EDITED BY

STEPHEN McGLINCHEY, ROSIE WALTERS
& CHRISTIAN SCHEINPFLUG

DASAR-DASAR KAJIAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL
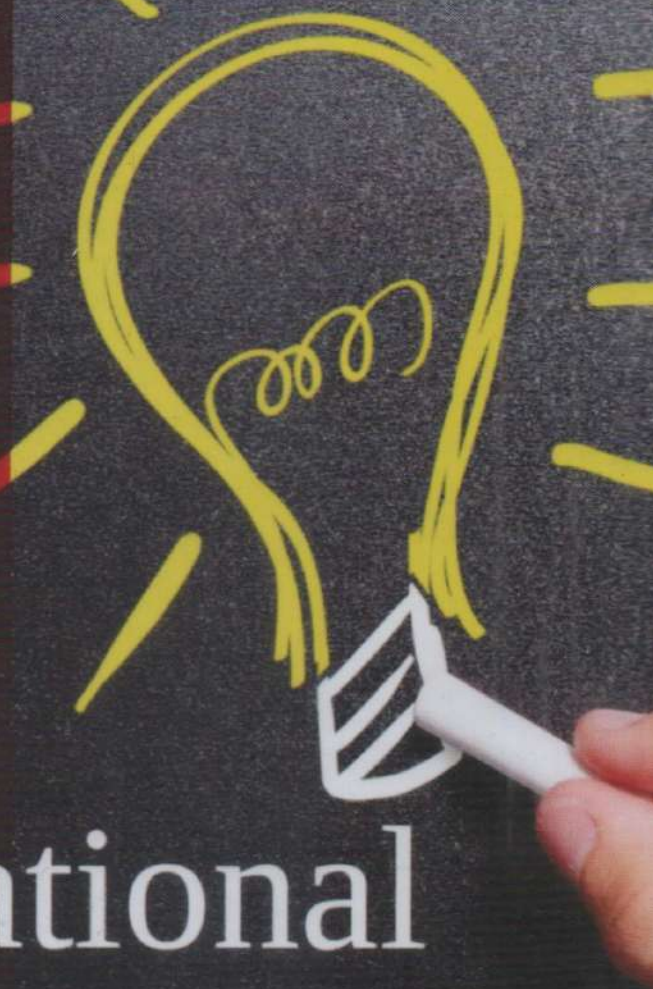
International Relations Theory

Diterjemahkan Oleh

Dr. Takdir Ali Mukti

ISBN : 978-602-6723-88-8

Laboratorium Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam kebanyakan buku teks ilmu hubungan internasional hampir tidak ada yang menyimpang dari 'playing it safe' atau bermain di wilayah aman, dengan memberikan penjelasan-penjelasan dalam teori-teori dasar yang sudah mapan. ‘Great breakout’ dari buku ini terletak pada bagian keduanya yang menawarkan proposal pemahaman baru yang cukup radikal dalam cara memandang dunia. Buku ini bersifat 'safe' sekaligus 'unsafe' secara intelektual, dan keduanya dipaparkan secara cerdas dengan cara yang dapat dinikmati oleh mahasiswa dalam mempelajari apa itu Hubungan Internasional (HI), dan apa saja yang terjadi di dalamnya. Sebuah buku yang indah yang isinya bagi para ahli hubungan internasional 'lama' kadang-kadang butuh keberanian untuk mendiskusikannya.

(Stephen Chan OBE, Professor of World Politics, School of Oriental & African Studies, University of London)

Volume yang kaya ide ini menawarkan pengantar yang sangat mudah dipahami dan jangkauan yang luas dalam bidang teori Hubungan Internasional. Pembahasan kerangka inti teoritik dimulai dari realisme 'mainstream' dan liberalisme sampai ke teori-teori yang tidak lazim serta geografi kritis. Dengan menempatkan masing-masing teori ke dalam konteks, dan dengan memberikan banyak contoh yang mudah dipahami, buku ini menyediakan 'one-stop shopping' untuk berbagai kerangka kerja dan konsep teoritis, sambil memberikan perhatian khusus pada perspektif non-Barat. *An excellent place to start!*

(Mette Eilstrup-Sangiovanni, IR Dept. Cambridge University)

Ini buku yang luar biasa, menawarkan sederet topik-topik kajian yang komprehensif, dan disajikan secara imajinatif yang mudah dipahami kedalamannya. Besar harapan agar buku ini dapat menjadi wacana global. Buku yang berisi serangkaian teori hubungan internasional yang sangat cemerlang.

(Peter Vale, Professor of Humanities, University of Johannesburg; Professor of Public Policy and Global Affairs, Nanyang Technological University and Nelson Mandela Professor of Politics Emeritus, Rhodes University)

Dr. Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si. Lahir di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyelesaikan Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Negeri Jember (UNEJ), Jawa Timur, Tahun 1995. Lulus S.2 Ilmu Politik UGM Tahun 2004. Menyelesaikan S.3 di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Prodi Ilmu Politik Tahun 2019. Dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 1996 sampai sekarang. Pada tahun 2008, menjadi delegasi pada *Saemaul Undong Academy* di Universitas Kyungwoon, Korea Selatan. Publikasi nasional dan internasional, a.l.: Buku (1) ‘Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia’, (2020), The Phinsi Press, Yogyakarta, dan (2) ‘Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia’ (2013), The phinisi Press, Yogyakarta, dan beberapa book chapter; Dalam jurnal internasional bereputasi: (1)*‘The future of peace between Aceh and Jakarta under Helsinki agreement 2005*’, (2020), Takdir Ali Mukti, Tulus Warsito, Bambang Cipto, Sidiq Ahmadi and Husni Amriyanto Putra, Humanities and Social Sciences Reviews Journal, Vol. 8, No. 3 (2020). Indexed by SCOPUS Q-1, Mumbai, India. (2)*‘Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh-Indonesia and Catalonia-Spain’*, (2019), Takdir Ali Mukti, Tulus Warsito, Surwandono, Ulung Pribadi and Idham Badruzaman, in European Journal of East Asia Studies (EJEAS), indexed by SCOPUS Q-2. EJEAS-2019-18-1, Leiden, Netherland.

DASAR-DASAR KAJIAN
TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL

EDITOR
STEPHEN MCGLINCHEY, ROSIE WALTERS
& CRISTIAN SCHEINPFLUG

Edisi dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh
Dr. Takdir Ali Mukti

E-International Relations
www.E-IR.info
Bristol, England
2017

ISBN 978-1-910814-19-2 (paperback)
ISBN 978-1-910814-20-8 (e-book)

Production: Michael Tang
Copy-editing: Gill Gairdner
Cover Image: feedough via Depositphotos

A catalogue record for this book is available from the British Library.

(Editor Seri: Stephen McGlinchey. Asisten Editorial: Michael Bolt, Eloise Cox, Gary Leigh dan Farah Saleem)

Buku terjemahan ini sesuai dengan semangat para penulisnya diedarkan secara gratis di Indonesia untuk kepentingan para peneliti dan penstudi Ilmu Hubungan Internasional. Semoga Bermanfaat. (Dr. Takdir Ali Mukti)

KATA PENGANTAR PENERJEMAH

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Segala puji-pujian dan kemuliaan hanya milik Alloh SWT, Tuhan Yang Mahaesa. Atas limpahan karuniaNya-lah, terjemahan buku ‘***International Relations Theory’***, karya bersama Stephen McGlinchey, Rosie Walters, dan Christian Scheinpflug ini diterbitkan. Penerjemah sengaja tidak mengganti cover asli buku ini, dan hanya menambahkan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, yakni, **‘Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional’** sebagai judul buku ini, di samping judul yang aslinya.

Buku ini sesuai dengan semangat para penulisnya, didedikasikan sepenuhnya untuk para peneliti, mahasiswa dan penstudi hubungan internasional pada umunya sehingga baik buku dalam bentuk cetakan maupun e-book disebar-luaskan secara gratis (*free of charge*), *open access*, dan bersifat *non-profit*. Siapa pun boleh memanfaatkan dan meng-copy buku ini dengan semangat untuk saling membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, dan bukan bertujuan untuk keuntungan material semata.

Penerjemah mengucapkan terima kasih kepada Stephen McGlinchey, Rosie Walters, Christian Scheinpflug, Michael Bolt, Eloise Cox, Gary Leigh, Farah Saleem, dan para kontributor/penulis buku ini, serta E-International Relations Publishing, yang merelakan beredarnya karya-karya mereka dengan tanpa dipungut biaya apa pun demi pengembangan ilmu pengetahuan. Sebuah dedikasi yang sangat patut disosialisasikan di tengah komersialisasi hasil penelitian yang semakin massive di dunia dewasa ini.

Kepada Program Studi Hubungan Internasional dan Laboratorium Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penerjemah mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan pembeayaan untuk pencetakan buku ini dan proses *e-Book* yang akan digunakan untuk melayani mahasiswa di universitas ini.

Ucapan terima kasih secara khusus, penulis sampaikan kepada keluarga saya tercinta, istriku Bunda Nita Ariyati, dan 3 (tiga) *honey babies* yakni kakak Almiera Litalia Mukti, kakak Bellenita Zafira Mukti, dan Emirsyah Aydin Mukti, yang membuat ayah selalu memiliki energi untuk berkarya.

Kepada para pembaca yang budiman, penerjemah berharap buku terjemahan ini dapat memberi kontribusi yang positif sekecil apa pun untuk kemajuan ilmu pengetahuan, dan segala bentuk kritik serta saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada edisi berikutnya. Semoga!

Yogyakarta, 17 Agustus 2020

Penerjemah

Dr. Takdir Ali Mukti

Ucapan Terima Kasih dari Editor

Penerbitan buku ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan *E-IR's Student Review Panel*. Anggota panel memberikan waktu luang mereka untuk membaca dan membuat draft dari setiap bab dan menawarkan pemikiran mereka agar tulisan itu dapat ditingkatkan kualitasnya. Panel tersebut terdiri dari Laura Southgate, Matthew Koo, Constance Dijkstra, Loveleena Sharma, Daniel Golebiewski, Ljupcho Stojkovski, Max Nurnus, Jess Dam, Caroline Cottet, Jan Tattenberg, Matthew Ribar, Laura Cartner, Pameran Clayton, Phoebe Gardner, Ana Carolina Sarmento, Naomi McMillen, Kanica Rakhra, Dean Cooper-Cunningham, Jonathan Webb, Daniel Rowney, Janja R. Avgustin dan Scott Edwards.

Editor juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota *E-International Relations Team*, dulu dan sekarang, atas banyak usaha dan jerih payah mereka dalam mengembangkan tumbuhnya gagasan dan memberikan iklim yang mendukung untuk pengembangan buku ini.

Akhirnya, dan yang paling penting, editor ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis masing-masing bab yang bekerja begitu keras pada proyek ini, dan membantu kami dalam menghadirkan buku yang berkualitas ini.

Editor

Stephen McGlinchey, Rosie Walters,
& Christian Scheinpflug

DAFTAR ISI

BAGIAN DUA - PAKET EKSPANSI TEORITIS

MEMAHAMI TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Stephen McGlinchey, Rosie Walters & Dana Gold

Sebelum kita mulai, ada satu catatan yang sangat penting. Anda mungkin memperhatikan bahwa beberapa teori hubungan internasional (HI) yang diperkenalkan di sini memiliki kesamaaan nama atau penyebutan dengan teori-teori pada disiplin ilmu yang lain. Penyebutan itu mungkin terkait dengan teori-teori pada disiplin tertentu (maksudnya, selain HI), atau mungkin juga tidak terkait sama sekali. Ini terkadang membingungkan, misalnya, realisme pada HI tidak sama dengan pemahaman aliran realisme dalam bidang seni. Demikian pula, Anda mungkin mendengar kata 'liberal' yang digunakan untuk menggambarkan pandangan pribadi seseorang, tetapi dalam HI, arti liberalisme menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Untuk menghindari kebingungan, catatan ini akan berfungsi sebagai peringatan bahwa dalam buku ini, kita merujuk pada teori-teori yang bersangkutan dengan pemaknaan sebagaimana yang telah dikembangkan dalam disiplin ilmu HI. Jika ada pengecualian makna, maka itu akan dinyatakan secara jelas untuk menghindari kebingungan dan kesalah-pahaman pembaca.

Pengantar Singkat Teori Hubungan Internasional (THI)

Dengan berkembangnya teori hubungan internasional (THI) yang telah tumbuh sedemikian kompleks, rumpun-rumpun THI yang ditawarkan oleh para ilmuwan pun menjadi sedemikian banyak jumlahnya. Tentu, ini menjadi tantangan tersendiri bagi *'new comers'* dalam mempelajari teori HI. Untuk memahami perkembangan yang demikian, pengantar ini cukup memberi Anda kepercayaan diri untuk memasuki belantara teori itu. Untuk memulai, bagian ini akan secara singkat memperkenalkan teori HI melalui tiga pembagian spektrum yakni teori HI tradisional atau *traditional theories*, teori jalan tengah atau *middle ground theories*, dan teori kritis atau *critical theories.* Ketika Anda membaca lebih jauh ke dalam buku ini,

Anda, sebagai *'new comers'* tentunya, sebaiknya tetap berpegangan pada 3 (tiga) pengelompokkan sederhana ini. Hal ini sangat berguna sebagai perangkat untuk kembali ke pemahaman dasar, jika Anda bingung memahami koordinat atau posisi dari teori-teori yang dipaparkan lebih lanjut.

Teori-teori terus bermunculan dan bersaing satu sama lain. Ini bisa menjadi disorientasi pemikiran. Segera setelah anda berpikir bahwa anda telah meletakkan kaki secara akurat dan kokoh pada salah satu pendekatan teoretis, maka, teori yang lain akan segera muncul menggoda pikiran anda. Karena itu, bagian ini akan berfungsi, baik sebagai pemberi arah sekaligus peringatan bahwa kompleksitas akan terjadi dan menantang anda dalam kajian ini. Meskipun buku ini menyajikan THI dengan cara yang sangat sederhana dan mendasar, kompleksitas tetap tidak bisa dihindari. Teori HI membutuhkan perhatian penuh anda, dan anda harus bekerja keras dan bersiap menghadapi turbulensi pemahaman dalam pembacaan anda selanjutnya.

Struktur Revolusi Ilmiah Thomas Kuhn (1962) mengatur panggung untuk memahami bagaimana dan mengapa teori-teori tertentu dilegitimasi dan luas diterima. Dia juga mengidentifikasi proses yang terjadi ketika teori tidak relevan lagi, dan teori baru muncul. Misalnya, manusia pernah yakin bahwa bumi itu datar. Dengan kemajuan sains dan teknologi, ada penemuan signifikan, dan manusia membuang kepercayaan ini. Ketika penemuan semacam itu terjadi, 'pergeseran paradigma' hasil dan cara berpikir sebelumnya digantikan oleh yang baru. Meskipun perubahan dalam teori HI tidak sedramatis contoh di atas, telah terjadi pula evolusi signifikan dalam disiplin ini. Ini penting untuk diingat ketika kita mempertimbangkan bagaimana teori HI berperan dalam menjelaskan dunia dan bagaimana, berdasarkan periode waktu yang berbeda dan konteks riset individual kita, satu pendekatan mungkin berbicara kepada kita lebih dari yang lain dalam menjelaskan sesuatu.

Semua teori yang ditinjau dalam bagian ini (dan banyak lagi yang lainnya) akan tercakup dalam bab-bab tersendiri dalam buku ini.

Secara tradisional ada dua teori utama HI adalah liberalisme dan realisme. Meskipun keduanya mendapat tantangan besar dari teori lain, namun tetap menjadi pusat rujukan dalam disiplin ini. Pada puncaknya,

liberalisme disebut sebagai teori 'utopis', dan sampai tingkat tertentu masih diakui sampai sekarang. Para penganjurnya memandang manusia sebagai orang yang sangat baik dan percaya bahwa perdamaian dan keharmonisan antar bangsa tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga diinginkan oleh semua orang. Pada akhir abad ke-18, Immanuel Kant mengembangkan gagasan bahwa negara-negara yang memiliki nilai-nilai liberal yang sama, tidak memiliki alasan untuk berperang satu sama lain. Di mata Kant, semakin banyak negara-negara liberal di dunia, maka akan semakin damai, karena negara-negara liberal diperintah oleh warga negara mereka dan warga negara sangat jarang mendukung berperang bahkan cenderung menolaknya. Ini berbeda dengan aturan raja, dan penguasa lainnya yang tidak melalui pemilihan rakyat, yang sering memiliki keinginan egois yang tidak sejalan dengan aspirasi warga negara. Ide-ide Kant ini telah bergema dan terus dikembangkan oleh kaum liberal modern, terutama dalam teori perdamaian demokratis, yang menyatakan bahwa demokrasi tidak saling berperang satu sama lain.

Lebih jauh, kaum liberal memiliki keyakinan pada gagasan bahwa penghentian perang yang permanen adalah tujuan yang dapat dicapai. Dengan menerapkan gagasan liberal, Presiden AS Woodrow Wilson menyampaikan '*Fourteen Points'* ke Kongres AS pada Januari 1918 selama tahun terakhir Perang Dunia Pertama. Poin terakhirnya, yakni gagasan untuk membangun kembali dunia setelah perang, adalah gagasan inisiasi pembentukan liga bangsa-bangsa (LBB) atau the League of Nations. Kembali ke tahun 1920, LBB sebagian besar diciptakan untuk tujuan mengawasi urusan antara negara dan menerapkan, serta mempertahankan, perdamaian internasional. Namun, ketika Liga runtuh karena pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, kegagalannya sulit dipahami oleh kaum liberal, sebab faktanya bertentangan dengan teori mereka. Karena itu, meski ada upaya dari tokoh-tokoh seperti Kant dan Wilson, liberalisme gagal mempertahankan cengkeraman ideanya secara kuat, dan ini menjadi ruang bagi sebuah teori baru untuk muncul, dan menjelaskan sebab keberadaan perang yang berkelanjutan. Teori itu dikenal sebagai realisme.

Realisme mendapatkan momentumnya selama Perang Dunia Kedua, ketika itu muncul untuk menawarkan penjelasan yang meyakinkan

tentang bagaimana dan mengapa terjadi perang secara luas dan mematikan dalam sejarah ummat manusia, menggantikan periode yang penuh optimisme untuk menciptakan perdamaian. Meskipun istilah 'realisme' secara formal dipopulerkan pada abad kedua puluh, namun, banyak para ilmuan realis merunutnya dengan melihat jauh ke belakang sejarah. Memang, para pendukung realis melihat sejarah dunia kuno, di mana mereka mendeteksi pola perilaku manusia yang serupa dengan yang terjadi di dunia modern. Seperti namanya, para intelektual realisme menyatakan bahwa, hal itu mencerminkan realitas dunia dan lebih efektif untuk menjelaskan perubahan dalam politik internasional. Thomas Hobbes sering disebut dalam diskusi realisme karena deskripsinya tentang kebrutalan kehidupan selama Perang Saudara Inggris 1642–1651. Hobbes menggambarkan manusia sebagai makhluk hidup yang dalam 'keadaan alamiahnya' adalah tak tertib, sehingga dianggapnya sebagai perang semua terhadap semua atau *a war of all againsts all*. Untuk memperbaiki ini, ia mengusulkan adanya 'kontrak sosial' atau *social contract* antara penguasa dan rakyat suatu negara untuk menjaga ketertiban relatif. Setiap pemimpin, atau yang berdaulat (raja atau parlemen, misalnya), menetapkan aturan dan menetapkan sistem hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Masyarakat dunia menerima ini di negaranya masing-masing sehingga kehidupan dapat berfungsi dengan rasa keamanan dan terjaga ketertiban sosialnya. Ini mungkin tidak ideal, tetapi lebih baik daripada keadaan alami yang tidak tertib tadi. Karena tidak ada kontrak semacam itu yang berlaku secara internasional, dan tidak ada negara yang berwenang mengatur dunia, maka, kekacauan dan ketakutanlah yang melingkupi dan menentukan hubungan internasional. Bagi ilmuan realist, masyarakat dunia hidup dalam sistem 'anarki internasional' atau *international anarchy*. Sifat anarkhi HI itu lah sebab utama terjadinya perang, sehingga fenomena perang tampak lebih umum daripada perdamaian di mata kaum realist. Menurut mereka, perang adalah sesuatu yang tak terhindarkan.

Penting untuk dipahami bahwa, tidak ada varian tunggal dari setiap teori. Para ilmuan jarang sepenuhnya setuju satu sama lain, bahkan mereka yang memiliki teori yang sama pendekatan sekalipun. Setiap sarjana memiliki interpretasi khusus tentang dunia, termasuk ide-ide perdamaian, perang dan peran negara dalam kaitannya dengan individu. Namun

demikian, perspektif ini masih dapat dikelompokkan ke dalam suatu rumpun teori (atau tradisi keilmuan tertentu), dan inilah cara kami mengatur materi dalam buku ini. Dalam studi anda, ada kebutuhan untuk membongkar berbagai perbedaan teoritis itu, tetapi, paling tidak untuk saat ini, memahami asumsi-asumsi inti dari setiap pendekatan adalah cara terbaik untuk mendapatkan esensi dari setiap pendekatan teoritis itu. Sebagai contoh, jika kita memikirkan kontras sederhana dari optimisme dan pesimisme, kita dapat melihat hubungan kerumpunan teori di semua cabang realisme dan liberalisme. Liberal memiliki pandangan optimis tentang HI, percaya bahwa tatanan dunia dapat ditingkatkan, dengan perdamaian dan kemajuan secara bertahap menggantikan perang. Mereka mungkin tidak menyetujui detailnya, tetapi pandangan optimis ini umumnya menyatukan mereka. Sebaliknya, kaum realis cenderung mengabaikan optimisme sebagai bentuk idealisme yang salah tempat dan sebaliknya mereka tiba pada pandangan yang lebih pesimistis. Ini karena fokus mereka pada sentralitas negara dan kebutuhannya akan keamanan dan kelangsungan hidup dalam sistem anarkis di mana ia hanya dapat benar-benar mengandalkan dirinya sendiri. Akibatnya, realis mencapai serangkaian pemahaman dasar yang menggambarkan HI sebagai sistem di mana perang dan konflik adalah umum atau biasa, dan periode perdamaian hanyalah saat ketika negara sedang mempersiapkan konflik di masa perang berikutnya di masa depan.

Pemikiran English School sering dipandang sebagai jalan tengah antara teori liberal dan realis. Teorinya melibatkan gagasan adanya a society of states atau masyarakat negara-negara secara internasional. Hedley Bull, salah satu tokoh utama dari madzab English School ini, setuju dengan teori-teori tradisional bahwa sistem internasional bersifat anarkis. Namun, dia menegaskan bahwa ini tidak berarti tidak adanya norma (perilaku yang diharapkan) dalam masyarakat internasional, sehingga mengklaim hadirnya aspek-aspek sosial dalam politik internasional. Dalam pengertian ini, negara membentuk 'Masyarakat Anarkis' (Bull 1977) di tempat sebuah tatanan internasional berada, yakni tatanan yang terbentuk berdasarkan norma dan perilaku bersama.

Konstruktivisme adalah teori lain yang umumnya dipandang sebagai jalan tengah, tetapi kali ini diposisikan antara teori arus utama atau

mainstream (tradisional) dan teori kritis yang akan kita paparkan nanti. Teori konstruktifis juga memiliki beberapa hubungan rumpun teori dengan English School tadi. Tidak seperti para sarjana dari perspektif lain, konstruktivis menyoroti pentingnya nilai dan kepentingan bersama antara individu yang berinteraksi di panggung global. Alexander Wendt, seorang konstruktivis terkemuka, menggambarkan hubungan antara agen (individu) dan struktur (seperti negara) sebagai satu satu kesatuan, di mana struktur tidak hanya membatasi agen tetapi juga membangun identitas dan kepentingan mereka. Ungkapan Went (1992) bahwa *anarchy is what states make of it* (anarki adalah apa yang dinyatakan oleh negara) meringkaskan pokok pemikiran konstruktifis dengan baik. Cara lain untuk menjelaskan hal ini, dan untuk menjelaskan inti konstruktivisme, adalah bahwa esensi hubungan internasional ada dalam interaksi antara orang-orang. Bagaimanapun, negara tidak berinteraksi, tapi agen-agen dari negara-negara tersebut lah yang melaksanakannya, seperti politisi dan diplomat, yang berinteraksi satu sama lain. Karena mereka yang berinteraksi di panggung dunia yang telah menerima anarki internasional sebagai prinsip yang menentukan, maka keyakinan itu akhirnya menjadi bagian dari realitas dunia. Namun, jika anarkhi adalah apa yang kita perbuat untuk itu, maka negara yang berbeda dapat memandang anarki secara berbeda pula, dan kualitas anarki bahkan dapat berubah seiring waktu. Anarki internasional bahkan dapat digantikan oleh sistem yang berbeda jika kelompok berpengaruh dari individu lain (dan dengan perwakilan negara yang mereka wakili) menerima gagasan itu. Memahami konstruktivisme berarti memahami bahwa gagasan dan norma yang sering mereka sebut memiliki kekuatan. Dengan demikian, konstruktivis berusaha mempelajari proses di mana norma ditantang dan berpotensi diganti dengan norma baru.

Pendekatan kritis mengacu pada spektrum teori yang luas yang telah ditetapkan sebagai respons terhadap pendekatan arus utama di lapangan, terutama liberalisme dan realisme. Singkatnya, para teoretikus kritis memiliki satu sifat khusus - mereka menentang asumsi-asumsi umum yang digunakan dalam bidang HI yang telah menjadi pusat pemikiran sejak pendiriannya. Mereka menyerukan pendekatan baru yang lebih cocok untuk memahami, serta mempertanyakan, dunia tempat kita berada.Teori kritis sangat berharga karena mereka mengidentifikasi posisi yang biasanya

diabaikan dalam HI. Mereka juga memberikan suara kepada kelompok-kelompok orang yang sering terpinggirkan, terutama perempuan, dan mereka dari *Global South* (masyarakat negara berkembang dari dunia selatan). Banyak dari bagian buku ini berkaitan dengan teori-teori yang ditetapkan dalam kategori yang lebih besar ini.

Marxisme adalah tempat yang baik untuk memulai dengan teori-teori kritis. Pendekatan ini didasarkan pada ide-ide Karl Marx, yang hidup pada abad kesembilan belas di puncak revolusi industri. Istilah 'Marxis' mengacu pada orang-orang yang telah mengadopsi pandangan-pandangan Marx dan percaya bahwa masyarakat industri dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas bisnis 'pemilik modal' (borjuasi) dan kelas pekerja (proletariat). Proletariat berada di bawah kekuasaan kaum borjuis yang mengendalikan upah dan standar hidup mereka. Marx berharap untuk menggulingkan borjuasi oleh kaum proletar dan akhirnya mengakhiri masyarakat kelas. Para ahli teori kritis yang mengambil sudut pandang Marxis sering berargumen bahwa organisasi politik internasional di seluruh negara telah menyebabkan orang-orang biasa di seluruh dunia menjadi terpecah-pecah dan teralienasi, daripada mengakui apa yang mereka semua miliki bersama, dan ini berpotensi sebagai proletariat global. Agar perubahan ini terjadi, legitimasi negara harus dipertanyakan dan akhirnya dibubarkan. Dalam arti itu, emansipasi dari negara dalam bentuk tertentu seringkali menjadi bagian dari agenda pembahasan secara kritis secara lebih luas.

Berbeda dari Marxisme yang mempertentangkan kelas, Postkolonialisme berfokus pada ketidaksetaraan antara negara atau wilayah. Efek kolonialisme masih terasa di banyak wilayah di dunia saat ini karena populasi lokal terus menghadapi tantangan yang diciptakan dan ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan eks-kolonial seperti Inggris dan Perancis. Asal usul postkolonialisme dapat ditelusuri ke periode Perang Dingin ketika banyak kegiatan dalam hubungan internasional berpusat di sekitar dekolonisasi dan keinginan untuk membatalkan warisan imperialisme Eropa. Pendekatan ini mengakui bahwa penelitian HI secara historis berpusat pada perspektif dan pengalaman Barat, tidak termasuk suara orang-orang dari wilayah lain di dunia. Yang terpenting, para sarjana postkolonial berpendapat bahwa analisis yang didasarkan pada perspektif

teoretis Barat, atau yang tidak memperhitungkan perspektif mereka yang berada di bekas jajahan, dapat mengarahkan institusi internasional dan para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan yang secara tidak adil menguntungkan Barat. Para teoritisi postkolonial telah menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana beroperasinya sistem ekonomi global yang penuh ketimpangan dan ketidak adilan, proses pengambilan keputusan dari lembaga-lembaga internasional dan tindakan-tindakan kekuatan besar yang sebenarnya merupakan bentuk-bentuk baru kolonialisme. Edward Said (1978) menggambarkan bagaimana masyarakat di Timur Tengah dan Asia secara teratur disalah pahami dalam karya sastra Barat, dan penulisan ilmiah dengan cara yang menempatkan mereka lebih rendah (inferior) terhadap Barat. Oleh karena itu, sarjana postkolonial merupakan kontributor penting bagi bidang ini karena mereka memperluas fokus penyelidikan di luar pola pikir tradisional HI versi 'Barat'.

Teori lain yang mengungkap ketimpangan yang melekat dalam hubungan internasional adalah feminisme. Feminisme memasuki bidang ini pada 1980-an sebagai bagian dari gerakan kritis yang muncul. Ini berfokus pada menjelaskan mengapa begitu sedikit perempuan yang tampaknya berada dalam posisi berkuasa dan implikasinya pada bagaimana politik global disusun. Anda hanya perlu melihat visual dari setiap pertemuan para pemimpin dunia untuk melihat bagaimana tampaknya itu adalah dunia pria. Menyadari hal ini, maka teori feminisme memperkenalkan pembacaan HI dalam perspektif 'gender' di mana masalah seperti gender sebagai objek utama di inti teori ini. Jika politik internasional adalah dunia pria, apa artinya itu? Bagaimana karakteristik tertentu yang secara tradisional dipandang sebagai maskulin, seperti agresi, pelepasan emosi, dan kekuatan, dapat dilihat sebagai kualitas esensial dari seorang pemimpin dunia? Kualitas dan karakteristik apa yang dikecualikan (mungkin empati dan kerja sama) dan tindakan apa yang dihasilkannya? Dengan mengakui bahwa gender, sebagai peran yang dibangun masyarakat untuk pria dan wanita, menembus segalanya, feminisme menantang peran itu dengan cara yang menguntungkan semua orang. Ini bukan hanya soal menghitung tubuh pria dan wanita. Alih-alih, para feminis bertanya bagaimana struktur kekuasaan gender mempersulit perempuan atau laki-laki yang memperlihatkan ciri-ciri feminin untuk mencapai tingkat

kekuasaan tertinggi. Mengingat bahwa posisi-posisi itu melibatkan pengambilan keputusan hidup dan mati, penting bagi kita semua apakah orang yang tiba di sana dikenal karena agresi mereka atau belas kasihan mereka. Dengan semua pembicaraan tentang peran gender yang dikonstruksi secara sosial ini, Anda mungkin mulai melihat beberapa tumpang tindih, misalnya dengan konstruktivisme. Kami melakukan yang terbaik untuk menyajikan setiap pendekatan secara terpisah sehingga Anda memiliki titik awal yang lebih jelas, tetapi sebaiknya Anda diingatkan bahwa teori HI adalah semacam web yang padat kontentnya, dan kompleks, dan tidak selalu didefinisikan dengan jelas. Ingatlah hal ini saat Anda mempelajari sebuah teori dan ketika studi Anda berkembang.

Mungkin teori paling kritis yang paling kontroversial adalah poststrukturalisme. Ini adalah pendekatan yang mempertanyakan keyakinan yang kita semua ketahui dan rasakan sebagai 'nyata'. Poststrukturalisme mempertanyakan narasi dominan yang telah diterima secara luas oleh teori arus utama. Misalnya, kaum liberal dan realis menerima gagasan negara dan sebagian besar menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Asumsi-asumsi semacam itu adalah 'kebenaran' yang mendasar di mana teori-teori tradisional itu bersandar, dan menjadi 'struktur' tempat landasan mereka membangun realitas. Jadi, meskipun kedua perspektif teoretis ini mungkin berbeda dalam beberapa hal sehubungan dengan pandangan dunia mereka secara keseluruhan, mereka berbagi pemahaman umum tentang dunia. Tidak ada teori yang berusaha menantang keberadaan negara, teori realisme dan liberalisme hanya menganggapnya sebagai bagian dari realitas mereka. Poststrukturalisme berupaya mempertanyakan asumsi-asumsi realitas yang umumnya dipegang ini, tidak hanya negara tetapi juga sifat kekuasaan yang lebih luas. Kontribusi Michel Foucault bagi poststrukturalisme adalah identifikasi dari pengetahuan sebagai nexus atau gagasan sentral dari kekuasaan. Ini berarti bahwa orang yang berada dalam posisi berkuasa, termasuk politisi, jurnalis, bahkan cendekiawan, memiliki kemampuan untuk membentuk pemahaman kita bersama tentang suatu masalah. Pada gilirannya, pemahaman tentang masalah ini dapat menjadi begitu berurat berakar sehingga mereka tampaknya masuk akal dan menjadi sulit untuk berpikir di luar mereka. Kekuasaan adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah

kekuatan. Dengan menganalisis cara di mana suatu pemahaman tertentu dari suatu masalah tertentu dapat menjadi dominan, teori poststrukturalis bertujuan untuk mengekspos asumsi tersembunyi yang menjadi dasarnya. Mereka juga bertujuan untuk membuka cara pandang dan alasan lain yang mungkin, berpikir dan melakukan sesuatu dalam politik internasional.

Seperti yang ditunjukkan oleh pengantar singkat teori HI ini, setiap teori memiliki pandangan dunia yang sah, namun berbeda. Memang, di luar teori yang dieksplorasi di atas ada banyak teori dan perspektif lain yang akan Anda temukan di bagian kedua buku ini. Penting juga untuk dicatat bahwa teori-teori yang dicakup dalam buku ini tidak lengkap dan ada lebih banyak lagi yang dapat dikaji. Namun, editor percaya bahwa kami telah memberikan titik awal yang baik untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh tentang studi teori HI, dan menunjukkan tempat di mana pendekatan-pendekatan serta perspektive-perspektif yang paling umum, dan paling baru, itu berada. Tidak perlu, dan mungkin tidak bijak jika sejak awal dalam studi Anda, untuk mengadopsi satu teori sebagai milik Anda. Lebih penting dari itu adalah untuk memahami berbagai teori sebagai alat analisis, atau lensa analitis, yang dapat Anda terapkan dalam studi Anda dalam berbagai kasus. Sederhananya, mereka menawarkan cara untuk mencoba memahami dunia yang kompleks.

Harus diperhatikan pula bahwa Hubungan Internasional masih merupakan disiplin atau bidang ilmu yang relative muda, dan sedang mengalami perkembangan formatif yang signifikan. Di dalam perkembangan itu, ada sekumpulan argumen sengit tentang sifat negara, individu, organisasi internasional, identitas dan, bahkan, realitas HI itu sendiri. Poin penting untuk diingat adalah bahwa teori adalah alat analisis. Seringkali suatu teori itu relevan dan berwawasan luas jika diterapkan dengan benar dalam suatu peristiwa. Tetapi, sama seringnya teori itu tidak sempurna, dan anda akan menemukan diri anda mengambil alat teoretis lain yang lebih berlaku pada riset anda. Buku ini akan melengkapi pengetahuan anda dengan titik awal yang mendasar untuk mengembangkan teori HI sebagai alat analisis, sehingga apa pun tugas anda, anda dipersenjatai dengan semua yang anda butuhkan untuk memulai analisis, dan untuk memahami teks-teks kunci yang lebih maju dalam bidang HI. Semoga berhasil!

BAGIAN PERTAMA

TEORI-TEORI YANG SUDAH MAPAN

(*ESTABLISHED THEORIES*)

1
REALISME
(REALISM)

Sandrina Antunes & Isabel Camiso

Dalam disiplin Hubungan Internasional, realisme adalah aliran pemikiran yang menekankan sisi kompetitif dan konfliktual dari ilmu ini. Akar realisme sering dikatakan telah ditemukan dalam beberapa tulisan sejarah manusia yang paling kuno, khususnya sejarah Perang Peloponnesia karya Thucydides, yang berkecamuk antara 431 dan 404 SM. Thucydides, yang menulis lebih dari dua ribu tahun yang lalu, tentulah tidak bermaksud memformulasikan pendekatan 'realis' dalam studi antar bangsa, sebab teori HI belum terbentuk sampai abad kedua puluh. Namun, ketika melihat ke belakang dari sudut pandang kontemporer, ahli teori mendeteksi banyak kesamaan dalam pola pikir dan perilaku dunia kuno dan dunia modern.Mereka kemudian menggunakan tulisan-tulisannya, dan tulisan-tulisan orang lain, untuk memberi bobot pada gagasan bahwa ada teori abadi yang mencakup semua sejarah manusia yang tercatat. Teori itu bernama 'realisme'.[1]

Dasar-Dasar Realisme

[1] Buku *Politics Among Nations* (1948) karya Hans J. Morgenthau sangat besar pengaruhnya dalam membangun kerangka teori umum realisme. Tidak hanya menjadi salah satu buku teks yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat dan Inggris, buku itu terus diterbitkan ulang selama setengah abad berikutnya. Buku itu juga merupakan eksposisi konsep-konsep penting dari teori hubungan internasional realis. Banyak kontributor lain untuk teori realis muncul sekitar satu dekade setelah Perang Dunia II, termasuk Arnold Wolfers, George F. Kennan, Robert Strausz-Hupé, Kissinger, dan teolog Reinhold Niebuhr. Lihat laman https://www.britannica.com/topic/international-relations/The-postwar-ascendancy-of-realism#ref846569 (penerjemah)

Asumsi *pertama* realisme adalah bahwa negara-bangsa (biasanya disingkat 'state') adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Ada badan-badan lain, seperti individu dan organisasi, tetapi kekuatan mereka terbatas. *Kedua,* negara adalah aktor kesatuan yang solid. Kepentingan nasional, terutama di masa perang, membuat negara berbicara dan bertindak dengan satu suara. *Ketiga*, pembuat keputusan adalah aktor rasional dalam arti bahwa pengambilan keputusan rasional mengarah pada pengejaran kepentingan nasional. Di sini, mengambil tindakan yang akan membuat negara menjadi lemah atau rentan adalah perilaku yang tidak rasional. Realisme menunjukkan bahwa semua pemimpin, tidak peduli apa persuasi politik atau ideologi mereka, mengakui hal ini ketika mereka berusaha untuk mengelola urusan negara mereka untuk dapat bertahan hidup dalam lingkungan internasional yang kompetitif. Akhirnya, negara hidup dalam konteks anarki, yaitu, dengan tidak adanya siapa pun yang bertanggung jawab secara internasional. Analogi yang sering digunakan adalah tidak adanya seseorang yang bisa dimintai tolong atau istilahnya '*no one to call'* dalam keadaan darurat internasional. Dalam praktik kehidupan domestik, setiap negara biasanya memiliki pasukan polisi, militer, pengadilan dan sebagainya sehingga dalam keadaan darurat, ada harapan bahwa lembaga-lembaga ini akan 'melakukan sesuatu' atau *'doing something'* sebagai tanggapan atas keadaan tertentu. Secara internasional, tidak ada ekspektasi yang jelas terhadap siapa pun atau apa pun untuk 'melakukan sesuatu' itu karena tidak ada hierarki yang mapan dan otoritative dalam struktur masyarakat internasional. Karena itu, negara pada akhirnya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri.

Realisme sering mengambil contoh-contoh dari masa lalu, dengan narasi besar bahwa manusia pada dasarnya disandera oleh pola perilaku berulang yang ditentukan oleh sifat dasar-alamiah mereka. Inti dari asumsi itu adalah pandangan bahwa manusia itu egois dan berkeinginan kuat untuk meraih kekuasaan. Realis percaya bahwa keegoisan dan hasrat manusia akan kekuasaan, bersamaan dengan ketidak mampuan mereka untuk memercayai orang lain, mengarah pada perilaku yang dapat diprediksi secara teoritis yakni benturan kepentingan dan konflik. Mungkin inilah sebabnya perang sangat umum terjadi sepanjang catatan sejarah manusia. Ketika individu diorganisir menjadi negara, sifat dasar manusia akan

terbawa pada perilaku negara. Dalam hal itu, Niccolò Machiavelli fokus pada bagaimana karakteristik dasar manusia mempengaruhi keamanan negara. Dan pada masanya, para pemimpin biasanya laki-laki, yang juga mempengaruhi pertimbangan politik realis mereka. Dalam The Prince (1532), Machiavelli menekankan bahwa perhatian utama seorang pemimpin adalah untuk mempromosikan keamanan nasional. Agar berhasil melakukan tugas ini, pemimpin perlu waspada dan mengatasi secara efektif ancaman internal maupun eksternal terhadap kekuasaannya; dia harus memiliki sifat seekor singa sekaligus rubah. Kekuasaan *(the lion*) dan kelicikkan (*the fox*) adalah alat penting untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dalam pandangan Machiavelli, para penguasa yang mematuhi 'etika tanggung jawab' *(the ethics of responsibility)* daripada moralitas agama konvensional yang membimbing moral warga negara pada umunya. Mereka harus baik ketika mereka bisa, tetapi mereka juga harus bersedia menggunakan kekerasan ketika diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup negara.

Sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua, Hans Morgenthau (1948) berusaha mengembangkan teori internasional yang komprehensif karena ia percaya bahwa politik, seperti masyarakat pada umumnya, diatur oleh hukum-hukum yang berakar pada sifat dasar manusia yang dilukisnya sebagai pemburu kekuasaan. Fokus kajian Morgenthau adalah untuk mengklarifikasi hubungan antara kepentingan *(national interest*) dan moralitas *(morality*) dalam politik internasional, dan karyanya sangat banyak diwarnai oleh pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh sejarah seperti Thucydides dan Machiavelli. Berbeda dengan kaum idealis yang lebih optimis, yang mengharapkan ketegangan internasional diselesaikan melalui negosiasi terbuka yang ditandai dengan niat baik (*goodwill*), Morgenthau menetapkan pendekatan yang menekankan konsep kekuasaan di atas moralitas. Memang, menurutnya, moralitas digambarkan sebagai sesuatu yang harus dihindari dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam gagasan Morgenthau, setiap tindakan politik diarahkan untuk menjaga, meningkatkan, atau menunjukkan kekuasaan (*demonstrating power*). Pemikirannya adalah bahwa kebijakan yang didasarkan pada moralitas atau idealisme dapat mengarah pada kelemahan, dan yang lebih buruk lagi, mungkin justru penghancuran atau dominasi negara oleh pesaing. Dalam

hal ini, mengejar kepentingan nasional adalah perilaku yang 'nir-moral' (amoral), dalam artian bahwa, tidak tunduk pada perhitungan moralitas.

Dalam Theory of International Politics (1979), Kenneth Waltz memodernisasi teori HI dengan menjauhkan realisme dari asumsi yang tidak dapat dibuktikan (*unprovable*), tentang sifat manusia (*human nature*). Kontribusi teoretisnya ini disebut sebagai '*neorealisme*' atau 'realisme struktural' karena ia tetap menekankan gagasan tentang tindakan politik yang didasarkan pada sifat dasar manusia (*human nature*), yang dapat dijelaskan melalui serangkaian formula sederhana. Pertama, semua negara dibatasi oleh keberadaannya dalam sistem anarkis internasional (ini adalah struktur). Kedua, setiap tindakan yang mereka lakukan didasarkan pada kekuatan relatif mereka ketika diukur terhadap negara-negara lain. Jadi, Waltz menawarkan versi realisme yang merekomendasikan agar para ahli teori HI untuk meneliti dan menguji karakteristik sistem internasional untuk menjadi jawaban atas fenomena hubungan internasional yang terjadi, daripada menggali kelemahan dalam sifat manusia itu sendiri. Dengan melakukan itu, Waltz telah memicu era baru dalam teori HI yang berusaha menggunakan metode ilmiah sosial *(social scientific methods*) daripada metode teori politik atau filosofis (*philosophical theory*). Perbedaannya adalah bahwa variabel Waltz (anarki internasional, dan seberapa banyak kekuatan yang dimiliki suatu negara, dll.) dapat diukur secara empiris/fisik *(empirically verified*). Gagasan seperti sifat manusia adalah asumsi yang berdasarkan pandangan filosofis tertentu yang tidak dapat diukur dengan cara yang sama.

Kaum realis percaya bahwa teori mereka paling akurat menggambarkan potret politik dunia sebagaimana yang dipegangi oleh para praktisi kenegaraan dan hubungan internasional. Untuk alasan ini, realisme, mungkin lebih dari teori HI lainnya, lebih sering digunakan dalam dunia pembuatan kebijakan, sehingga semacam menggemakan keinginan Machiavelli untuk menulis manual untuk memandu para pemimpin dunia. Kelompok ilmuan pengkritik realisme berpendapat bahwa realis dapat membantu melanggengkan dunia yang penuh kekerasan dan konfrontasional yang mereka gambarkan. Dengan mengasumsikan sifat manusia yang tidak kooperatif dan egoistik dan tidak adanya hierarki dalam sistem negara, realis mendorong para pemimpin untuk bertindak dengan

cara yang didasarkan pada kecurigaan, kekuasaan dan kekuatan. Realisme dengan demikian dapat dilihat sebagai ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Bahkan, realisme sering dikritik sebagai terlalu pesimistis, karena ia memandang sifat konfrontasional dari sistem internasional sebagai hal yang tak terhindarkan. Namun, menurut para pendukung realis, para pemimpin dihadapkan dengan kendala yang tak ada habisnya dan sedikit peluang untuk kerja sama. Dengan demikian, mereka dapat berbuat banyak untuk melarikan diri dari kenyataan politik kekuasaan, artinya membuka ruang negosiasi dan menghindari perang. Bagi seorang realis, menghadapi kenyataan kesulitan yang nyata itu bukanlah pesimisme, tapi sebuah kehati-hatian (prudence). Artinya, kalau suatu negara membuka ruang untuk berdamai, maka ia harus siap berperang pada saat yang bersamaan (*penerjemah*). Pemikiran realis tentang hubungan internasional menekankan bahwa kemungkinan perubahan damai, atau bahkan segala jenis perubahan lainnya, adalah sangat terbatas. Dan, bagi seorang pemimpin yang mengandalkan ukuran-ukuran idealistis dalam mengambil tindakan internasional adalah sebuah kebodohan.

Mungkin karena ia dirancang untuk menjelaskan pengulangan dan pola perilaku yang tak lekang oleh waktu, realisme tidak dapat memprediksi atau menjelaskan transformasi besar baru-baru ini dari sistem internasional: akhir Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Soviet Serikat pada tahun 1991. Ketika Perang Dingin berakhir, politik internasional mengalami perubahan cepat yang menunjuk ke era baru persaingan terbatas antara negara-negara dan banyak peluang untuk kerja sama. Transformasi ini mendorong munculnya visi optimis tentang politik dunia yang membuang realisme sebagai ‘pemikiran lama’ (*old thinking*). Realis juga dituduh terlalu fokus pada negara sebagai unit yang solid, yang pada akhirnya mengabaikan aktor dan kekuatan lain di dalam negara dan juga mengabaikan masalah internasional yang tidak terkait langsung dengan kelangsungan hidup negara. Misalnya, Perang Dingin berakhir karena warga negara biasa di negara-negara yang dikuasai Soviet di Eropa Timur memutuskan untuk memberontak terhadap struktur kekuasaan yang ada. Pemberontakan ini menjalar dari satu negara ke negara lain di dalam wilayah kekuasaan Uni Soviet yang luas, mengakibatkan keruntuhannya secara bertahap antara 1989 dan 1991. perangkat analisis Realisme tidak

pernah dan tidak akan menjelaskan peristiwa-peristiwa seperti itu; sebuah tindakan warga biasa (atau organisasi internasional, dalam hal ini) tidak menjadi bagian utama dalam peta analisis kaum realis. Ini disebabkan oleh sifat pemikiran yang berpusat pada negara, tempat realisme dibangun di atasnya. Realisme memandang negara seperti bola bilyard yang solid yang memantul di atas meja, tidak pernah berhenti untuk melihat ke dalam setiap bola itu, dari apa ia tersusun, dan mengapa bola bergerak seperti itu. Kaum realis mengakui pentingnya kritik-kritik ini, tetapi cenderung melihat peristiwa-peristiwa seperti runtuhnya Uni Soviet itu sebagai pengecualian terhadap pola hal-hal normal dari keajegan perulangan sejarah.

Banyak kritikus realisme fokus pada salah satu strategi sentralnya dalam pengelolaan urusan dunia *(the management of world affairs*); sebuah gagasan yang disebut sebagai '*balance of power'* atau keseimbangan kekuasaan. Ini menggambarkan situasi di mana negara terus-menerus membuat pilihan untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri, sambil atau meskipun, hal itu merusak kemampuan orang lain. Ini menghasilkan semacam 'keseimbangan' karena, secara teoritis, tidak ada negara yang diizinkan untuk menjadi terlalu kuat dalam sistem internasional. Jika suatu negara berusaha untuk mendorong keberuntungannya dan tumbuh terlalu kuat, seperti Jerman-Nazi pada tahun 1930-an, itu akan memicu perang karena negara-negara lain akan membentuk aliansi untuk mencoba mengalahkannya, yaitu, dengan mengembalikan pada titik keseimbangan semula. Keseimbangan sistem kekuasaan ini adalah salah satu alasan mengapa hubungan antar bangsa bersifat anarkis. Tidak ada satu negara pun yang bisa menjadi kekuatan global dan menyatukan dunia di bawah pemerintahannya secara langsung. Oleh karena itu, realisme sering berbicara tentang pentingnya aliansi yang fleksibel sebagai cara untuk memastikan kelangsungan hidup. Aliansi ini kurang ditentukan oleh kesamaan politik atau budaya di antara negara-negara anggota, tetapi, lebih karena kebutuhan untuk menemukan teman-teman yang 'berwajah ceria', atau pun berkerja sama dengan 'musuhnya, musuhku' (*enemies of my enemy)*. Ini dapat membantu menjelaskan mengapa AS dan Uni Soviet bersekutu selama Perang Dunia Kedua (1939–1945), karena mereka berdua melihat ancaman yang sama dari Jerman yang sedang bangkit dan berusaha menyeimbangkan kekuatannya. Namun, dalam beberapa tahun setelah

perang berakhir, kedua negara tersebut telah menjadi musuh bebuyutan, sehingga keseimbangan kekuasaan mulai bergeser lagi ketika aliansi baru terbentuk selama periode Perang Dingin (1947–1991). Sementara kaum realis menggambarkan keseimbangan kekuasaan sebagai strategi yang bijaksana untuk mengelola dunia yang tidak aman, para kritikus melihatnya sebagai cara untuk melegitimasi perang dan agresi.

Terlepas dari kritik-kritik ini, realisme tetap menjadi pusat rujukan dalam bidang teori HI, dengan sebagian besar teori lain terkait dalam pembahasannya, setidaknya untuk sebagian. Oleh karena itu, tidak tepat jika menulis buku teks tentang teori HI, tanpa membahas realisme di bab pertamanya. Selain itu, realisme terus menawarkan banyak wawasan penting tentang studi pembuatan kebijakan politik internasional, karena sejarah dari perkembangan teori ini yang dekat dengan pembuatan kebijakan sehingga selalu menawarkan alat-alat dalam mengelola tata negara bagi pembuat kebijakan. (Tokoh paling berpengaruh dalam teori realisme, Hans J. Morgenthau, misalnya, adalah penasehat kebijakan luar negeri USA pada masa Presiden John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson, dan diberhentikan saat mulai mengkritik kebijakan Amerika di Vietnan tahun 1960an. Pada masanya, Morgenthau dipandang oleh ilmuan HI sebagai penerjemah akademik politik luar negeri Amerika Serikat-penerjemah).

Realisme dan Kelompok ISIL, Daesh atau ISIS

Kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai Negara Islam (dikenal sebagai IS, Daesh, ISIS atau ISIL) adalah kelompok militan yang mengikuti doktrin fundamentalis Islam Sunni. Pada Juni 2014, kelompok itu menerbitkan sebuah dokumen di mana mereka mengklaim telah melacak garis keturunan pemimpinnya, Abu Bakar al-Baghdadi, yang sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kelompok itu kemudian menunjuk al-Baghdadi sebagai ‘khalifah’. Sebagai khalifah, al-Baghdadi menuntut kesetiaan Muslim yang taat di seluruh dunia. Kelompok dan pendukungnya mulai melakukan berbagai tindakan ekstrem dan biadab. Banyak aksi mereka mentargetkan di kota-kota di negara-negara Barat seperti Melbourne, Manchester dan Paris, sehingga menjadi masalah global. Pada

akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan Negara Islam atau Kekhalifahan versi mereka, secara geopolitik, budaya dan politik, serta untuk mencegah (melalui penggunaan terorisme dan tindakan ekstrim) kekuatan Barat atau regional yang akan mengganggu proses ini. Tentu saja, ini berarti ancaman bagi negara yang wilayahnya diklaim oleh kelompok Al-Baghdadi ini selaku 'existing state' yang berdaulat selama ini. Meskipun kelompok ekstrimis ini menganggap dirinya negara, namun, dengan berbagai tindakannya itu telah menunjukkan secara jelas bahwa mereka adalah organisasi teroris. Hampir semua negara di dunia dan organisasi internasional memiliki posisi sudut pandang yang sama. Para pemimpin agama Islam pun mengutuk keras ideologi dan tindakan brutal kelompok itu.

Meskipun tidak menjadi negara yang diakui secara resmi, dengan mencaplok dan menguasai/mengendalikan sebagian wilayah di Irak dan Suriah, kelompok Al-Baghdadi ini jelas memiliki aspek kenegaraan. Bagian utama dari upaya untuk memerangi kelompok ini terdiri dari serangan udara terhadap posisinya, dikombinasikan dengan strategi militer lainnya seperti menggunakan pasukan sekutu lokal untuk merebut kembali wilayah (terutama di Irak). Ini menunjukkan bahwa perang dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mengimbangi meningkatnya kekuatan terorisme di Timur Tengah dan menetralisir ancaman yang ditimbulkannya, baik bagi negara-negara Barat, maupun negara-negara di kawasan itu. Jadi, munculnya terorisme transnasional, seperti yang dipraktikkan oleh kelompok Al-Baghdadi itu, merupakan ancaman yang relatif baru dalam hubungan internasional, di lain pihak, negara-negara masih tetap mengandalkan strategi lama yang konsisten dengan realisme untuk menghadapinya, yakni perang terbuka sebagaimana yang telah terjadi.

Negara pada akhirnya mengandalkan swadaya mandiri untuk menjamin keamanan mereka sendiri. Dalam konteks ini, realis memiliki dua strategi utama untuk mengelola rasa tidak aman; keseimbangan kekuasaan (*balance of power)* dan pencegahan (*deterrence).* Keseimbangan kekuatan bergantung pada aliansi yang strategis dan fleksibel, sementara pencegahan tergantung pada ancaman (atau penggunaan) kekuatan yang signifikan. Keduanya terbukti dalam kasus ini.

Pertama, koalisi longgar negara-negara yang menyerang kelompok ISIS (Al-Baghdadi) yakni AS, Rusia dan Prancis, bergantung pada berbagai aliansi teman *'charming'* mereka, yakni kekuatan regional seperti Arab Saudi, Turki dan Iran. Pada saat yang sama, mereka meremehkan peran organisasi internasional karena mencari persetujuan tindakan di tempat-tempat pertemuan umum seperti PBB sangatlah sulit karena persaingan banyak negara. Kedua, mencegah (*deterrence*) musuh dengan kekuatan yang luar biasa (atau ancamannya) dianggap sebagai metode tercepat untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah di bawah pemerintahan ISIS. Tidak adanya proporsionalitas antara pasukan militer ISIS bila dibandingkan dengan gabungan pasukan militer AS, Prancis atau Rusia, tampaknya mengkonfirmasi rasionalitas keputusan, yang lagi-lagi mengingatkan kembali pada penekanan realisme pada pentingnya konsep-konsep seperti pencegahan. Bahkan, bagi negara-negara pengamat yang tidak terlibat pun sebenarnya bersikap rasional juga. Bagaimana pun, pendekatan aktor rasional mengandaikan bahwa musuh, bahkan jika musuh itu berupa kelompok teroris sekalipun, adalah, juga merupakan aktor rasional yang akan memilih tindakan yang manfaatnya lebih besar daripada risikonya.

Melalui poin ini, kita dapat melihat bahwa sementara tindakan kelompok teroris mungkin tampak tidak rasional, mereka dapat ditafsirkan sebaliknya. Dari sudut pandang realis, kelompok ISIS, dengan menyebarkan teror, menggunakan sarana terbatas yang tersedia untuk mengimbangi pengaruh Barat di Irak dan Suriah. Kerusakan substansial dari serangan militer brutal jelas tidak menjadi perhatian bagi komandan kelompok karena dua alasan utama, yang keduanya dapat berfungsi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pertama, itu akan berkontribusi untuk memicu sentimen anti-Barat di seluruh Timur Tengah karena populasi lokal menjadi target agresi asing. Kedua, perasaan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh serangan-serangan ini menciptakan peluang bagi perekrutan spontan para pejuang yang akan rela mati untuk mengesahkan tujuan kelompok - ini juga berlaku bagi mereka yang berada di wilayah dekat dan mereka yang secara internasional menjadi target ideologis ISIS melalui propaganda di internet.

Belajar dari kerumitan dalam kasus ISIS itu, di negara-negara yang sama rumitnya dengan Timur Tengah, para pendukung realis merekomendasikan kehati-hatian ekstrem mengenai kapan dan di mana suatu negara menggunakan kekuatan militernya. Sangat mudah ketika melihat realisme untuk melihatnya sebagai teori penghasut perang. Misalnya, saat membaca paruh pertama paragraf di atas, Anda mungkin merasa bahwa realisme akan mendukung serangan terhadap kelompok ISIS. Tetapi ketika Anda membaca paruh kedua paragraf itu, Anda akan menemukan bahwa teori yang sama merekomendasikan dengan sangat hati-hati atas tindakan yang harus diambil.

Poin kunci dalam memahami realisme adalah bahwa itu adalah teori yang berpendapat bahwa tindakan buruk seperti perang adalah alat yang diperlukan untuk tata negara dalam dunia yang tidak sempurna, dan para pemimpin harus menggunakannya ketika itu untuk melindungi kepentingan nasional yang esensial. Ini sepenuhnya rasional, di dunia di mana kelangsungan hidup negara adalah yang menjadi prioritas utama. Karena itu, seorang pemimpin harus sangat berhati-hati ketika memutuskan di mana dan kapan menggunakan kekuatan militer. Perlu dicatat bahwa invasi AS ke Irak pada tahun 2003, yang dilakukan sebagai bagian dari Perang Global Melawan Teror *(Global War on Terror)*, ditentang habis-habisan oleh sebagian besar ilmuan realis terkemuka sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang tidak akan berpihak pada kepentingan nasional AS. Hal ini terjadi karena penggunaan kekuatan militer AS yang tidak proporsional akan menyebabkan pukulan balik dan kekesalan di wilayah tersebut. Memang, dalam kasus ini, realisme menghasilkan hasil yang kuat sebagai alat analisis, seperti kebangkitan kelompok ISIS itu pada beberapa tahun setelah invasi Irak dilakukan.

Kesimpulan

Realisme adalah teori yang mengklaim dapat menjelaskan realitas politik internasional. Ia menekankan kendala pada politik yang dihasilkan dari sifat egois manusia dan tidak adanya otoritas pusat di atas negara. Bagi penganut realis, tujuan tertinggi adalah kelangsungan hidup negara, yang menjelaskan mengapa tindakan negara dinilai berdasarkan etika tanggung

jawab dan bukan dengan prinsip-prinsip moral tradisional. Dominasi realisme dalam ilmu HI telah menghasilkan banyak literatur yang secara signifikan mengkritik prinsip utamanya. Namun demikian, terlepas dari kritik-kritik yang berharga itu, realisme masih terus memberikan gagasan-gagasan yang akurat dan terus berkembang sehingga tetap menjadi alat analisis penting bagi setiap penstudi Hubungan Internasional.

2
LIBERALISME
(LIBERALISM)

Jeffrey W. Meiser

Liberalisme adalah ciri khas demokrasi modern, yang diilustrasikan dalam istilah ‘demokrasi liberal’ sebagai cara untuk menggambarkan negara-negara dengan pemilihan umum yang bebas dan adil, aturan hukum dan kebebasan sipil yang dilindungi. Liberalisme, ketika dibahas dalam ranah teori HI, telah berevolusi menjadi entitas tersendiri yang mengandung berbagai konsep dan argumen tentang bagaimana institusi, perilaku dan koneksi ekonomi memuat dan mengurangi resiko terhadap kekerasan kekuasaan negara. Jika dibandingkan dengan realisme, liberalisme menambah lebih banyak faktor ke dalam bidang kajian HI, terutama dari sisi warga negara dan organisasi internasional. Perlu ditegaskan bahwa, liberalisme telah menjadi lawan tradisional realisme dalam teori HI karena menawarkan pandangan dunia yang lebih optimis, didasarkan pada pembacaan sejarah yang berbeda dengan yang ditemukan oleh para pendukung realisme.

Dasar-Dasar Liberalism

Liberalisme didasarkan pada argumen moral bahwa memastikan hak individu seseorang untuk hidup, kebebasan dan properti adalah tujuan tertinggi pemerintah. Konsekuensinya, kaum liberal menekankan kesejahteraan individu sebagai dasar pembangun sistem politik yang adil. Sistem politik yang ditandai oleh kekuatan yang tidak terkendali, seperti monarki atau kediktatoran, tidak dapat melindungi kehidupan dan kebebasan warganya. Karena itu, perhatian utama liberalisme adalah membangun institusi yang melindungi kebebasan individu dengan membatasi dan mengontrol kekuasaan politik. Meskipun ini adalah

masalah politik dalam negeri, ranah HI juga penting bagi kaum liberal karena aktivitas negara di luar negeri dapat memiliki pengaruh kuat terhadap kebebasan di dalam negeri. Kaum liberal sangat terganggu oleh kebijakan luar negeri yang militeristik. Perhatian utamanya adalah, bahwa perang menuntut negara untuk membangun kekuatan militer. Padahal, kekuatan militer ini 2 (dua) sisi, yakni dapat digunakan untuk memerangi negara asing, tetapi juga dapat digunakan untuk menindas warganya sendiri. Karena alasan ini, maka, sistem politik yang berakar pada liberalisme sering membatasi kekuasaan militer dengan cara seperti memastikan kontrol sipil atas militer.

Perang ekspansi teritorial, atau imperialisme, ketika negara berusaha membangun kekaisaran dengan mengambil wilayah di luar negeri, sangat mengganggu bagi kaum liberal. Tidak hanya perang ekspansionis yang memperkuat negara dengan mengorbankan rakyat, perang ini juga membutuhkan komitmen jangka panjang terhadap pendudukan militer dan kontrol politik wilayah dan rakyat asing. Pekerjaan dan kontrol membutuhkan birokrasi besar yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan atau memperluas pendudukan wilayah asing. Oleh karena itu, bagi kaum liberal, masalah intinya adalah bagaimana mengembangkan sistem politik yang dapat memungkinkan negara untuk melakukannya, melindungi diri dari ancaman asing tanpa merusak kebebasan individu warganya. Pengendalian utama secara institusional terhadap kekuasaan di negara-negara liberal adalah pemilihan yang bebas dan adil di mana orang-orang dapat menurunkan atau mengganti penguasa mereka dari kekuasaan, dan memberikan evaluasi mendasar pada perilaku pemerintah. Pembatasan penting kedua pada kekuasaan politik adalah pembagian kekuasaan politik di antara berbagai cabang dan tingkat pemerintahan, seperti parlemen / kongres, eksekutif dan sistem hukum. Ini memungkinkan untuk pemeriksaan dan menjaga keseimbangan dalam penggunaan kekuasaan.

Teori perdamaian demokratis (*democratic peace theory*) dapat dikatakan sebagai kontribusi tervalid yang diberikan liberalisme pada teori HI. Ini menegaskan bahwa negara-negara demokratis sangat tidak mungkin berperang satu sama lain. Ada dua bagian penjelasan untuk fenomena ini. Pertama, negara-negara demokratis ditandai oleh pengekangan/

pembatasan internal terhadap kekuasaan, seperti yang dijelaskan di atas. Kedua, demokrasi cenderung memandang satu sama lain sebagai yang sah (legitimate), dan tidak mengancam, sehingga memiliki kapasitas dan probabilitas yang lebih tinggi untuk kerja sama satu sama lain daripada yang mereka lakukan dengan negara-negara non-demokrasi. Analisis statistik dan studi kasus secara historis memberikan dukungan kuat untuk teori perdamaian demokratis, tetapi beberapa masalah terus diperdebatkan. Pertama, demokrasi adalah perkembangan yang relatif baru dalam sejarah manusia. Ini berarti ada beberapa kasus demokrasi yang memiliki kesempatan untuk saling bertarung. Kedua, kita tidak bisa memastikan, apakah sesuatu itu benar-benar dapat disebut sebagai perdamaian 'demokratis', atau apakah beberapa faktor lain yang berkorelasi dengan demokrasi adalah sumber perdamaian, seperti kekuasaan, aliansi, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Poin ketiga adalah bahwa, sementara demokrasi tidak mungkin berperang satu sama lain, beberapa penelitian para sarjana menunjukkan bahwa negara demokrasi (liberal) cenderung agresif terhadap non-demokrasi, seperti ketika Amerika Serikat berperang dengan Irak pada tahun 2003. Meskipun ada perdebatan, kemungkinan perdamaian demokratik secara bertahap dapat menggantikan gambaran dunia yang terus-menerus diwarnai oleh perang dan anarkhi, sebagaimana persepsikan oleh kaum realis. Ini tentulah sebuah aspek dari liberalisme yang abadi dan penting.

Saat ini, masyarakat dunia hidup dalam sistem internasional yang disusun oleh tatanan dunia liberal yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua (1939–1945). Lembaga, organisasi, dan norma internasional (sebagai perilaku yang diharapkan) dari tatanan dunia ini dibangun di atas fondasi yang sama dengan institusi dan norma liberal domestik, yakni, keinginan untuk membatasi kekerasan kekuasaan negara. Faktanya, kekuasaan justru lebih terdilusi dan tersebar secara internasional daripada di dalam negara. Misalnya, di bawah hukum internasional, perang untuk tujuan agresi dilarang. Tidak ada kekuatan polisi internasional untuk menegakkan undang-undang ini, tetapi pihak penyerang tahu bahwa ketika melanggar hukum internasional ini, ia akan mendapat banyak reaksi internasional. Misalnya, negara, baik secara individu atau kolektif seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menjatuhkan sanksi ekonomi atau

campur tangan secara militer terhadap negara yang melanggar. Lebih jauh, negara yang agresif juga berisiko kehilangan manfaat perdamaian, seperti keuntungan dari perdagangan internasional, bantuan asing, dan pengakuan diplomatik.

Gagasan lengkap tentang tatanan dunia liberal yang berlaku saat ini, dapat ditemukan dalam karya Daniel Deudney dan G. John Ikenberry (1999), yang menggambarkan tiga faktor yang saling terkait.

Pertama, hukum dan perjanjian internasional dibersamai oleh organisasi internasional berfungsi untuk menciptakan sistem internasional yang relatif adil. Contoh pola dasar dari organisasi semacam itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengumpulkan sumber daya untuk tujuan bersama (seperti memperbaiki perubahan iklim), menyediakan diplomasi yang hampir konstan antara musuh dan teman-teman secara seimbang, dan memberikan semua negara anggota hak bersuara di komunitas internasional.

Kedua, penyebaran perdagangan bebas dan kapitalisme melalui upaya negara-negara liberal yang kuat dan organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) menciptakan sistem ekonomi internasional yang terbuka dan berbasis pasar. Situasi ini saling menguntungkan karena tingkat perdagangan yang tinggi antar negara mengurangi konflik dan membuat perang lebih kecil kemungkinannya, karena perang akan mengganggu atau membatalkan manfaat (keuntungan) perdagangan. Karenanya, negara-negara dengan ikatan dagang yang luas sangat bersemangat untuk menjaga hubungan damai. Dengan perhitungan ini, perang tidak menguntungkan, tetapi merugikan negara.

Elemen ketiga dari tatanan internasional liberal adalah norma-norma internasional. Norma liberal mendukung kerja sama internasional, hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Ketika suatu negara mengambil tindakan yang bertentangan dengan norma-norma ini, mereka dikenakan berbagai jenis konsekuensi. Namun, norma internasional sering diperdebatkan karena variasinya yang luas di seluruh dunia. Namun demikian, ada konsekuensi yang harus ditanggung, jika melanggar norma-norma liberal. Bahkan, konsekuensinya dapat terjadi secara langsung dan segera. Sebagai contoh, Uni Eropa memberlakukan embargo penjualan

senjata kepada Tiongkok setelah penindasannya yang keras terhadap para demonstran pro-demokrasi pada tahun 1989. Embargo berlanjut hingga hari ini. Konsekuensi juga bisa bersifat kurang langsung, tetapi sama penting akibatnya. Sebagai contoh, persepsi baik masyarakat internasional terhadap Amerika Serikat menurun secara signifikan di seluruh dunia setelah invasi Irak tahun 2003 karena invasi itu dilakukan secara sepihak (di luar aturan PBB yang ditetapkan) dalam suatu langkah yang secara luas dianggap tidak sah. Kebanyakan para sarjana liberal saat ini berfokus pada bagaimana organisasi internasional memupuk kerja sama dengan membantu negara mengatasi insentif untuk keluar dari perjanjian internasional. Jenis para sarjana ini biasanya disebut sebagai 'institusionalisme neoliberal', yang sering disingkat menjadi 'neoliberalisme' saja. Ini sering menyebabkan kebingungan karena neoliberalisme juga merupakan istilah yang digunakan di luar teori HI untuk menggambarkan ideologi deregulasi ekonomi yang luas, privatisasi, pajak rendah, penghematan (pemotongan belanja publik), dan perdagangan bebas. Inti dari neoliberalisme, ketika diterapkan dalam bidang HI, adalah bahwa negara dapat memperoleh manfaat secara signifikan dari kerja sama jika mereka saling mempercayai untuk memenuhi perjanjian mereka. Dalam situasi di mana suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari aktifitas menipu dan menghindari hukuman, pembelotan kemungkinan besar terjadi. Namun, ketika pihak ketiga (seperti organisasi internasional yang tidak memihak) dapat memantau perilaku penandatangan perjanjian dan memberikan informasi kepada kedua belah pihak, dorongan untuk mencederai perjanjian dapat berkurang, dan kedua belah pihak dapat berkomitmen untuk meningkatkan bekerja sama. Dalam kasus ini, semua pihak penandatangan perjanjian dapat mengambil manfaat dari keuntungan absolut. Keuntungan absolut mengacu pada peningkatan kesejahteraan secara umum bagi semua pihak yang berkepentingan, yakni, setiap negara peserta perjanjian mendapat manfaat sampai tingkat tertentu, meskipun tidak harus sama rata. Para ahli teori liberal berpendapat bahwa negara lebih peduli pada perolehan absolut daripada keuntungan relatif. Keuntungan relatif menggambarkan situasi di mana suatu negara mengukur peningkatan kesejahteraannya secara relatif terhadap negara lain, dan mungkin akan secara malu-malu menjauh dari perjanjian yang

membuat pesaingnya lebih kuat. Dengan berfokus pada sudut pandang yang lebih optimis tentang perolehan absolut dan memberikan bukti keberadaannya melalui organisasi internasional, kaum liberal melihat dunia di mana negara-negara akan lebih suka bekerja sama dalam bentuk perjanjian apa pun, yang memungkinkan segala peningkatan kemakmuran dapat terjadi.

Teori Liberal dan Imperialisme Amerika

Salah satu ilustrasi liberalisme yang lebih menarik berasal dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh. Selama periode ini, Amerika Serikat adalah liberal, tetapi menurut narasi sejarah yang dominan, juga imperialistik (lihat Meiser 2015). Jadi, tampaknya ada kontradiksi. Jika kita melihat lebih dekat, kita melihat bahwa Amerika Serikat tampak lebih terkendali penggunaan kekuasaannya daripada yang dibayangkan orang, khususnya terkait dengan kekuatan besar dunia lainnya di era itu. Salah satu ukuran sederhana adalah tingkat wilayah kolonial yang diperolehnya dibandingkan dengan kekuatan besar lainnya. Pada 1913, Amerika Serikat mengklaim 310.000 kilometer persegi wilayah kolonial, dibandingkan dengan 2.360.000 km untuk Belgia, 2.940.000 km untuk Jerman dan 32.860.000 km persegi untuk Inggris (Bairoch 1993, 83). Bahkan, sebagian besar kepemilikan kolonial Amerika disebabkan oleh aneksasi Filipina dan Puerto Rico, yang diwarisi setelah mengalahkan Spanyol dalam Perang Spanyol-Amerika tahun 1898. Amerika Serikat menunjukkan pengekangan seperti itu karena, seperti yang disarankan oleh teori liberal, struktur politiknya membatasi ekspansionisme. Meneliti hubungan AS-Meksiko selama awal abad kedua puluh membantu menggambarkan penyebab pengekangan Amerika ini.

Pada musim semi 1914, Amerika Serikat menyerbu kota Veracruz di Meksiko karena perselisihan tentang penahanan beberapa pelaut Amerika di Meksiko. Namun, hubungan AS-Meksiko sudah bermasalah karena kepercayaan liberal Presiden Woodrow Wilson bahwa, adalah tugas Amerika Serikat untuk membawa demokrasi ke Meksiko, yang menerapkan kediktatoran. Tujuan awal dari rencana perang Amerika sebenarnya adalah untuk menduduki Veracruz dan tetangganya, Tampico,

dan kemudian memblokade pantai timur Meksiko sampai kehormatan Amerika dipulihkan, atau perubahan rezim terjadi di Meksiko. Setelah pasukan Amerika mendarat di Veracruz, para pemimpin militer senior dan penasihat diplomatik Wilson di Meksiko menganjurkan peningkatan tujuan politik untuk memasukkan pendudukan Mexico City, ada juga pendukung vokal yang mengadvokasi pendudukan penuh Meksiko. Wilson tidak sepenuhnya mengikuti saran yang diterimanya. Sebaliknya, ia mengurangi tujuan perangnya, menghentikan pasukannya di Veracruz dan menarik pasukan AS dalam beberapa bulan. Wilson melakukan pengekangan karena oposisi publik Amerika, nilai-nilai pribadinya dipertanyakan publik, ketakutan resiko permusuhan dengan Meksiko yang disuarakan, dan kerugian militer yang timbul dalam pertempuran itu. Pendapat internasional juga tampaknya telah mempengaruhi pemikiran Wilson ketika anti-Amerikanisme mulai meluas di Amerika Latin. Seperti yang ditunjukkan Arthur Link, *'Altogether, it was an unhappy time for a President and a people who claimed the moral leadership of the world'* (Link 1956, 405).

Pada 1919, koalisi pro-intervensi tumbuh di Amerika Serikat yang dibangun di atas frustrasi dengan pengekangan kekuasaan atas ekspansi Amerika Serikat di Mexico oleh Presiden Wilson sebelumnya dan ketakutan baru terhadap Konstitusi Meksiko 1917, yang memberi rakyat Meksiko kepemilikan semua sumber daya bawah tanah. Ini berpotensi membahayakan kepemilikan asing atas tambang dan ladang minyak di Meksiko. Intervensionis ingin mengubah Meksiko menjadi protektorat Amerika, atau setidaknya merebut ladang minyak Meksiko. Koalisi ini menggerakkan negara ke arah intervensi, sementara Wilson terganggu oleh negosiasi damai di Eropa dan kemudian terbaring di tempat tidur karena stroke. Jalan menuju intervensi diblokir segera setelah Wilson pulih kesehatannya, dan cukup kuat untuk mendapatkan kembali komando agenda kebijakan AS, dan memutuskan ikatan dengan kaum intervensionis. Wilson memiliki dua alasan utama untuk menghindari jalur kebijakan yang lebih agresif. Pertama, ia melihat Gedung Kongres (dengan dukungan beberapa anggota) berusaha menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang menurut Wilson tidak konstitusional. Dalam sistem Amerika, presiden memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan luar negeri. Oleh

karena itu, penegasannya atas kebijakan luar negeri dengan Meksiko merupakan upaya yang jelas untuk menunjukkan kekuatan kepada Kongres dalam pembuatan kebijakan. Kedua, Wilson bertekad untuk mempertahankan kebijakan yang konsisten dengan norma anti-imperialisme, tetapi juga norma penentuan nasib sendiri (self-determination), proses di mana suatu negara menentukan nasib negaranya sendiri, dan memilih bentuk pemerintahannya sendiri. Kedua norma ini tetap menjadi landasan pokok teori liberal yang berlaku saat ini. Hubungan AS dengan Meksiko dalam kasus ini menunjukkan bagaimana struktur institusi domestik dan normatif menahan penggunaan kekuatan kekerasan untuk meluaskan pendudukan atas Mexico. Pengekangan institusional ini dapat runtuh, jika suatu masyarakat tidak memiliki budaya politik yang dijiwai oleh norma-norma liberal. Misalnya, anti-statisme (suatu kepercayaan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi) dan anti-imperialisme (keyakinan bahwa penaklukan orang asing adalah salah) adalah norma liberal. Suatu masyarakat yang dipenuhi oleh norma-norma liberal memiliki tingkat pengekangan tambahan yang melampaui batasan institusional murni pada kekuasaan negara. Warga negara liberal secara alami akan menentang tindakan pemerintah yang mengancam kebebasan individu dan memilih perwakilan (anggota parlemen) yang akan bertindak berdasarkan preferensi liberal. Pemisahan kekuasaan yang institusional di Amerika Serikat memungkinkan Wilson untuk menghalangi upaya intervensi Kongres dan lainnya. Norma liberal anti-imperialisme menahan ekspansi Amerika melalui mekanisme opini publik dan nilai-nilai pribadi presiden Amerika Serikat. Institusi dan norma bekerja secara simbiotik. Pendapat internasional memberi tekanan tambahan pada para pemimpin politik Amerika karena meningkatnya peluang perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin sepanjang awal 1900-an. Tepat seperti rincian teori liberal, keuntungan absolut dan peluang yang ditawarkan oleh perdagangan, bersama dengan preferensi untuk penentuan nasib sendiri dan tanpa campur tangan, bertindak sebagai pengekangan terhadap ekspansionisme AS menuju Meksiko dalam periode yang paling imperialis dalam sejarah dunia ini.

Kesimpulan

Argumen inti liberalisme adalah, bahwa konsentrasi kekuatan kekerasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan merupakan ancaman mendasar terhadap kebebasan individu dan, oleh karenanya, harus dikendalikan. Sarana utama untuk membatasi kekuasaan adalah institusi dan norma di tingkat domestik dan internasional. Di tingkat internasional, lembaga dan organisasi membatasi kekuatan negara dengan membina kerja sama dan menyediakan cara untuk memberikan konsekuensi (sanksi) pada negara yang melanggar perjanjian internasional. Institusi ekonomi sangat efektif dalam membina kerja sama karena manfaat besar yang dapat diperoleh dari saling ketergantungan ekonomi. Akhirnya, norma-norma liberal menambahkan pembatasan lebih lanjut pada penggunaan kekuasaan dengan membentuk pemahaman kita tentang jenis perilaku apa yang sesuai. Saat ini, jelaslah bahwa liberalisme bukanlah sebuah teori utopi, yang menggambarkan dunia dengan mimpi perdamaian dan kebahagiaan sejati, seperti yang pernah dituduhkan. Liberalisme memberikan jawaban konsisten terhadap realisme, sekaligus berakar kuat dalam bukti dan tradisi teoretis yang mendalam.

3
THE ENGLISH SCHOOL[2]

Yannis A. Stivachtis

The English school meyumbangkan pemikirannya mengenai dasar-dasar untuk studi sejarah internasional dan dunia, dalam kaitannya dengan struktur sosial dari tatanan internasional. Tidak seperti banyak teori yang mengklaim sektor tertentu dari subjek Hubungan Internasional, The English school menyediakan pendekatan holistik untuk subjek, dan berusaha untuk melihat dunia secara keseluruhan. Teori English school dibangun tiga konsep utama, yakni, sistem internasional (*internastional system)*, masyarakat internasional (*international society*) dan masyarakat dunia *(world society*). Dengan melakukan itu, English School membuka ruang baru dalam teori HI, dan menawarkan jalan tengah (*middle ground*) antara teori realisme dan liberalisme yang bertentangan.

Dasar-Dasar Teori English school

The English school[3] dibangun dengan 3 (tiga) konsep utama, yakni, sistem internasional, masyarakat internasional dan masyarakat dunia.

---

[2] The English School sengaja tidak diterjemahkan di sini sebab istilah itu merujuk pada sebuah nama komunitas ilmuan, dan bukan sebuah frasa (penerjemah)

[3] The English school (ES) dianggap sebagai sebuah kerangka teoritis dan empiris yang mapan, berasal dari akhir 1950-an (Dunne 1998; Wæver 1998; Buzan 2001). Robert Jackson (1992: 271) dengan baik menyimpulkan pemikiran ES dengan melihatnya sebagai berbagai pertanyaan teoritis yang memahami hubungan internasional sebagai dunia tidak hanya kekuasaan atau kehati-hatian atau kekayaan atau kemampuan atau dominasi tetapi juga salah satu pengakuan, asosiasi, keanggotaan, kesetaraan, kesederajatan, kepentingan yang sah, hak, timbal balik, adat istiadat dan konvensi, kesepakatan dan ketidaksepakatan, perselisihan, pelanggaran, cedera, kerusakan, reparasi, dan sisanya adalah kosa kata normatif perilaku manusia. Dua elemen inti mendefinisikan kekhasan ES, yakni (1) tiga konsep utamanya, dan (2) pendekatan pluralis

Hedley Bull (1977, 9-10) mendefinisikan bahwa, sistem internasional terbentuk ‘ketika dua atau lebih negara memiliki kontak yang cukup di antara mereka, dan memiliki dampak yang cukup pada keputusan satu sama lain untuk membuat mereka berperilaku sebagai bagian dari keseluruhan (dalam satu kesatuan)’. Menurut definisi ini, sistem internasional lebih menekankan pada politik kekuasaan di antara negara-negara yang tindakannya dikondisikan oleh struktur anarki internasional. Menurutnya, suatu masyarakat internasional ada ketika sekelompok negara yang berpikiran sama ‘menganggap diri mereka terikat oleh seperangkat aturan umum dalam hubungan mereka satu sama lain, dan berbagi (*share*), saling membantu, dalam kerja-kerja pada lembaga-lembaga umum yang mereka miliki’ (Bull 1977, 13). Dengan kata lain, masyarakat internasional menekankan tentang penciptaan dan pemeliharaan norma, aturan, dan lembaga yang dimiliki bersama. Akhirnya, masyarakat dunia lebih mendasar daripada masyarakat internasional karena ‘unit utama dari masyarakat besar ini bukanlah negara, …tetapi manusia individu seluruhnya’ (Bull 1977, 21). Dengan demikian, masyarakat dunia melampaui sistem negara dan menjadikan individu, aktor non-negara, dan akhirnya populasi global sebagai fokus identitas dan pengaturan masyarakat global. Penting untuk dicatat bahwa, The English school menggunakan istilah ‘institusi’ di sini berbeda maknanya dengan istilah ‘organisasi’.

Menurut pemikiran English School, ‘institusi’ merujuk pada praktik jangka panjang di antara negara-negara (seperti diplomasi, hukum, dan perang) daripada struktur birokrasi internasional (organisasi) yang mungkin didirikan untuk memfasilitasi interaksi negara. Untuk merujuk pada organisasi internasional, English School menggunakan istilah *‘pseudo-institutions’* atau *‘secondary institutions’* untuk menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional tergantung pada fungsi lembaga utama masyarakat internasional.

---

teorinya. Tiga konsep utama adalah: sistem internasional, masyarakat internasional dan masyarakat dunia (Little 1995: 15-16). Lihat laman https://www.cambridge.org/core/books/from-international-to-world-society/english-school-theory-and-its-problems-an-overview/C5BE462214E2D0B6C498800335C61D6A (penerjemah)

Perbedaan antara sistem internasional dan masyarakat internasional membantu kita membedakan pola dan karakter hubungan antara negara-negara secara individual dan kelompok negara tertentu. Misalnya, secara historis ada perbedaan mendasar antara jenis hubungan antara negara-negara Eropa dan jenis hubungan mereka dengan Kekhalifahan Ottoman. Hubungan antara negara-negara Eropa mencerminkan keberadaan masyarakat internasional Eropa (ditandai dengan adanya *share norm* di antara mereka), sementara hubungan antara negara-negara Eropa dan Kekhalifahan Ottoman mencerminkan keberadaan sistem internasional (yang lebih berfokus pada hubungan politik kenegaraan). Dapat pula dibandingkan bahwa, interaksi antara negara-negara anggota Uni Eropa mencerminkan keberadaan masyarakat internasional, lain halnya dengan interaksi Uni Eropa itu sendiri dengan Turki (bukan anggota) menggambarkan interaksi dalam sistem internasional yang lebih luas. Terlepas dari kegunaannya, perbedaan antara sistem internasional dan masyarakat internasional mengundang banyak kritik karena dalam sistem internasional pun orang dapat mengamati keberadaan beberapa aturan dan pengoperasian beberapa institusi (yang menjadi domain khas suatu masyarakat internasional-penerjemah). Debat ini telah menghasilkan penerimaan sebuah premis bahwa sistem internasional merupakan bentuk lemah atau 'tipis' *(thin*) dari masyarakat internasional.

Sepanjang sejarah, tidak ada sistem atau masyarakat internasional tunggal. Faktanya, ada beberapa masyarakat internasional regional, masing-masing dengan aturan dan institusi tersendiri. Semua dibangun di atas peradaban yang rumit, termasuk agama yang berbeda, sistem pemerintahan yang berbeda, berbagai jenis hukum dan konsepsi dunia yang berbeda. Ini, pada gilirannya, menyiratkan bahwa hubungan antara entitas politik yang merupakan anggota masyarakat internasional regional yang berbeda tidak dapat dilakukan dengan dasar moral dan hukum yang sama, karena aturan masing-masing masyarakat regional secara budaya bersifat khusus dan eksklusif. Tidak ada satu pun perangkat aturan dan lembaga yang disepakati yang diterapkan melintasi batas-batas dua atau lebih masyarakat internasional regional. Selain itu, kontak antara sesama masyarakat internasional regional jauh lebih terbatas daripada kontak antar-anggota di dalamnya. Dengan demikian, kemunculan masyarakat

internasional yang benar-benar universal tidak akan mungkin terjadi, kecuali jika salah satu masyarakat internasional regional dapat mengembangkan dirinya sendiri sampai taraf yang dapat menggabungkan semua yang lain menjadi satu masyarakat universal tunggal yang diorganisir di ke dalam suatu perangkat aturan dan nilai (norma) yang sama.

Selama abad ketujuh belas dan kedelapan belas, masyarakat internasional kemudian dianggap sebagai asosiasi istimewa dari negara-negara Eropa dan negara-negara 'beradab' saja, yang memiliki ekspresi nyata di lembaga-lembaga tertentu seperti hukum internasional, diplomasi dan keseimbangan kekuasaan. Ada keyakinan bahwa negara-negara dan para penguasa Eropa terikat oleh aturan perilaku (*code of conduct*) dalam berurusan satu sama lain, dan bahwa aturan ini tidak berlaku dalam berurusan dengan negara atau masyarakat lain. Para Pengacara internasional (*lawyers*) abad kesembilan belas mengabadikan dualisme budaya antara orang Eropa dan non-Eropa dan antara orang-orang yang 'beradab' dan 'tidak beradab'. Perbedaan antara kemanusiaan 'beradab' dan 'barbar' berarti bahwa negara-negara yang termasuk dalam kategori mana pun diberikan tahapan pengakuan hukum yang berbeda. Ketika masyarakat internasional Eropa menyebar ke seluruh dunia, banyak negara non-Eropa berusaha bergabung dengan masyarakat internasional. Dengan demikian, negara-negara Eropa perlu mendefinisikan kondisi di mana entitas politik non-Eropa akan diterima. Hasilnya adalah pembentukan standar 'peradaban', yang mencerminkan norma-norma peradaban Eropa liberal. Standar peradaban termasuk unsur-unsur seperti jaminan hak asasi manusia (HAM) dan pemeliharaan sistem hukum domestik yang menjamin keadilan bagi semua. Dengan demikian, menurut definisi, negara-negara yang tidak mau atau tidak dapat menjamin hak-hak tersebut tidak dapat dianggap 'beradab'. Akibatnya, negara-negara kandidat non-Eropa dinilai tidak hanya dengan cara mereka melakukan hubungan luar negeri, tetapi juga dengan bagaimana mereka mengatur diri mereka sendiri secara domestik. Proses ini juga mengarah pada terciptanya hubungan hierarkis antara dua kategori baru negara, yakni 'civilisers' (pembawa peradaban) dan '*civilisees*' (penerima peradaban). Atau dengan kata lain, 'guru' dan 'murid'.

Sebuah masyarakat internasional baru muncul setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama (1914-1918), ditandai oleh pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Desain yang terakhir untuk masyarakat internasional global baru menggabungkan hampir semua aturan dan praktik yang telah dikembangkan dalam masyarakat internasional Eropa, termasuk hukum dan diplomasi internasionalnya, serta asumsi dasarnya tentang kedaulatan dan kesetaraan peradilan dari negara-negara yang diakui sebagai anggota masyarakat yang independen. Dorongan untuk Liga datang bukan dari Eropa, tetapi dari seorang presiden Amerika, Woodrow Wilson. Ini sekaligus menandakan perubahan dalam sifat tatanan internasional. Pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 mengganggu fungsi Liga dan akibatnya menyebabkan kehancuran masyarakat internasional yang telah terbentuk. Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 merupakan ekspresi dari masyarakat internasional baru. Meski demikian, banyak prinsip dan struktur yang ditemukan di Liga BB direplikasi ulang oleh PBB.

Sementara itu, standar 'peradaban' menghina para perwakilan peradaban negara-negara non-Eropa karena status hukum istimewa yang diklaim oleh negara-negara Eropa untuk diri mereka sendiri tidak hanya berarti pembagian dunia antara negara-negara 'beradab' dan 'tidak beradab', tetapi juga mempertahankan hubungan hirarkis antar negara. Akibatnya, negara-negara non-Eropa dan komunitas-komunitas negara-negara terjajah mulai berkampanye melawan 'standar peradaban yang tidak fair itu', dan kemudian dihapuskan ketika proses dekolonisasi dimulai. Ini menandai berakhirnya zaman kolonisasi dan imperialisme.

Munculnya dunia bipolar dari Perang Dingin (1947–1991), ketika dua negara adidaya membagi dunia menjadi orbitnya masing-masing, menyebabkan pembagian masyarakat internasional baru yang relatif 'tipis' (lemah ikatan normanya), menjadi dua sub-global yang 'lebih tebal', yakni, satu yang terikat dengan Amerika Serikat dan satu lainnya beraliansi dengan Uni Soviet. Akhir Perang Dingin pada tahun 1991 berarti dua hal; pertama, pembagian masyarakat internasional secara global tidak ada lagi; dan kedua, seperangkat masyarakat internasional regional dengan berbagai tingkat 'ketebalan' (kekuatan keterikatan norma pergaulan) yang berbeda-beda secara bertahap muncul dalam batas-batas masyarakat internasional

secara global (muncul era regionalism dengan ikatan kerjasama yang lebih kuat-penerjemah). Perdebatan utama dalam English School berkisar pada pluralisme dan solidarisme. Pluralisme mengacu pada masyarakat internasional dengan tingkat norma, aturan, dan institusi yang relatif rendah keterikatannya. Solidarisme mengacu pada jenis masyarakat internasional dengan tingkat norma, aturan, dan kelembagaan bersama yang relatif tinggi. Perdebatan pluralis / solidaris pada dasarnya adalah tentang bagaimana masyarakat internasional berhubungan (negara-negara) dengan masyarakat dunia (people). Pertanyaan utamanya adalah bagaimana mengurangi ketegangan antara kebutuhan dan keharusan bertindak (imperatif) negara dengan kebutuhan dan keharusan bertindak (imperatif) umat manusia. Ini secara teratur bertentangan baik dalam situasi dunia nyata maupun dalam teori. Sebagian besar cendekiawan English School yang terlibat dalam debat ini, mengambil ketegangan antara keharusan ketertiban dan keadilan sebagai masalah inti yang harus ditangani.

Topik lain yang penting dalam perdebatan kelompok pluralis dengan solidaris adalah pertanyaan tentang apakah hukum internasional harus mencakup hukum kodrat atau hukum positif. Hukum kodrat adalah filosofi yang menganjurkan bahwa hak-hak atau nilai-nilai tertentu melekat karena sifat manusia, dan dapat dipahami secara universal melalui akal manusia. Dengan kata lain, hukum kodrat mengacu pada prinsip-prinsip moral yang tidak berubah dan dianggap sebagai dasar untuk semua perilaku manusia. Hukum positif, di sisi lain, mengacu pada hukum buatan manusia dari komunitas, masyarakat atau negara tertentu. Debat ini memanifestasikan paling akut antara klaim kedaulatan negara (via pluralisme) di satu sisi dan gagasan bahwa hak-hak universal berada di tangan orang-orang (via solidarisme) di sisi lain. Contoh cepat untuk menunjukkan ini adalah dengan menggunakan kasus Suriah. Pembacaan pluralis akan menyatakan bahwa meskipun terjadi kekejaman yang mengerikan sejak 2011 karena negara tersebut telah runtuh dalam perang saudara yang brutal, Suriah adalah negara berdaulat dan bertanggung jawab atas wilayah dan rakyatnya sendiri.Posisi solidaris akan menekankan kewajiban utama untuk melindungi kehidupan manusia dan dibutuhkan campur tangan PBB dalam perang saudara Suriah. Kedua posisi akan menyarankan tipe masyarakat internasional yang sangat berbeda.

Pluralisme dan solidarisme, walaupun tampaknya bertolak belakang, namun sangat berguna sebagai kerangka prinsip untuk membingkai perdebatan terkait batasan dan kemungkinan-kemungkinan bekerjanya sebuah masyarakat internasional. Debat ini sebagian besar berbicara tentang bagaimana cara terbaik untuk mendamaikan keinginan dan kebutuhan orang dan negara. Dalam hal ini, English School adalah alat penting dalam teori HI yang mencoba untuk menemukan keseimbangan kerja antara bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan standar keadilan dan tanggung jawab beroperasi dalam masyarakat internasional.

The English school dan Uni Eropa

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, enam negara Eropa membentuk sistem internasional regional dalam arti bahwa mereka memiliki ‘kontak yang cukup di antara mereka, dan memiliki dampak yang cukup pada keputusan satu sama lain untuk membuat mereka berperilaku sebagai bagian dari keseluruhan’ (Bull 1977, 9-10). Menerapkan definisi Bull tentang masyarakat internasional, segera sebuah masyarakat internasional terbentuk dalam arti bahwa ‘mereka menganggap diri mereka terikat oleh seperangkat aturan umum dalam hubungan mereka satu sama lain, dan ikut serta dalam kerja institusi bersama’ (Bull 1977) , 13). Dengan kata lain, negara-negara Eropa yang saat ini dikaitkan dengan Uni Eropa (UE) menciptakan seperangkat aturan dan lembaga untuk mengatur dan mengelola urusan mereka. Seiring berjalannya waktu, proses integrasi memperoleh kekuatan, keluasan dan kedalaman, menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga supranasional (kekuatan hukum yang ada di luar negara), hukum dan kebijakan. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan, antara lain, pada penciptaan masyarakat dunia UE yang menopang masyarakat internasional UE. Pada saat yang sama, undang-undang dan kebijakan Uni Eropa berupaya mengatur hubungan antara Uni dengan, baik, negara-negara anggotanya, maupun dengan rakyatnya. Dengan cara ini, ketegangan antara kebutuhan dan imperatif (keharusan bertindak) negara dan kebutuhan dan imperatif rakyat, serta ketegangan antara imperatif ketertiban dan keadilan, yang merupakan inti dari perdebatan pluralis dan solidarisme, sangat relevan untuk dibahas dalam

kajian kedua sudut pandang ini. Proses perluasan Uni Eropa dari enam anggota pada tahun 1951 menjadi 28 pada tahun 2013, tidak jauh berbeda dengan proses ekspansi historis masyarakat internasional Eropa. Seperti pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara anggota UE harus menetapkan kondisi di mana mereka akan menerima negara-negara kandidat. Akibatnya, negara-negara Eropa yang bercita-cita untuk menjadi anggota Uni Eropa perlu memenuhi kriteria politik dan ekonomi tertentu. Seperti standar historis 'peradaban', kondisi keanggotaan UE adalah ekspresi dari asumsi yang digunakan untuk membedakan asumsi-asumsi yang menjadi milik Uni yang berkembang dari yang tidak non Eropa. Mereka yang memenuhi kondisi politik dan ekonomi yang ditetapkan oleh negara-negara UE akan diperkenankan untuk bergabung, sementara yang tidak sesuai dengan standar EU, akan ditolak untuk bergabung dengan UE. Seperti negara-negara non-Eropa sebelumnya, negara-negara kandidat UE harus belajar menyesuaikan diri dengan realitas baru, yang bhakan, kadang-kadang dengan merugikan cukup signifikan untuk masyarakat negara mereka sendiri.

Kriteria keanggotaan UE mencakup kondisi ekonomi dan politik. Karena UE memang diawali dibentuk sebagai organisasi ekonomi, artinya, definisi kondisi ekonomi tertentu yang harus dipenuhi oleh calon anggota sudah ada sejak awal berdirinya UE. Di sisi lain, perumusan kondisi politik telah mengalami evolusi yang cukup besar. Pada KTT Kopenhagen pada Juni 1993, norma dan nilai UE diklarifikasi dengan kriteria berikut:

1. Keanggotaan mensyaratkan bahwa negara kandidat telah mencapai stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perlindungan minoritas.
2. Keanggotaan membutuhkan keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi serta kapasitas untuk mengatasi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di dalam UE.
3. Keanggotaan mensyaratkan kemampuan kandidat untuk mengambil kewajiban keanggotaan termasuk kepatuhan terhadap tujuan serikat politik, ekonomi dan moneter.

Potensi UE untuk mempengaruhi pada negara-negara kandidat bervariasi antara dua tahap besar; pertama, pra-negosiasi (ketika kriteria Kopenhagen harus dipenuhi sebelum negosiasi dimulai); dan kedua, negosiasi aktual (ketika kondisi politik dipantau secara teratur). Selama fase pertama, negosiasi dapat diblokir oleh kegagalan suatu negara untuk memenuhi kondisi politik, sementara selama fase kedua, negosiasi dapat terputus atau dihentikan jika negara yang melakukan negosiasi berubah kondisi politiknya, atau melanggar salah satu dari syarat-syarat kriteria politik UE. Di sini kasus Turki yang terkatung-katung dalam lamarannya menjadi anggota UE mulai dapat dipahami, mengingat kekuatan otoriternya bergeser (erdogan dinilai otoriter oleh para pemimpin Eropa-penerjemah), dan catatan hak asasi manusia yang bermasalah, yang dapat menjelaskan mengapa jalannya untuk menjadi anggota tidak terpenuhi sejak pertama kali diterapkan untuk bergabung pada tahun 1987.

Proses perluasan UE, terus berkembang sehingga meliputi sebagian besar benua Eropa, menunjukkan bagaimana masyarakat internasional regional yang 'tebal' berkembang ke luar, secara bertahap mengubah sistem internasional yang jauh lebih luas di mana ia tertanam ke dalam masyarakat internasional. Tetapi, seperti disebutkan sebelumnya, sistem internasional itu sendiri mewakili bentuk 'tipis' masyarakat internasional. Namun, proses ekspansi tidak berakhir dengan masuknya negara kandidat ke Uni Eropa. Faktanya, unsur-unsur keteraturan yang ada di UE dan yang terkait dengan masyarakat internasional dan masyarakat dunia diekspor di luar batas-batas Uni Eropa dengan tiga cara tambahan. Pertama, negara-negara yang terletak di sekitar perbatasan UE didorong untuk mengadopsi norma dan praktik yang sesuai dengan norma Uni Eropa. Kedua, untuk mengakses bantuan kemanusiaan atau bantuan pembangunan, maka negara-negara harus memenuhi kondisi politik dan ekonomi tertentu yang mencerminkan norma dan nilai UE. Ketiga, meminta mitra dagang UE untuk mematuhi norma, aturan, dan praktik tertentu telah menjadi persyaratan UE yang telah membentuk kebijakan perdagangan Uni Eropa dan hubungannya dengan negara-negara eksternal.Jika studi perluasan UE penting untuk memahami bagaimana masyarakat internasional regional berkembang ke luar, dengan demikian secara perlahan mengubah sistem internasional yang lebih luas di mana mereka berada, ke dalam masyarakat internasional. Penelitian

tentang apa yang terjadi pada mereka jika mereka berkontraksi satu sama lain, tentu sangat menarik dilakukan. Misalnya, apa yang akan terjadi pada masyarakat internasional regional UE sebagai akibat dari 'Brexit' (Inggris meninggalkan Uni Eropa) dan kemungkinan bahwa negara-negara lain juga akan pergi? Ada dua kemungkinan. Pertama, jika anggota inti dari masyarakat internasional regional (UE) pergi, maka masyarakat ini mungkin secara bertahap berubah menjadi masyarakat internasional yang 'lebih tipis' (kendor ikatan normanya), yang setara dengan sistem internasional. Kedua, masyarakat internasional regional dapat terus ada, tetapi negara-negara yang meninggalkan masyarakat ini akan pindah ke sistem internasional yang lebih luas di mana masyarakat internasional regional juga terlibat. Misalnya, terlepas dari Brexit, masyarakat internasional regional UE akan terus ada, tetapi Inggris akan pindah ke sistem internasional yang lebih luas di mana masyarakat internasional regional UE sama-sama berada (PBB, misalnya). Tetapi, jika negara anggota UE lainnya mengikuti jalur yang sama, maka masyarakat internasional regional UE secara bertahap akan berubah menjadi masyarakat internasional yang 'lebih tipis lagi' (dan semakin lemah ikatannya). Jika negara-negara anggota UE tidak bersatu untuk menghadapi tantangan-tantangannya (yang Brexit hanya satu), mungkin kita dapat secara bertahap melihat penurunan 'ketebalan' UE (atau melemahnya UE), yang berakibat pada terjadinya pergeseran dari ujung spektrum masyarakat dunia ke ujung spektrum sistem internasional *(the world society end of spectrum to the international system end of spectrum*).

Kesimpulan

Dua perdebatan penting telah terjadi di English School. Pertama, apakah perbedaan antara sistem internasional dan masyarakat internasional itu valid, dan, jika ya, maka di mana garis batas antara dua bentuk tatanan internasional itu letak persisnya. Yang kedua beralih pada pemahaman pluralis versus solidarisme, dan hubungan antara masyarakat internasional dan masyarakat dunia. Debat pertama menghasilkan penerimaan premis bahwa sistem internasional merupakan bentuk lemah/tipis dari masyarakat internasional. Meskipun perdebatan pluralis dan solidarisme masih

berlangsung, orang harus mengakui bahwa perubahan tertentu dalam masyarakat internasional (misalnya pergeseran dari dunia perang berkepanjangan sebelum tahun 1945 ke perdamaian dunia secara relatif pasca-1945), disertai dengan beberapa perkembangan penting lainnya di masyarakat dunia. Misalnya, ada tuntutan yang meningkat akan hak asasi manusia ketika orang semakin memahami bahwa mereka terhubung dalam satu ekonomi global dan tinggal dalam satu lingkungan global. Pada saat yang sama, teknologi dan media sosial memungkinkan pengalaman yang banyak saling dipertukarkan antar negara. Perkembangan ini telah menyebabkan peningkatan interaksi antara masyarakat internasional dan masyarakat dunia yang memiliki potensi menstabilkan masyarakat internasional dengan menanamkan gagasan tidak hanya dalam benak para elit politik dan ekonomi tetapi juga dalam benak warga negara biasa seluruh dunia.

4
KONSTRUKTIVISME (CONSTRUCTIVISM)

Sarina Theys

Kedatangan konstruktivisme dalam studi HI sering dikaitkan dengan berakhirnya Perang Dingin, sebuah peristiwa yang gagal dijelaskan oleh teori-teori tradisional seperti realisme dan liberalisme. Kegagalan ini dapat dikaitkan dengan beberapa prinsip inti mereka, seperti keyakinan bahwa negara adalah aktor yang mementingkan diri sendiri yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan distribusi kekuasaan yang tidak setara di antara negara-negara yang menentukan keseimbangan kekuasaan di antara mereka. Dengan memfokuskan pada dominan negara, teori-teori tradisional belum membuka banyak ruang untuk mengamati agensi individu. Lagi pula, tindakan rakyat biasalah yang memastikan berakhirnya Perang Dingin, bukan tindakan negara atau organisasi internasional. Konstruktivisme menjelaskan masalah ini dengan menyatakan bahwa dunia sosial (*social world*) adalah buatan kita (*our making*) (Onuf 1989). Aktor (biasanya yang kuat, seperti pemimpin dan warga negara yang berpengaruh) terus-menerus membentuk, dan kadang-kadang membentuk kembali (reshape), hakikat hubungan internasional melalui tindakan dan interaksi mereka.

Dasar-Dasar Konstruktivisme

Konstruktivisme melihat dunia, dan apa yang dapat kita ketahui tentang dunia, sebagai konstruksi sosial (*socially constructed*). Pandangan ini mengacu pada sifat realitas dan sifat pengetahuan yang juga disebut ontologi dan epistemologi dalam bahasa penelitian. Alexander Wendt (1995) menawarkan contoh luar biasa yang menggambarkan konstruksi

sosial dari kenyataan ketika ia menjelaskan bahwa 500 senjata nuklir Inggris kurang mengancam Amerika Serikat daripada lima senjata nuklir Korea Utara. Identifikasi ini bukan disebabkan oleh senjata nuklir (struktur material) melainkan oleh makna *(meaning*) yang diberikan pada struktur material (struktur ideasional). Penting untuk memahami bahwa hubungan sosial antara Amerika Serikat dengan Inggris, dan Amerika Serikat dengan Korea Utara dipersepsikan dengan cara yang sama oleh negara-negara ini, sehingga pemahaman bersama (atau inter-subjektivitas) ini membentuk dasar dari interaksi mereka. Contoh ini juga menunjukkan bahwa senjata nuklir sendiri tidak memiliki makna apa pun, kecuali jika kita memahami konteks sosial. Lebih lanjut menunjukkan bahwa konstruktivis melampaui realitas material dengan memasukkan efek ide dan keyakinan pada politik dunia. Ini juga mensyaratkan bahwa realitas selalu dalam konstruksi, yang membuka prospek untuk perubahan. Dengan kata lain, maknanya tidak tetap, tetapi dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada ide dan keyakinan yang dimiliki oleh para pelaku.

Konstruktivis berpendapat bahwa agensi (agent) dan struktur (structure) saling membentuk, yang menyiratkan bahwa struktur memengaruhi agensi dan agensi itu memengaruhi struktur. Agensi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak, sedangkan struktur mengacu pada sistem internasional yang terdiri dari elemen material dan ideasional. Kembali ke contoh Wendt di atas, ini berarti bahwa hubungan sosial permusuhan antara Amerika Serikat dan Korea Utara mewakili struktur inter-subjektif (yaitu, gagasan dan kepercayaan bersama antara kedua negara), sedangkan Amerika Serikat dan Korea Utara adalah aktor yang memiliki kapasitas (yaitu, agen) untuk mengubah atau memperkuat struktur yang ada, atau hubungan sosial yang bermusuhan itu. Perubahan atau penguatan ini pada akhirnya tergantung pada kepercayaan dan ide yang dimiliki oleh kedua negara. Jika keyakinan dan ide mereka berubah, hubungan sosial bisa berubah menjadi pertemanan. Sikap ini sangat berbeda dari sikap realis, yang berpendapat bahwa struktur anarkis sistem internasional menentukan perilaku negara. Konstruktivis, di sisi lain, berpendapat bahwa 'anarki adalah apa yang dibuat oleh negara' *(anarchy is what states make of it*) (Wendt 1992). Ini berarti bahwa anarki

dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda tergantung pada makna yang diberikan oleh aktor.

Isu sentral lain dari konstruktivisme adalah identitas dan minat. Konstruktivis menyatakan bahwa negara dapat memiliki banyak identitas yang dibangun secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain. Identitas adalah representasi pemahaman aktor tentang siapa diri mereka itu, yang pada gilirannya memberi sinyal minat mereka. Identifikasi identitas mereka (negara-negara) penting bagi peneliti konstruktivis, karena para pendukung konstruktifis berpendapat bahwa identitas akan menentukan kepentingan (interest) dan tindakan (actions) yang akan dilakukan oleh negara-negara. Sebagai contoh, identitas negara kecil menyiratkan serangkaian kepentingan yang berbeda dari yang tersirat oleh identitas negara besar. Negara kecil ini bisa dibilang lebih fokus pada kelangsungan hidupnya, sedangkan negara besar itu berkepentingan dengan mendominasi urusan politik, ekonomi dan militer global. Perlu dicatat, bahwa tindakan suatu negara harus selaras dengan identitasnya. Suatu negara, dengan demikian, tidak dapat bertindak bertentangan dengan identitasnya itu, karena itu akan mengundang pertanyaan terkait validitas identitas, termasuk preferensinya. Masalah ini mungkin menjelaskan mengapa Jerman, meskipun merupakan kekuatan besar dengan ekonomi global terkemuka, tidak menjadi kekuatan militer pada paruh kedua abad kedua puluh. Menyusul kekejaman rezim Nazi Adolf Hitler selama Perang Dunia Kedua, identitas politik Jerman bergeser dari salah satu negara militerisme ke pasifisme karena situasi sejarah yang unik.

Norma sosial juga penting bagi konstruktivisme. Ini umumnya didefinisikan sebagai ‘standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas yang diberikan’ (Katzenstein 1996, 5). Negara-negara yang menyesuaikan diri dengan identitas tertentu diharapkan untuk mematuhi norma-norma yang terkait dengan identitas itu. Gagasan ini datang dengan harapan bahwa beberapa jenis perilaku dan tindakan lebih dapat diterima daripada yang lain. Proses ini juga dikenal sebagai ‘*the logic of app-ropriateness*’, di mana aktor berperilaku dengan cara tertentu karena mereka percaya bahwa perilaku ini sesuai dengan identitas dirinya (March and Olsen 1998, 951-952). Untuk lebih memahami norma, kita dapat mengidentifikasi tiga jenis: norma regulatif, norma konstitutif, dan norma

preskriptif. Norma pengaturan mengatur dan membatasi perilaku; norma konstitutif menciptakan aktor, minat, atau kategori tindakan baru; dan norma preskriptif menentukan norma tertentu, artinya tidak ada norma buruk dari perspektif mereka yang mempromosikannya (atau yang melakukannya sesuai dengan identitas diri mereka-penerjemah) (Finnemore dan Sikkink 1998). Penting juga untuk dicatat bahwa norma-norma harus melalui 'siklus kehidupan norma-norma' (*a lifecycle of norm*) sebelum suatu norma itu dapat diterima secara luas. Norma hanya menjadi perilaku yang diharapkan ketika negara-negara yang relevan mengadopsi dan menginternalisasikannya dalam praktik mereka sendiri. Sebagai contoh, konstruktivis akan berpendapat bahwa sebagian besar negara telah berkumpul untuk mengembangkan kebijakan mitigasi perubahan iklim, karena hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan demi kelangsungan hidup umat manusia. Ini selama beberapa dekade diplomasi dan advokasi, telah menjadi perilaku yang sesuai yang sebagian besar warga negara harapkan untuk dipatuhi oleh pemimpin mereka. Kalangan Liberal, di sisi lain, mungkin menolak gagasan politik perubahan iklim demi kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan mengejar solusi ilmiah yang inovatif, sementara realis mungkin menolaknya karena kerusakan yang mungkin dilakukan kebijakan perubahan iklim untuk kepentingan jangka pendek nasional (pembayaran kompensasi finansial yang besar dari negara-negara industri, misalnya-penerjemah).

Meskipun semua ilmuan konstruktivis berbagi pandangan dan konsep seperti di atas, namun, ada banyak variasi dalam konstruktivisme. Ilmuan konstruktivis konvensional menitik beratkan pada pertanyaan jenis 'what', misalnya, apa yang menyebabkan aktor bertindak. Mereka percaya bahwa, adalah mungkin untuk menjelaskan dunia dalam istilah kausal dan tertarik untuk menemukan hubungan antara aktor, norma sosial, minat dan identitas. Kaum konstruktivis konvensional mengasumsikan, bahwa pelaku bertindak sesuai dengan identitas mereka, dan bahwa, secara teoritik mungkin untuk memprediksi kapan identitas ini menjadi terlihat atau tidak di masa yang akan datang. Ketika suatu identitas terlihat sedang mengalami perubahan, konstruktivis konvensional menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan segi aspek mana dari suatu identitas negara yang berubah. Sementara itu, konstruktivis kritis mengajukan pertanyaan jenis 'how',

misalnya, bagaimana para aktor percaya pada identitas tertentu. Berlawanan dengan konstruktivis konvensional, mereka tidak tertarik pada efek yang dimiliki identitas ini. Sebaliknya, konstruktivis kritis ingin merekonstruksi identitas, yaitu, mencari tahu apa bagian komponennya, yang mereka yakini diciptakan melalui komunikasi tertulis atau lisan di antara manusia dan bangsa-bangsa. Bahasa memainkan peran kunci bagi para kontraktifis kritis, karena ia membangun, dan memiliki kemampuan untuk mengubah realitas sosial. Sebagian besar kaum konstruktivis menempatkan diri di antara dua ujung spektrum yang ekstrem ini.

Konstruktivisme dan Kepentingan Nasional Bhutan

Bhutan adalah kerajaan Budha yang terletak di Himalaya. Kondisi negara ini dapat digambarkan dengan jumlah populasinya sekitar 745.000 jiwa, dengan luas wilayah 38.394 kilo meter persegi, kapasitas ekonomi lemah dan kekuatan militer yang sangat kecil. Situasi lingkungan politiknya, Bhutan berbagi perbatasan nasional dengan dua kekuatan utama di Asia; Cina di utara dan India di selatan. Lokasi Bhutan secara geografis sensitif karena negara ini berfungsi sebagai negara penyangga (*buffer state*) antara kekuatan-kekuatan utama tersebut, yang memandang satu sama lain sebagai saingan dan bukan teman. Selain itu, Cina mengklaim, setelah mencaplok Tibet pada 1950-an, bahwa wilayah Bhutan juga merupakan bagian dari daratannya. Sampai saat ini masih ada sengketa perbatasan yang sedang berlangsung antara Bhutan dengan Cina, dan ada laporan bahwa tentara Cina telah melakukan beberapa serangan ke Bhutan. Demikian juga, India memiliki andil dalam kebijakan luar negeri Bhutan. Pasal 2 Perjanjian Persahabatan India-Bhutan (1949) mencatat bahwa 'Bhutan setuju untuk dibimbing oleh India (*guided by advice of India)* sehubungan dengan hubungan eksternalnya'. Meskipun Pasal ini direvisi pada 2007, para komentator melaporkan bahwa India masih memiliki pengaruh terhadap Bhutan.

Dari perspektif realis, orang akan berpendapat bahwa Bhutan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena terhalang oleh lokasi geografisnya dan tidak dapat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dengan tetangga-tetangganya. Pelestarian kedaulatan

nasionalnya kemungkinan akan tergantung pada hasil dari kompetisi yang lebih besar antara Cina dan India. Pandangan konstruktivis, di sisi lain, akan berpendapat bahwa kondisi struktural ini tidak serta merta membatasi kemampuan Bhutan untuk mengejar kepentingan nasionalnya karena mereka bukan satu-satunya kondisi yang mempengaruhi negara perilaku. Makna yang diberikan pada kondisi struktural khas Bhutan ini sangat penting (karena dapat memberikan harapan baru bagi negara ini-penerjemah). Misalnya, ketika Tibet dianeksasi oleh Tiongkok, Bhutan merasa terancam. Akibatnya, ia menutup perbatasannya di utara dan berbelok ke India, tetangganya di selatan. Sejak saat itu dan seterusnya, Bhutan menganggap Cina sebagai ancaman potensial dan India sebagai teman. Sampai saat ini, Bhutan dan India menganggap satu sama lain sebagai teman sedangkan Bhutan tidak memiliki hubungan resmi dengan Cina. Hubungan sosial ini mewakili struktur ideasional yang berasal dari makna yang diberikan kepada struktur material. Penting untuk dicatat, bagaimanapun, bahwa hubungan sosial dapat berubah tergantung pada ide, kepercayaan dan tindakan Bhutan, India, dan Cina. Misalnya, kesepakatan tentang sengketa perbatasan antara Cina dan Bhutan dapat mengubah cara kedua negara saling memandang. Perubahan ini mungkin mengarah pada pembentukan hubungan resmi, yang sifatnya persahabatan dan bukan permusuhan. Seorang konstruktivis memposisikan diri dengan baik untuk mendeteksi dan memahami perubahan-perubahan ini karena berfokus pada hubungan sosial antar negara.

Bhutan juga telah mengembangkan identitas nasional yang berbeda, yang membedakannya dari tetangganya yang lebih besar. Identitas ini memproyeksikan Bhutan sebagai 'Kemaharajaan Buddha Mahayana independent, yang bertahan hidup terakhir di dunia' (Bhutan Vision 2020, 24-25). Penggunaan kata '*independent*' mengacu langsung pada kepentingan nasional Bhutan, yakni pelestarian kedaulatan nasionalnya. Identitas nasional Bhutan dibangun secara sosial melalui proses Bhutanisasi yang dimulai pada 1980-an, ketika raja keempat Bhutan memperkenalkan kebijakan 'Satu Bangsa, Satu Rakyat'. Kebijakan ini menuntut kepatuhan terhadap kode etik (norma) yang dikenal sebagai *Driglam Namzhag*. Norma ini dibangun di atas ketaatan yang ketat terhadap sumpah seperti kesetiaan kekeluargaan yang kuat, menghormati

orang tua, ketua-ketua adat, dan atasan, dan kerja sama timbal balik antara para penguasa dan yang diperintah. Ini juga memperkuat aturan untuk mengenakan pakaian nasional, yakni, *gho* untuk pria dan *kira* untuk wanita. Selain itu, Dzongkha dipilih sebagai bahasa nasional Bhutan. *Driglam Namzhag* dapat dianggap sebagai norma yang mengatur karena tujuan kebijakan adalah untuk mengarahkan dan membatasi perilaku. Sebagai contoh, meskipun identitas nasional Bhutan menunjukkan bahwa Bhutan terdiri dari satu kelompok homogen, Bhutan sebenarnya adalah negara multi-etnis, multi-agama dan multi-bahasa. Ada tiga kelompok etnis utama; Ngalong, Sharchhops dan Lhotshampas, yang merupakan keturunan Nepal. Dari jumlah tersebut, suku Ngalong dan Sharchhops adalah penganut Buddha, sedangkan Lhotshampas sebagian besar adalah umat Hindu yang berbicara bahasa Nepal. Kebijakan tersebut memiliki efek yang parah bagi suku Lhotshampas karena bahasa Nepal tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah dan orang-orang yang tidak dapat membuktikan tempat tinggal di Bhutan sebelum tahun 1958 diklasifikasikan sebagai bukan warga negara. Akibatnya, ribuan Lhotshampas diusir dari Bhutan pada 1990-an. Dengan demikian, norma digunakan oleh otoritas Bhutan untuk menciptakan kesatuan budaya dan untuk merangsang warga negara untuk merefleksikan kekhasan budaya mereka, yang sangat penting dalam menciptakan identitas nasional.

Seperti disebutkan sebelumnya dalam bab ini, suatu norma perlu melalui siklus hidup, sebelum ia ditetapkan berlakunya secara mengikat. Dalam kasus Bhutan, kita dapat menyaksikan fase pertama, munculnya norma, dalam penciptaan *Driglam Namzhag* oleh otoritas Bhutan (formalisasi aturan-aturan budaya oleh pemerintah-penerjemah). Fase kedua, penerimaan norma, mengharuskan warga negara Bhutan untuk menerima *Driglam Namzhag*, termasuk pakaian nasional dan *Dzongkha* sebagai bahasa nasional (penolakan pada penerapan suatu norma yang telah berubah menjadi 'hukum' berdampak serius bagi yang menolaknya-penerjemah). Setelah penerimaan ini terjadi, internalisasi norma terjadi. Selesainya proses ini mensyaratkan bahwa perilaku warga Bhutan dibatasi oleh norma-norma dan praktik-praktik ini. Pembatasan ini juga menunjukkan sifat konstitutif dari *Driglam Namzhag*, yang menciptakan aktor baru, yaitu warga negara Bhutan yang bertindak dan berperilaku

sesuai dengan aturan tertentu (aturan hukum yang lahir dari 'norma' tradisional, yang diformalkan-penerjemah). Kita dapat melihat, misalnya, bahwa norma-norma dan praktik-praktik ini diatur hingga saat ini. Misalnya, warga negara Bhutan diwajibkan mengenakan pakaian nasional selama acara nasional, dan ketika mereka bersekolah atau bekerja. Peraturan ini, seperti dijelaskan sebelumnya, penting, karena perilaku negara dan warganya harus mematuhi norma-norma yang terkait dengan identitas nasional Bhutan. Peraturan tersebut juga menandakan bahwa norma-norma ini dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh otoritas Bhutan, yang menggaris-bawahi sifat norma preskriptif. Anggota elit Bhutan juga telah menciptakan identitas kedua, yang memproyeksikan Bhutan sebagai pemimpin dalam memajukan paradigma pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Identitas ini didasarkan pada filosofi pembangunan Bhutan, *Gross National Happiness* (GNH), yang mengkritik pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB*/Gross National Bruto*) yang terkenal karena hanya berfokus pada segi ekonomi saja. Sebaliknya, GNH mempromosikan keseimbangan antar materi kesejahteraan dan kebutuhan spiritual pikiran. Diimplementasikan dan tertanam dalam sistem politik dan pendidikan Bhutan.

Anggota elit Bhutan sebagian besar menggunakan PBB sebagai platform dan saluran untuk mempromosikan ide internasionalnya. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 65/309, yang menyatakan bahwa pengejaran kebahagiaan adalah tujuan mendasar, dan bahwa indikator produk domestik bruto tidak dirancang untuk, dan tidak secara memadai mencerminkan, kesejahteraan manusia. Memproyeksikan negara mereka sebagai Buddha Mahayana independen yang bertahan hidup terakhir di dunia, dan sebagai pemimpin dalam memajukan paradigma pembangunan yang holistik dan berkelanjutan memungkinkan otoritas Bhutan memberi sinyal status negara mereka sebagai negara berdaulat yang independen. Hal ini juga memungkinkan Bhutan untuk meningkatkan visibilitas internasionalnya, yang menguntungkan ketika ketegangan politik meningkat dengan, atau di antara negara-negara tetangganya.

Kesimpulan

Konstruktivisme secara tegas menyatakan bahwa tindakan, interaksi, dan persepsi membentuk realitas. Karenanya, pikiran dan tindakan itu secara nyata membangun hubungan internasional. Namun, ide yang tampaknya sederhana ini, ketika diterapkan secara teoritis, memiliki implikasi yang signifikan untuk bagaimana kita dapat memahami dunia. Disiplin Hubungan Internasional mendapat manfaat dari konstruktivisme karena membahas masalah dan konsep yang diabaikan oleh teori arus utama, terutama realisme. Dengan melakukan itu, konstruktivis menawarkan penjelasan dan wawasan alternatif untuk peristiwa yang terjadi di dunia social yang lebih luas (tidak hanya bidang hubungan internasional-penerjemah). Mereka menunjukkan, misalnya, bahwa bukan hanya distribusi kekuatan material, kekayaan, dan kondisi geografis yang dapat menjelaskan perilaku negara, tetapi juga gagasan, identitas, dan norma. Lebih jauh lagi, fokus mereka pada faktor-faktor ideasional menunjukkan bahwa realitas tidak tetap, tetapi dapat berubah.

5
MARXISME
(MARXISM)

Maïa Pal

Marxisme adalah pendekatan kritis yang ingin selalu mempertanyakan pendekatan yang digerakkan oleh kebijakan arus utama (realisme dan liberalisme-penerjemah) dalam HI, namun di sisi lain, marxisme sekaligus sebagai pendekatan klasik melalui tradisi filosofis dan sosiologis dari nama teorinya, filsuf Karl Marx (1818–1883). Faktanya, Marxisme adalah satu-satunya perspektif teoretis dalam HI yang dinamai berdasarkan nama seseorang. Dari sekian banyak pemikir hebat yang ada, Marx mungkin tidak secara otomatis memenuhi syarat sebagai yang paling 'internasionalis'. Faktanya, sebagian besar karya Marx (dan kadang-kadang rekan penulisnya, Friedrich Engels) tidak berkaitan dengan pembentukan negara ataunpun interaksi antar negara bangsa. Apa yang menghubungkan minat mereka dengan HI adalah revolusi industri, karena peristiwa ini pada akhirnya adalah sebagai obyek sentral dari apa yang disaksikan dan dipahami oleh Marx. Dia, bersama Engels, mengembangkan pendekatan revolusioner dan menguraikan serangkaian konsep yang melampaui perbedaan nasional sambil memberikan saran praktis tentang bagaimana membangun gerakan transnasional manusia sedunia (manifesto Comunisme dalam Comintern-komunisme internasional-penerjemah). Para pekerja dari pabrik-pabrik di seluruh dunia, yang dia sebut sebagai kaum proletar, akan mengorganisir diri mereka menjadi sebuah gerakan revolusioner politik untuk melawan efek kapitalisme yang eksploitatif, dan tidak setara. Kondisi ini dipercepat dan diperluas oleh revolusi industri. Visi tentang hubungan potensial antara sebagian besar umat manusia sebagai proletariat global adalah letak fokus, dan bagaimana cara, Marxisme memasuki HI dari sudut pandang berbeda ke teori-teori lain.

Dasar-Dasar Marxisme

Semua konsep Marxis dihubungkan oleh tujuan bersama untuk berkontribusi pada apa yang mereka anggap sebagai kebaikan umat manusia dan lingkungannya. Meminjam kata-kata Adrienne Rich (2002, 65), bahwa;

> *Theory is the seeing of patterns, showing the forest as well as the trees, theory can be a dew that rises from the earth and collects in the rain cloud and returns to earth over and over. But if it doesn't smell of the earth, it isn't good for the earth.*

Dengan kata lain, kaum Marxis harus mengetahui secara mendalam/detail mengenai informasi terkait dengan aspek-aspek dasar dari suatu masyarakat dan lingkungan mereka (digambarkan dengan 'hutan' dan 'pohon-pohonnya'-penerjemah). Ini juga berarti bahwa, jika revolusi industri (dan kapitalisme pada umumnya) berbau pembakaran batu bara, pabrik-pabrik yang penuh sesak, dan asap bensin, maka, aroma revolusi berikutnya seharusnya tidak terlalu mematikan, tidak terlalu mencemari dan lebih melindungi bumi. Untuk memahami Marxisme, seseorang perlu memahami elemen dasar dari inovasi Marx mengenai asal-usul dan fungsi kapitalisme. Selain itu, kita harus memahami bahwa asal-usul dan fungsi tersebut dapat terjadi secara bersamaan di tingkat domestik dan internasional. Kontribusi paling penting yang ditawarkan Marxisme kepada studi HI adalah, bahwa mode produksi kapitalis dan sistem negara berdaulat modern (yang muncul kira-kira pada saat yang sama, yakni abad pertengahan), bukanlah peristiwa yang alami atau sesuatu yang tidak dapat dihindari (artinya bisa dihindari dan dapat diubah melalui revolusi-penterjamah). Mereka adalah produk yang saling tergantung dari kondisi historis dan hubungan sosial tertentu. Pekerjaan kaum Marxis adalah memetakan dan menelusuri kembali kondisi-kondisi dan hubungan-hubungan sosial itu, dan mencari tahu bagaimana model produksi kaum kapitalist (*the capitalist mode of productions*), dan sistem negara berdaulat itu muncul dalam sistem masyarakat kapitalis ini. Apakah sistem produksi kapitalis dan sistem negara berdaulat yang muncul itu sebagai dua sisi mata uang dari koin yang sama, sebagai koin yang berbeda, atau mungkin sebagai mata uang yang berbeda? Perdebatan tentang tingkat saling

ketergantungan antara dua fenomena historis utama ini masih terus berlangsung, tetapi pencapaian lain dari Marxisme dalam studi HI adalah, menghentikan kita dari memikirkan keduanya secara terpisah. Marxisme juga menyarankan bahwa konsep-konsep ilmiah tidak hanya dimaksudkan untuk membantu kita memahami dunia, tetapi konsep itu juga harus membantu kita mengubah dunia. Untuk menjelaskan Marxisme dalam HI, kita perlu mulai dengan gagasan teori utama Marx tentang perkembangan kapitalisme, yakni materialisme historis (*historical materialism*). Paling sederhana, materialisme historis menegaskan bahwa manusia, termasuk hubungan mereka satu sama lain dan lingkungan mereka, ditentukan oleh kondisi material di mana mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi. Karena itu, Marxisme menegaskan bahwa kondisi material dapat diubah oleh tindakan manusia, yang tergantung pada fenomena fisik dan juga perilaku manusia. Dengan kata lain, ini kondisi material bersifat historis, mereka berubah seiring ruang dan waktu. Tetapi mereka juga selalu bergantung pada, dan sering terhambat oleh, proses dan ide yang mendahuluinya, sehingga masa lalu itu membebani masa kini. Seorang Marxis akan menekankan bahwa HI bukan hanya tentang kebijakan luar negeri negara, atau perilaku politisi, tetapi lebih banyak tentang kelangsungan hidup (atau lebih luasnya, kehidupan pada umunya), reproduksi, teknologi, dan tenaga kerja. Jika pandangan Marxis ini benar, maka pemisahan antara politik dan ekonomi, atau publik dan swasta, menjadi 'bermasalah' karena kategori-kategori itu menyembunyikan cara-cara di mana negara dan kebijakan luar negeri ditentukan oleh hubungan sosial dan struktur ekonomi global, seperti perusahaan multinasional atau lembaga keuangan internasional (yang saat ini didominasi oleh perspektif liberalis dalam hubungan antar bangsa-penerjemah). Dengan kata lain, Marxisme secara mendasar mempertanyakan makna tentang apa itu 'internasional' (*what 'international' is*) dalam studi HI.

Apakah itu anarki bagi kaum realis atau masyarakat internasional untuk English School, kaum Marxis berpendapat bahwa konsep-konsep semacam itu bermasalah karena membuat kita percaya pada ilusi atau mitos tentang dunia. Sebagai contoh, konsep anarki menciptakan fatamorgana bahwa negara adalah agen otonom yang perilaku rasionalnya dapat diprediksi. Namun, ini mengabaikan fakta tentang ketahanan (*endurance*)

ketidaksetaraan regional dan hubungan struktural dan historis antara negara, kekerasan dan aktor-aktor utama ekonomi politik global. Aplikasi pertama dari ide-ide Marxis untuk menjelaskan proses internasional dilakukan oleh kalangan ilmuan komunis dan revolusioner dari awal abad ke-20 seperti Rosa Luxemburg, Rudolf Hilferding dan Vladimir Lenin. Para penulis ini mengembangkan pemikiran tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai teori klasik imperialisme untuk memahami bagaimana kapitalisme berkembang dan beradaptasi dengan dunia persaingan antar-imperial yang mengarah ke Perang Dunia Pertama, dan disintegrasi lambat imperium Eropa. Pada 1974, Immanuel Wallerstein mengembangkan 'teori sistem dunia' *(world system theory*) untuk menggabungkan perubahan di akhir abad kedua puluh dan melawan cara pendekatan tradisional yang cenderung memahami bahwa imperialisme sebagai proses yang dipimpin/diciptakan oleh negara. Pendekatan Wallerstein menggunakan unit analisis yang berbeda dan mengambil pandangan jangka panjang yang lebih panjang tentang sejarah negara dan interaksinya. Wallerstein membedakan tiga kelompok negara atau wilayah, yakni inti *(the core)*, semi-pinggiran *(the semi-periphery*) dan pinggiran (*the periphery)*. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana negara-negara telah berkembang sejak abad keenam belas dalam hubungan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan ketergantungan antara kelompok negara yang berbeda tergantung pada jenis ekonomi dan industri khusus mereka. Oleh karena itu, hubungan ketergantungan dan kelompok ini mengharuskan peneliti memahami dunia melalui unit yang lebih luas daripada negara. Unit-unit ini, atau sistem dunia, membantu menjelaskan dilema mengapa semua negara menjadi kapitalis, meskipun dengan cara yang sangat khas (uniq), tidak setara dan berbeda. Kelompok inti negara (diisi oleh kelompok negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara) mengacu pada pemerintah demokratis yang memberikan upah tinggi dan mendorong investasi tingkat tinggi dan layanan kesejahteraan. Negara-negara semi-pinggiran (misalnya dari Amerika Latin) bercirikan pemerintah otoriter yang memberikan upah rendah dan layanan kesejahteraan yang buruk bagi warganya. Negara-negara pinggiran (umumnya berasal dari Sub-Sahara, Afrika Tengah, Asia Selatan) merujuk pada pemerintah non-demokratis di mana pekerja sebagian besar dapat

menghargapkan upah di bawah tingkat subsisten dan di mana tidak ada layanan kesejahteraan. Negara-negara Inti *(the core*) mampu menghasilkan barang konsumsi laba tinggi untuk dirinya sendiri dan juga untuk pasar semi-pinggiran dan pinggiran karena pinggiran menyediakan tenaga kerja murah dan bahan baku ke inti dan semi-pinggiran yang diperlukan untuk membuat barang konsumsi laba tinggi ini. Dengan kata lain, meskipun secara historis beberapa negara telah mengubah grup mereka (misalnya, dari pinggiran menjadi semi-pinggiran), kapitalisme selalu membutuhkan wilayah pinggiran yang menyediakan sarana bagi inti untuk mempertahankan tingkat konsumsi dan keamanan yang tinggi. Dengan demikian, hubungan ketergantungan dan ketimpangan sangat penting bagi kapitalisme dan tidak dapat dikurangi secara signifikan (karena sengaja dipertahankan untuk berjalannya sistem kapitalisme dunia-penerjemah).

Gagasan teoritis berpengaruh lainnya dari teori imperialisme klasik adalah keterpaduan konsep Marxisme neo-Gramscian. Konsep hegemoni Antonio Gramsci (1891–1937) dianggap oleh beberapa orang lebih bermanfaat saat ini daripada konsep imperialisme. Ini menekankan dua hal. Pertama, dominasi beberapa kelompok individu (atau kelompok negara) atas kelompok lain yang tergantung pada faktor-faktor ideologis. Dengan kata lain, kapitalisme dialami dengan berbagai cara secara historis dan lintas dunia karena orang memahaminya, dan, karena itu setuju atau menolaknya, dengan cara yang berbeda. Kedua, hubungan ketergantungan dan jenis kelompok (atau unit) yang digunakan untuk memahami hubungan-hubungan itu lebih bervariasi dan cair daripada teori sistem dunia. Karena itu, kapitalisme mendominasi hubungan sosial kita karena ia direproduksi melalui cara-cara koersif (paksaan) dan konsensual (penerimaan damai). Konsep ini digunakan untuk menjelaskan mengapa pekerja berpendidikan dan terorganisir di Eropa Barat tidak ‘menyatukan kekuatan’ untuk ‘menghilangan rantai yang mengikat mereka’ (pada kapitalisme-penerjemah), seperti yang Marx dan Engels telah meramalkan. Konsep hegemoni *neo-Gramscian* berfokus pada cara-cara konsensual di mana kelas transnasional, organisasi dan hukum internasional (dengan wacana-wacana dominan secara internasional-penerjemah) mereproduksi kapitalisme dan ketidaksetaraannya. Kelas kapitalis transnasional, yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan besar, membentuk ‘masyarakat sipil

global' (*global civil society*) yang me-universalkan cita-cita liberal sambil meminimalisir tindakan memaksakan dirinya melalui proses imperialisme dan kolonisasi klasik yang lebih memaksa, seperti yang terjadi di abad sebelumnya. Misalnya, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan dikenal sebagai Empat Macan Asia karena industrialisasi mereka yang cepat dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun 1960-an hingga 1990-an. Di negara-negara ini, elit penguasa yang kuat menyetujui jenis ekonomi dan sistem keuangan tertentu, sering disebut model 'neoliberal'. Bahkan, keempat negara tersebut sulit ditandingi keberhasilanya ketika negara-negara lain berusaha meniru 'kesuksesan' ini. Namun, ketidaksetaraan yang luas dan pelanggaran hak asasi manusia meningkat di banyak masyarakat dunia, meskipun neoliberalisme sudah mendominasi secara global. Ini menunjukkan bahwa, walaupun hegemoni neoliberal jauh dari menghasilkan kesuksesan yang diproyeksikan semula, kesuksesan yang dirasakan ini tetap menjadi salah satu pendorong utama kapitalisme karena meyakinkan orang untuk menyetujui kapitalisme tanpa ancaman kekuatan. Kecenderungan Marxisme yang lebih baru dalam HI, sosiologi historis, kembali ke beberapa isu HI yang lebih klasik (tentang perjuangan antar kelas dan materialisme historis-penerjemah). Secara khusus, ia melihat perkembangan sistem negara modern dalam kaitannya dengan transisi ke kapitalisme, dan ke berbagai momen ekspansi kolonial dan imperialisme. Itu terlihat lebih nyata pada apa yang terjadi di Eropa, tetapi juga di luar Eropa sudah mulai tampak.

Lebih khusus, para teoritisi Marxis menentang kelahiran sistem negara berdaulat sebagai produk dari atau mengikuti perjanjian Westphalia pada tahun 1648, namun, sebaliknya, pembentukan sistem negara lebih banyak berfokus pada proses sosial-ekonomi pada abad ke-19 untuk menentukan perubahan kunci dalam hubungan internasional modern. Ini menggaris-bawahi bagaimana para sarjana mengambil sejarah di luar Eropa untuk mengatasi asumsi Eurosentris yang ditemukan dalam Marxisme dan dalam disiplin ilmu HI yang lebih luas. Singkatnya, Marxisme dicirikan oleh saling ketergantungan. Istilah Marxis untuk ini adalah dialektika, yang menopang semua konsep sebelumnya yang dieksplorasi berhubungan satu sama lain. Bagi Marxisme, semua konsep mencerminkan hubungan sosial, tetapi kategori mengambil kehidupan

mereka sendiri dan sering menyembunyikan hubungan sosial itu. Sangat mudah untuk membuat rumit atau menyalahgunakan konsep ini. Namun, ini adalah titik awal yang krusial untuk memahami dunia secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian individualnya, karena 'dialektika adalah cara berpikir yang memusatkan perhatian pada serangkaian perubahan secara penuh, dan interaksi yang terjadi di dunia' (Ollman 2003, 12).

Marxisme, Migran, dan Perbatasan

Pendekatan teoritis a la Marxis untuk migrasi menunjukkan pentingnya materialisme historis sebagai pendekatan terhadap studi HI. Pertama, kaum Marxis kritis terhadap aspek perbatasan yang tetap karena mereka menciptakan hubungan ketergantungan dan ketidaksetaraan di antara orang-orang dengan membatasi dan mengendalikan akses mereka ke sumber daya dan tenaga kerja. Beberapa ilmuan Marxis berpendapat bahwa kita membutuhkan konsep kewarganegaraan global untuk melawan bagaimana negara mengecualikan non-warga negara dari manfaat dan akses ke tenaga kerja dan sumber daya. Oleh karena itu, dari sudut pandang Marxis, orang-orang dari semua bangsa dipersatukan dalam penindasan mereka oleh kapitalisme dan sistem negara modern yang memisahkan mereka, dan membuat mereka bertentangan satu sama lain, sehingga orang harus dibebaskan (atau disetarakan) dari status ini. Akibatnya, kaum Marxis melihat perbatasan sebagai perlengkapan yang secara tidak adil menentukan hubungan ketergantungan dan ketidaksetaraan, atau dengan kata lain, siapa yang berhak atas apa. Kedua, kita perlu memikirkan siapa yang memutuskan siapa yang menjadi migran, dan apa yang termasuk dalam kategori itu. Sebagai contoh, menjadi seorang migran yang melarikan diri dari suatu negara karena penganiayaan adalah syarat yang diperlukan menurut hukum internasional untuk mengajukan suaka dan menjadi pengungsi di negara tuan rumah atau negara tujuan *(a host state*). Sebagian besar negara telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan telah menyetujui definisi ini. Kenyataannya, menjadi tipe migran khusus ini sangat tergantung pada perjanjian khusus dan keinginan masing-masing negara untuk menyetujuinya (artinya, tidak memberlakukan mutlak

ketentuan dalam Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951 di atas-penerjemah). Dengan kata lain, kategori migran atau pengungsi yang dianiaya (di-persekusi di tanah airnya-penerjemah) adalah relatif, atau tidak nyata pemaknaan dan pelaksaannya oleh negara-negara sebagaimana jelasnya warna mata Anda yang nyata dan tidak dapat ditentukan secara berbeda oleh orang lain.

Orang-orang yang melarikan diri dari kemiskinan terkait dengan konflik, perubahan iklim, atau kurangnya pekerjaan sering ditunjuk sebagai migran ekonomi. Status mereka tidak bergantung pada definisi sejelas pengungsi, dan juga tidak mengarah pada hak dan peluang yang sama. Banyak orang pindah ke Eropa karena menawarkan lebih banyak peluang ekonomi dan lingkungan politik yang relatif lebih aman. Namun, keputusan di tingkat Eropa dan negara bagian semakin menguatkan batas-politik perbatasan (atau penutupan), karena beberapa merasa bahwa migrasi ekonomi bukan alasan yang cukup untuk mengakui seseorang secara bebas. Sebaliknya, menjadi migran ekonomi yang memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh negara tuan rumah dianggap sah. Dengan kata lain, 'realitas' menjadi seorang migran ekonomi 'baik' (*a good economic migrant*), yang diizinkan untuk pindah ke berbagai negara, tergantung pada faktor-faktor yang seringkali tidak tergantung pada orang yang bermigrasi (tetapi justru tergantung pada kebutuhan dari negara penerima migrant-penerjemah). Marxisme memberi kita sudut orisinal yang membuat kita mempertimbangkan kembali migrasi, dan menunjukkan mengapa penutupan perbatasan adalah kebijakan buta-sosiologis dan politis dalam kaitannya dengan sistem yang saat ini berlaku. Akibatnya, kapitalisme memulai proses simultan pembatasan wilayah dan perubahan sosial melalui hubungan kerja-upahan. Mainstream HI memisahkan proses-proses tersebut secara historis dan teoritis dengan menjadikan pemisahan antara domestik dan internasional sebagai hal yang tetap dan nyata. Marxisme berpendapat bahwa ini mengarah ke mengaburkan hubungan sosial dan proses yang menghubungkan gerakan orang dan penciptaan perbatasan. Dengan kata lain, memisahkan level domestik dan internasional mengarah pada pemikiran bahwa menjadi seorang migran adalah cadangan orang-orang tertentu dan bukan suatu kondisi yang semua orang dapat mengalaminya (dengan suatu alasan tertentu yang

memaksanya-penerjemah). Yang terpenting adalah, sikap berfikir dan bertindak seperti itu akan membenarkan memperlakukan para migran sebagai orang-orang kelas dua, dan karena itu mengarah pada ketidaksetaraan ras dan sosial yang lebih jauh.

Pergerakan orang-orang terjadi jauh sebelum kapitalisme, tetapi kapitalisme membentuk gerakan-gerakan itu bersamaan dengan penciptaan perbatasan dan produktivitas ekonomi. Proses pengurungan di awal kapitalisme mengarah ke orang-orang menjauh dari tanah tempat mereka berburu, mengumpulkan, dan menanam makanan. Prosesnya melibatkan pemilik tanah yang menutup atau memagari tanah umum untuk menggembalakan domba dan mengembangkan metode pertanian yang lebih intensif. Ini secara bertahap mengubah hubungan sosial, cara di mana orang bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Tanpa tanah untuk bertahan hidup, orang harus mulai menjual kemampuan mereka untuk bekerja, apa yang disebut kaum Marxis sebagai buruh (*labour*), dan seringkali harus bekerja jauh dari rumah mereka. Meskipun orang pindah karena berbagai alasan, satu yang sangat sering adalah perlunya bergerak untuk menjual diri sebagai buruh/tenaga-kerja itu. Ini dapat melibatkan pemindahan dari pedesaan ke pusat kota di dalam negara bagian atau dari satu negara bagian ke negara lain. Dengan kata lain, itu adalah keharusan untuk dapat bekerja sehingga apakah seseorang melintasi perbatasan internasional atau tidak, akan dilakukan juga. Dalam sistem kapitalis, sulit untuk bertahan hidup tanpa bekerja dan bekerja berarti bergerak atau bersiap untuk bergerak. Dengan kata lain, kita semua secara teori adalah migran. Mengakui hal ini berarti bahwa menutup perbatasan, yang melibatkan penetapan status masyarakat sebagai ‘migran ekonomi baik’ atau ‘buruk’, didasarkan pada dua ilusi yang diungkapkan oleh Marxisme, dan karenanya harus dipertanyakan dan dipertimbangkan kembali. Yang pertama adalah perbedaan antara domestik dan internasional. Kapitalisme adalah sistem internasional yang berkembang dan memungkinkan perbatasan domestik dilampaui hanya apabila memiliki alasan yang masuk akal secara ekonomi. Ilusi kedua adalah perbedaan kelas atau kategori setiap orang menjadi nyata dan tetap. Kapitalisme memungkinkan elit untuk melampaui perbatasan secara ekonomi, tetapi juga memungkinkan potensi untuk menutupnya secara politis. Dengan demikian,

memungkinkan orang tertentu (yang paling kaya) untuk memutuskan bahwa orang lain (yang kurang kaya, apalagi yang miskin) tidak dapat mencoba dan mengubah situasi hidup mereka.

Kesimpulan

Peran teori dan pengetahuan maxisme secara umum adalah mengungkapkan apa yang nyata dan apa yang merupakan ilusi. Materialisme historis, teori yang menggerakkan Marxisme, mencoba menerapkan saran ini dengan mendasarkan pemahaman hubungan internasional dengan cara-cara orang mengubah tanah, menghasilkan barang-barang di atasnya, dan pada akhirnya bergantung pada sumber dayanya untuk membentuk lembaga-lembaga politik seperti organisasi negara dan internasional. Marxisme telah membuat beberapa terobosan dalam pengembangan disiplin HI dengan secara intrinsik peduli dengan cara-cara di mana orang, dan kelompok, berinteraksi dan menghasilkan hal-hal lintas batas, serta bagaimana mereka mengatur diri mereka sendiri melalui lembaga-lembaga untuk mengelola dan melawan produksi dan distribusi tentang segala hal di seluruh dunia. Lebih khusus lagi, Marxisme berpendapat bahwa pembangunan perbatasan modern ditentukan oleh, atau dihubungkan dengan berbagai cara untuk, pengembangan kapitalisme. Karena itu, pandangan Marxisme ini membuat kita mempertanyakan karakter alami, atau yang dianggap sebagai sistem yang tak terhindarkan yang cenderung atau bahkan secara latah kita anggap sebagai sistem ekonomi dan politik kita. Dengan kata lain, jika suatu sistem tidak nyata dan tetap, seperti yang kita pikirkan pertama kali, karena ia memiliki sejarah khusus dan relatif singkat dalam perjalanan kemanusiaan yang lebih luas (misalnya karena dibawa oleh penjajahan-penerjemah), maka akan lebih mudah bagi kita untuk membayangkan berbagai cara yang ditantangkan terhadapnya, dan bagaimana hal itu dapat ditransformasikan ke sistem yang, harap Marxis, akan lebih baik dalam mendistribusikan kekayaan dunia.

Marx sendiri menulis bahwa filsafat seringkali terlalu peduli dengan menafsirkan dunia, ketika titik sebenarnya adalah mengubahnya. Marxisme sebagai teori HI tentu menjawab panggilan itu, dan, terlepas dari variasi dalam rumpun teori yang mana, untuk menjadi seorang Marxis selalu berarti menantang (mengkritisi) ide seseorang tentang dunia.

6

TEORI KRITIS
(CRITICAL THEORY)

Marcos Farias Ferreira

Teori kritis (*Critical Theory*) menggabungkan berbagai pendekatan yang semuanya berfokus pada gagasan membebaskan orang dari negara modern dan sistem ekonomi, sebuah konsep yang dikenal oleh para ahli teori kritis sebagai emansipasi. Gagasan ini berasal dari karya penulis seperti Immanuel Kant dan Karl Marx yang, pada abad ke-18 dan 19, mengajukan gagasan-gagasan revolusioner yang berbeda tentang bagaimana dunia dapat disusun kembali dan diubah. Baik Kant maupun Marx memiliki keterikatan kuat dengan tema Pencerahan universalisme - pandangan bahwa ada prinsip-prinsip sosial dan politik yang jelas bagi semua orang, di mana pun. Di era modern, kedua penulis menjadi tokoh mendasar bagi ahli teori yang berusaha untuk menggantikan sistem negara modern dengan mempromosikan pengaturan politik global yang lebih adil seperti federasi negara bebas yang hidup dalam perdamaian abadi (Kant) atau komunisme sebagai sistem sosial dan ekonomi global untuk menggantikan tatanan kapitalis yang tidak setara (Marx). Teori kritis berangkat untuk mengkritik praktik dan institusi sosial yang represif di dunia saat ini dan memajukan emansipasi dengan mendukung gagasan dan praktik yang memenuhi prinsip keadilan universal. Kritik semacam ini memiliki dimensi transformatif dalam arti bahwa ia bertujuan mengubah masyarakat nasional, internasional hubungan dan masyarakat global yang muncul, mulai dari alternative ide dan praktik yang melekat pada latar belakang proses sejarah.

Dasar-Dasar Teori Kritis

Meskipun teori kritis, dalam beberapa hal, mengulang dan menggantikan tema Kantian dan Marxian, kedua penulis tetap berada di dasar fondasi rumpun teori ini. Melalui telaah filosofi-kritis, Kant membahas kondisi tertentu yang kita klaim tentang dunia, dan menegaskan bahwa kondisi yang semakin saling berhubungan (*inter-connectedness*) saat ini, adalah waktu yang tepat untuk membuka pintu bagi komunitas politik yang lebih kosmopolitan (yaitu supranasional). Cara penelaahan kritis Marx didasarkan pada keinginan untuk memahami perkembangan sosial dalam masyarakat industri, termasuk kontradiksi yang melekat dalam kapitalisme yang akan mengarah pada keruntuhannya, penindasan, eksploitasi tenaga kerja, dan keinginan Marx untuk membuat pengaturan sistem hubungan sosial global yang lebih adil. Dengan cara ini, tulisan-tulisan Kant dan Marx bertemu untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tingkat hubungan internasional sangat penting untuk pencapaian emansipasi manusia dan kebebasan global. Akibatnya, penelusuran kemungkinan yang masuk akal/nyata (*tangible*), atau bahkan perubahan secara politik dan sosial (yang berasal dari praktik dan lembaga yang ada) menjadi ciri utama untaian pemikiran kritis yang memasuki HI melalui penulis yang mengerjakan ulang tema-tema Marxis dan Kantian selama abad kedua puluh.

Tentu saja, baik Marx maupun Kant bukanlah ahli teori HI dalam pengertian kontemporer. Keduanya adalah filsuf. Karena itu kita harus mengidentifikasi dua sumber yang lebih baru untuk melacak bagaimana teori kritis dikembangkan dalam disiplin HI modern. Yang pertama, adalah Antonio Gramsci dan pengaruhnya terhadap Robert Cox, dan paradigma produksi (pola ekonomi yang terlibat dalam produksi barang dan hubungan sosial dan politik yang disyaratkan). Yang kedua, adalah Frankfurt School, Jürgen Habermas khususnya, dan pengaruh Habermas atas Andrew Linklater dan paradigma komunikasi (pola rasionalitas yang terlibat dalam komunikasi manusia dan prinsip-prinsip etika yang mereka emban). Ada dua tema yang menyatukan pendekatan ini yang menunjukkan keterikatan dengan rumpun ahli teori kritis. Pertama, keduanya menggunakan emansipasi sebagai prinsip untuk mengkritik, atau menilai, masyarakat dan

tatanan politik global. Kedua, mereka berdua mendeteksi potensi emansipasi yang berkembang dalam proses historis, tetapi menganggap bahwa itu mungkin tidak dapat dihindari. Paradigma redistribusi dan pengakuan berhubungan dengan apa yang oleh Nancy Fraser (1995) disebut sebagai dua poros utama perjuangan politik kontemporer *(the two axes of contemporary political struggle*). Perjuangan redistribusi merujuk langsung ke tema-tema Marxis tentang perjuangan kelas dan emansipasi sosial, perjuangan pengakuan berkaitan dengan aspirasi kebebasan dan keadilan yang terkait dengan gender, seksualitas, ras dan pengakuan nasional. Sementara itu, Cox berfokus pada perjuangan redistribusi kontemporer, Linklater beralih ke pertanyaan identitas dan komunitas sebagai lebih penting daripada pencarian emansipasi hubungan ekonomi dewasa ini. (Makna 'emansipasi' dalam pemikiran Kant ini bersifat tema umum untuk menghilangkan ketimpangan atau ketidak setaraan hubungan sosial, politik dan ekonomi dunia-penerjemah).

Cox berangkat untuk menantang asumsi realisme, yaitu studi tentang hubungan antar negara yang ter-isolasi dari kekuatan sosial lainnya. Dia menekankan perlunya melihat politik global sebagai konstruksi kolektif yang berkembang melalui interaksi yang kompleks antara kekuatan negara, sub-negara dan trans-negara dalam bidang ekonomi, budaya dan ideologis. Tujuannya adalah untuk memperhatikan seluruh bidang yang memerlukan perubahan dalam politik global kontemporer. Sebagai contoh, ketika realisme hanya berfokus pada kekuatan besar dan stabilitas strategis, itu akhirnya memperkuat serangkaian hubungan global yang tidak adil yang berasal dari kekuasaan dan paksaan. Untuk alasan ini, Cox menantang gagasan bahwa 'kebenaran' (*truth*) adalah mutlak, seperti dalam pernyataan realisme bahwa ada logika abadi untuk hubungan internasional, atau pernyataan liberalisme bahwa pengejaran kapitalisme global adalah positif. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa, 'teori selalu untuk seseorang, dan untuk beberapa tujuan' (Cox 1981, 128). Dengan menggunakan alur pikiran Gramsci, Cox muncul dengan gambaran sistem politik dunia yang dihasilkan oleh hegemoni dan hierarki kekuasaan yang diproduksi atau dibentuk di arena ekonomi. Oleh karena itu, kekuasaan dipahami dalam konteks seperangkat hubungan produksi global yang menuntut transformasi negara-bangsa, dan bergantung pada kombinasi

elemen material dan gagasan untuk memperoleh legitimasi (Cox dan Jacobsen 1977). Cox mengeksplorasi kontradiksi ekonomi yang memacu perubahan dalam hubungan kekuasaan, dan membimbing transisi menuju tatanan dunia yang lebih adil, bahkan, jika sekalipun seseorang itu tidak mengakui bahwa emansipasi itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari (seperti keyakinan kaum liberal-penerjemah).

Seperti yang ditunjukkan oleh Hutchings (2001), proyek kritis yang menghubungkan Linklater dengan Coxsets, bertujuan untuk mengungkap segala macam kepentingan hegemonik yang memberi kontribusi pada tatanan dunia sebagai langkah pertama untuk mengatasi sistem-sistem global yang penuh pengecualian (*exclusion*) dan ketidaksetaraan *(inequality*). Proyek kritis Linklater bertujuan merekonstruksi kosmopolitanisme, bukan mengambil dari prinsip moral abstrak atau utopis, tetapi dari tindakan non-instrumental dan asumsi-asumsi ideal (komunikasi terbuka dan non-koersif) yang dikembangkan oleh Habermas. Gagasan-gagasan ideal Habermas menjadi alat penting yang digunakan dalam rekonstruksi komunitas politik (dari tingkat lokal ke tingkat global) melalui dialog terbuka dan komunikasi non-koersif, sebuah proses di mana semua yang terkena dampak keputusan politik mengedepankan klaim mereka, dan membenarkan mereka atas dasar rasional dan prinsip validitas yang diterima secara universal. Metode ini menimbulkan pertanyaan tentang 'kehidupan yang baik' (*good life),* seperti apa masyarakat seharusnya (lokal dan global), dan pertanyaan tentang 'keadilan' (*justice*), yakni keadilan dalam cara yang dipilih oleh anggota masyarakat sendiri.

Dengan demikian, emansipasi disusun bukan dengan mengacu pada ide universal yang abstrak, tetapi berdasarkan pada proses diskusi terbuka tentang siapa yang dapat dikeluarkan secara sah dari pengaturan politik tertentu dan jenis kekhususan apa (gender, ras, bahasa) yang memberikan hak kepada orang-orang pada serangkaian hak khusus (untuk mendiskriminasi mereka yang memiliki aspirasi monoritas, misalnya,-penerjemah). Bagi Linklater, perkembangan historis kewarganegaraan membuktikan bahwa sangat dipengaruhi dibukanya peluang atau pun dibatasinya proses diskusi terbuka tentang hak seseorang, seperti siapa yang memiliki hak apa dalam konteks sistem negara yang dibentuk. Kewarganegaraan telah menjadi konsep kritis dan serangkaian praktik

yang memungkinkan penikmatan hak-hak universal di dalam suatu komunitas atau masyarakat suatu negara (seperti kebebasan beraspirasi, kebebasan bergerak, kebebasan berserikat), tetapi juga perlindungan kerentanan kelompok minoritas, dengan memberi mereka hak-hak khusus untuk menghindari atau mengurangi dampak diskriminasi. Di sisi lain, bagaimana pun, kewarganegaraan telah membagi kemanusiaan menjadi kelompok nasional, dan karenanya, telah menjadi penghalang bagi pemenuhan kebebasan manusia secara universal.

Menurut Linklater saat itu, proses emansipasi (ekonomi, politik dan sosial) menuntut interaksi global yang dipandu oleh dialog terbuka, inklusif dan non-koersif tentang ikatan yang mengikat komunitas bersama. Ini juga meluas pada kewajiban kita terhadap orang asing, dan betapa adilnya membatasi orang luar dari penikmatan hak yang diberikan kepada orang dalam (sehingga menjaga eksploitasi sumber daya dari luar-penerjemah). Bagi Linklater, jawabannya terletak pada potensi konsep kewarganegaraan yang lebih universal, dibentuk kembali melalui dialog terbuka di antara mereka yang terpengaruh oleh proses global yang mengubah dunia. Proses-proses ini adalah masalah-masalah seperti bentuk-bentuk kekerasan non-negara (seperti kekerasan seksual dan terorisme), migrasi paksa, perubahan iklim dan penipisan sumber daya. Oleh karena itu, teori kritis dapat dilihat sebagai instrumen yang tidak berdaya untuk memajukan jenis hubungan global yang lebih adil. Lebih penting bagi kami, dalam teori HI, pendekatan ini secara alamiah melawan pendekatan tradisional, terutama liberalisme dan realisme, dan menyoroti bagaimana mereka memberi kontribusi pada ketidakseimbangan tatanan global yang tidak adil dengan gagal mempertanyakan (atau mengkritik) klaim-klaim dasar mereka (tentang HI yang anarkhi bagi kaum realis, dan demokratisasi ekonomi dan politik berikut bekerjanya hukum serta lembaga-lembaga internasional menurut kaum liberalis). Karya Linklater ditandai oleh kesadaran bahwa modernitas adalah proyek yang belum selesai dalam potensinya untuk mencapai kebebasan manusia, yaitu melalui transformasi sistem persaingan negara-negara yang terpisah menjadi komunitas global.

Dengan mengakui bahwa kebutuhan keamanan mendesak manusia untuk membentuk komunitas yang dibatasi, dan bertindak sesuai dengan loyalitas nasional. Linklater mengakui batas-batas politik kosmopolitan itu.

Namun pada saat yang sama, ia menggarisbawahi bahwa ada kesadaran yang tumbuh bahwa keterkaitan global *(interconnectedness*) dan kerentanan *(vulnerabilities*) dunia memaksa suatu masyarakata untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, dan pada saat yang sama harus hidup berdampingan dengan orang lain. Kedekatan interaksi dengan orang asing mendorong, misalnya, rasa kesadaran yang tinggi untuk berbagi dalam sebuah planet dan sumber daya yang terbatas, dan mengarahkan individu untuk mempertanyakan kewajiban eksklusif kepada negara demi tingkat tanggung jawab kosmopolitan terhadap mereka yang tidak termasuk dalam komunitas nasional seseorang (artinya, naiknya kesadaran kosmopolitanisme yang sanggup mengimbangi, kalau pun bukan menggantikan, keterikatan kepada kewarganegaraan seseorang, meskipun ini justru menjadi semacam utopia baru-penerjemah).

Karenanya, Linklater mengeksplorasi ketegangan moral yang muncul antara kemanusiaan dan kewarganegaraan (*humanism* dan *citizenship*) untuk merancang kemungkinan praktis untuk menciptakan komunitas yang lebih inklusif, dengan efek yang lebih beradab terhadap perilaku hubungan internasional. Linklater tidak meremehkan gerakan historis menuju pembentukan komunitas moral yang terikat (negara-bangsa), tetapi juga melihat potensi dalam proses historis untuk meningkatkan perluasan hak dan kewajiban di luar (melintasi) negara. Fakta bahwa negara-negara dalam sistem internasional modern dimungkinkan untuk menyetujui perlindungan hak asasi manusia, dan relevansi politik untuk menghindari kesalahan manusia, adalah tanda-tanda adanya harapan baru atau relevansi ide-ide kaum teori kritis ini. Apa yang menyatukan para ahli teori kritis seperti Cox, Linklater, dan lainnya, adalah penelaahan kajian politik dengan tujuan emansipatoris eksplisit. Hal ini bertujuan mengungkap potensi sistem hubungan global yang lebih adil yang dihasilkan dari prinsip, praktik, dan komunitas yang sudah ada, yang memperluas hak asasi manusia dan mencegah bahaya bagi orang asing (yang berbeda kewarganegaraannya).

Teori Kritis dan 'Krisis' Migran Eropa

Haman menatap malam panjang di belakangnya ketika aku mengejut kannya dalam pandangan kosong di atas dek kapal feri Blue Star yang membawa kami ke pelabuhan Yunani, Piraeus. Berangkat dari Rhodes, feri telah membuat perhentian pertama di pulau Kos, di mana puluhan pengungsi dari perang Suriah berbaris dengan sabar selama berjam-jam dan akhirnya mendapat tempat di kapal. Haman adalah salah satunya. Setelah berbicara selama berjam-jam tentang perang dan harapannya akan masa depan, jelas bagi saya bahwa feri di Laut Aegean adalah metafora komunitas global yang mengalami kendala kebebasan manusia, meskipun memegang sumber daya untuk pemenuhannya.Namun setelah Kos, saya tidak bisa benar-benar tahu siapa yang turis dan yang mana seorang pengungsi, juga mana orang Yunani atau Athena, dan terpikir oleh saya mengapa ini kategori 'warga negara' ini harus menjadi 'penting sekali' di dunia ini. Kondisi manusia di atas kapal feri itu akan berdiri untuk malam itu, tetapi yang berstatus sebagai turis, paginya akan melanjutkan perjalanan pulang mereka dengan tenang, sementara para pengungsi harus berimprovisasi menyeberang Eropa, memohon keramahtamahan dan belas kasihan. Di pelabuhan Piraeus, di sana, dini hari Agustus 2015, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Haman dan berharap dia beruntung untuk perjalanan ini. Ini hari Jumat dan dia tahu dia harus mencapai perbatasan Hongaria sebelum Selasa, atau berisiko terperangkap oleh pagar yang didirikan dengan tergesa-gesa pada hari-hari sebelumnya untuk memblokir migran dari pihak Serbia. 'Ini akan dingin', katanya (gambaran kesulitan hidup di benua baru yang dingin, Eropa-penerjemah), firasat apa yang ada di depan untuk orang-orang seperti dia mencari perlindungan di Eropa. Itulah yang terakhir saya dengar dari Haman. saya tinggal di sana sebentar, menatapnya berbaur dengan kerumunan, dan saat itu diumumkan di seluruh Eropa sebagai krisis pengungsi dan migran ilegal.

Pertemuan singkat dengan Haman dan ceritanya ini merupakan pemicu untuk mengingat bagaimana dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak orang yang lolos dari penganiayaan, perang, dan kelaparan telah mencoba mencapai tempat yang aman seperti Eropa. Sementara, hal ini telah didekati sebagian besar sebagai 'krisis' yang mempengaruhi Eropa dan komunitas nasional (baik negara-negara maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam suatu negara-penerjemah) juga menghadapinya sebagai krisis yang serius. Beberapa suara telah menggarisbawahi bagaimana sejarah umat manusia selalu ditandai dengan sejarah migrasi, damai atau sebaliknya, dan bahwa hari ini lebih banyak orang daripada saat Perang Dunia Kedua yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Perspektif kritis mengasumsikan bahwa klaim keamanan pengungsi yang melarikan diri dari negara yang dilanda perang merupakan tanggung jawab kosmopolitan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya untuk mengatasinya. Poinnya bukan hanya untuk memahami bagaimana dunia dibentuk oleh ketegangan moral antara warga negara dengan orang asing, tetapi untuk berkontribusi pada solusi politik yang lebih adil untuk mengatasi 'krisis' pengungsi saat ini dengan membawa masalah pengungsi ini ke meja perundingan bagi mereka yang paling rentan dan menjamin keamanan mereka secara legitimate. Berlawanan dengan teori tradisional (realisme dan liberalisme), teori kritis tidak melihat pengungsi sebagai bagian dari dan akibat dari kekerasan dan ketidaksetaraan. Bahkan, teori kritis berusaha menempatkan gelombang migrasi paksa saat ini (karena pertikaian elit di negara mereka) dalam konteks struktur ekonomi dan geopolitik yang lebih dalam menghasilkan kerusakan dan pengucilan secara global. Sepanjang garis pemikiran Cox dan Linklater, migrasi saat ini harus dilihat sebagai dipaksakan pada individu dan produk sampingan dari tatanan dunia saat ini. Keadaan hubungan-hubungan ini mengecualikan potensi pemahaman manusia dan saling pengakuan, karena telah terjadi melalui globalisasi produksi yang berbahaya dan dinamika terkait pembangunan bangsa, perang, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, sebuah perspektif kritis menanyakan lebih dalam tentang bagaimana kekuatan ekonomi global, dan hierarki kekuasaan yang terkait, menjadi terlibat dalam menciptakan

kekacauan dan rasa tidak aman yang memaksa orang meninggalkan rumah mereka di berbagai belahan dunia. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada bagaimana dinamika kapitalisme global menghasilkan negara-negara gagal di seluruh Afrika dan Timur Tengah, tidak hanya sebagai kemalangan yang tidak disengaja tetapi sebagai bagian dari bagaimana kekuatan kapitalisme itu sendiri bekerja.Tantangan utama bagi teori kritis adalah menghubungkan teori dengan praktik, untuk dapat menetapkan lensa teoritis yang menghasilkan hasil transformatif dunia nyata. Tidak cukup hanya memahami dan melacak asal-usul bahaya dan sebab terjadinya migrasi/pengungsi di dunia, namun, sangat penting untuk menggunakan pemahaman itu untuk mencapai pengaturan keamanan yang lebih adil yang tidak mengabaikan klaim pengungsi terhadap hak-hak dasar. Seseorang yang ingin mengejar garis kritis penyelidikan tentang 'krisis' pengungsi mungkin ingin memulai dengan Haman dan perjalanannya dari Suriah ke Eropa sebagai bayangan cermin dari keadaan saat ini dari begitu banyak orang di Global South (belahan dunia selatan). Untuk teori kritis hari ini, politik, pengetahuan dan tatanan global adalah untuk orang-orang seperti Haman, dan harus memiliki tujuan membebaskan mereka dari bahaya yang tidak perlu dan interaksi global yang tidak adil atau tidak seimbang. Lembaga seperti negara harus dinilai dalam hal bagaimana mereka mengatasi berbagai jenis eksklusi vis-à-vis orang dalam dan orang luar. Teori kritis, lebih dari pendekatan lain, berjanji untuk masuk lebih dalam untuk memahami mengapa para pengungsi harus meninggalkan rumah mereka. Ini mensyaratkan menghasilkan pengetahuan tentang alasan langsung (perang di Suriah atau di tempat lain), tetapi juga tentang struktur global kekuasaan internasional, dan bahaya serta agen-agen yang terlibat di dalamnya (kepentingan geopolitik yang lebih luas, cara kerja ekonomi global, perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan komunitas). Selain itu, teori kritis meneliti konsekuensi moral (apa yang harus dilakukan) dari perjalanan Haman dan tanggung jawab seperti apa yang mungkin ditanggung orang lain atas penderitaan Haman.

Secara kosmopolitan, teori kritis menolak untuk melihat negara sebagai komunitas moral yang dibatasi oleh alam (perbatasan fisik), dan justru menemukan di dalamnya potensi untuk melindungi orang asing yang

membutuhkan dan memasukkan mereka dalam pengertian yang lebih luas tentang kepentingan nasional (yang menghiraukan sisi kemanusiaan-penerjemah). Dalam konteks ‘krisis’ pengungsi saat ini, kritik diarahkan pada berbagai norma dan praktik yang disetujui oleh negara-negara berhadapan dengan pengungsi yang masuk. Dasar pijakan untuk membedakan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan hak-hak kosmopolitan (hak dasar kemanusiaan bagi pengungsi/migran-penerjemah), adalah apa yang   yang telah diabadikan/disetujui dalam hukum internasional dan ditegakkan oleh banyak orang dan organisasi di berbagai masyarakat di dunia. Langkah kedua adalah mempromosikan inisiatif sipil yang mampu mengkonsolidasikan hubungan yang lebih adil dan lebih seimbang (sebagai solusi untuk ‘krisis’) antara mereka yang mencari perlindungan dari bahaya, dan mereka yang berada dalam posisi untuk menjamin perlindungan dari bahaya (negara-negara yang aman). Solusi harus dicari dalam dialog terbuka, menggunakan argumen rasional yang mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan semua orang penduduk dunia. Membiarkan solusi pada pemerintah nasional saja bukanlah suatu pilihan karena posisi mereka yang ketat dalam pertimbangan kepentingan nasional sempit mereka. Sebaliknya, posisi yang lebih seimbang akan dihasilkan dari keterlibatan aktif masyarakat sipil, otoritas lokal, otoritas Eropa dan pengungsi itu sendiri. Bagaimanapun, Eropa adalah kasus khusus sini karena merupakan rumah bagi Uni Eropa, sebuah proyek yang menyatukan sebagian besar negara-negara Eropa dalam persatuan supranasional, dan relatif berbatasan, di mana semua warga negara secara hukum bebas untuk bekerja dan hidup dimanapun mereka yang mereka inginkan. Jelas, ada kerangka kerja yang ada dalam politik Eropa untuk dapat bekerja guna mencapai solusi yang lebih adil untuk ‘krisis’ migrasi ini daripada yang dikembangkan oleh negara-negara yang menutup perbatasan mereka. Oleh karena itu, kontribusi penting seseorang yang mengikuti jalur penelaahan pemikiran teori kritis ini adalah untuk memahami sepenuhnya bahwa teori selalu terlibat dalam praktik dan bahwa cara kita memahami "krisis" pengungsi membentuk jenis solusi yang kita bayangkan untuk itu. Dari perspektif kritis, maka, hanya ada solusi sejati untuk ‘krisis’ ini ketika para aktor politik merangkul kriteria kosmopolitan (humanisme universal) yang

menyeimbangkan seluruh jajaran kepentingan dan menghormati hak-hak semua orang yang terlibat.

Kesimpulan

Menyadari bahwa ada untaian pemikiran yang sangat berbeda dalam teori kritis, bab ini telah mempersempit pendekatannya untuk memperkenalkan teori kritis sebagai jalur penelaahan pemikiran khusus yang berupaya memajukan emansipasi, atau kebebasan manusia, dalam pelaksanaan urusan global. Sebuah kritik yang relevan berusaha untuk melacak bentuk-bentuk eksklusi yang menghasut baik redistribusi dan perjuangan pengakuan, dan kemudian mengidentifikasi potensi untuk perubahan progresif yang terinspirasi oleh ide-ide imanen (baru yang kreatif), norma dan praktik. Maka, dari perspektif kritis, orang, dan bukan negara, harus ditempatkan di pusat politik, global atau lainnya. Selain itu, pengaturan politik harus dinilai, atau dikritik, sesuai dengan kapasitas mereka untuk memajukan emansipasi (dalam artia luas, politik, sosial dan ekonomi secara loal dan global-penerjemah) dan perluasan batas-batas moral (dari tradisional ke ukuran moral yang baru-penerjemah). Teori kritis mengasumsikan peran aktif dalam perbaikan urusan manusia sesuai dengan potensi kebebasan yang melekat dalam modernitas, dan identifikasi alternatif politik yang ada di masyarakat global (yang lebih manusiawi dari sekedar format yang dibentuk oleh kaum liberal-demokrat dewasa ini-penerjemah), dan proses sejarah akan mewujudkannya.

7
POSTSTRUKTURALISME *(POSTSTRUCTURALISM)*

Aishling Mc. Morrow

Poststrukturalisme (*poststructuralism*) mendorong sebuah cara pandang terhadap dunia dengan menantang dan mempertanyakan apa yang selama ini telah diterima sebagai ‘kebenaran’ (*truth*) dan ‘pengetahuan’ (*knowledge*). Kaum poststrukturalis selalu mempertanyakan bagaimana ‘fakta’ (*facts*) dan ‘keyakinan’ (*beliefs*) tertentu yang diterima dapat bekerja secara nyata untuk memperkuat dominasi dan kekuatan aktor-aktor tertentu dalam hubungan internasional. Poststrukturalisme meragukan kemungkinan untuk mencapai hukum atau kebenaran universal karena tidak ada dunia yang ada secara independen terbebas dari interpretasi kita sendiri. Sudut pandang ini digaris-bawahi oleh pernyataan Foucault (1984, 127) bahwa *‘kita tidak boleh membayangkan dunia menoleh ke arah kita dengan wajah (dunia) yang terbaca dengan jelas, dan kemudian kita tinggal menguraikannya’*. Untuk alasan ini, para ilmuan poststrukturalis mendorong para peneliti untuk bersikap skeptis (atau sikap cenderung mencurigai) terhadap narasi (atau gagasan-gagasan) universal yang mencoba menawarkan pandangan dunia yang obyektif, karena asumsi ini sangat dipengaruhi oleh asumsi yang sudah ada sebelumnya tentang apa yang benar (*the truth*), dan biasanya digaris-bawahi atau didukung oleh pandangan mereka yang berkuasa. Hal ini membuat poststrukturalisme selalu kritis secara terbuka terhadap teori apa pun yang mengklaim dapat mengidentifikasi fakta objektif karena kebenaran dan pengetahuan adalah entitas subjektif (kumpulan subyektifitas) yang diproduksi oleh pemaknaan secara subyektif dari kelompok ilmuan tertentu daripada ditemukan secara alamiah. Oleh karena itu, secara alamiah, poststrukturalisme bertentangan dengan sebagian besar teori HI lainnya karena mereka (teori-teori lainnya)

merasa tidak mampu (atau tidak mau) untuk sepenuhnya menjelaskan keragaman sejati ilmu hubungan internasional.

Dasar-Dasar Poststrukturalisme

Para ilmuan poststrukturalis berpendapat bahwa ‘pengetahuan’ (*knowledge*) diterima seperti itu (dianggap sebagai kebenaran) karena adanya kekuatan dan keunggulan (pengaruh) aktor-aktor tertentu dalam masyarakat yang dikenal sebagai ‘elit’ (*elites*), yang kemudian memaksakannya kepada orang lain. Elit mengambil berbagai bentuk peran yang berbeda dalam masyarakat kontemporer. Misalnya, mereka masuk dalam jajaran menteri pemerintah yang memutuskan fokus dan arah kebijakan suatu negara, juga sebagai pemimpin bisnis yang memanfaatkan sumber daya keuangan yang besar untuk membentuk arah pasar (market directions), dan selaku pemilik berbagai saluran media yang menentukan bagaimana seseorang digambarkan (*image building*) saat melaporkan sebuah berita. Selain itu, elit sering juga dikategorikan sebagai ‘ahli’ (*experts*) dalam masyarakat sehingga memberi mereka wewenang untuk lebih memperkuat sudut pandang mereka. sebagai contoh, kasus kelaparan, misalnya, ketika aktor elit menyebut kelaparan sebagai bencana alam, mereka menghapus peristiwa tersebut dari konteks politiknya. Oleh karena itu, sebab-sebab terjadinya kelaparan yang diakibatkan oleh perilaku elit yang mengambil keputusan dan tindakan politik tertentu, melalui proses eksploitasi atau kelambanan pemerintah dalam bertindak karena memberi keuntungan kepada kelompoknya (lingkaran elit) dari kenaikan harga pangan yang terjadi, akan hilang dari paparan analisa penguasa, sehingga elite akan melihat kelaparan yang terjadi itu sebagai bencana lam yang tidak dapat dihindari.

Meskipun penekanan dan fokus besar kaum poststrukturalis diletakkan pada otoritas para aktor elit untuk memutuskan apa yang dianggap sebagai pengetahuan dan asumsi yang valid dalam masyarakat, kelompok ilmuan ini menegaskan bahwa cara kekuasaan ini dicapai pun melalui manipulasi wacana (publik). Wacana memfasilitasi proses di mana informasi tertentu diterima sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Diskursus (wacana) yang memperkuat kekuatan elit

seperti itu adalah diskursus dominan atau resmi dalam kaum poststrukturalis. Kekuatan wacana dominan terletak pada kemampuannya untuk menutup pilihan atau opini lain sehingga pemikiran di luar ranah yang diatur oleh wacana tersebut dipandang tidak rasional (atau tidak penting).

Contoh dari hal di atas, dapat ditemukan dalam debat keamanan (*security)* versus kebebasan (*liberty*). Keinginan untuk meningkatkan tingkat keamanan di masyarakat, dalam menanggapi kejahatan, migrasi tidak teratur dan ancaman teroris, misalnya, telah disajikan sebagai skala geser (*a sliding scale*) sehingga jika suatu negara ingin menjadi lebih aman, maka publik harus menanggung pengurangan dalam kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi (*personal freedom*), seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul, telah ditempatkan sebagai batasan sekaligus syarat keberadaan suatu keamanan negara. Maka, dalam konstruksi diskursif ini, orang dihadirkan dengan pilihan antara negara yang menghormati kebebasan sipil tetapi dibiarkan berpotensi tidak aman secara kebebasan individual, atau keadaan yang harus mengekang kebebasan pribadi agar terjamin dan terlindungi. Dalam praktiknya, wacana dominan tentang keamanan negara seringkali berfungsi untuk membungkam segala kekhawatiran tentang peningkatan kekuasaan negara (*abuse of power*). Program elit untuk membatasi kebebasan sipil dapat dibenarkan untuk masyarakat yang dikondisikan oleh pengulangan 'ahli' dari wacana ini dengan menarik logika objektif yang ditegaskannya dan mengabaikan semua interpretasi lainnya. Oleh karena itu, langkah untuk mencapai tingkat keamanan yang lebih tinggi tanpa pelanggaran atas kebebasan pribadi atau sipil dikecualikan dari argumen, karena keduanya adalah terus-menerus diposisikan dalam pertentangan langsung satu sama lain.

Bagi kaum poststrukturalis, bahasa adalah salah satu elemen paling penting (*crucial*) untuk pembentukan dan penanaman wacana dominan dalam masyarakat. Melalui bahasa, aktor, konsep, dan peristiwa tertentu ditempatkan sebagai pasangan hierarkis, yang dinamakan oposisi biner (binary oppositions), artinya, salah satu elemen lebih disukai daripada yang lain untuk menciptakan atau melestarikan makna yang dikehendaki oleh elit pembuatnya. Relasi kuasa (power relations) yang tertanam dalam hubungan ini, misalnya, baik (good) versus jahat (evil) atau pikiran maju

(*developed*) versus tertinggal (*undeveloped*), berfungsi untuk memperkuat makna yang disukai atau dikehendaki dalam konstruksi diskursif. Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu penuh dengan pertentangan ini, dan digunakan oleh para elit untuk menciptakan makna yang menguntungkan dari peristiwa tertentu, dan untuk memungkinkan makna ini dengan mudah diserap dan diterima oleh publik yang lebih luas (internasional). Salah satu oposisi biner yang paling umum dipraktikkan adalah dengan pe-label-an nama kepada kelompok-kelompok tertentu atau negera-negara tertentu dengan istilah 'mereka' versus 'kita' (untuk membedakan 'in groups' dengan 'out groups'-penerjemah).

Jika kita melihat setelah peristiwa 11 September 2001 (umumnya dikenal sebagai 9/11, baca '*nine one-one'*), kita dapat melihat kategori diferensiasi ini dan pengaruh pelabelan itu sangat nyata. Presiden George W. Bush menggambarkan Iran, Irak dan Korea Utara sebagai 'poros kejahatan', menjadikan negara-negara ini 'mereka' (out groups atau them) yang secara retoris dan politis diposisikan sebagai paria (terhina) secara internasional. Di lain pihak, berbeda dengan nasib kelompok 'kita' (in groups atau 'us') yang tidak bersalah, yakni Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Karenanya, oposisi biner ini memungkinkan Bush untuk mengklaim bahwa Amerika Serikat berlawanan dengan semua yang diwakili oleh trio (Irak, Iran dan Korea Utara) ini, dan akan dibenarkan dalam mengambil berbagai tindakan selama kampanye global untuk melawan negara-negara yang dinilai mensponsori, atau menyembunyikan teroris. (Amerika Serikat dalam menyerang Irak tanpa menggunakan legitimasi yang sah (resolusi) dari PBB sehingga ditentang secara luas oleh kaum realis Amerika sebagai perang yang illegal dan tidak menguntungkan bagi negara-penerjemah)

Jika melihat karya salah satu cendekiawan terkemuka poststrukturalisme, Michel Foucault, maka konsep elit, wacana dan kekuatan bahasa dan oposisi biner semuanya bersatu untuk menciptakan apa yang ia beri label 'rezim kebenaran' (*regime of truth*). Model ini berlaku untuk wacana penguasa yang beroperasi tanpa pertanyaan dalam masyarakat, menyamar sebagai kebenaran atau fakta. Rezim kebenaran, kemudian, dibentuk oleh wacana dominan, aktor elit dan bahasa yang digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan makna dan kebenaran,

yang menguntung atau mendukung kepentingan aktor yang menciptakannya (atau yang dikehendaki oleh si pembuat wacana dominan itu-penerjemah).

Arti penting poststrukturalisme adalah untuk menyoroti rezim kebenaran (*regime of truth*) yang ada, dan menunjukkan bahwa cara berpikir dan analisis konvensional dalam hubungan internasional tidak dapat menunjukkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan tertentu lainnya terjadi, dan selalu dikesampingkan oleh wacana-wacana teori HI pada umumnya sejak dari awal. Butler (2003) membangun pemikirannya di atas gagasan/wacana itu dengan mengusulkan bahwa kehidupan manusia, dalam situasi konflik tertentu atau kekejaman teroris tertentu, dianggap lebih 'menyedihkan' daripada kondisi-kondisi yang lain. Butler berpendapat bahwa ribuan orang hilang atau terbunuh dalam konflik di negara-negara seperti Palestina dan Afghanistan, bahkan seringkali di tangan kekuatan militer Barat, namun orang-orang yang hilang/terbunuh ini tidak dianggap ada kematiannya, tidak dikenal, atau bahkan tidak didengar dalam laporan perang versi Barat. Hirarki kesedihan ini juga terlihat dari curahan simpati para korban serangan teroris di Paris pada November 2015 dan Nice pada Juli 2016. Namun, serangan serupa terjadi di Beirut dan Nigeria pada November 2015 dan Baghdad pada Juli 2016. Sebagian besar tidak diperhatikan, dan bahkan dibungkam dalam rezim kebenaran yang meratapi, atau mendukung, korban negara-negara Barat yang sebenarnya 'tidak bersalah' *(innocent Western victim*).

Poststrukturalisme dan Representasi Media tentang Teroris

Media adalah contoh utama dari sebuah situs di mana wacana dalam rezim kebenaran diproduksi (kembali) dan dapat diidentifikasi. Bagaimana masyarakat menerima informasi, dan cara pemberitaan suatu peristiwa disajikan kepada mereka, akan membentuk bagaimana masyarakat mengkonseptualisasikan dan bereaksi terhadap peristiwa politik. Dengan demikian, jika kita ingin mengamati bagaimana orang-orang memahami dan membingkai terorisme dan teroris, ilmuan poststrukturalis dapat menganalisis akun media untuk menganalisis konstruksi wacana (diskursif) dari para aktor politik ini, berikut peristiwa teroris terkait.

Sebagai serangan teroris global yang menentukan abad kedua puluh satu, serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat dapat digunakan untuk menyampaikan bagaimana wacana dominan, dihasut oleh elit pemerintah, diabadikan dan diperkuat oleh media.

Dalam laporan surat kabar, khususnya, dalam seminggu setelah serangan, teroris ditampilkan sebagai orang yang jahat dan tidak rasional, motivasi politik yang mereka nyatakan telah dihapuskan dari seluruh halaman media, dan sebaliknya teroris berulang kali dibicarakan sebagai orang gila dan apolitis. Para teroris diganggu oleh ‘neurosis yang tidak bisa dijelaskan’ dan didorong oleh ‘kegilaan etnis, takhayul dan kesukuan’ (Toynbee 2001). Selain itu, para teroris ini dibedakan dari bentuk-bentuk terorisme yang lebih tradisional yang pernah disaksikan dunia sebelumnya melalui dengan menyoroti pada sifatnya yang mematikan bagi targetnya, dan sifat pembunuhan massalnya dari terorisme transnasional, sebuah langkah pemberitaan yang meningkatkan emosi ketakutan dan kecemasan lebih lanjut.

Untuk menggarisbawahi kaitan ini dengan kematian dan kehancuran, narasi (wacana pemberitaan) media juga secara konsisten mengaitkan tindakan dan pelaku 9/11 dengan gambaran dan metafora wabah dan penyakit. Berbeda dengan ini, adalah penanaman gagasan ‘kepolosan Amerika’ (*American Innocence*) (Boswell 2001) yang ‘rentan terhadap kebencian’ atau *vulnerable to hate* (Boyd 2001), ditambah dengan pengulangan yang terus-menerus, dan selalu mengingatkan penderitaan para korban 9/11 dan kepahlawanan dari para penolong pertama. Sementara itu, protes internasional yang meluas terhadap serangan tersebut secara bersamaan bekerja untuk lebih menekankan sisi amoralitas dan ketidakmanusiawian dari para aktor serangan teroris ini. Tema patriotisme dan kesopanan dikerahkan di dalam media untuk semakin menjauhkan ‘kita’ (‘us’ dan kelompok kita) yang kohesif dari unsur-unsur para teroris barbar secara umum. Reaksi masyarakat yang berkumpul untuk berdoa, saling mendukung, menjadi relawan dan akhirnya bergabung dengan militer disandingkan secara radikal dengan aksi destruktif para teroris. Apalagi emosi yang menuturkan aksi-aksi tersebut terkait ke dalam perasaan cinta, empati dan altruisme yang digunakan media untuk

menimbulkan kohesi lebih lanjut dalam masyarakat melawan ‘pihak lain’ yakni para teroris dan para dalang yang ada dibelakangnya.

Pentingnya pengakuan wacana ini bukan untuk mencoba menampilkan para aktor politik ini, yakni para teroris, secara lebih baik, tetapi untuk mengenali bagaimana penggambaran yang konsisten dan universal tentang mereka sebagai kejahatan dan irasional membuat reaksi tertentu, dan tindakan kebijakan luar negeri lebih bisa diterima, dan segera memotong atau membuang metode lain untuk menanggapi serangan teroris ini. Dari sini, poststrukturalisme mempertanyakan secara kritis apa tujuan konstruksi, baik oleh media maupun pemerintah, dari wacana dominan yang menempatkan teroris dan masyarakat yang mereka anggap sebagai kejahatan dan barbar itu? Bagaimana pengungkapan jurang tak terjembatani antara masyarakat beradab dan teroris purba, dalam rezim kebenaran (*regime of truth*), mendukung agenda elit saat ini? Salah satu jawabannya adalah mengidentifikasi bagaimana konstruksi ‘baik versus jahat’ ini dipersiapkan, dan hampir saja menggalang publik Amerika untuk berperang. Hal ini tentunya mencegah kesempatan untuk menangani serangan-serangan ini melalui diplomasi, karena wacana umum menyatakan bahwa para teroris ini hanya ingin menghancurkan dunia dengan tangan mereka saja. Sementara beberapa orang mungkin mendukung perang di Afghanistan (2001) dan Irak (2003) yang waktunya berbarengan dengan serangan ini, di lain pihak, ilmuan poststrukturalis berkontribusi untuk mendekonstruksi bagaimana tanggapan militeristik dan agresif terhadap aksi 9/11 ini dilegitimasi oleh konstruksi diskursif para teroris (versi wacana pemberitaan media-penerjemah), emosi yang dimanipulasi, dan kesenjangan perbedaan antara ‘kita’ dan ‘mereka’ (teroris dan negera-negara yang distempelkan berafiliasi dengan mereka-penerjemah) itu dibuat.

Penyusupan wacana ini juga berfungsi untuk menggabungkan motivasi dan tindakan teroris ini dengan konstruksi masyarakat Muslim dan Arab yang lebih luas. Dengan interpretasi simplistik dari hubungan historis antara ‘Barat’ dan ‘Timur’ yang didorong dalam konstruksi diskursif (media) ini, rezim kebenaran mempermainkan dan memperkuat gagasan tentang dunia Muslim atau Arab sebagai terbelakang dan primordial. Maka, dalam rezim kebenaran Perang Melawan Teror, wacana

emotif ini meluas ke setiap Muslim, setiap Arab, dan, pada akhirnya, setiap non-Barat.

Dengan berlalunya waktu, kita juga dapat melacak gangguan bertahap dan destabilisasi rezim kebenaran ini. Ketika Amerika Serikat ditarik lebih jauh ke dalam konflik yang merusak dan berlarut-larut di Afghanistan dan Irak, opini publik yang mendukung intervensi mulai berkurang. Seiring waktu, konstruksi diskursif teroris oleh media tidak cukup kuat untuk mengesampingkan akun media bersamaan dari sejumlah besar korban yang dihasilkan dari intervensi. Bersamaan dengan korban jiwa tersebut, ketika media mulai memberitakan pelanggaran yang dilakukan, rezim kebenaran yang selama ini berpusat pada arahan kebijakan luar negeri kepresidenan Bush mulai goyah. Dengan demikian, wacana resmi mengenai terorisme dan intervensi telah berubah. Pergeseran ini dapat ditandai dengan pergeseran ke bentuk intervensi yang lebih klandestin (atau intervensi diam-diam) di Timur Tengah dari tahun 2009 dan seterusnya, yang ditandai oleh kepresidenan Barack Obama. Meningkatnya penggunaan pasukan khusus dan serangan pesawat tak berawak memungkinkan Obama untuk terus memberikan pengaruh atas wilayah tersebut tanpa secara terbuka menyatakan perang, sambil mengurangi intensitas intervensi militer yang dibuat oleh pendahulunya, Bush.

Wacana resmi yang melintasi suatu peristiwa, meski kuat, tidak pernah sepenuhnya menjelaskan pembacaan seluruh situasi. Sementara kebencian terhadap teroris sebagai irasional dan jahat yang sebelumnya telah menemukan dasar yang kuat, dan persepsi dominan tentang terorisme dan teroris adalah tindakan dan aktor yang tidak logis dan apolitis, akan selalu menemukan penyimpangannya dari konseptualisasi ini. Karenanya, wacana resmi yang dibuat oleh para elit tidak pernah sepenuhnya menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Misalnya, meskipun ada keributan setelah 9/11 yang mestinya menguatkan gagasan perlunta perang, namun justru aksi protes anti-perang berskala besar oleh masyarakat terjadi di banyak negara. Keterpautan yang kacau dalam politik internasional dan para elit dewasa ini, menunjukkan bahwa banyak wacana dapat hidup berdampingan dan membentuk pandangan baru hubungan internasional yang ditawarkan kepada kita. Dari sini, kita harus mengakui bahwa elit dan

wacana sehari-hari hidup berdampingan, dan, meskipun seseorang mengambil posisi dominan, masih banyak wacana lain yang bersaing dan turut berperan, serta ikut membentuk hubungan internasional, berpotensi untuk berkontribusi pada pemahaman yang pada umumnya dilihat sebagai ‘pengetahuan’ (*knowledge*) dan ‘kebenaran’ (*truth)*.

Kesimpulan

Dampak poststrukturalisme dalam teori HI berasal dari kemampuannya untuk tidak hanya mengidentifikasi dan mengungkap hubungan kekuasaan yang mendikte peristiwa politik, tetapi juga memberikan ruang bagi munculnya wacana alternatif yang juga dapat memengaruhi jalannya peristiwa. Dengan menelaah aktor-aktor elit, kita dapat melihat bagaimana fakta yang diterima secara umum tentang sistem politik itu sebenarnya tidak 'alami' (natural), tetapi sebaliknya, dikonstruksi untuk mendukung wacana dominan yang menguntungkan kelompok elit. Selanjutnya, dengan menelusuri naik turunnya rezim kebenaran (*regime of truth*) saat mereka mengambil bentuk baru dan mendukung kemunculan aktor-aktor baru, poststrukturalisme menunjukkan bagaimana wacana dapat berubah dari waktu ke waktu dan menjadi tidak stabil. Yang paling penting, poststrukturalisme memungkinkan Anda untuk menjadi terbiasa dengan, dan juga menginterogasi, banyak cara yang dilakukan dalam praktik-praktik kekuasaan.

8
FEMINISME
(FEMINISM)

Sarah Smith

Sejak awal, teori feminisme telah menantang ketidakhadiran perempuan dalam teori dan praktik HI tradisional. Ketidakhadiran ini terlihat baik dalam marginalisasi perempuan dari pengambilan keputusan maupun dalam asumsi bahwa realitas kehidupan sehari-hari perempuan tidak dipengaruhi oleh atau dianggap penting bagi hubungan internasional. Selain itu, kontribusi feminis untuk HI juga dapat dipahami melalui usaha mereka dalam mendekonstruksi gender, baik sebagai identitas yang dikonstruksi secara sosial, maupun sebagai logika pengorganisasian yang kuat (*a powerful organising logic*). Ini berarti mengakui, dan kemudian menantang asumsi tentang peran gender maskulin dan feminin yang menentukan apa yang harus atau dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam politik global, serta apa yang dianggap penting dalam pemikiran-pemikiran hubungan internasional. Asumsi-asumsi ini pada gilirannya membentuk proses politik global dan dampaknya terhadap kehidupan laki-laki dan perempuan. Selain menyoroti bahwa HI tradisional adalah netral gender *(gender-neutral*), kaum feminisme juga menyatakan bahwa, dalam praktinya selama ini, antara gender dan HI adalah dua bidang terpisah yang tidak saling berkaitan atau tidak mempengaruhi satu sama lain. Para pendukung teori feminisme telah menunjukkan fakta bahwa HI tradisional sebenarnya bersifat buta gender (*gender-blind*). Oleh karena itu, para sarjana pendukung feminisme menganggap serius peran wanita dan gender ini dalam HI kontemporer, dan berupaya keras untuk melakukannya. Hal itu berarti menantang konsep dan asumsi-asumsi dasar dalam teori-teori HI yang lainnya.

Dasar-Dasar Teori Feminisme

Kita memulai bahasan ini dengan menyebutkan kontribusi pertama feminisme, yakni menjadikan kaum perempuan 'terlihat' (visible, atau diperhitungkan dalam wacana politik domestik dan global-penerjemah). Pada tahap awal teori feminis, sangat berkontribusi dalam pengungkapan bahwa kaum perempuan dalam sejarahnya, dan secara rutin diekspose terkait kekerasan gender. Untuk membuat kekerasan terhadap perempuan 'terlihat' dan menjadi perhatian dunia, maka sistem internasional yang diam-diam menerima sejumlah besar kekerasan terhadap perempuan sebagai keadaan normal itu juga harus diungkap (dikritisi dan dibongkar secara pemikiran-penerjemah). Misalnya, kampanye 'UNiTE'[4] oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan memperkirakan bahwa, sekitar tujuh dari sepuluh perempuan akan mengalami kekerasan di beberapa titik dalam hidup mereka, dan, ada sekitar 600 juta perempuan tinggal di negara-negara yang politik domestiknya diwarnai kekerasan terhadap perempuan belum dianggap sebagai kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan lazim secara global, dan tidak spesifik untuk sistem politik atau ekonomi tertentu. Jacqui True (2012) telah mendemonstrasikan hubungan antara kekerasan terhadap perempuan di ranah privat (misalnya, kekerasan dalam rumah tangga) dan jenis kekerasan yang dialami perempuan di depan umum, juga di tempat kerja yang semakin mengglobal, dan di masa perang. Pendeknya, perempuan tidak memiliki hak ekonomi, politik atau sosial yang sama dengan laki-laki. Di mana-mana ada bentuk-bentuk kekerasan gender, apakah ini kekerasan dalam rumah tangga di rumah, atau kekerasan seksual dalam konflik. Dengan cara pandang tertentu pada fenomena kekerasan

---

[4] *UNiTE to End Violence against Women* diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pada tahun 2008 untuk mengakhiri kekerasan terhadap wanita. Ini adalah program multi-years yang bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. UNiTE menyerukan kepada pemerintah, masyarakat sipil, organisasi wanita, kaum muda, sektor swasta, media dan seluruh sistem PBB untuk bergabung dalam menangani pandemi global kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Lihat laman https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite (penerjemah)

terhadap perempuan, ternyata terlihat keberlanjutan (*continuum*) kekerasan gender yang tidak membedakan baik di daerah atau negara yang 'dianggap' damai, maupun yang stabilitasnya rendah atau dalam keadaan perang/konflik. Kekerasan gender tidak mencerminkan kategori perdamaian, stabilitas dan sebagainya yang secara tegas dan berbeda (artinya, label sebagai negara 'damai' tidak serta merta tidak adanya kekerasan terhadap perempuan di dalamnya-penerjemah). Banyak masyarakat yang dianggap damai atau stabil meskipun tingkat kekerasan terhadap perempuannya tinggi. Ini juga menggambaran sudut pandang yang sangat berbeda dalam 'memaknai' suatu kekerasan dan ketidak-amanan dari cara pandang para teoritisi HI tradisional yang melihat fenomena itu dengan bingkai agenda keamanan negara, yang merupakan karakteristik dari sudut pandang HI tradisional (realisme dan liberalisme). Dalam membuat perempuan 'terlihat' (visible atau diperhitungkan), feminisme juga menyoroti ketidakhadiran perempuan dalam pengambilan keputusan dan struktur kelembagaan internasional. Misalnya, pada tahun 2015 Bank Dunia memperkirakan bahwa secara global perempuan hanya 22,9% dari parlemen nasional. Salah satu asumsi inti dari perspektif tradisional yang ditantang oleh feminisme adalah fokus eksklusif pada bidang-bidang yang dianggap politik 'tinggi' (*high politics*), misalnya, kedaulatan, negara dan militer-keamanan. Fokus ilmuan tradisional HI adalah pada negara, dan hubungan di antara mereka (negara-negara) mengabaikan fakta bahwa laki-laki secara dominan bertanggung jawab atas institusi negara, kekuasaan yang mendominasi dan struktur pengambilan keputusan. Ini juga mengabaikan area lain, baik yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi pada arena politik global. Ini adalah kekhasan dari perspektif gender, karena perempuan secara nyata berkontribusi dalam cara-cara penting untuk politik global, meskipun mereka lebih cenderung menempati wilayah-wilayah yang tidak dianggap politik tinggi, dan kehidupan sehari-hari mereka mungkin dianggap pinggiran. Perspektif tradisional yang mengabaikan gender tidak hanya mengabaikan kontribusi perempuan dan dampak politik global terhadap mereka, tetapi juga terus-menerus membenarkan pengecualian ini. Jika perempuan berada di luar domain kekuasaan ini, maka pengalaman dan kontribusi mereka tidak relevan. Ahli teori feminis telah bekerja untuk menunjukkan bahwa

perbedaan antara privat dan publik adalah salah. Dengan melakukan itu, mereka menunjukkan bahwa area yang sebelumnya dikecualikan adalah pusat dari fungsi HI (yakni peran gender dalam politik global), bahkan jika mereka tidak diakui, dan bahkan penentuan apakah suatu topik bahasan itu termasuk dalam ranah HI atau bukan, dalam pemikiran teoritisi HI tradisional pun didasarkan pada gagasan-gagasan bias gender (*gendered ideas)* tentang apa yang diperhitungkan dan tidak dihitung (atau yang dimasukkan dalam bahasan HI atau yang tidak dimasukkan-penerjemah).

Ini membawa kita ke kontribusi kunci kedua dari feminisme, yakni mengungkap dan mendekonstruksi norma gender yang dibangun secara sosial. Dalam memahami HI dengan cara yang menganggap serius perempuan dan gender, feminisme telah menunjukkan (baca: membongkar) konstruksi identitas gender yang melanggengkan gagasan normatif tentang apa yang harus dilakukan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, penting untuk memahami perbedaan antara 'seks' sebagai biologis dan 'gender' sebagai konstruksi sosial. Tidak semua pertimbangan gender didasarkan pada analisis perempuan, dan memang tidak seharusnya mereka, dan gender berkaitan dengan harapan dan identitas yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender dipahami sebagai konsep yang dibangun secara sosial yang ditetapkan pada tubuh laki-laki atau perempuan, yaitu, perilaku yang dianggap sesuai dengan perilaku 'maskulin' (pria) atau 'feminin' (wanita). Maskulinitas sering dikaitkan dengan rasionalitas, kekuasaan, kemandirian, dan ruang publik. Feminitas sering dikaitkan dengan irasionalitas, emosional, membutuhkan perlindungan, urusan kerumahtanggaan dan lingkungan pribadi. Identitas gender yang dihasilkan secara sosial dan politik ini membentuk dan memengaruhi interaksi global, dan HI sebagai teori dan prakti dalam politik global, juga menghasilkan identitas gender seperti itu dalam melanggengkan asumsi tentang siapa yang harus melakukan 'apa' dan 'mengapa'. Identitas gender ini juga dijiwai oleh kekuasaan, khususnya kekuasaan patriarki, yang menempatkan perempuan dan identitas gender feminin di bawah laki-laki dan identitas gender maskulin. Artinya, identitas gender yang dikonstruksi secara sosial juga menentukan distribusi kekuasaan, yang berdampak pada keberadaan perempuan dalam politik global. Meskipun, laki-laki bisa memiliki karakter yang feminin, dan

perempuan dapat memiliki kecenderungan karakter maskulin, maskulinitas diharapkan untuk laki-laki dan feminitas perempuan.

Cynthia Enloe (1989) mengajukan pertanyaan ‘di mana perempuan?’, Mendorong sarjana HI untuk melihat ruang yang dihuni perempuan dalam politik global dan menunjukkan bahwa perempuan adalah aktor penting dalam sistem internasional. Dia fokus pada dekonstruksi perbedaan antara apa yang dianggap internasional dan apa yang dianggap pribadi (personal), dan menunjukkan bagaimana politik global berdampak pada, dan dibentuk oleh aktivitas sehari-hari pria dan wanita, yang pada gilirannya aktivitas ini juga bertumpu pada identitas gender. Secara tradisional, militer dan keputusan perang dipandang sebagai upaya maskulin, terkait dengan gagasan bahwa laki-laki adalah pejuang dan pelindung, bahwa mereka adalah aktor bersenjata sah yang berjuang untuk melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan, yakni perempuan, anak-anak dan laki-laki yang tidak berperang (karena tua, sakit atau alasan khusus lainnya). Dalam praktiknya, banyak cara perempuan berkontribusi dalam konflik, dan pengalaman dalam konflik itu telah dianggap periferal atau pinggiran, bahkan di luar pertimbangan para ilmuan tradisional HI. Misalnya, isu kekerasan seksual dan gender dalam konflik, baru belakangan ini masuk dalam agenda internasional. Relatif, pemerkosaan massal terhadap perempuan selama dan setelah Perang Dunia Kedua tidak dituntut karena kejadian tersebut dianggap sebagai produk sampingan perang yang tidak menguntungkan atau diabaikan begitu saja. Hal ini telah berubah, dengan Statuta Roma 2002 yang mengakui pemerkosaan sebagai kejahatan perang. Namun, pengakuan ini tidak mengarah pada pengurangan konflik terkait kekerasan seksual dan bentuk kekerasan ini tetap endemik di banyak konflik di seluruh dunia, begitu pula impunitas (atau pembebasan dari konsekuensi perbuatannya-penerjemah) atas kejadiannya.

Pada gilirannya, isu-isu ini menyoroti pentingnya pemahaman interseksi (saling bertemunya beberapa pendekatan), bahwa HI dibentuk tidak hanya oleh gender tetapi juga oleh identitas lain, seperti kelas, ras atau etnis. Interseksionalitas mengacu pada tempat irisan bidang identitas-identitas ini bertemu, dan pada gilirannya akan sampai pada pemahaman tentang bagaimana berbagai kelompok orang menjadi terpinggirkan. Ini

menunjukkan bahwa kita harus mempertimbangkan masing-masing pendekatan secara bersamaan, dan bukan dengan cara isolasi per bidang. Dalam menganalisa pemerkosaan masa perang, Lori Handrahan (2004, 437) telah menunjukkan persimpangan identitas gender dan etnis, di mana perempuan musuh dikonstruksikan sebagai 'orang lain', dan kekerasan terhadap mereka ,sebagai akibatnya, terjadi untuk mewakili 'perluasan wilayah etnis oleh penakluk laki-laki'. Ini bertumpu pada konstruksi gender, yang terjadi di persimpangan dengan bentuk identitas lain, seperti suku atau ras. Konstruksi gender yang terbentuk pada mereka, melihat perempuan dicirikan atau dimaknai sebagai 'sesuatu yang dilindungi' sehingga menaklukkan mereka (para perempuan 'pihak musuh' ini) melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual, adalah perwakilan dari kekuasaan dan dominasi atas musuh seseorang. Penerapan teori feminis pada isu pemerkosaan pada masa perang juga menunjukkan logika gender yang mengkonfirmasikan kejadian tersebut, khususnya pemerkosaan lawan laki-laki dilihat untuk 'feminisasi' (*feminise*), yaitu, mempermalukan, dan mengalahkan lawan. Ini sekali lagi menegaskan kontribusi feminisme dalam memahami bagaimana gender mempengaruhi HI, dan bagaimana nilai-nilai feminin diremehkan atau direndahkan.

Sebagaimana telah dibahas di atas, feminisme telah mengungkap kekerasan gender dan marginalisasi perempuan dalam politik global. Namun, hal ini juga menantang konstruksi perempuan berdasarkan gender sebagai damai, seperti membutuhkan perlindungan atau sebagai korban. Feminis melihat konstruksi ini sebagai bukti lebih lanjut dari ketidaksetaraan gender dan juga berkontribusi pada pengucilan perempuan dari perspektif HI tradisional. Jika perempuan dianggap sebagai korban dan bukan aktor, atau sebagai perempuan yang damai dan bukan agresif, atau hanya ada di ranah domestik atau privat (bukan ranah publik), maka pengalaman dan perspektif mereka tentang politik global lebih mudah diabaikan dan dibenarkan sebagai marginal. Cerita tentang perempuan yang mengganggu identitas gender ini, misalnya, menjadi perempuan yang agen kekerasan politik (atau, gambaran tentang seorang detektif perempuan yang sangat pandai berkelahi dan memainkan senjata, misalnya-penerjemah), telah menggoyahkan asumsi-asumsi tradisional tentang feminisme ini. Poin pemikiran ini juga merupakan kontribusi penting dari

feminisme, dan salah satunya, menantang konstruksi identitas gender yang tidak mencerminkan keragaman keterlibatan perempuan dalam HI, dan yang dalam praktiknya melanggengkan akses perempuan yang terbatas pada kekuasaan. Oleh karena itu, menganggap serius feminisme tidak hanya tentang pembalikan sejarah marginalisasi perempuan, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik global dengan mempertimbangkan aktor dan aksi yang lebih luas.

Feminisme dan Pemeliharaan Perdamaian

Membangun perdamaian setelah konflik menjadi perhatian utama para cendekiawan HI, terutama ketika konflik menjadi lebih luas dan lebih kompleks. Ada juga pertanyaan tentang bagaimana masyarakat pasca-konflik harus dibangun kembali, dan bagaimana cara terbaik untuk mencegah kekambuhan ke dalam konflik lagi. Misi pemeliharaan perdamaian adalah salah satu cara yang dicari komunitas internasional untuk melembagakan perdamaian yang berkelanjutan setelah konflik. Peran penjaga perdamaian PBB secara tradisional telah berkembang pesat dewasa ini. Misi perdamaian PBB dapat dipahami bertindak sebagai lawan bicara atau pengawas yang tidak memihak. Misi PBB sekarang ini sering meluaskan perannya ke urusan yang sebenarnya menjadi urusan ‘negara’ dalam keadaan normal, misalnya, termasuk membangun kembali pasukan polisi dan militer, serta membangun lembaga politik. Ahli teori feminis telah menunjukkan cara-cara pemeliharaan perdamaian dibentuk oleh gagasan maskulin tentang keamanan yang di-militerisasi. Situasi pasca-konflik umumnya dicirikan sebagai penghentian kekerasan formal antara kombatan bersenjata, idealnya beralih ke situasi di mana negara memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan. Pergeseran inilah yang berusaha difasilitasi oleh misi penjaga perdamaian, melakukan berbagai tugas seperti melucuti senjata kombatan, memfasilitasi kesepakatan damai antara berbagai kelompok negara dan non-negara, memantau pemilihan, dan membangun kapasitas supremasi hukum di lembaga-lembaga negara seperti pasukan polisi dan tentara.

Seperti yang ditunjukkan oleh para sarjana HI feminis, kekerasan terhadap perempuan sering berlanjut dalam periode pasca-konflik dengan

kecepatan yang sepadan, atau bahkan lebih besar daripada selama periode konflik. Ini termasuk pemerkosaan dan penyerangan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan prostitusi paksa, serta mereka yang menjual seks untuk mengurangi ketidak-amanan finansial (*financial security*). Pendekatan dominan yang berlaku untuk menjaga perdamaian seringkali mengaburkan jenis kekerasan ini. Isu-isu seperti kesetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga (dan hak asasi manusia) dianggap sebagai masalah 'lunak' *(soft issues*) sebagai lawan dari masalah 'keras' (*hard issues*) atau keamanan secara militer. Akibat pemahaman tentang perdamaian yang seperti ini, menjadikan isu keamanan perempuan tidak diutamakan.

Dalam hal kekerasan struktural dan yang bersifat tidak langsung, perempuan pada umumnya dikucilkan dari posisi kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam upaya rekonstruksi, dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Donna Pankhurst (2008) berteori dengan apa yang dia sebut sebagai '*reaksi pasca-konflik terhadap perempuan, yang terutama ditandai dengan tingginya tingkat kekerasan dan pembatasan akses perempuan ke sumber daya politik, ekonomi dan sosial pasca-konflik'*. Pembatasan akses perempuan ke sumber daya semacam itu, seperti makanan pokok, perumahan dan pendidikan, membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan gender. Hal ini sering dimulai dengan pengucilan perempuan dari negosiasi dan kesepakatan perdamaian, yang justru berfokus pada aktor elit yang sebagian besar adalah laki-laki, dan bahkan seringkali mereka adalah para laki-laki yang termiliterisasi. Dalam misi penjaga perdamaian, perempuan juga kurang terwakili. Pada tahun 1993, perempuan hanya mencapai 1% dari personel yang dikerahkan. Angka itu hanya meningkat menjadi 3% untuk militer dan 10% untuk personel kebijakan pada tahun 2014. Karena ketidaksetaraan gender semakin diakui, mereka yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian lebih memperhatikan penyebab dan konsekuensi ketidakamanan perempuan dalam pengaturan pasca-konflik.

Pada bulan Oktober 2000, Dewan Keamanan PBB mengabdikan seluruh sesi untuk Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, sebagai hasilnya sepakat mengadopsi Resolusi nomor 1325. Resolusi ini menyerukan agar perspektif gender 'diarus-utamakan' (*mainstreaming*) di

seluruh operasi perdamaian, dan agar perempuan diikutsertakan dalam perjanjian perdamaian dan pengambilan keputusan pasca-konflik, selain di bidang khusus masalah perlindungan perempuan dan anak perempuan (*girls)* selama konflik. Resolusi 1325 menyerukan semua aktor untuk mengakui 'kebutuhan khusus' (*special needs*) perempuan dan anak perempuan di masyarakat pasca konflik, untuk mendukung inisiatif perdamaian perempuan lokal, dan mengadvokasi perlindungan hak asasi perempuan dalam sistem pemilihan, peradilan dan kepolisian. Namun, konsisten dengan konstruksi pemahaman gender tentang perdamaian yang dibahas di atas, masih ada batasan untuk implementasi penuh Resolusi 1325.

Sebuah studi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yanag dilakukan oleh Radhika Coomaraswamy (2015) membuktikan bahwa gender dalam pemeliharaan perdamaian terus kekurangan sumber daya secara politis dan finansial, dan elemen gender dalam rekonstruksi pasca-konflik masih terpinggirkan dalam misi. Perempuan masih mengalami tingkat kekerasan pasca konflik yang tinggi, masih dipinggirkan dari proses perdamaian dan masih diabaikan dalam kebijakan pembangunan perdamaian. Peminggiran peran perempuan itu ditunjukkan, misalnya, dalam upaya nasional dan internasional untuk melucuti senjata mantan kombatan setelah konflik dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat pasca konflik. Ini adalah area kebijakan pascakonflik yang para cendekiawan pendukung feminisme secara rutin mengungkapkan tentang para wanita mantan kombatan yang sangat berkarakter gender dan dan memerlukan perlakuan khusus yang sering diabaikan (*highly gendered and exclusionary of women*). Megan Mackenzie (2010) mengaitkan hal ini dengan konstruksi identitas gender yang meminimalkan gagasan bahwa perempuan adalah agen dalam konflik, atau terlibat dalam keputusan perang, namun sebaliknya, mengkonstruksinya sebagai korban dengan agen terbatas. Dengan kata lain, mereka lebih diposisikan sebagai korban perang daripada berperan sebagai aktor perang.

Ini berarti bahwa perempuan tidak hanya dikeluarkan dari program pelucutan senjata karena norma-norma gender yang diproduksi secara sosial, tetapi juga bahwa mereka tidak dapat mengakses manfaat materi dan ekonomi yang mungkin mengalir dari program-program tersebut, atau

keuntungan politik dan sosial yang dapat mereka peroleh dari pengakuan sebagai veteran yang sah dalam masyarakat pasca-konflik. Contoh ini menunjukkan besarnya kekuatan yang ditanamkan dalam identitas gender, juga cara mereka dapat membentuk kebijakan, dan bagaimana ketidaksetaraan gender dilestarikan melalui kebijakan tersebut.

Akhirnya, intervensi internasional seperti misi penjaga perdamaian juga berkontribusi pada keberlanjutan kekerasan pasca konflik, dan merupakan tempat di mana identitas gender dihasilkan dan direproduksi. Ada banyak laporan tentang penjaga perdamaian yang melakukan kekerasan seksual terhadap wanita, anak perempuan dan anak lelaki saat menjalankan misi. Masalah ini mendapat banyak perhatian pada tahun 2015 dan hingga tahun 2016, ketika pelapor PBB tidak hanya mengungkap laporan pelecehan seksual terhadap anak-anak di Republik Afrika Tengah oleh penjaga perdamaian Prancis, tetapi juga kelambanan PBB dalam menghadapi laporan ini. Dari perspektif seorang feminis, impunitas (atau semacam kekebalan hukum karena tidak tersentuh aparat penegak hukum-penerjemah) yang dinikmati para penjaga perdamaian, meskipun ada komitmen retoris terhadap nol toleransi terhadap kasus semacam ini, adalah menunjukkan keharusan pentingnya konsep keamanan yang berperspektif gender, yang mencakup kerja-kerja keamanan-militer dan institusi-institusi baik organisasi internasional atau pun negara-negara, untuk diprioritaskan di atas kesejahteraan rakyat atau individu (kaum feminis meletakkan keamanan manusia lebih diutamakan daripada pertimbangan kesejahteraan-penerjemah).

Kesimpulan

Penelitian feminis telah berhasil menunjukkan nilai dalam mengambil pengalaman dan kontribusi perempuan secara serius, dan menggunakannya sebagai dasar untuk menunjukkan bagaimana HI berpijak, dan melanggengkan, gagasan-gagasan (bias) gender tentang siapa melakukan apa, siapa yang mengalami apa, dan mengapa itu terjadi, dalam arena politik global. Selain itu, ada juga pengakuan bahwa perempuan adalah agen penting dalam proses politik, ekonomi dan sosial. Terlepas dari sebutannya, feminisme lebih dari sekadar fokus pada wanita, atau apa yang

dianggap sebagai masalah wanita. Dalam menyoroti inequalitas atau ketidaksetaraan, dan relasi kekuasaan, feminisme mengungkapkan konsep kekuasaan yang bias gender, dan apa yang dilakukannya dalam politik global. Menjadi prihatin dengan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, ketidaksetaraan gender dan pembangunan identitas gender, kaum feminisme telah menantang konsep homogen tentang 'perempuan' (*women*) dalam studi dan praktik HI, dan sekaligus, mengekspos (menawarkan) logika gender sebagai kerangka kerja pengorganisasian yang kuat.

9
POSTKOLONIALISME
(POSTCOLONIALISM)

Sheila Nair

Postkolonialisme meneliti bagaimana masyarakat, pemerintah, dan orang-orang di wilayah yang sebelumnya dijajah di dunia melakukan hubungan internasional. Penggunaan istilah '*post*' oleh para sarjana postkolonial sama sekali tidak menunjukkan bahwa efek atau dampak dari pemerintahan kolonial sekarang sudah lama hilang. Sebaliknya, ini menyoroti dampak yang masih dimiliki oleh sejarah kolonialisme dan imperialisme dalam membentuk cara berpikir kolonial tentang dunia, dan bagaimana bentuk-bentuk pengetahuan dan kekuasaan Barat itu meminggirkan dunia non-Barat. Postkolonialisme tidak hanya tertarik untuk memahami dunia sebagaimana adanya, tetapi juga sebagaimana mestinya. Ini berkaitan dengan disparitas dalam kekuatan global dan akumulasi kekayaan, dan mengapa beberapa negara dan kelompok negara menjalankan begitu banyak kekuasaan di atas yang lain. Dengan mengangkat isu-isu seperti ini, postkolonialisme mengajukan pertanyaan yang berbeda terhadap teori HI, dan memungkinkan tidak hanya menjadi sebuah pembacaan alternatif atas sejarah, tetapi juga perspektif alternatif tentang peristiwa dan masalah kontemporer.

Dasar-Dasar Postkolonialisme

Postkolonialisme secara khusus memberikan perhatian pada pengabaian teori HI atas interseksi kritis imperialisme, ras, etnis, gender, dan perbedaan kelas (di samping faktor-faktor lainnya) dalam menganalisa cara kerja kekuatan global (*global power*) yang mereproduksi hierarkhi dalam HI. Hierarki ini tidak berorientasi atau bermuara pada perjuangan untuk mendistribusikan kekuasaan yang lebih setara (adil) di antara

masyarakat dan negara, tetapi justru merupakan usaha-usaha pemusatan (konsentrasi) kekuasaan di tangan beberapa aktor dominan saja.

Tema kunci pascakolonialisme adalah bahwa persepsi Barat tentang non-Barat adalah hasil warisan penjajahan dan imperialisme Eropa. Diskursus, terutama hal-hal yang tertulis atau diucapkan, mengkonstruksi negara dan masyarakat non-Barat sebagai 'orang lain' (*other*s), atau berbeda dengan Barat, biasanya dengan cara yang membuat mereka tampak menjadi lebih rendah (*inferior*). Dengan melakukan itu, mereka (para elit dan ilmuan yang membuat diskursus tersebut-penerjemah) membantu kekuasaan Eropa untuk membenarkan dominasi mereka atas orang lain atas nama membawa peradaban (*civilisation*) atau kemajuan.

Untuk lebih memahami postkolonialisme, kita dapat mempertimbangkan wacana yang membuat hubungan kekuasaan tertentu tampak alami, atau bahkan tak terhindarkan. Pascakolonialisme memandang isu-isu kunci dalam Hubungan Internasional sebagai wacana kekuasaan. Gagasan wacana ini memungkinkan para sarjana untuk memanfaatkan kerangka acuan untuk berpikir tentang dunia dan masalahnya yang tidak hanya berada dalam analisa yang didasarkan pembuktian fakta-fakta (*facts*) empiris untuk mendorong dan mendukung argumen teori HI tradisional, seperti realisme dan liberalisme. Ambil contoh, masalah ketimpangan global. Pascakolonialisme menyarankan bahwa untuk lebih memahami bagaimana hubungan kelas secara global muncul dan dipertahankan, kita harus membahas gagasan tentang mengapa hubungan ini tampak 'normal'. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana karakterisasi kemiskinan global sering kali disertai dengan gambaran dan narasi dari pemerintah dan masyarakat non-Barat sebagai primitif, hiper-maskulin, agresif, kekanak-kanakan, dan banci secara bersamaan. Singkatnya, postkolonialisme berpendapat bahwa menangani dan menemukan solusi untuk kemiskinan dan ketidaksetaraan global bertentangan dengan representasi dari pihak lain yang mempersulit pembuat kebijakan Barat untuk melepaskan bias mereka dan mengatasi faktor struktural global yang mendasarinya seperti bagaimana modal dan sumber daya diakumulasi dan mengalir di seluruh dunia itu mengakibatkan dan memproduksi ketidaksetaraan atau ketimpangan di segala bidang. Karena alasan ini, solusi sering kali hanya berfokus pada intervensi untuk

mendukung negara yang tampaknya kurang berkembang, daripada menangani penyebab utama ketidaksetaraan global.

Dalam menganalisis bagaimana konsep-konsep kunci seperti kekuasaan, negara dan keamanan berfungsi untuk mereproduksi status quo (baca: hierarkhi dan ketimpangan internasional-penerjemah), postkolonialisme mengajukan pandangan yang lebih kompleks tentang konsep-konsep tersebut daripada karakteristik teori tradisional HI. Misalnya, konsep kedaulatan, yang dengan itu bentuk (kontur) negara modern ditentukan, dipaksakan pada dunia kolonial (seluruh daerah jajahan) oleh kekuatan Eropa. Namun, anehnya, itu adalah konsep yang biasanya diterima begitu saja oleh para sarjana realisme dan liberalisme. Pascakolonialisme juga menantang perspektif Marxis yang berargumen bahwa perjuangan kelas adalah akar dari perubahan sejarah, namun, sebaliknya, kaum postkolonialisme menunjukkan bahwa bagaimana ras (baca: ras kulit putih-penerjemah) membentuk sejarah. Analisis yang berfokus hanya pada kelas, telah gagal mempertimbangkan bagaimana identifikasi 'Dunia Ketiga' atau *Third World* (istilah yang dikembangkan selama Perang Dingin untuk menggambarkan negara-negara yang tidak beraliansi dengan Amerika Serikat atau Uni Soviet) sebagai kelompok yang bercirikan 'terbelakang', 'primitif' atau 'non-rasional', terkait dengan marjinalisasi ekonomi yang terus menerus (persisten). Senada dengan itu, teori HI arus utama melihat sistem internasional sebagai anarki, para sarjana postkolonial melihatnya sebagai hierarki. Kolonialisme dan imperialisme memupuk proses panjang dominasi Barat atas seluruh dunia, dan bentuk dominasi budaya, ekonomi dan politik itu masih menjadi ciri politik global dewasa ini.

Postkolonialisme juga mendemonstrasikan bagaimana pandangan Barat tentang Islam dan penganutnya, yang sebenarnya hanya merupakan manifestasi dari ketidak-amanan Barat sendiri. Kebangkitan Islam politik (*political Islam*) di seluruh dunia Muslim, ditandai dengan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, tidak hanya melawan intervensi neo-imperialis, tetapi juga membongkar pondasi perubahan budaya dan sosial masyarakat yang menyertai sistem ekonomi global yang saling berhubungan *(interconnected*). Namun, di Barat, kebangkitan Islam ini telah ditafsirkan oleh pembuat kebijakan dan akademisi terkemuka sebagai pembawa

‘benturan peradaban’ atau *clash of civilization* (Huntington 1993), dan lebih buruk lagi, merupakan ancaman langsung bagi peradaban Barat. Edward Said (1997) menunjukkan bagaimana media, film, akademisi, dan elit kebijakan Barat menggunakan lensa atau kerangka yang terdistorsi yang digunakan untuk menggambarkan sejarah dan budaya masyarakat Arab dan penganut Islam. Dia menyebutnya sebagai ‘Orientalisme’ karena ia membangun ide tertentu dari apa yang disebut ‘Timur’ atau ‘Orient’, yang berbeda dari Barat, dan yang dalam cara berpikir biner atau dualistik dianggap berasal dari Timur, dan karakteristik penduduknya yang pada dasarnya berlawanan dengan Barat. Misalnya, orang-orang dari Timur dicirikan sebagai orang yang eksotis, emosional, feminin, terbelakang, hedonistik, non rasional, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan atribut yang lebih positif yang biasanya dikaitkan dengan Barat seperti rasionalitas, maskulinitas, peradaban, dan modernitas. Banyak sarjana postkolonial menekankan bagaimana wacana orientalis masih terlihat dalam representasi Barat saat ini. Representasi dan persepsi merupakan 2 hal yang penting bagi ahli teori postkolonial karena mereka mendikte apa yang kemudian dilihat sebagai sesuatu yang normal atau masuk akal. Postkolonialisme berhutang banyak kepada Edward Said untuk karyanya dalam mengembangkan Orientalisme. Namun, Said sendiri dipengaruhi oleh tulisan para pemikir antikolonial dan nasionalis seperti Frantz Fanon (1967) dan Albert Memmi (1991) yang karyanya membahas tentang kekuatan proses pelabelan sebagai ‘orang lain’ atau *‘others’* (*the power of Othering*). Misalnya, Fanon menunjukkan bagaimana ras membentuk cara penjajah berhubungan dengan yang terjajah, dan sebaliknya, dengan memperhatikan bagaimana beberapa orang di bawah pemerintahan kolonial mulai menginternalisasi ide-ide perbedaan ras yang melihat ‘orang lain’ (*others*) sebagai inferior terhadap orang Eropa kulit putih. (label ‘*Others*’ ini dari sudut pandang Eropa, sehingga non-Eropa yang bercirikan ‘berbeda’ dari ras, warna kulit, kebudayaan, keterbelakangan, kemiskinan dan lain sebagainya, di masukkan dalam kategori ‘*Others*’-penerjemah). Fanon menjelaskan bahwa ‘orang kulit hitam’ dibuat (dikonstruksi pikirannya) untuk percaya pada inferioritasnya terhadap ‘penjajah kulit putih’ melalui aspek psikologis penjajahan, seperti pemberlakuan unsur-unsur kehidupan masyarakat terjajah dengan unsur-unsur dari penjajah,

misalnya penggunaan bahasa penjajah, budaya, agama dan sistem pendidikan. Melalui pemaksaan seperti itu, kaum terjajah menjadi percaya bahwa mereka adalah orang lain *(others*) yang secara budaya lebih rendah. Internalisasi ini memudahkan penjajah untuk membenarkan dan mempertahankan aturan mereka. Dengan demikian, postkolonialisme memfokuskan bagaimana biner rasial, yaitu, bagaimana ras dikonstruksi sebagai berbeda, berlawanan atau 'lainnya' (*others*), itu berlanjut terus, bahkan setelah berakhirnya pemerintahan kolonial formal (pasca-dekolonisasi atau setelah kemerdekaan). Ini menyoroti bagaimana kerangka atau aspek lain yang di-rasialisasi itu tidak hanya sejarah, tetapi perdebatan kontemporer seperti keamanan nasional, politik nuklir, nasionalisme, budaya, imigrasi, bantuan internasional dan perjuangan hak masyarakat adat.

Contoh rasisasi (*racialise*) dari kelompok '*others*' yang non-Eropa (atau, non kulit putih, Barat-penerjemah) dapat ditemukan dalam wacana seputar non-proliferasi nuklir. Dalam wacana seperti itu, negara dan pemimpinnya di belahan dunia selatan (*global South*) biasanya dianggap tidak dipercaya dengan senjata nuklir. Wacana dominan ini membangun negara-negara ini sebagai berbahaya, tidak dapat diprediksi atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan melanggar norma-norma dasar tentang hak asasi manusia. Kita hanya perlu melihat bagaimana Korea Utara dan Iran, dua negara yang mengejar proliferasi nuklir, digambarkan sebagai negara-negara nakal dalam wacana kebijakan luar negeri AS. Namun, selama beberapa dekade, pengabaian hak asasi manusia oleh Barat dapat dilihat dalam penambangan uranium yang sering terjadi di tanah yang dihuni oleh masyarakat adat di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, dan telah menyebabkan kematian, penyakit, dan kerusakan lingkungan. Yang terpenting, yang sering hilang dari perdebatan nuklir adalah fakta, bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya kekuatan yang pernah menggunakan senjata nuklir (selain dari pengujian), ketika menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang pada tahun 1945, dengan kematian yang mengerikan dan menghancurkan. Oleh karena itu, bagi sarjana postkolonial seperti Shampa Biswas (2014), anggapan bahwa beberapa negara dapat dipercaya dengan senjata nuklir, sementara yang lain tidak dapat dipercaya karena mereka kurang berkembang, kurang matang dalam pendekatan

mereka terhadap kehidupan manusia, atau kurang rasional, adalah wacana rasial (yang diskriminatif-penerjemah). Dalam perdebatan seperti ini, postkolonialisme tidak menanyakan siapa yang dapat dipercaya dengan senjata semacam itu, tetapi siapa yang menentukan siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak dapat, dan mengapa? Hanya dengan melihat persaingan antar negara untuk memperoleh senjata nuklir saja, tidak akan memberi tahu kita cukup banyak tentang cara kerja kekuasaan dalam hubungan internasional seperti bagaimana perlombaan senjata nuklir yang didukung oleh beberapa kekuatan negara Barat itu mengkonstruksikan wacana bagi negara-negara lain (*others*), sehingga mereka menjadi dianggap tidak mampu memiliki senjata semacam itu sama sekali.

Postkolonialisme dan Marginalisasi Wanita Kulit Berwarna

Seperti semua teori HI, ada perdebatan internal di antara para sarjana postkolonial, dan dalam hal ini juga tumpang tindih yang signifikan dengan feminisme, terutama feminisme 'gelombang ketiga' (*third wave*) yang menjadi menonjol di tahun 1990-an. Bell Hooks (2000) mengamati bahwa apa yang disebut *'second wave'* atau 'gelombang kedua' feminisme pada pertengahan hingga akhir abad ke-20 telah muncul dari wanita dalam posisi istimewa, dan tidak mewakili wanita Afrika-Amerika seperti dirinya yang tetap berada di pinggiran masyarakat, baik secara politik, ekonomi dan budaya/sosial. Dia menyerukan aktivisme dan politik feminis alternatif, yang kritis dan khas.

Misalnya, apakah wanita kulit hitam dari lingkungan miskin di sisi selatan Chicago mengalami seksisme dengan cara yang sama seperti wanita kulit putih dari pinggiran kota yang lebih kaya? Wanita yang memiliki identitas etnis yang sama mungkin mengalami seksisme dengan cara yang berbeda karena kelasnya. Hal yang sama mungkin berlaku untuk wanita kulit berwarna dan wanita kulit putih dari kelas sosial yang sama. Wanita kulit berwarna dan wanita kulit putih di Amerika Serikat mengalami 'heteropatriarki' - sebuah tatanan masyarakat yang ditandai oleh dominasi heteroseksual pria kulit putih - secara berbeda meskipun mereka berasal dari kelas sosial yang sama. Sebuah Ilustrasi tentang cara kerjanya dapat

ditemukan dalam video *Beyonce's Lemonade'*[5] yang tidak hanya mengacu pada bagaimana seksisme disaring melalui tatanan patriarkal ini, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana ras, jenis kelamin, kelas dan seksualitas terjalin erat dalam sejarah perempuan kulit hitam.

Fakta bahwa beberapa wanita kulit hitam mungkin lebih diistimewakan dalam kaitannya dengan kelas mungkin tidak mengurangi pengalaman rasisme mereka. Untuk alasan ini (dan lainnya), ilmuan postkolonial feminis (lihat Chowdhry dan Nair 2002) menyerukan perhatian lebih pada persimpangan ras dan/atau etnis, kebangsaan, kelas dan jenis kelamin. Dengan melakukan itu, mereka membahas cara-cara di mana berbagai aspek identitas seseorang, seperti ras, jenis kelamin, kelas, seksualitas, dan sebagainya, ber-interseksi (saling bertemu pada bidang tertentu) untuk menciptakan berbagai bentuk penindasan yang berbeda sehingga tidak ada satu aspek pun yang dapat diistimewakan dalam memahami penindasan. Sebaliknya, berbagai identitas harus dipahami sebagai pertemuan sekaligus perpotongan bidang (interseksi) dalam menghasilkan pengalaman penindasan seseorang. Gagasan tentang 'interseksionalitas' ini adalah inti dari pendekatan feminis gelombang ketiga.

Feminis postkolonial memiliki keinginan yang sama untuk lebih dari sekadar menganalisis dampak patriarki, ketidaksetaraan gender, dan eksploitasi seksual. Sebaliknya, mereka menyoroti kebutuhan untuk melawan tidak hanya patriarki (secara luas dipahami sebagai kekuatan laki-laki atas perempuan), tetapi juga klasisme dan rasisme yang mengutamakan perempuan kulit putih daripada perempuan kulit berwarna. Mereka mempertanyakan gagasan solidaritas universal dalam gerakan perempuan, dengan alasan bahwa perjuangan melawan patriarki serta ketidaksetaraan sosial harus ditempatkan dalam kaitannya dengan ras, etnis dan hak istimewa berdasarkan kategori seksual. Misalnya, meski feminisme Barat

---

[5] Album tersebut mengisahkan perempuan kulit hitam yang kembali tampil ke panggung sejarah nasional, regional dan diaspora internasional, dari tradisi Gotik Selatan. Selain 'kuat' dan 'ajaib', Lemonade menegaskan bahwa perempuan kulit hitam adalah alkemis (ahli kimia) dan ahli metafisika, sekaligus mewakili masa lalu, sekarang dan masa depan, yang sanggup mengubah dan mampu menyembuhkan dunia fisik, kimiawi, dan spiritual di sekitar mereka. Perjalanan hidup wanita kulit hitam yang sangat berat digambarkan dalam film ini (penerjemah).

sering menggambarkan cadar sebagai simbol penindasan terhadap perempuan, banyak perempuan Aljazair mengadopsi cadar, berdiri di samping laki-laki, saat memprotes pemerintahan Prancis. Bagi mereka, itu adalah simbol oposisi terhadap patriarki kolonial kulit putih. Di banyak bagian lain di negara-negara terjajah, wanita berdiri bahu-membahu dengan pria dalam gerakan nasionalis untuk menggulingkan pemerintahan kolonial, menunjukkan bahwa wanita dalam konteks budaya, sosial dan politik yang berbeda mengalami penindasan dengan cara yang sangat berbeda.

Feminis postkolonial berkomitmen pada pendekatan titik-temu yang mengungkap implikasi lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa kekerasan sistemik yang terbukti dalam perang, konflik, teror, kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan sebagainya telah mengakar dalam berbagai belahan dunia. Dalam memahami kekuasaan, dengan demikian, membutuhkan perhatian serius pada interseksi bidang ini, dan bagaimana mereka tertanam dalam masalah yang sedang dihadapi.

Feminisme postkolonial menegaskan bahwa perempuan kulit berwarna ditindas tiga kali lipat karena (1) ras/etnis, (2) status kelas, dan (3) jenis kelamin. Sebuah contoh dapat ditemukan dalam kondisi kerja banyak perempuan di Dunia Selatan (global South atau dunia ketiga) yang bekerja di pabrik yang memproduksi tekstil, semi-konduktor, dan barang-barang olah raga dan konsumsi untuk diekspor ke negara-negara Barat. Di salah satu pabrik di Thailand, Pabrik Mainan (*Kader Toy Factory*), kebakaran tahun 1993 menewaskan 220 pekerja pabrik wanita dan melukai lebih dari 500 lainnya. Pintu gedung terkunci pada saat kebakaran. Tragedi itu mengungkap eksploitasi dan kondisi kerja yang menyedihkan dari para wanita ini, yang dipekerjakan oleh kontraktor lokal perusahaan Amerika untuk membuat mainan dan boneka binatang untuk dijual di pasar Barat (Eropa dan Amerika Serikat). Terlepas dari beberapa dekade pelanggaran semacam itu, hanya ada sedikit perhatian yang diberikan pada kondisi di pabrik-pabrik ini, atau pada tragedi kebakaran, di media utama (*mainstream*) Barat. Sebagian opini media di bawah ini menggambarkan pengabaian yang mengejutkan atas tentang kehidupan para wanita itu;

> Para eksekutif ini tahu bahwa keuntungan mereka berasal dari jerih payah kaum muda dan orang malang di Timur Jauh, mereka bisa hidup dengan itu, dengan hidup yang nyaman. Itu faktanya. Tetapi, mereka tidak ingin berbicara tentang perempuan dan gadis yang menjadi korban kebakaran yang yang jasadnya ditumpuk di halaman pabrik seperti seonggok sampah. Tubuh mereka akhirnya akan dibawa pergi seperti puing-puing industri lainnya (Herbert 1994).

Dalam tragedi lainnya, Rana Plaza, sebuah pabrik garmen di Dhaka, Bangladesh, runtuh, menewaskan 1.135 pekerja garmen, kebanyakan wanita. Ini menyoroti cara kerja industri garmen global. Produsen pakaian yang diekspor ke negara-negara Barat yang populer mendapatkan keuntungan dari upah buruh yang rendah, eksploitasi dan kondisi pabrik pengab, di negara-negara dengan standar peraturan bangunan pabrik yang lemah/rendah, dan standar keamanan *(safety*) tenaga kerja yang tidak ada (atau tidak memadai). Penanggungjawab Rantai produksi pakaian (pemerintah atau bahkan asosiasi buruh) akhirnya tidak dapat meminta pertanggungjawaban pabrik atas kondisi buruh, situasi dan beban kerja serta keselamatan pekerjanya. Para ahli postkolonial berpendapat bahwa kondisi yang sangat eksploitatif dan pengabaian terhadap keselamatan para pekerja ini menunjukkan bahwa nilai yang lebih rendah dianggap berasal dari 'tubuh cokelat' dibandingkan dengan yang berkulit 'putih'

Meskipun ada lebih banyak liputan tentang kecelakaan industri ini di media Barat, dan merek yang pakaiannya dibuat di Rana Plaza mengalami publisitas buruk sesaat, namun, hanya ada sedikit upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kesalahan dalam operasi perusahaan multinasional. Pencarian untuk margin keuntungan setinggi mungkin memaksa negara-negara berkembang untuk 'berlomba ke tempat yang paling bawah' (*a race to the buttom*) di mana mereka bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja dan biaya produksi termurah untuk menarik investasi dari perusahaan multinasional.

Hasilnya adalah upah rendah, eksploitasi dan standar keamanan pekerja yang rendah. Para ilmuan postkolonial menjelaskan kegagalan untuk mengubah kondisi ini, dengan mengungkap bagaimana ras, kelas dan

gender bersatu untuk mengaburkan penderitaan para pekerja ini, yang berarti bahwa pengawas pabrik, seperti pemilik Rana Plaza dan Kader Factory, tidak dimintai pertanggungjawaban (atau tidak dikontrol pekerjaannya agar sesuai dengan standar yang berlaku) sampai tragedi itu terjadi. Bahkan ketika mereka dimintai pertanggungjawaban, hukuman tidak meluas ke perusahaan-perusahaan Barat lebih jauh, dari rantai yang men-subkontrakkan pekerjaan/proyek untuk mengeksploitasi para pekerja itu, dan pada akhirnya membunuh beberapa dari mereka dalam kasus ini. Hampir tidak mungkin untuk membayangkan bahwa tragedi dengan skala yang sama di negara Barat hanya akan menimbulkan sedikit tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab atau membiarkan kondisi yang menyebabkannya terus berlanjut tanpa terkendali.

Kesimpulan

Postkolonialisme menginterogasi tatanan dunia yang didominasi oleh aktor-aktor negara besar dan kepentingan mereka yang mendominasi serta cara pandang mereka terhadap dunia. Ini menantang gagasan yang telah bertahan tentang cara negara bertindak atau berperilaku dan apa yang memotivasi mereka. Poskolonialis memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan sulit tentang bagaimana dan mengapa tatanan internasional hierarkis muncul, dan selanjutnya menantang asumsi inti HI arus utama (*mainstream*) tentang konsep-konsep seperti kekuasaan dan cara kerjanya. Pascakolonialisme memaksa kita untuk memperhitungkan ketidakadilan sehari-hari, dan penindasan yang dapat menunjukkan diri mereka sendiri dengan cara yang paling kejam melalui saat-saat krisis tertentu. Entah itu berkaitan dengan ancaman senjata nuklir atau kematian pekerja di pabrik yang memproduksi barang-barang untuk pasar Barat. Postkolonialisme meminta kita untuk menganalisis masalah ini dari perspektif mereka yang kekurangan daya dan terpinggirkan. Meskipun postkolonialisme memiliki kesamaan dengan teori kritis lainnya dalam hal ini, ia juga menawarkan pendekatan yang berbeda. Ini menyatukan keprihatinan yang mendalam dengan sejarah kolonialisme dan imperialisme, bagaimana bisa hal ini dibawa hingga saat ini, dan bagaimana ketidaksetaraan dan penindasan yang tertanam dalam hubungan ras, kelas dan gender dalam skala global

itu sangat penting bagi pemahaman kita tentang hubungan internasional. Dengan memperhatikan dengan cermat bagaimana aspek-aspek global ini bermain dalam konteks tertentu, postkolonialisme memberi kita lensa konseptual yang penting dan alternatif yang memberi kita seperangkat alat teoretis berbeda untuk mengungkap dan membongkar kompleksitas dunia ini.

10
MENUJU TEORI HI GLOBAL?

Amitav Acharya

Studi tentang Hubungan Internasional berkembang pesat di seluruh dunia. Mahasiswa HI di universitas-universitas Barat adalah kelompok yang semakin multikultural, diambil dari berbagai belahan dunia. Departemen dan program HI juga berkembang biak di universitas di luar Barat, terutama di negara-negara besar seperti Cina, India, Turki, Brasil, dan Indonesia. Namun, HI belum benar-benar merupakan disiplin global yang menangkap berbagai ide, pendekatan, dan pengalaman masyarakat Barat dan non-Barat. Teori dan konsep HI masih sangat bias untuk mendukung Eropa Barat dan Amerika Serikat. Akibatnya, mereka mengabaikan pengalaman dan hubungan internasional di bagian lain dunia, atau menawarkan ketidaksesuaian perspektif atau pun pendekatan untuk memahami dan menjelaskan hubungan di luar negara-negara Barat.

Gagasan HI global menggugat pengabaian dan marginalisasi oleh para teoritisi HI tradisional, terutama realisme dan liberalisme, terhadap suara dan pengalaman dunia non-Barat, atau Dunia Selatan. Tujuan utama HI global adalah untuk ‘membawa gagasan Non Barat’ (*to bring the Rest in*) dalam pemikiran HI secara komprehensif. Ini membutuhkan partisipasi yang lebih besar dari para sarjana dari Dunia Selatan dalam disiplin HI dan perluasan cara HI diajarkan dan ditulis di pusat-pusat pengetahuan yang dominan di Barat. Tujuan HI global adalah untuk memastikan transformasi disiplin menjadi sesuatu yang benar-benar menangkap dan menjelaskan hubungan antar negara dan masyarakat di semua bagian dunia; Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Perspektif HI global tentang teori HI tidak berusaha untuk menggantikan teori yang ada, tetapi menantang mereka untuk memperluas wawasan mereka dan mengakui tempat dan peran dunia non-Barat.

Ada banyak alasan untuk dominasi HI Barat sampai sekarang. Salah satunya adalah status hegemoni cendekiawan, publikasi, dan institusi Barat di HI dan keyakinan mereka yang tersebar luas bahwa teori HI Barat telah menemukan jalan yang benar untuk memahami HI, atau jawaban yang benar untuk teka-teki dan masalah saat ini. Yang memperparah masalah adalah kurangnya sumber daya institusional di dunia non-Barat. Selain itu, tantangan yang dihadapi para sarjana dari negara-negara yang tidak berbahasa Inggris untuk dipublikasikan di jurnal HI utama atau untuk mengejar debat besar dan perkembangan di bidang yang sebagian besar dilakukan dalam bahasa Inggris. Faktor lainnya adalah hubungan erat antara akademisi HI dan pemerintah di banyak negara berkembang (meskipun ini juga merupakan fitur di Barat), yang mempromosikan penelitian berorientasi kebijakan dengan mengorbankan kerja-kerja teoretis sebagai seorang ilmuan. Ada juga kecenderungan di antara banyak sarjana HI di Dunia Selatan menerima secara tidak kritis dari teori-teori yang berasal dari Barat, dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan diri untuk melawan teori Barat. Dalam situasi ini, apa yang dianggap sebagai teori, sebagian besar adalah penerapan konsep dan model teoretis Barat ke dalam konteks lokal, daripada menyuntikkan gagasan dan wawasan asli dari praktik lokal ke bagian utama teori HI.

Disiplin Hubungan Internasional, seperti yang sering disajikan dalam buku teks utama dan program pembelajaran dan pelatihan dari pengajaran institusi utama, dikatakan telah dimulai secara nominal di Inggris pada tahun 1919 ketika departemen dan jabatan profesor pertama dalam politik internasional diciptakan di Aberystwyth, Wales. Tapi itu benar-benar berkembang di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Bukan suatu kebetulan bahwa negara-negara ini adalah kekuatan utama dunia sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Menurut pandangan tradisional, HI dimulai dengan Perdamaian Westphalia (1648), ketika Eropa mengembangkan negara-bangsa yang berdaulat. Ini juga bertepatan kira-kira dengan kebangkitan 'Barat' melalui sistem negara Eropa yang meluas ke seluruh dunia karena kolonialisme dan imperialisme Eropa.

Ketika negara-negara non-Barat merdeka selama periode dekolonisasi pasca-1945, mereka mewarisi dan mengadopsi gagasan, institusi, dan praktik Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua, sementara

beberapa gagasan Eropa mempertahankan sentralitasnya, Amerika Serikat menambahkan gagasan dan pendekatannya sendiri. Eropa sebelum tahun 1945 telah mengatur hubungan internasional melalui keseimbangan sistem kekuasaan, yang didasarkan pada gagasan bahwa stabilitas sistem internasional paling baik dijamin melalui perkiraan paritas atau keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan utamanya. Setiap upaya oleh kekuatan tunggal untuk menjadi hegemonik (mendominasi yang lainnya) harus dikalahkan oleh aliansi di antara kekuatan lain di dalam sistem. Di sisi lain, Amerika Serikat berupaya mengatur tatanan internasional melalui lembaga multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Moneter Internasional. Meskipun lembaga-lembaga ini secara teoritis terbuka untuk partisipasi semua negara, tujuan dan agenda mereka sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan preferensi Amerika Serikat dan sekutunya.

Dibentuk oleh gagasan-gagasan dan praktik Barat, bidang HI memberikan sedikit perhatian pada 'dunia non-Barat' (*The Rest*). Literatur HI tradisional memandang negara-negara non-Barat sebagai 'pengambil norma' (*norm taker*) atau 'subjek pasif' (*passive subject*), penerima gagasan dan lembaga Barat daripada kontributor aktif untuk tatanan internasional dalam gagasan dan perspektif mereka sendiri. Bertentangan dengan pandangan tradisional ini, Global IR atau HI Global menawarkan narasi alternatif. HI sebagai suatu disiplin ilmu mungkin telah ditemukan di Barat, tetapi substansi HI tidak dimulai dengan Peace of Westphalia pada tahun 1648 itu, yang menandai dimulainya periode dominasi Barat yang identik dengan kolonialisme dan imperialisme di seluruh dunia. Peradaban lain dan yang lebih tua - seperti India, Cina dan Islam, memelopori sistem internasional dan tatanan dunia yang berbeda. Untuk alasan ini, kontribusi mereka harus lebih sentral untuk studi HI. HI harus mempelajari tidak hanya sistem internasional anarkis seperti sistem negara-kota Yunani dan Eropa setelah Perdamaian Westphalia, tetapi juga sistem hierarki seperti yang berlaku di Asia dan Timur Tengah sebelum munculnya kolonialisme Eropa.

HI Global juga berpendapat bahwa sistem internasional harus dipelajari tidak hanya dalam hal interaksi politik-strategis tetapi juga interaksi budaya dan peradaban. Banyak dari apa yang disebut konsep

modern seperti saling ketergantungan ekonomi, keseimbangan kekuasaan, dan manajemen keamanan kolektif, yang sering dilacak oleh HI tradisional hingga gagasan dan praktik di Eropa, sebenarnya gagasan seperti itu memiliki banyak titik asal, baik di dalam maupun di luar Eropa. Dengan cakupan yang lebih luas, HI kemudian diharapkan dapat menawarkan lebih banyak ruang untuk sejarah, budaya, sistem ekonomi dan interaksi serta kontribusi peradaban dari negara-negara non-Barat. HI paling baik dipahami sebagai produk interaksi dan pembelajaran timbal balik antara semua peradaban dan negara, meskipun beberapa di antaranya lebih kuat daripada yang lain di berbagai tahap dalam sejarah.

Secara garis besar, gagasan HI global berkisar pada enam dimensi utama (lihat Acharya 2014 dan 2016).

Pertama, HI global menyerukan pemahaman baru tentang universalisme atau universalitas. Makna dominan universalisme dalam HI saat ini sangat dipengaruhi oleh Pencerahan Eropa (*the European Enlightenment*). Seperti yang dikatakan Robert Cox (2002, 53), bahwa makna *enlightenment*, adalah universal, dalam arti 'benar untuk semua ruang dan waktu'. Konsepsi universalisme-nya dapat disebut 'universalisme partikularistik' (*particularistic universalism*), dalam arti satu set ide/gagasan dari Eropa berlaku untuk semua umat manusia. Konsepsi universalisme ini memiliki sisi gelap; penindasan terhadap keragaman dan pembenaran imperialisme Eropa, yang diilhami oleh keyakinan bahwa gagasan, institusi, dan praktik Eropa lebih unggul daripada gagasan, institusi, dan praktik orang lain, dan karenanya, pantas untuk diterapkan pada masyarakat lain melalui cara apa pun, termasuk dengan kekerasan, dan pendudukan (kolonialisme). Sebuah alternatif dari universalisme partikularistik adalah universalisme pluralistik (*pluralistic universalism*). Ini mengakui keragaman di antara bangsa-bangsa, menghormatinya, dan berusaha menemukan kesamaan di antara mereka. Universalisme pluralistik ini memandang HI sebagai disiplin ilmu dengan landasan global dan multi disiplin.

Kedua, perspektif HI global mendorong HI untuk lebih secara otentik didasarkan pada sejarah dunia, bukan sejarah Barat, dan dalam hal gagasan, institusi, perspektif intelektual dan praktik mencakup baik yang berasal dari masyarakat Barat dan non-Barat. '*Bringing the Rest in'*

(membawa gagasan Non Barat) dalam studi HI, tidak berarti hanya menggunakan dunia non-Barat sebagai tempat pengujian untuk memvalidasi ulang teori HI yang ada setelah beberapa penyesuaian dan ekstensi pemahamannya. HI Global harus merupakan proses dua arah. Tantangan utama bagi teori dan ahli teori HI global adalah mengembangkan konsep dan pendekatan dari konteks non-Barat dengan istilah mereka sendiri, dan menerapkannya tidak hanya secara lokal tetapi juga ke konteks lain, termasuk kanvas global yang lebih besar.

Ketiga, HI global, lebih dari sekedar menggantikan pengetahuan HI yang ada, termasuk teori, metode, dan klaim ilmiah yang sudah kita kenal. Saya sepenuhnya menyadari bahwa teori HI hampir tidak monolitik atau tidak berubah ketika berhubungan dengan dunia non-Barat. Beberapa teori, terutama postkolonialisme dan feminisme, telah menjadi yang terdepan dalam upaya untuk mengenali peristiwa, masalah, agen dan interaksi di luar Barat dan menarik wawasan teoritis dari mereka untuk memperkaya studi HI. Realisme berada di depan liberalisme dalam menarik wawasan dari dunia non-Barat. Misalnya, realis mengakui pemikiran Kautilya India atau pemikir legalis China, seperti Han Feizi, sebagai cikal bakal Machiavelli atau Hobbes. Realisme juga telah menambahkan varian baru ke dalam kelompok teoretisnya yang membuatnya lebih relevan dengan dunia non-Barat daripada dalam bentuk klasiknya. Konstruktivisme menjadi sangat penting dalam membuka ruang bagi keilmuan di dunia non-Barat karena tekanannya pada budaya dan identitas. Realisme dan liberalisme mengistimewakan penentu materi hubungan internasional, seperti kekuasaan atau kekayaan. Ini sering sekali tidak tersedia di negara-negara berkembang. Tetapi, ide dan normanya tidak demikian, dan mereka sering menjadi mekanisme utama yang digunakan negara berkembang untuk memberikan kontribusi mereka pada hubungan internasional. Liberalisme juga berguna dalam pengertian ini, karena ia mengidentifikasi dan menentukan tiga jalan utama menuju perdamaian, yakni, saling ketergantungan ekonomi, lembaga multilateral, dan demokrasi. Dunia telah melihat tren yang meningkat ke arah ini di negara berkembang. Saling ketergantungan ekonomi global telah tumbuh sejak akhir Perang Dingin. Ada saling ketergantungan ekonomi regional yang tumbuh di Asia Timur, wilayah kritis dunia. Lembaga multilateral telah berkembang biak,

termasuk di bidang yang relatif lebih baru seperti dunia maya dan perubahan iklim. Dalam taraf yang lebih rendah, demokratisasi telah berlangsung di negara berkembang, terutama di Amerika Latin dan sebagian Asia Timur, seperti Indonesia dan Myanmar. Perkembangan ini berpotensi membuat liberalisme lebih relevan untuk memahami politik internasional dunia non-Barat.

Pada saat yang sama, HI global tidak membiarkan teori arus utama, yakni, realisme, liberalisme, dan konstruktivisme seperti apa adanya. Namun, sebaliknya, HI global mendesak mereka untuk memikirkan kembali asumsi mereka dan memperluas cakupan penyelidikan mereka. Untuk realisme, tantangannya adalah untuk melihat melampaui konflik yang disebabkan oleh kepentingan nasional dan distribusi kekuasaan dan mengakui sumber lembaga lain, termasuk budaya, gagasan, dan norma yang membuat negara dan peradaban tidak bentrok, tetapi saling merangkul dan belajar dari satu sama lain. Bagi kaum liberal, ada tantangan serupa untuk melihat melampaui hegemoni Amerika sebagai titik awal penyelidikan multilateralisme dan regionalisme serta bentuk kelembagaan mereka. Liberalisme juga perlu mengakui variasi signifikan dalam perilaku kerja sama yang ada dalam konteks lokal yang berbeda, karena tidak ada model integrasi atau interaksi tunggal yang dapat menjelaskan semua atau sebagian besar dari mereka. Untuk konstruktivisme, mempertimbangkan berbagai bentuk agensi dalam penciptaan dan penyebaran ide dan norma tetap menjadi tantangan utama.

Keempat, HI global memberikan panggung utama ke wilayah negara-negara atau kawasan-kawasan. Regionalisme saat ini kurang berpusat pada negara dan mencakup aktor dan isu yang semakin luas. Regionalisme kadang-kadang dipandang sebagai antitesis universalisme, tetapi keduanya bisa saling melengkapi. Pengelompokan (groupings) seperti *European Union (EU), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),* dan *African Union (AU*) sebenarnya melengkapi peran PBB dalam peacekeeping, operasi kemanusiaan dan manajemen konflik. Kajian tentang daerah (kawasan) tidak hanya tentang bagaimana daerah mengatur sendiri ruang ekonomi, politik dan budayanya, tetapi juga tentang bagaimana mereka berhubungan satu sama lain untuk membentuk tatanan global. Selain itu, fokus pada wilayah (kawasan) sangat penting untuk

menempa integrasi yang erat antara pendekatan disipliner (yang seringkali memiliki cakupan global) dan studi area (atau regional).

Kelima, HI yang benar-benar global tidak dapat didasarkan pada eksepsi budaya dan parokialisme. Eksepsionalisme adalah kecenderungan untuk menampilkan ciri-ciri suatu kelompok sosial sebagai homogen, unik secara kolektif, dan lebih unggul dari yang lain (misal Eropa atau Barat yang ditampilkan lebih unggul dari belahan dunia yang lain atau wilayah Timur-penerjemah). Klaim tentang status istimewa dari yang lain atau eksepsionalisme sering dikaitkan dengan agenda politik dan tujuan elit penguasa, seperti yang terlihat dalam konsep seperti 'Nilai Asia' (*Asian values)* atau 'Hak Asasi Manusia Asia' *(Asian Human Right*) atau 'Demokrasi Asia' (*Asian Democracy*). Ini biasanya dikaitkan dengan berbagai variasi pemerintahan otoriter karena mereka berasal pada tahun 1990-an dari negara-negara seperti Singapura Lee Kuan Yew, Malaysia Mahathir Mohamad, dan Tiongkok Deng Xiaoping. Demikian pula, eksepsi dalam HI sering kali membenarkan dominasi kekuatan besar atas yang lemah. Sebelum kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha membangun sebuah kerajaan di atas Asia dengan dalih budaya dan identitas Pan-Asia yang khas. Saat ini, kebangkitan Cina telah meningkatkan kemungkinan adanya sistem internasional di Asia yang didominasi oleh nilai-nilai Cina (Konfusianisme) dan lembaga-lembaga penguasa, seperti sistem upeti dalam sejarah feudalnya.

Akhirnya, HI global mengambil konsepsi yang luas dan berbagai bentuk agensi. Belum lama berselang, agensi dalam hubungan internasional terutama dilihat melalui apa yang disebut sebagai istilah 'standar peradaban' (*standard of civilisation*), yang di dalamnya, penentu utamanya adalah kapasitas negara untuk mempertahankan kedaulatan mereka, berperang, menegosiasikan perjanjian, menegakkan kepatuhan dan mengelola keseimbangan kekuasaan. Formulasi yang mementingkan diri sendiri, ahistoris, dan rasis oleh kekuatan kolonial Eropa mengabaikan fakta bahwa, bahkan bentuk negara yang paling canggih pun, ada di banyak peradaban non-Barat sebelumnya yang lebih awal dari peradaban Eropa. Sementara teori HI arus utama (mainstream) memandang apa yang disebut Dunia Ketiga atau Global Selatan sebagai marjinal untuk permainan politik internasional yang dimainkan negara-negara yang lebih kuat atau dominan.

Beberapa teori kritis sebenarnya telah berkembang dari hal-hal yang dianggap marjinal ini. Mereka dengan tepat mengkritik teori arus utama yang mengabaikan Dunia Selatan atau Non Barat yang lain, tetapi melakukan sedikit eksplorasi bentuk-bentuk alternatif agensi di Selatan (*global south*). Sementara kesenjangan (disparitas) global dalam kekuatan material tidak akan segera hilang, kita perlu mengadopsi pandangan yang lebih luas tentang agensi dalam hubungan internasional, melampaui (beyond) kekuatan militer dan kekayaan. Agensi adalah materi sekaligus ideasional. Hak pilihan bukanlah hak prerogatif yang kuat, tetapi dapat bermanifestasi sebagai senjata yang lemah. Keagenan dapat dilaksanakan di ruang transnasional global serta di tingkat regional dan lokal. Agensi dapat mengambil berbagai bentuk. Keagenan berarti membangun aturan dan institusi baru di tingkat regional baik untuk menantang atau mendukung dan memperkuat tatanan global.

Misalnya, pemimpin nasionalis Tiongkok sebelum Perang Dunia Kedua, Sun Yat-sen, adalah bapak dari gagasan pembangunan internasional yang menjadi pendukung lembaga pasca-perang seperti Bank Dunia. Jawaharlal Nehru dari India adalah orang pertama yang mengusulkan larangan uji coba nuklir. Negara-negara Amerika Latin mengadopsi deklarasi hak asasi manusia berbulan-bulan sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dirancang di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dan negara-negara Asia memainkan peran penting dalam pembuatan perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa berikutnya tentang hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Keagenan berarti membuat konsep dan menerapkan jalur baru menuju keamanan, pembangunan dan keadilan. Pada 1960-an, negara-negara Afrika membuat aturan secara formal dan informal untuk mempertahankan batas-batas postkolonial mereka dalam kerangka Organisasi Persatuan Afrika, yang kemudian digantikan oleh Uni Afrika pada tahun 2000. Bersama dengan Uni Afrika, peran utama dalam penciptaan norma '*Responsibility to Protect'* (R2P) dimainkan oleh para pemimpin politik Afrika seperti Nelson Mandela, diplomat seperti Francis Deng (Sudan) dan Mohamed Sahnoun (Aljazair) dan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan. Ekonom India Amartya Sen dan Ekonom Pakistan Mahbub ul Haq secara frontal menantang model

pembangunan ortodoks Barat yang berfokus pada kekuatan ekonomi nasional, dan tingkat pertumbuhan dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Mereka mengedepankan gagasan alternatif dan lebih luas tentang pembangunan manusia, yang berfokus pada peningkatan kemampuan individu melalui pendidikan dasar dan kesehatan. Sebagai bukti, beberapa dari tindakan para agensi ini (para pemimpin Asia dan Afrika tersebut) tidak hanya untuk wilayah tertentu, atau untuk Selatan itu sendiri saja, tetapi penting untuk pemerintahan global secara keseluruhan. Menggunakan kerangka kerja lembaga yang lebih luas ini, HI global memberikan tempat sentral bagi suara dan lembaga-lembaga Selatan, perspektif Selatan tentang tatanan global, dan dinamika perubahan hubungan Utara-Selatan.

Dengan dasar-dasar HI global yang sekarang ditata, penting untuk mengingat Robert Cox, yang memperingatkan bahwa ‘teori selalu untuk seseorang dan untuk beberapa tujuan’ (1981, 129). Untuk siapa HI global, dan untuk tujuan apa? Karena HI global tidak menolak teori HI yang ada, tetapi berupaya untuk mengakomodasinya, terbuka untuk kritik bahwa hal itu mungkin pada akhirnya akan mempertahankan struktur dasar HI, meskipun mengisi konten baru dengan mengumpulkan konsep di seluruh dunia. Dengan kata lain, HI global mungkin akan mengglobalisasi teori dan konsep HI tradisional. Ada juga risiko terlalu fokus pada negara-negara non-Barat yang lebih kuat dan lebih kaya sumber daya dengan mengorbankan negara-negara yang lebih lemah di dunia berkembang. Tantangan lain bagi HI global adalah bagaimana mempelajari semua bangsa, peradaban, dan area isu di bawah satu kerangka kerja tanpa mengaburkan variasi budaya, politik dan ekonomi di antara mereka. Mencoba ini juga berisiko membuat HI terlalu luas, mengurangi nilai analitiknya, dan mempersulit pembangunan teori. Risiko-risiko ini tidak sepele, tetapi menjaga mereka tetap fokus, akan membantu para sarjana untuk secara positif memajukan disiplin yang jelas membutuhkan perspektif global yang baru.

BAGIAN KEDUA

TEORI-TEORI PENGEMBANGAN

(EXPANSION PACK)

11
TEORI HIJAU
(GREEN THEORY)

Hugh C. Dyer

Pada tahun 1960-an ada pengakuan publik atas krisis lingkungan global yang timbul dari 'tragedi bersama' (*tragedy of the commons*), yang merupakan gagasan bahwa sebagai individu yang mementingkan diri sendiri, manusia akan menggunakan sumber daya bersama seperti tanah, air tawar, dan ikan secara berlebihan. Pada tahun 1970-an konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama tentang masalah ini diadakan, dan pada tahun 1980-an bermunculan beberapa Green Party di berbagai negara, dan kebijakan publik yang mewacanakan krisis lingkungan ini. Ini bertepatan dengan keinginan agar teori hijau membantu menjelaskan dan memahami masalah politik ini. Pada 1990-an, Hubungan Internasional telah mengakui lingkungan alam sebagai sumber eksplorasi penelitian yang semakin signifikan untuk disiplin ilmu, membutuhkan perhatian teoritis dan praktis, terutama setelah bukti yang meningkat bahwa tindakan manusia secara signifikan mengubah iklim global kita, dan menimbulkan masalah-masalah keamanan serta masalah ekologis.

Dasar-Dasar Teori Hijau

Pemikiran ekologis lebih memperhatikan kepentingan alam itu sendiri daripada hanya kepentingan kemanusiaan di alam. Teori hijau menangkap orientasi ini dalam hal nilai (value) dan agensi politik (Goodin 1992), yang terkait dengan apa yang harus dihargai, oleh siapa dan bagaimana mendapatkannya. Teori hijau termasuk dalam tradisi teori kritis (*critical theory*), dalam arti bahwa isu lingkungan menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara diri kita sendiri dengan orang lain dalam konteks masyarakat dan pengambilan keputusan kolektif. Pada

gilirannya hal ini selalu menimbulkan pertanyaan tentang di mana letak batas-batas komunitas politik. Untuk masalah lingkungan yang melampaui batas, pertanyaan-pertanyaan ini berupa pertanyaan pada ‘level komunitas politik apa’ yang harus kita cari solusinya. Bagi ahli teori hijau, jawabannya ditemukan dalam gagasan alternatif tentang asosiasi politik berdasarkan hubungan ekologis kita.

Masuknya pendekatan masalah lingkungan ke HI sudah memiliki pengaruh, tetapi signifikansi teoritis dan implikasi kebijakan praktisnya dapat dipandang kompatibel atau tidak dapat didamaikan dengan asumsi tradisional dan praktik saat ini. Jika dilihat secara tradisional, maka masalah lingkungan dapat dengan mudah ditambahkan ke daftar masalah yang ditangani dengan cara yang ada, untuk tujuan yang ada. Jika dilihat secara alternatif, maka masalah ini dapat mengarah pada transformasi teoritis dan praktis. Karena teori dan praktik saling terkait, ketika masalah lingkungan menantang praktik yang ada, mereka juga menimbulkan pertanyaan baru yang harus dihadapi oleh teori HI. Tantangan praktis nyata dari perubahan lingkungan belum mengubah teori HI, atau bahkan banyak praktik. Itu kelanjutan hubungan negara yang kompetitif tidak kondusif untuk kerjasama lingkungan atau mendorong pemikiran hijau. Namun, perkembangan teoritis dan beberapa kemajuan praktis , juga literatur yang lebih luas telah terjadi dengan melihat berbagai masalah lingkungan dari perspektif teoritis yang berbeda. Jika pun perspektif teori hijau ini belum menjadi satu visi yang jelas, namun, itu pasti mewakili pandangan jangka panjang tentang masa depan umat manusia secara bersama sedunia.

Biasanya, masalah lingkungan terkubur dalam teks HI di bawah judul lain dan dengan sedikit pengakuan signifikansi teoritisnya yang unik. Para ilmuan yang memberikan perhatian pada tema lingkungan hidup, umumnya menerima kerangka yang ada dari struktur politik, sosial dan ekonomi politik dunia. Meskipun tentu saja ada bentuk-bentuk pemikiran kritis yang mapan, hal ini membahas hubungan di dalam dan di antara komunitas manusia, bukan hubungan manusia dengan lingkungan non-manusia. Misalnya, liberalisme menekankan hak individu atas pilihan dan konsumsi, tetapi pada dasarnya tidak begitu memperhatikann dengan konsekuensi atau dampak lingkungan dari konsumsi tersebut. Akibatnya, sebagian besar bentuk pemikiran tenatang lingkungan berusaha untuk

menetapkan posisi teoritis dan solusi praktis melalui struktur yang ada, atau sejalan dengan kritik yang ada terhadap struktur tersebut. Jika orientasinya kurang kritis, maka pandangan ini kemungkinan besar cocok atau berhimpit dengan posisi liberal dalam kajian HI (memandang kerja sama internasional sebagai manfaat umum bagi negara). Jika lebih kritis lagi dalam orientasinya, maka lingkungan hidup dapat menyelaraskan dirinya dengan kritik terhadap sistem dunia kapitalis (maldistribusi manfaat kepada orang-orang), atau justru menantang dan membongkar komitmen liberalist yang hanya untuk produksi dan konsumsi semata. Perspektif lingkungan, sambil mengidentifikasi perubahan lingkungan sebagai sebuah masalah, mencoba untuk menemukan ruang untuk lingkungan di antara kategori masalah lain yang ada, daripada menganggapnya sebagai definisi atau transformasional.

Mereka yang frustrasi karena kurangnya pengakuan akan tantangan lingkungan dalam hubungan internasional beralih ke ilmu ekologi lintas disiplin. Ekologi politik telah memungkinkan perspektif ekologi untuk menginformasikan pemikiran politik dan pemahaman politik tentang keadaan lingkungan kita. Secara khusus, keadaan kita telah lama ditentukan oleh jalur perkembangan tertentu yang bergantung pada konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Secara khusus, praktik politik-ekonomi produksi, distribusi dan konsumsi kita dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang mendesak. Namun, praktik-praktik ini tercermin dalam ekonomi pasar global yang bergantung pada pertumbuhan yang tidak dirancang untuk mencapai kelestarian lingkungan atau mengenali batasan ekologis. Perekonomian ini telah memberikan pengembangan material sejenis, tetapi dengan manfaat yang tidak merata dan kerusakan tambahan yang meluas, termasuk terhadap lingkungan, sehingga tidak memberikan pembangunan manusia dalam konteks ekologis. Dari perspektif ekologi, ada kritik umum terhadap pembangunan, dan bahkan praktik pembangunan berkelanjutan yang tampaknya progresif. Model terkenal dari *tragedy of commons* atau 'tragedi milik bersama' (Hardin 1968), di mana pilihan jangka pendek kita, individu, pilihan rasional menghancurkan sumber daya lingkungan kita, dengan demikian telah diterapkan pada planet ini secara keseluruhan. Ini tragis karena kita dapat melihatnya datang, tetapi tampaknya tidak mampu

atau tidak mau berbuat apa-apa. Ketidakmampuan itu lebih dari sekadar masalah praktis; ini merupakan tantangan teoretis yang mendalam. Hardin menunjukkan bahwa masalah seperti itu tidak dapat diselesaikan dengan cara teknis, tetapi membutuhkan perubahan nilai kemanusiaan. Melampaui pemikiran perspektif lingkungan dan ekologi politik, teori hijau secara lebih radikal membongkar struktur politik, sosial dan ekonomi yang ada. Secara khusus, ini menantang asumsi politik dan ekonomi liberal arus utama, termasuk yang melampaui batas-batas komunitas politik yang ada (untuk HI konvensional, ini berarti negara). Goodin (1992) mengemukakan bahwa ciri khas teori hijau adalah rujukannya pada visi moral yang koheren, yakni *green theory of values* atau 'teori nilai hijau', yang beroperasi secara independen dari teori praktik atau lembaga politik. Misalnya, moralitas hijau mungkin menyarankan bahwa pengembangan materi manusia harus dibatasi demi kepentingan melestarikan sifat non-manusia. Ini akan membatasi kebebasan kita untuk mengonsumsi sebanyak apa pun yang dapat kita peroleh. Kebutuhan untuk membatasi kebebasan tradisional menunjukkan pendekatan yang menempatkan alam di atas manusia. Teori hijau, dalam pengertian ini, bersifat ekosentris.

Ekosentrisme (pemikiran yang berpusat pada ekologi) bertentangan dengan antroposentrisme (pemikiran yang berpusat pada manusia). Ini bukan karena ekosentrisme mengabaikan kebutuhan dan keinginan manusia, melainkan karena antroposentrisme termasuk dalam perspektif ekologi yang lebih luas. Ekosentrisme mengutamakan ekosistem yang sehat karena merupakan prasyarat bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, antroposentrisme hanya melihat nilai instrumental jangka pendek dari alam bagi manusia. Perbedaan ekosentris dibandingkan dengan antroposentris ini merupakan inti dari teori hijau. Perspektif ekosentris holistik menyiratkan penolakan terhadap perpecahan antara politik domestik dan internasional, mengingat batas sewenang-wenang antar negara tidak bertepatan dengan ekosistem. Misalnya, polusi udara dan air dapat melintasi perbatasan, dan perubahan iklim melintasi semua perbatasan dan populasi. Sederhananya, populasi manusia saling berhubungan secara ekologis. Ini berdampak pada bagaimana kita memahami dan menangani masalah lingkungan lintas batas dan global secara kolektif, dengan mengesampingkan kepentingan nasional.

Perhatian HI tradisional terhadap negara, dalam sistem internasional, merupakan tantangan untuk memikirkan masalah lingkungan. Sebagai ciri utama dari model historis negara-bangsa Westphalia yang berdaulat (menentukan nasib sendiri), konsep kedaulatan (sebagai otoritas tertinggi) menjadi sangat meresahkan. Kedaulatan tidak menggambarkan realitas modern atas kontrol politik maupun penawaran konsep dasar yang dapat diandalkan untuk identitas kemanusiaan atau kesejahteraan manusia. Masalah lingkungan global membutuhkan solusi global. Hal ini mengharuskan kita mengembangkan pemahaman kita tentang 'global' (atau pada level global-penerjemah) sebagai prinsip pengorganisasian alternatif, dan diharapkan untuk menjadi gerakan sosial hijau daripada sekedar konsepsi negara untuk memperkaya wawasan teoritis saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kita perlu menyerah pada gagasan tentang negara dengan perbatasan yang masih relevan dengan kehidupan masyarakat, atau menyusunnya kembali dengan cara yang lebih sesuai secara ekologis dengan mengacu pada bagaimana orang hidup dalam hubungannya dengan lingkungan mereka. Ini tampaknya akan memerlukan lebih banyak jenis etika atu norma global daripada lokal. Hal ini sebagian terkait erat dengan pandangan kami tentang perlunya struktur politik (pemerintahan besar, pemerintahan kecil atau tanpa pemerintahan), dan tingkat pembangunan dan perkembangannya. Misalnya, kita dapat mempromosikan struktur politik global yang terpusat, seperti lembaga untuk mengatur masalah lingkungan (Biermann 2001), atau memungkinkan berbagai struktur lokal yang terdesentralisasi, bahkan anarkis, dan ke-saling berhubungan-nya (*interconnected*) struktur di tingkat lokal yang muncul sesuai kebutuhan (Dyer 2014).

Desentralisasi, atau pengalihan kewenangan dan pengambilan keputusan dari badan-badan di tingkat pusat ke daerah, memiliki ciri-ciri menarik tertentu, seperti penentuan nasib sendiri dan akuntabilitas demokratis. Secara ekologis, tampaknya ada keuntungan juga, karena komunitas kecil mungkin lebih bergantung pada sumber daya lokal terdekat sehingga lebih cenderung untuk memelihara lingkungan mereka. Komunitas lokal lebih cenderung memahami lingkungan alam, dan hubungannya dengan lingkungan yang lebih kecil, secara instrumental,

mereka melihatnya lebih sebagai rumah tinggal mereka hidup, sehingga mengatasi salah satu alasan utama krisis lingkungan.

Misalnya, konsep 'bio-regionalism', *(bio-regionalism*) dimana masyarakat manusia yang lebih diatur oleh konteks ekologi daripada batas-batas politik, memunculkan isu-isu pengetahuan tertentu, sains, sejarah, budaya, ruang dan tempat dalam konteks ekologi (McGinnis 1999). Misalnya, rasa identitas kita, mungkin berasal lebih banyak dari lingkungan yang dekat (*closed*) daripada dari gagasan kebangsaan, sehingga kita memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang lingkungan lokal daripada lokasi politik kita. Namun, ada juga sejumlah keberatan terhadap desentralisasi, atau lokalisasi pengambilan keputusan yang lebih luas. Ini termasuk kekhawatiran bahwa ia tidak akan mempromosikan kerja sama lintas komunitas karena terlalu parokial (terlalu eksklusif lokal; masalah nasionalisme), dan ini berarti kecilnya peluang untuk mengembangkan mekanisme yang efektif untuk menangani masalah global. Akibatnya, itu mungkin hanya mereproduksi model politik negara-berdaulat yang bermasalah dalam skala yang lebih kecil.

Saat ini, teori HI telah menunjukkan perhatiannya pada transformasi dalam komunitas politik kita, tetapi agak kurang memperhatikan transformasi dalam komunitas ekologi kita. Mungkin ini karena kita belum yakin bagaimana rasa komunitas kosmopolitan global mewarnai hubungan lokal kita.

Teori Hijau dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah masalah lingkungan yang dominan di zaman kita, yang disebabkan oleh ketergantungan kita yang berbahaya pada bahan bakar fosil. Teori hijau membantu kita untuk memahami hal ini dalam kaitannya dengan nilai-nilai ekologi jangka panjang daripada kepentingan manusia jangka pendek. Kepentingan ini umumnya dikejar oleh negara melalui investasi dalam teknologi, tetapi tidak ada solusi teknis yang mudah untuk perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Dari perspektif teori hijau, kebuntuan teknis ini membutuhkan perubahan dalam nilai dan perilaku manusia, dan oleh karena itu, memberikan peluang bagi inovasi politik atau bahkan perubahan transformatif dalam politik global.

Teori HI dapat menjelaskan mengapa perubahan iklim merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh negara karena persaingan ekonomi dan dis-insentif untuk kerjasama. Namun, ini tidak dapat memberikan kerangka kerja alternatif untuk menjelaskan bagaimana hal ini dapat ditangani. HI dewasa ini tetap terlalu fokus pada negara dan kepentingan nasional mereka daripada aktor lain yang mungkin lebih kooperatif, seperti kota dan komunitas atau organisasi non-pemerintah dan gerakan sosial peduli lingkungan (*green social movement*).

Perspektif teori hijau tentang perubahan iklim memahaminya sebagai konsekuensi langsung dari pilihan kolektif manusia. Secara khusus, pilihan-pilihan ini telah mengarah pada praktik ekonomi antroposentris historis dari kelompok politik (negara) yang secara historis sewenang-wenang, yang telah mengeksploitasi alam untuk kepentingan jangka pendek mereka sendiri. Perubahan iklim menghadirkan kasus ketidakadilan yang jelas bagi manusia sekarang dan masa depan yang tidak bertanggung jawab, dan kerusakan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, solusi membutuhkan teori nilai ekosentris (*ecocentric theory of values)*, dan sikap yang lebih etis daripada instrumental (eksploitatif-penerjemah) terhadap hubungan manusia di masa depan. Teori hijau membantu kita untuk mendefinisikan kembali isu-isu seperti perubahan iklim dalam kaitannya dengan nilai ekologi jangka panjang daripada kepentingan politik jangka pendek.

Di tingkat internasional, upaya-upaya telah dilakukan sejak sebelum Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio, yang melahirkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan kesepakatan lingkungan lainnya. Seperti banyak masalah terjebak dalam ketegangan langsung antara tujuan lingkungan dan tujuan pembangunan, sehingga segala bentuk tawar-menawar yang terjadi dalam konferensi itu adalah kompromi yang tidak memadai.

Untuk teori hijau, tidak ada ketegangan seperti itu di jalur ekologis menuju pembangunan, bahkan jika jalur itu tampaknya lebih mahal dalam jangka pendek. Ini paling tidak karena beberapa negara masih berkembang untuk melakukan dan meminta negara-negara maju yang secara historis bertanggung jawab atas perubahan iklim. Faktanya, tidak ada aktor

nasional yang bersedia menanggung biaya global dalam mengatasi masalah lingkungan ini. Setelah usaha yang goyah untuk mengatasi perubahan iklim melalui ketentuan Protokol Kyoto tentang UNFCCC, 1997, kesepakatan garis besar akhirnya dicapai dalam Kesepakatan Paris pada Desember 2015. Apakah upaya ini benar-benar akan mengatasi sumber dan konsekuensinya atau tidak dari dampak perubahan iklim, masih harus dilihat dalam pelaksanaannya dalam beberapa tahun ke depan, tetapi teori hijau menyarankan bahwa fokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan pilihan dalam komunitas lebih, baik daripada fokus pada tawar-menawar antar negara.

Ketika urusan bernegara meletakkan tanggung jawab utamanya pada memenuhi kebutuhan warga mereka sendiri, sulit untuk menemukan pertukaran *(trade off*) yang dapat diterima antara kesejahteraan ekonomi langsung (yang berupa keuntungan materiil) dengan kesejahteraan ekologis jangka panjang. Ada beberapa prospek dari negara-negara kuat (seperti China) atau kelompok negara (seperti Uni Eropa) yang memimpin dan mengubah parameter struktural (dengan lebih peduli pada isu lingkungan dari dekade sebelumnya-penerjemah). Namun, titik temu pemikiran yang mungkin diantara negara-negara yang bersaing memperjuangkan kepentingannya dari perspektif HI, tidak mungkin berada di dekat titik temu yang dibayangkan oleh teori hijau. Lebih mendasar lagi, tantangan perubahan iklim tampaknya tidak mungkin tercapai. Bahkan dengan beberapa kesepakatan politik, tetap ada perbedaan yang signifikan tentang tanggung jawab atas perubahan iklim dan biaya untuk beradaptasi dengan iklim yang sudah berubah yang mempengaruhi populasi paling terbelakang yang paling sulit berkembang sekalipun. Meskipun mungkin bagi negara-negara untuk bekerja sama untuk membuat komitmen kebijakan lingkungan yang bermanfaat, ini tidak secara langsung terkait dengan tindakan atau perubahan.

Meskipun perjanjian internasional secara resmi diiplementasikan oleh pemerintah dan badan konstitusional lainnya, agen utama perubahan adalah aktor non-negara yang lebih luas, kelompok dan individu yang lebih kecil, yang bekerja lebih secara anarkhi daripada hierarki. Singkatnya, solusi hijau untuk perubahan iklim dapat melibatkan lembaga tata kelola global dan komunitas yang saling bekerja bersama, yang sebagian besar

harus melintasi batas negara, untuk mengurangi emisi yang merusak, melindungi iklim dan melestarikan ekologi planet tempat bergantung manusia.

Teori hijau melengkapi kita dengan sudut pandang baru untuk menganalisis perkembangan-perkembangan ini. Hal ini juga memungkinkan perspektif ekologi yang lebih luas tentang kepentingan manusia bersama kita dan menekankan pilihan yang dibuat dalam batas ekologis perubahan iklim, daripada batas politik keuntungan ekonomi.

Kesimpulan

Bagi HI, kontribusi teori hijau membantu kita untuk mencermati kembali hubungan antara negara, ekonomi, dan lingkungan. HI biasanya menetapkan ini dalam konteks globalisasi yang dilihat dari perspektif terbatas, yakni, negara dan pasar, tetapi globalisasi juga melibatkan peluang untuk mengembangkan nilai ekologi global bersama. Teori hijau memiliki potensi untuk secara radikal membongkar gagasan tentang negara-negara berdaulat yang beroperasi dalam persaingan, dan dengan demikian, menjadi bagian dari tren pasca-Westphalia dalam pemikiran HI. Tentu saja, kontribusi yang lebih besar dari teori hijau, atau kapasitasnya dalam tinjauan kritis HI, terletak pada asal-usulnya yang sangat berbeda. Teori hijau mengambil ekologi planet sebagai titik awal dan melihat melampaui struktur politik-ekonomi kita saat ini. Teori hijau dengan demikian mampu menawarkan tidak hanya deskripsi alternatif tentang dunia kita tetapi juga logika yang berbeda untuk memahaminya, dan bagaimana cara yang memungkinkan kita untuk mengubahnya. Teori HI kemungkinan besar akan terganggu dan diorientasikan kembali oleh teori hijau, bukan karena hijau akan memenangkan argumen, tetapi karena ahli teori HI mau tidak mau harus memberikan penjelasan yang koheren tentang bagaimana kita semua hidup secara berkelanjutan di planet kita. Ini berarti bahwa pada titik tertentu kita mungkin harus berhenti berteori tentang 'antar-nasional' yang berpusat pada negara dan menemukan titik acuan politik lain dalam hubungan manusia, seperti jaringan kebijakan atau gerakan sosial. (Atau, dengan kata lain, teori hijau identik dengan teori tentang keberlanjutan kehidupan di bumi-penerjemah).

12
TEORI KEADILAN GLOBAL
(GLOBAL JUSTICE)

Alix Dietzel

Keadilan global adalah teori yang muncul dalam studi kosmopolitanisme yang lebih luas, yang berfokus pada pentingnya individu sebagai lawan dari negara, komunitas atau budaya. Para pendukung teori Kosmopolit mengambil individu sebagai titik awal karena mereka percaya bahwa semua manusia memiliki nilai moral yang sama, dan oleh karena itu berhak atas pertimbangan moral yang sama. Dalam pengertian ini, meskipun kosmopolit tidak bersepakat tentang bagaimana memastikan bahwa individu adalah subjek perhatian moral yang sama, fokus dari pendekatan yang berbeda ini adalah nilai individu. Fokus pada kepentingan moral individu ini telah menyebabkan beberapa sarjana kosmopolitan untuk secara kritis terlibat dengan teori keadilan, yang secara tradisional terbatas pada negara dan terkandung dalam ranah teori politik (bukan internasional). Upaya ini berusaha untuk melahirkan teori keadilan global, yang mencermati pertanyaan tentang cara terbaik untuk menjamin kehidupan yang adil bagi semua individu di Planet Bumi, terlepas dari kebangsaan atau status mereka.

Dasar-Dasar Keadilan Global

Keadilan, pada intinya, berkaitan dengan siapa yang berhak mendapatkan apa dan mengapa. Sesuai dengan akar kosmopolitan, para sarjana keadilan global kontemporer memfokuskan diri pada kajian nilai moral individu, terlepas dari tempat lahir, dan fokus pada masalah kohabitasi global di mana individu belum diperlakukan sama secara moral (karena fokus dan standar moral secara tradisional berada pada otoritas negara). Untuk mengatasi masalah seperti itu, para sarjana keadilan global

biasanya memusatkan perhatian pada apa yang pantas didapatkan oleh individu di seluruh dunia, dan bagaimana distribusi hak ini dapat dicapai. Jawaban atas jenis pertanyaan ini sangat bervariasi tergantung pada masalah apa yang sedang ditangani.

Teori Keadilan John Rawls (1971) mengemukakan teori bahwa struktur politik (biasanya negara) dapat menentukan siapa yang berhak mendapatkan apa dan mengapa karena kekuasaan untuk membuat undang-undang, menaikkan pajak, dan mengeluarkan pengeluaran publik. Oleh karena itu, struktur seperti itu harus dibangun dengan hati-hati untuk memastikan pembagian hak dan kewajiban yang adil di antara semua warga negara. Karenanya, ide Rawls adalah salah satu keadilan distributif. Rawls tidak mendukung komunisme, di mana semua kekayaan dibagikan secara merata, tetapi untuk masyarakat di mana ketidaksetaraan dimoderasi sehingga mereka yang dirugikan (untuk alasan apa pun) setidaknya dapat menjalani kehidupan yang layak. Rawls berteori bahwa struktur seperti itu hanya bisa ada dalam masyarakat demokratis, atau dengan kata lain, tipe negara tertentu. Oleh karena itu, penjelasan Rawls tentang keadilan menggambarkan potensi keberadaan manusia yang adil bagi mereka yang cukup beruntung untuk hidup dalam negara seperti itu, tetapi teorinya tidak dirancang untuk diterapkan secara internasional karena tidak ada struktur formal keadilan distributif global.

Cendekiawan kosmopolitan mempermasalahkan pendekatan Rawls yang berpusat pada negara dan berpendapat bahwa pertanyaan tentang keadilan harus mencakup semua manusia, terlepas dari asosiasi negara. Misalnya, Charles Beitz (1975) berpendapat bahwa membatasi persoalan keadilan ke tingkat nasional di era global modern secara moral tidak tepat, karena kita sekarang memiliki lembaga global yang mungkin dapat menjalankan beberapa fungsi dasar negara, seperti mengumpulkan formulir perpajakan atau membuat undang-undang. Thomas Pogge (1989) menekankan bahwa ketidaksetaraan global antar individu membutuhkan pendekatan global terhadap keadilan yang dapat secara efektif mengatasi problem ketidaksetaraan ini. Meskipun para sarjana ini mendasarkan argumen mereka dengan cara yang berbeda, mereka berdua mendukung perluasan ruang lingkup keadilan ke tingkat global. Jenis argumen ini

adalah tempat asal istilah ‘keadilan global’ (*global justice*) dan memberikan landasan untuk kemunculannya sebagai teori HI.

Ketika membahas kemiskinan global, Thomas Pogge (2001) dan Gillian Brock (2010) berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan harus fokus pada redistribusi kekayaan dan sumber daya antara individu kaya dan miskin. Ketika menganalisis intervensi kemanusiaan, para sarjana seperti Mary Kaldor (2010) dan Daniele Archibugi (2004) menyatakan bahwa individu harus diprioritaskan daripada undang-undang non-intervensi yang berpusat pada negara. Lebih lanjut, para ahli seperti Garrett Brown (2012) menganalisis masalah kesehatan global dan berpendapat bahwa tingkat kesehatan individu ditentukan pula oleh struktur global untuk mendukung reformasi. Sarjana keadilan global kontemporer fokus pada masalah yang beragam seperti ketidaksetaraan gender, imigrasi dan pengungsi, peperangan dan perubahan iklim. Ini menyiratkan bahwa pertanyaan tentang siapa yang berhak mendapatkan apa, dan mengapa, mencakup berbagai topik, yang sebagian besar merupakan masalah hubungan internasional kontemporer. Inilah mengapa disiplin keadilan global sangat relevan bagi HI, karena sarjana keadilan global menganalisis dan menilai masalah mendasar yang disebabkan oleh kohabitasi (kehidupan bersama) secara global. Dalam pengertian ini, maka teori keadilan modern akan terus relevan selama masih ada masalah secara global, terutama masalah kesenjangan.

Meskipun sarjana keadilan global biasanya menegaskan bahwa individu harus menjadi unit pusat perhatian moral ketika mengeksplorasi masalah global, penting untuk dicatat bahwa para sarjana ini sering memprioritaskan tujuan yang berbeda untuk memastikan bahwa individu menjadi subjek perhatian moral yang sama. Misalnya, beberapa sarjana menekankan hak asasi manusia, beberapa membahas pentingnya lembaga yang beroperasi secara adil (dirujuk sebagai keadilan prosedural), beberapa menekankan pentingnya kemampuan manusia, sementara yang lain prihatin dengan proses sosial global yang tidak adil. Penting untuk diingat perihal keragaman ini ketika mempelajari perspektif keadilan global. Sebab, tidak ada dua sarjana yang memiliki tujuan yang persis sama, yang menyiratkan keragaman ide yang sehat dalam bidang tersebut. Ini benar bahkan dalam subjek yang lebih sempit, seperti keadilan iklim, di mana

penulis memiliki banyak gagasan berbeda tentang bagaimana mencapai tanggapan yang adil terhadap masalah perubahan iklim.

Meskipun Anda mungkin berasumsi bahwa pendekatan yang berupaya untuk memperlakukan semua manusia di Bumi dengan lebih baik itu populer, atau logis, keadilan global juga menarik beberapa kritik penting. David Miller (2007) berpendapat bahwa perbatasan nasional lebih penting daripada keadilan global kosmopolitan. Miller percaya bahwa mencapai kesepakatan tentang prinsip-prinsip keadilan membutuhkan sejarah dan budaya yang sama, dan bahwa mendefinisikan prinsip-prinsip global tidak mungkin dilakukan karena perbedaan-perbedaan nasional pada pemaknaan konsepsi tentang apa yang 'baik' *(good*) atau 'benar' (*right*). Thomas Nagel (2005) dan Michael Blake (2001) keduanya berpendapat bahwa keadilan global tidak dapat dicapai tanpa dukungan institusi global yang kuat.

Namun, institusi global yang memiliki kekuasaan atas individu dan negara sampai saat ini tidak ada (belum), membuat diskusi tentang prinsip-prinsip keadilan global menjadi sia-sia. Akhirnya, Iris Marion Young (2011) menganggap kosmopolitanisme sebagai teori yang berpusat pada Barat yang tidak memiliki daya tarik global yang dimaksudkan untuk dimiliki. Bagaimanapun, keadilan global didasarkan pada pentingnya individu dan seringkali mengacu pada hak asasi manusia dan norma liberal lainnya, yang oleh beberapa orang dianggap sebagai cita-cita Barat, bukan yang universal. Kritik ini tidak mengurangi pentingnya keadilan global, dan, seperti semua teori HI yang lain, perkembangan teoretisnya selalu dipacu dengan menjawab kritiknya.

Keadilan Global dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim membutuhkan aktor dari seluruh dunia untuk berkumpul dan sepakat tentang bagaimana melangkah maju. Ketika suhu terus meningkat dan respon global tertinggal dari apa yang para ilmuwan rekomendasikan, para ahli keadilan global menjadi semakin tertarik pada perubahan iklim dan manajemen globalnya (yang mungkin juga mis-manajemen). Didorong oleh sifat masalah global dan ketidakadilan yang

ditimbulkannya, para ahli keadilan global juga mengalihkan perhatian mereka pada perubahan iklim karena beberapa alasan penting.

Pertama, perubahan iklim tidak diragukan lagi merupakan masalah global dan para ahli keadilan global tertarik untuk terlibat dalam masalah tersebut. Emisi gas rumah kaca tidak dapat dibatasi dalam suatu keadaan, mereka naik ke atmosfer dan menyebabkan perubahan suhu global di dalam dan di luar batas negara asli-asal-nya. Meskipun sulit untuk menyalahkan atau menyalahkan secara langsung, namun tidak dapat disangkal bahwa hampir semua individu, negara, dan perusahaan berkontribusi pada perubahan iklim sampai tingkat tertentu. Dalam pengertian ini, sifat global dari masalah perubahan iklim menentang asumsi konvensional tentang kedaulatan dan keadilan negara, yang membuatnya sangat menarik bagi para sarjana keadilan global.

Kedua, perubahan iklim membutuhkan solusi global, yang sesuai dengan sarjana keadilan global yang tertarik untuk memberikan rekomendasi untuk masalah kohabitasi global (kehidup-bersamaan secara global). Tidak ada satu negara pun yang bisa menghentikan perubahan iklim sendiri. Tidak ada keraguan bahwa memerangi perubahan iklim akan membutuhkan upaya kolaboratif, yang menyiratkan perlunya kesepakatan global. Mencapai kesepakatan seperti itu pasti akan melibatkan diskusi tentang aktor mana yang harus menurunkan emisi dan seberapa banyak atau bahkan aktor mana yang harus berkontribusi pada biaya perubahan iklim, seperti membantu populasi tertentu beradaptasi dengan kenaikan permukaan laut atau cuaca ekstrim. Ini, pada dasarnya, adalah pertanyaan tentang keadilan distributif, dan oleh karena itu menarik bagi para sarjana keadilan global.

Ketiga, perubahan iklim menghadirkan distribusi manfaat dan beban yang tidak adil antara individu yang setara secara moral, yang merupakan perhatian utama para sarjana keadilan global. Perubahan iklim akan berdampak paling negatif pada mereka yang tinggal di negara kurang berkembang yang telah berbuat paling sedikit untuk berkontribusi pada penyebab perubahan iklim, sementara mereka yang tinggal di negara maju, yang telah menyumbang emisi paling banyak, kemungkinan akan menderita paling sedikit. Ini karena negara-negara yang kurang berkembang lebih sering berada di daerah yang akan menanggung beban

terbesar masalah yang terkait dengan perubahan iklim. Selain itu, negara berkembang biasanya tidak memiliki sumber daya sebanyak negara maju untuk beradaptasi dengan pola cuaca berbahaya. Misalnya, Kepulauan Solomon telah kehilangan lima pulau kecil sebagai akibat dari perubahan iklim, namun merupakan salah satu negara dengan emisi terendah di dunia. Paul Harris (2010, 37) berpendapat bahwa masalah perubahan iklim 'menuntut keadilan' (*cries out for justice*) karena efek perubahan iklim jatuh secara tidak proporsional pada orang-orang yang sudah rentan, tidak dapat melindungi diri mereka sendiri secara memadai dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masalah tersebut.

Meskipun para ahli keadilan global setuju bahwa perubahan iklim akan mempengaruhi individu, dan oleh karena itu peduli untuk mengatasi masalah tersebut, para sarjana ini memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan, dan oleh karena itu apa yang harus diprioritaskan. Misalnya, Simon Caney (2010) mendefinisikan tiga hak berbeda yang diperkirakan terancam oleh perubahan iklim, yakni, hak untuk hidup, hak atas pangan dan hak kesehatan sehingga program apa pun yang memerangi perubahan iklim tidak boleh melanggar ini.

Tim Hayward (2007) mendefinisikan hak khusus untuk masalah perubahan iklim yakni, ruang ekologis, yang merupakan hak asasi manusia untuk hidup di lingkungan yang bebas dari polusi berbahaya yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan. Pendekatan Hayward berbeda dengan Caney karena prioritasnya bukanlah melindungi hak asasi manusia yang sudah ada dalam hukum internasional melainkan menciptakan hak terkait iklim baru yang harus dipertahankan.

Konsepsi Patrick Hayden (2010) tentang hak mencakup hak-hak substantif dan prosedural yang spesifik lingkungan. Hak substantif Hayden termasuk hak untuk dilindungi dari kerusakan lingkungan dan hak proseduralnya termasuk hak untuk mendapatkan informasi lengkap tentang potensi efek bahaya lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam prosedur demokrasi untuk pembuatan kebijakan iklim dan hak untuk mengeluh tentang kondisi yang ada, standar dan kebijakan (Hayden 2010, 361-362). Dalam pengertian ini, Hayden tidak hanya peduli dengan hak-hak dasar tetapi juga dengan prosedur yang adil.

Perdebatan tentang hak adalah sangat penting, karena menentukan siapa yang berhak mendapatkan apa, yang dapat membantu memandu diskusi tentang apa yang harus dilakukan tentang perubahan iklim, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan perubahan iklim. Misalnya, jika hak atas kesehatan harus dilindungi, ini dapat berarti bahwa menurunkan emisi tidaklah cukup dan bahwa populasi harus dilindungi dari penyakit dengan cara-cara lain. Misalnya, dengan menyuntik masyarakat yang rentan terhadap penyakit tertentu atau menyediakan air minum bersih di daerah yang rawan kekeringan.

Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas aksi perubahan iklim adalah poin utama diskusi di antara para sarjana keadilan global. Disiplin HI secara tradisional berkaitan dengan hubungan antar negara. Beberapa sarjana mengikuti tradisi ini dan perdebatan ini biasanya berfokus pada negara mana yang harus berkontribusi dan seberapa besar jumlahnya untuk tindakan perbaikan perubahan iklim. Henry Shue (2014) mendukung *Polluter Pays Principle*, yang didasarkan pada pencermatan siapa yang ‘menyebabkan masalah’ untuk menentukan ‘siapa yang harus membayar’ (dan berapa) untuk tindakan perubahan iklim, dan pemberlakuan prinsip ‘*Ability to Pay Approach*’, yang menegaskan bahwa tanggung jawab harus ditanggung oleh orang kaya. Thomas Risse (2008) mempermasalahkan pendekatan ini dan mendukung indeks yang mengukur kekayaan per kapita dan tingkat emisi per kapita, kemudian mengelompokkan negara ke dalam kategori.

Dalam pengertian ini, perdebatan menyangkut bagaimana tanggung jawab untuk perubahan iklim harus dialokasikan, yang penting bagi hubungan internasional, karena ini mencerminkan diskusi yang sedang berlangsung antar negara, paling akhir saat menyusun Perjanjian Paris 2015. Sarjana lain tertarik untuk memasukkan aktor non-negara dalam konsepsi mereka tentang keadilan dan tanggung jawab iklim.

Paul Harris menunjukkan bahwa kosmopolitanisme secara tradisional berkaitan tidak hanya dengan negara tetapi juga dengan individu. Untuk alasan ini dia mempelajari bagaimana individu mempengaruhi perubahan iklim dan menemukan bahwa individu kayalah yang menghasilkan gas rumah kaca paling banyak, terlepas dari negara bagian mana mereka tinggal. Seperti yang dia katakan, ‘kemakmuran

adalah penyebab utama dan tidak proporsional dari degradasi lingkungan global' (Harris 2010, 130). Orang-orang ini memiliki tanggung jawab untuk bertindak terhadap perubahan iklim dengan (misalnya) bepergian lebih sedikit, mengurangi konsumsi daging dan membeli lebih sedikit barang mewah. Simon Caney (2010) berpendapat bahwa semua agen (bukan hanya orang kaya) yang berkontribusi terhadap emisi dan memiliki sarana untuk menurunkannya, termasuk individu, negara, negara bagian, perusahaan, otoritas politik sub-negara, dan lembaga keuangan internasional, harus bertanggung jawab.

Perdebatan tentang tanggung jawab iklim dari aktor non-negara penting untuk teori HI, yang secara tradisional berkaitan dengan bagaimana negara berhubungan satu sama lain. Dengan membahas aktor lain mana yang mungkin bertanggung jawab atas perubahan iklim, sarjana keadilan global dapat menggerakkan disiplin Hubungan Internasional ke arah yang baru.

Kesimpulan

Teori hubungan internasional secara tradisional terlalu memperhatikan tatanan global (atau pun oleh kalangan skeptis disebut sebagai tatanan yang '*dis-order*'-penerjemah). Para ahli keadilan global telah berkontribusi untuk memperluas ruang lingkup teori HI dengan mengalihkan fokus ke individu, dalam skala planet, dan dengan demikian mendekati masalah kohabitasi global dengan cara baru. Namun, terlepas dari tanda-tanda kemajuan dalam dunia akademis, negara tampaknya lebih fokus pada pengelolaan konflik, ketidakpercayaan, dan kekacauan daripada mencapai kesepakatan global dan memperlakukan satu sama lain secara adil. Oleh karena itu, keadilan global sebagai sebuah masalah kurang terwakili dalam kebijakan dan para sarjana keadilan global belum mencapai ketenaran/kepopuleran yang sama dengan teori HI arus utama seperti realisme atau liberalisme. Namun demikian, pada masa terorisme transnasional, meningkatnya ketidaksetaraan global, krisis migrasi, penyakit pandemi seperti SARS dan Covid-19 saat ini-penerjemah), serta perubahan iklim, pertimbangan kerja sama global, kesetaraan dan keadilan menjadi lebih penting dan urgen dari era sebelumnya.

13
TEORI QUEER
(QUEER THEORY)

Markus Thiel

Teori Queer menawarkan jalan yang signifikan untuk mendekonstruksi, dan kemudian merekonstruksi konsep dan teori HI yang sudah mapan. Berasal dari berbagai bidang yang melampaui pandangan sempit HI, penelitian queer menerapkan pandangan interdisipliner untuk memajukan perspektif kritis baru tentang seksualitas, gender, dan lainnya. Sudut pandang tunggal dalam bidang yang beragam seperti HI tidak perlu membatasi rentang sudut pandang ilmiah. Sebab, hal Ini akan menghalangi perdebatan yang bernuansa konten dan bentuk pemikiran lesbian, gay, biseksual dan perspektif transgender (LGBT), dan para sarjana dari kelompok queer di bidang politik dan HI[6]. Karena tema-tema ini, dan karena keragamannya, sulit untuk mendefinisikan teori queer dengan tepat. Memang, definisi sempit tentang itu tidak akan sejalan dengan prinsip teoretis queer. Teori Queer tidak hanya terbatas pada seksualitas atau hak seksual. Ia juga mempertanyakan hubungan sosial, ekonomi dan politik yang mapan, dan secara kritis menginterogasi pengertian tentang keamanan.

---

[6] Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. KH. Maruf Amin (sekarang Wakil Presiden Republik Indonesia), telah menyerukan undang-undang untuk melarang aktivitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia, dan mengkategorikannya sebagai kejahatan, serta menyerukan hukuman pidana bagi siapa pun yang terlibat dalam aktivitas seksual terkait, atau mendorong, mempromosikan, atau mendanai aktivitas yang terkait dengan komunitas LGBT. Lihat laman https://www.thejakartapost.com/news/2016/02/17/mui-wants-law-ban-lgbt-activities.html. Kitab Suci Agama Islam, Kristen, dan Yahudi secara tegas melarang LGBT dengan hukuman cambuk sampai dengan hukuman mati karena dosa (sin) besar, dan penyakit masyarakat yang berbahaya. Sementara doktrin agama Budha, Hindu dan Konghucu tidak secara tegas melarang perilaku LGBT. Lihat juga laman https://www.neliti.com/publications/273117/homoseksual-dalam-perspektif-agama-agama-di-indonesia (penerjemah).

Dasar-Dasar Teori Queer

Asal mula teori Queer ada dalam studi LGBT, yang berfokus pada seksualitas dan gender. Ini segera menjauhkan diri dari pendekatan tersebut karena ketidaksepakatan dengan identitas permanen yang disarankan oleh studi LGBT. Teori Queer menekankan sifat seksualitas yang cair dan dilakukan secara manusiawi, atau seksualitas yang lebih baik. Ini mempertanyakan norma-norma yang ditetapkan secara sosial, dan kategori dualistik dengan fokus khusus pada tantangan klasifikasi seksual (heteroseksual / homoseksual), gender (pria / wanita), kelas (kaya / miskin), ras (kulit putih / non-kulit putih). Ini melampaui apa yang disebut 'binari' (*binary*) untuk melawan tatanan politik umum (swasta / publik) serta internasional (demokratis / otoriter). Ini dipandang sebagai konstruksi teoritis yang terlalu menggeneralisasi yang menghasilkan mode analisis salah satu/atau yang menyembunyikan lebih dari yang dijelaskan, dan tidak dapat mendeteksi perbedaan dan kontradiksi yang bernuansa lebih detail/kritis. Tetapi teori queer juga menganalisis dan mengkritik norma-norma sosial dan politik khususnya yang terkait dengan pengalaman seksualitas dan gender. Ini tidak dipandang sebagai urusan pribadi. Sama seperti feminis yang memandang gender sebagai urusan publik dan politik yang dikonstruksi secara sosial, demikian pula teori queer berdebat tentang seksualitas dan ekspresi gender.

Karena kata '*queer*' digunakan untuk mendeskripsikan homoseksual di abad kesembilan belas, teori queer menelusuri sejarahnya dari studi seksualitas dalam bentuk privat dan publiknya[7]. Makna umum yang dikaitkan dengan istilah tersebut berkisar pada ketidaksesuaian dalam hal seksualitas dan gender, sehingga menambahkan gagasan ambigu untuk

---

[7] Istilah "queer theory" sendiri berasal dari karya Teresa de Lauretis tahun 1991 dalam jurnal studi budaya feminis, berjudul "Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities". Dia menjelaskan istilahnya untuk menandakan bahwa setidaknya ada tiga proyek yang saling terkait yang berperan dalam teori ini, yakni, menolak heteroseksualitas sebagai patokan untuk formasi seksual, tantangan terhadap keyakinan bahwa studi lesbian dan gay adalah satu kesatuan, dan fokus yang kuat pada berbagai cara ras membentuk bias seksual. De Lauretis mengusulkan bahwa teori queer dapat mewakili semua kritik ini bersama-sama dan memungkinkan untuk memikirkan kembali segala sesuatu tentang seksualitas. Lihat di laman; https://guides.library.illinois.edu/queertheory/background (penerjemah)

menjadi atau bertindak aneh. Karenanya, pendekatan queer terhadap kesetaraan seksual mempersulit advokasi LGBT berbasis identitas, karena pemikiran queer mengekspresikan perspektif yang lebih menantang dan cair. Perpecahan ini menjadi semakin jelas ketika politik internasional tentang orientasi seksual dan identitas gender menerima perhatian publik yang semakin meningkat. Beberapa negara telah menerapkan ketetapan kesetaraan yang substansial untuk membuktikan bahwa mereka cukup ‘modern’ atau ‘Barat’, sementara yang lain menanggapi dengan penolakan dalam bentuk undang-undang dan penganiayaan homofobik (anti homoseksualitas). Orientasi seksual dan hak identitas gender, yang tersendiri dipertanyakan oleh para ahli teori queer karena terlalu bergantung pada norma-norma liberal Barat tentang hak asasi manusia dan demokrasi, yang telah menjadi poin perselisihan politik, memicu perang budaya dan politik di ranah domestik juga.

Mempertimbangkan perdebatan wacana ini di Amerika Serikat mengenai apakah individu transgender harus bebas menggunakan toilet pilihan pribadi mereka? Status seksualitas dan politik gender dalam HI jelas telah terangkat melalui kasus-kasus seperti ini yang dapat dengan cepat melampaui politik domestik dan memasuki ranah internasional. Selain itu, hal ini juga berdampak pada kebijakan yang tampaknya tidak terkait seperti kebijakan pertahanan, perawatan kesehatan, dan peraturan pasar tenaga kerja dan dengan demikian menciptakan jalan baru untuk membangun kembali konsep HI konvensional. Akibatnya, perspektif baru dibutuhkan untuk menjelaskan bagian inheren dunia sosial dan politik ini. Teori Queer tidak mengasumsikan akses seragam ke realitas, melainkan mengakui bahwa pengetahuan subjektif tentang seksualitas, gender dan aspek sosial lainnya dibangun daripada yang sudah ada sebelumnya, cair daripada stabil, dan tidak selalu sejalan dengan norma-norma masyarakat. Dalam pengertian ini, teori queer telah bergerak lebih dari sekadar berfokus pada pengalaman seksualitas dan gender.

Politik seksualitas dan proses keilmuan queer yang terkait dengannya terlambat masuk ke panggung teoretis sebagian karena seksualitas dan gender pada awalnya berlabuh di ranah privat, bukan publik. Para sarjana mengajukan pandangan kritis dan feminis muncul antara lain dari tulisan-tulisan Michel Foucault (1976), Judith Butler (1990)

dan Eve Kosofsky Sedgwick (1990). Pengaitan inovatif Foucault antara seksualitas dan pengetahuan dengan kekuatan politik, dan penolakan Butler terhadap orientasi seksual yang stabil/tetap dan identitas gender dalam penampilan sehari-hari, tetap menjadi gagasan mendasar kelompok ilmuan queer ini. Kosofsky Sedgwick menarik perhatian pada definisi diskursif homo dan heteroseksualitas dalam masyarakat, dan selanjutnya mendefinisikan pemikiran queer. Pernyataan ilmiah ini hampir tidak diterima dalam ilmu politik arus utama karena menolak objektivitas dan menyoroti sifat manusiawi yang bersyarat dan tidak stabil dari tatanan sosial dan politik, termasuk pandangan queer dalam studi HI terkait dengan keamanan dan pemerintahan. Oleh karena itu, teori queer berkembang sebagian besar dalam literatur, filsafat, sosiologi, dan program studi queer saja, tanpa membuat terobosan substansial ke dalam teori HI.[8]

Meskipun teori queer muncul dari asal-usul yang lebih luas, beberapa pertanyaan dasar tetap ada. Salah satu masalah utamanya adalah sejauh mana '*queer*' harus diadopsi sebagai label untuk bentuk pemikiran dan tindakan transgresif (yang tidak dapat diterima secara sosial), karena ini pada gilirannya akan menciptakan biner queer dengan arus utama. Ini adalah sesuatu yang dibantah oleh para sarjana queer. Masalah lain terletak pada definisi yang tidak jelas tentang prinsip dan istilah teoretis yang 'aneh' atau queer, yang mengarah pada ketidakpastian tentang bagaimana lensa teoretis queer dapat diterapkan dengan baik dalam berbagai disiplin ilmu oleh berbagai individu. Dalam penerapannya pada HI, teori queer menantang banyak asumsi tentang politik dunia yang tidak

---

[8] Salah satu konsep kunci dalam teori queer adalah gagasan heteronormativitas (heteronormativity), yang berkaitan dengan "institusi, struktur pemahaman, dan orientasi praktis yang membuat heteroseksualitas tampak tidak hanya koheren, yaitu, diorganisir sebagai seksualitas, tetapi juga diistimewakan" (Berlant). Heteronormativitas adalah pandangan dunia yang mempromosikan heteroseksualitas sebagai orientasi seksual normal dan/atau pilihan, dan diperkuat dalam masyarakat melalui lembaga perkawinan, pajak, pekerjaan, dan hak adopsi, dan lainnya. Heteronormativitas adalah bentuk kekuasaan dan kontrol yang memberikan tekanan pada individu heteronormatif dan gay, melalui pengaturan kelembagaan dan norma sosial yang diterima (bahkan secara terpaksa). Foucault menolak untuk menerima bahwa seksualitas dapat didefinisikan dengan jelas, dan sebaliknya berfokus pada produksi seksualitas yang ekspansif (seluas-liasnya) di dalam wacana utama kekuasaan dan pengetahuan. https://guides.library.illinois.edu/queertheory/background (penerjemah)

terkaitseksualitas dan gender. Ini bertujuan untuk mendekonstruksi biner sederhana yang sudah mapan, seperti ketidakamanan dengan keamanan atau perang dengan perdamaian, dan mengakui ketidakstabilan yang melekat pada tatanan politik dan sosial. Sebaliknya, ia mencakup aspek politik dunia yang cair, performatif, dan ambigu. Oleh karena itu, ia mengkritik pendekatan politik dan masyarakat yang mengasumsikan hierarki alam dan moral. Pandangan ini mempermasalahkan, misalnya, cara di mana seksualitas non-tradisional telah dinormalisasi menurut standar 'hetero-normatif', termasuk aspirasi menuju pernikahan dan membesarkan anak (yang ditolak oleh masyarakat dan pemikiran tradisional). Para pendukung teori Queer berpendapat bahwa pandangan itu mengakibatkan integrasi sosial dari minoritas seksual ke dalam masyarakat arus utama (tradisional), membuat mereka kurang bersedia (atau mampu) untuk melawan ketidaksetaraan politik yang lebih dalam.

Teori Queer memandang seksualitas dan gender sebagai konstruksi sosial yang membentuk cara orientasi seksual dan identitas gender ditampilkan di depan umum, dan dengan demikian sering direduksi menjadi isu hitam-putih yang dapat dimanipulasi atau diubah. Berkenaan dengan topik HI yang lebih klasik, ini secara kritis menilai asumsi bahwa semua masyarakat menemukan diri mereka pada titik yang berbeda sepanjang garis linier pembangunan politik dan ekonomi, atau mematuhi seperangkat norma universal. Karenanya ia merangkul ambiguitas, kegagalan dan konflik sebagai tandingan dari pemikiran progresif yang dominan yang terbukti dalam banyak kebijakan luar negeri atau pembangunan. Sebagai upaya ilmiah, penelitian teori queer merupakan 'segala bentuk penelitian yang diposisikan dalam kerangka konseptual yang menyoroti ketidakstabilan makna yang diterima begitu saja, dan hubungan kekuasaan yang dihasilkan' (Nash dan Browne 2012, 4).

Weber (2014) menyoroti kurangnya perhatian terhadap teori queer dengan mencela teori HI standar yang berpikiran tertutup, dengan alasan bahwa studi pemikiran queer dalam HI ada, tetapi tidak diakui. Teori queer yang tidak terlihat, mulai perlahan berubah, dengan studi kasus tentang homofobia negara (Weiss dan Bosia 2013) atau politik identitas kolektif (Ayoub dan Paternotte 2014) dan meningkatnya relevansi wacana hak LGBT transnasional dalam kajian HI. Tetapi jika pekerjaan empiris di

bidang ini terkonsentrasi terutama pada agen kelompok dalam struktur politik di sekitarnya, apa yang 'aneh' (*queer*) tentang perspektif advokasi LGBT? Karya-karya ini menawarkan studi kasus komparatif dari pinggiran regional, budaya dan teoritis untuk mengidentifikasi cara-cara baru berteori pada subjek politik dengan mempertanyakan peran negara seperti yang kita terima. Mereka menambah area kajian HI dengan memperluas pengetahuan tentang perspektif yang sebelumnya kurang dikenal yang secara kritis mengkaji konsep inti HI yang tampaknya jelas (atau 'mitos', seperti yang disebut Weber), seperti konsep-konsep kedaulatan, kekuasaan, keamanan, dan nasionalisme. Mereka melakukannya dari sudut pandang orang luar dan menanamkan pada konsep HI yang sudah usang ini dengan pertimbangan dan interpretasi kritis. Yang penting, mereka menentang biner dualistik yang ada dalam HI arus utama, seperti negara dengan sistem, liberalisme modern dengan homofobia pramodern, dan Barat dengan Non Barat (*the Rest*) (dan tentu saja mereka juga mendekonstruksi/melawan biner konsep pria dengan wanita, dengan mengadopsi konsep queer yang posisinya diantara biner seksual ini-penerjemah). Para sarjana HI pendukung teori Queer mencari kontribusi yang dapat diberikan oleh analisis queer untuk membangun kembali struktur politik individu dan juga struktur internasional tempat manusia tinggal.

Merefleksikan kemungkinan masa depan teori queer, ada berbagai aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Kemajuan dalam kancah politik LGBT terutama terbatas di Dunia Barat dan Utara, dan memicu perang budaya tentang bagaimana advokasi hetero-normatif itu seharusnya dilakukan. Dan, hal itu menimbulkan pertentangan internasional tentang cara yang secara budaya mengganggu dengan mempromosikan hak LGBT. Ini menjadi jelas ketika kelompok transnasional yang kuat, pemerintah atau organisasi internasional mengusulkan untuk membuat pencairan bantuan luar negeri bergantung pada reformasi kesetaraan di negara tertentu. Pada saat yang sama, mereka tidak cukup mengakui bahwa dukungan LGBT eksplisit mereka itu justru meningkatkan marjinalisasi minoritas di negara tertentu itu. Harus diakui juga, bahwa banyak organisasi LGBT memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konteks lokal dan sering bertindak dengan kerja sama aktivis lokal, meskipun biasanya berada dalam posisi

yang lebih lemah daripada lembaga antar pemerintah tempat mereka bekerja sama. Politik LGBT dan penelitian HI yang '*queer*' dapat saling menginspirasi dan paralel, selama politik advokasi seksual tidak menjadi mangsa politik yang terlalu liberal dan merendahkan. Tidak masalah, jika di arena domestik atau internasional sejumlah issue bermasalah tetap ada dengan membersamai kemajuan politik LGBT. Jika hak-hak yang diperjuangkan kaum gay dan lesbian seperti pernikahan dan kesetaraan adopsi masih menjadi masalah, dapatkah seseorang berbicara tentang kesetaraan sejati sementara individu transgender masih kekurangan akses perawatan kesehatan atau perlindungan dari kejahatan rasial? Dan, jika normalisasi individu LGBT Barat (dengan norma tradisional) menjadi diterima secara luas oleh masyarakat dan negara, maka populasi atau masyarakat yang didepolitisasi dengan gagasan tradisional itu mengarah pada melemahnya solidaritas dengan aktivis LGBT asing dan apresiasi terhadap perbedaan mereka, apa efeknya terhadap emansipasi LGBT global? Teori Queer adalah alat penting untuk membantu lebih menghargai kompleksitas perdebatan ini.

Teori Queer dan Kesetaraan Seksual di Eropa

Globalisasi telah melengkapi para ahli teori dan aktivis queer dengan medan intervensi yang diperluas. Dengan mengacu pada politik advokasi LGBT, munculnya banyak organisasi non-pemerintah yang diorganisir oleh Barat tetapi juga gerakan LGBT lokal dengan publisitas signifikan yang mereka hasilkan, baik itu positif atau negatif , memperluas politik transnasional ke tingkat yang sebelumnya tidak diketahui. Keduanya menghancurkan sentralitas negara dalam mengatur dan melindungi warganya. Tempat utama dalam perdebatan ini adalah di Uni Eropa (UE), yang merupakan organisasi internasional dengan kekuasaan supranasional (pembuatan hukum) atas negara-negara anggotanya.

Dimasukkannya individu LGBT bukan sebagai minoritas yang hina di Uni Eropa, tetapi sebagai pembawa hak asasi manusia dengan martabat yang melekat dan hak berekspresi individu dapat mengubah hubungan antara warga negara yang terpinggirkan dan otoritas pemerintah/negara, baik di tingkat negara maupun Uni Eropa. Tetapi teori queer tidak selalu

selaras dengan strategi politik dominan yang dikembangkan melalui advokasi hak LGBT transnasional di Eropa. Ini membantah banyak institusi sosial-politik yang ada seperti kapitalisme neoliberal atau status kewarganegaraan reguler yang membentuk landasan politik Eropa. Advokasi LGBT, kadang-kadang, dipandang oleh teori queer sebagai penurut, heteronormatif, stereotip, dan bahkan (homo) nasionalistik dalam nuansa Barat yang sarat nilai tertentu. Ini karena mengasumsikan bahwa berjuang untuk standar kesetaraan dan inklusi Barat berlaku secara universal dan mengarah pada prosen liberalisasi dan inklusi-sasi. Ini terbukti dalam tekanan negara-negara Eropa yang konservatif untuk mengadopsi kebijakan tertentu, malah justru sering kali menghasilkan ketegangan yang kontraproduktif dan mengekspos minoritas yang rentan. Advokasi LGBT ditujukan untuk inklusi dalam bentuk representasi yang ada, daripada apresiasi perbedaan yang diupayakan oleh teori queer. Karenanya, organisasi LGBT sering kali tampak 'tidak begitu berminat' (de-queered) untuk tujuan politik guna mendapatkan persetujuan dari seluruh masyarakat, yang sering mengarah pada perdebatan internal tentang representasi dan tujuan mereka.

Ketegangan antara advokasi arus utama dan pendekatan queer radikal menandakan kebutuhan untuk memikirkan kembali pendekatan analitis HI yang sederhana. Ketegangan politik di dunia 'nyata' mendorong ahli teori queer HI untuk mempertanyakan konsepsi pemerintahan internasional yang diterima secara umum dan mapan. Dalam melakukannya, ahli teori queer menggunakan literatur atau materi audio-visual yang ada seperti film atau bahkan pertunjukan untuk mempertanyakan kembali apa yang tampak jelas untuk didekonstruksi, dan kemudian merekonstruksi peristiwa dan proses HI yang terjadi. Mereka sering menunjukkan perspektif kritis terhadap kondisi ruang dan waktu yang diasumsikan secara alami yang cenderung menyembunyikan dan meratakan perbedaan di antara para aktor dan interpretasi peristiwa internasional. Misalnya, Cynthia Weber (2016) menggunakan pidato hak-hak seksual Hillary Clinton di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 dan membandingkannya dengan penampilan kemenangan Conchita Wurst di kontes lagu Eurovision pada tahun 2014 untuk menyoroti 'logika queer tentang tata kelola negara' *(the queer logic of statecraft*) yang

menentang tradisi, konstruksi tradisional tentang gender, dan pendekatan biner untuk tata kelola kebijakan (*governance*). Weber menyoroti bagaimana mengubah gagasan homoseksual dari menyimpang menjadi pemegang hak normal hak asasi dalam pidatonya, sementara Clinton masih menghasilkan biner internasional negara progresif versus intoleran. Di sisi lain, Conchita Wurst, karakter yang diciptakan oleh Thomas Neuwirth, menantang pemahaman yang diterima tentang apa yang dianggap normal atau menyimpang dengan menampilkan seorang laki-laki berpakian wanita namun berjenggot lebat (*performing in drag with a beard*). Dalam perjalanannya, Wurst menggoyahkan gagasan rasial, seksual, gender, dan geo-politik tentang apa artinya menjadi orang Eropa. Secara keseluruhan, kedua kasus tersebut menunjukkan betapa gagasan yang tampaknya stabil/kokoh dalam hubungan internasional jauh dari alamiah atau natural. Namun sebaliknya, mereka sengaja dibuat dikonstruksi, dinormalisasikan, ditantang dan dikonfigurasi ulang. Melihat lebih dalam pada masalah di Eropa, pembenaran UE atas non-diskriminasi seksual pada kebijakan pasar neoliberal, tampak pula posisi UE yang ambigu ketika menganjurkan ketentuan kesetaraan yang terbatas (Thiel 2015). Kebijakan anti-diskriminasi ini diterapkan dalam sistem tata kelola multi-level yang kompleks di UE yang mencakup lembaga UE sebagai ‘pemberi’ (*givers)* hak, negara-negara anggota sebagai ‘pengambil’ (takers) yang tidak selalu patuh, dan kelompok LGBT di tengah-tengah situasi ini. Selain pengaturan yang berpotensi bermasalah, paket kebijakan anti-diskriminasi UE hanya berlaku untuk diskriminasi terkait ketenagakerjaan. Namun kelompok advokasi LGBT terbesar di Eropa, *International Lesbian, Gay, Trans, Bisexual and Intersex Association (ILGA Europe*), bersama dengan banyak kelompok lainnya telah mendesakkan proposal undang-undang anti-diskriminasi yang lebih luas yang mencakup semua bidang kehidupan. Ini diperumit oleh fakta bahwa beberapa negara kuat tidak ingin memperluas hukum berbasis pasar yang ada, dan adanya faktor keraguan institusi UE yang memang dibentuk untuk berfokus pada masalah hak-hak ekonomi dan kebebasan warga negara.

Terbukti bahwa dominasi neoliberalisme sebagai alasan rasional utama UE membatasi pencapaian hak individu LGBT karena membatasi pandangan kritis alternatif. Mengingat orientasi UE, organisasi non-

pemerintah ditekan untuk memprioritaskan prinsip-prinsip pasar seperti partisipasi tenaga kerja, sambil menjadi lebih bergantung pada pendanaan pemerintah atau UE. Pada saat yang sama, peningkatan advokasi non-pemerintah ini berbarengan dengan kejadian mundurnya pemerintah di sektor sosial dan kesejahteraan. Hal ini mengurangi potensi untuk menentang kebijakan yang ada dan kemungkinan legitimasi mereka, karena kelompok non-pemerintah harus menghubungkan kegiatan anti-diskriminasi dengan lebih banyak inklusi masyarakat dan pasar tenaga kerja jika mereka ingin mempertahankan dana dari UE. Reorientasi semacam itu melingkupi tujuan Uni Eropa yang neoliberal menghasilkan hierarki hak yang berisiko menempatkan inklusi sosial dan rasa kesetaraan yang lebih luas di prioritas paling bawah. Oleh karena itu, studi kasus ini mempertanyakan kerja sama organisasi advokasi non-pemerintah dengan sistem tata kelola supranasional, yang setidaknya sebagian dituduh ikut bertanggung jawab untuk menghambat kebijakan kesejahteraan nasional. Selain itu, penilaian hak Uni Eropa itu bermasalah, karena hak yang tidak dapat dicabut (yakni, hak asasi LGBT) dijadikan objek nilai ekonomi dan keluaran *(output*) secara trade off. Namun, itu tidak dapat dikritik dalam sistem di mana perencanaan kebijakan UE dilindungi oleh peraturan non-politik, yang seharusnya dipimpin oleh ahli. Hal itu mengingatkan kita pada pemikiran Foucault tentang kesaling-terkaitan kekuasaan (*power linkage*). Ini juga menyiratkan bahwa refleksi evaluatif atas norma Eropa itu sangat diperlukan, dengan cara hetero-normativitas neoliberal sebagaimana yang diinginkan oleh aktor politik dalam proses kebijakan UE, dan karenanya di-reproduksi atau ditantang/dibongkar oleh kelompok hak berbasis gender atau jenis kelamin. Kontribusi feminis ke HI menyoroti hubungan kekuasaan gender yang tidak merata. Sedangkan, perspektif ekonomi-politik kritis yang menggabungkan kekhawatiran tentang ketidakadilan struktural dengan kritik konstruktif terhadap pandangan teori queer tentang inklusi masyarakat sipil, menambah wawasan mendalam ke dalam politik pengakuan hak seksual. Yang paling relevan di sini adalah ketika mempertimbangkan prinsip teoritis dari teori queer seperti menganggap serius posisi berbeda dari aktor politik, dan konten kebijakan publik yang seringkali bermasalah.

Kesimpulan

Perkembangan teori queer di HI menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dasar yang lebih ketat tentang dampak isu LGBT dalam politik internasional mulai berhasil dijawab. Ini menyoroti kontribusi berharga untuk menganalisis HI melalui perspektif yang sampai sekarang tidak dikenal tentang ekspresi seksual dan gender. Teori Queer juga telah terbukti secara teoritis bersifat inklusif dengan cara-cara yang terkadang tidak dilakukan oleh LGBT dan para sarjana feminis. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah ahli teori queer dapat mengenali, dan mungkin melampaui, orientasi ras, kelas dan Barat-sentris (*Western-centric orientations*) sebagai asal usul mereka sendiri. Perluasan seperti itu juga akan memudahkan untuk menemukan penyebab bersama dengan minoritas lain yang terkena dampak, paling tidak untuk beralih dari mode yang murni kritis atau dekonstruktif ke mode yang lebih transformatif dan produktif. Justru karena teori queer mampu melampaui fokus pada seksualitas dan gender melalui prinsip analitis umum, teori ini cocok untuk menginterogasi berbagai fenomena HI. Di masa ketika HI sering dituduh parokial, teori queer diperlukan untuk mengoreksi mitos dan narasi yang kuat dari tatanan internasional dewasa ini.

14
TEORI SEKURITISASI
(SECURITISATION THEORY)

Clara Eroukhmanoff

Teori sekuritisasi menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan keamanan nasional tidak terjadi secara alami, tetapi ditentukan dengan cermat oleh para politisi dan pembuat keputusan. Menurut teori sekuritisasi, isu-isu politik merupakan isu keamanan yang ekstrim yang harus segera ditangani ketika dicap 'berbahaya', 'mengancam', 'mengancam', 'mengkhawatirkan' (*dangerous, menacing, threatening, alarming*) seterusnya oleh 'aktor sekuritisasi' (*securitising actor*s) yang memiliki kekuatan sosial dan kelembagaan untuk memindahkan masalah 'di luar politik'. Jadi, masalah keamanan tidak hanya 'di luar sana' tetapi harus diartikulasikan sebagai masalah oleh aktor sekuritisasi. Melabeli imigrasi sebagai 'ancaman bagi keamanan nasional', misalnya, menggeser imigrasi dari masalah politik prioritas rendah menjadi masalah prioritas tinggi yang memerlukan tindakan, seperti mengamankan perbatasan. Teori sekuritisasi menantang pendekatan tradisional terhadap keamanan di HI, dan menegaskan bahwa masalah yang pada dasarnya 'tidak mengancam', namun, dengan melabeli/menyebut mereka sebagai masalah 'keamanan', maka mereka menjadi masalah keamanan yang serius.

Dasar-Dasar Teori Sekuritisasi

Akhir Perang Dingin memicu perdebatan tentang gagasan keamanan di HI antara 'penyempit' (*narrowers)* dan 'pelebar' (*wideners)*. Para narrowers prihatin dengan keamanan negara dan sering berfokus pada analisis stabilitas militer dan politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tidak puas dengan ini, wideners berusaha untuk memasukkan jenis ancaman lain yang tidak bersifat militer dan yang mempengaruhi orang,

dan bukan negara. Ini memperluas agenda keamanan dengan memasukkan konsep-konsep seperti keamanan manusia dan keamanan regional, bersama dengan gagasan budaya dan identitas. Feminisme memiliki peran penting dalam memperluas agenda dengan menantang gagasan bahwa satu-satunya penyedia keamanan adalah negara, dan bahwa gender tidak relevan dalam menciptakan keamanan. Sebaliknya, negara seringkali menjadi penyebab ketidakamanan bagi perempuan. Memperluas agenda dari perspektif feminis yang membawa isu gender ke dalam fokus HI dengan menempatkan gender dan perempuan sebagai fokus perhitungan keamanan, dan dengan menunjukkan bahwa gender, perang dan keamanan itu saling terkait. Ini merupakan perkembangan penting dalam munculnya perspektif yang lebih luas tentang keamanan. Apakah seseorang setuju dengan yang lebih luas atau lebih sempit, akhir dari Perang Dingin menunjukkan bahwa keamanan pada dasarnya adalah konsep yang diperebutkan, 'sebuah konsep yang menghasilkan perdebatan yang tidak dapat diselesaikan dengan merujuk pada bukti empiris karena konsep tersebut mengandung elemen ideologis atau moral yang jelas, dan sangat sulit mendefinisikan definisi keamanan yang tepat dan diterima secara umum' (karena digunakan dalam berbagai bidang dan kegunaan-penerjemah) (Fierke 2015, 35). Dengan menunjuk makna dan sifat dasar keamanan yang diperebutkan, pendekatan kritis terhadap keamanan berpendapat bahwa 'keamanan' tidak selalu positif atau universal, tetapi tergantung konteks dan subjek, dan bahkan terkadang negatif. Karena dalam praktik pengelolaan keamanan, ada pihak yang menerima/menikmati keamanan, namun, pada saat itu pula, keamanan menghasilkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di antara orang-orang. Misalnya, dalam konteks Perang Global Melawan Teror, seseorang yang berpenampilan Arab telah dicurigai sebagai 'orang lain' (*others*) yang berbahaya, dan telah terjadi peningkatan operasi pengawasan di komunitas Muslim dengan praduga karena mereka sesuai dengan profil teroris, maka mereka mungkin terkait dengan terorisme. Dilihat dari sudut ini, pengawasan menjadi aparat/instrumen kontrol keamanan, dan sumber ketidakamanan bagi suatu komunitas. Dengan mempertanyakan esensi keamanan dalam kasus seperti inilah, teori sekuritisasi mengembangkan dan memperluas cakupan keamanan untuk menyertakan objek rujukan lain,

di luar negara. Objek rujukan, ide sentral dalam sekuritisasi, adalah hal yang terancam dan perlu dilindungi.

Ahli teori sekuritisasi menentukan lima sektor, yakni, ekonomi, kemasyarakatan, militer, politik, dan lingkungan. Di setiap sektor, ancaman tertentu diartikulasikan sebagai mengancam objek rujukan. Misalnya pada bidang kemasyarakatan, objek yang menjadi acuan adalah identitas, sedangkan pada bidang lingkungan adalah ekosistem dan spesies yang terancam punah. Hanya di bidang militer, objek rujukan tetap negara. Dengan 'men-sektorisasi' keamanan, kami memahami bahwa ancaman eksistensial tidak obyektif tetapi berkaitan dengan karakteristik yang berbeda dari setiap objek rujukan. Teknik ini juga menyoroti sifat kontekstual keamanan dan ancaman. Serangan bom bunuh diri, misalnya, adalah sumber kecemasan yang lebih besar bagi sebagian orang saat ini daripada bagi kelompok orang lain. Namun kita sering mendengar terorisme bunuh diri dibingkai sebagai ancaman 'global'. Sekuritisasi menunjukkan bahwa tidaklah benar untuk membicarakan isu-isu seperti terorisme seolah-olah mereka sama-sama mengancam semua orang di seluruh dunia. Dengan membicarakan objek referensi, kita dapat bertanya, Keamanan untuk siapa? Keamanan dari apa? Dan keamanan oleh siapa?

Inti dari teori sekuritisasi adalah menunjukkan struktur retoris para pembuat keputusan ketika membingkai suatu masalah dan mencoba meyakinkan audiens untuk mengangkat masalah di atas politik. Inilah yang kami sebut tindak tutur *(a speech act*), 'dengan mengucapkan kata-kata, mengesankan bahwa sesuatunya telah dilakukan, seperti bertaruh/berkorban, dan memberi janji' (Buzan, Wæver dan de Wilde 1998, 26). Mengkonseptualisasikan sekuritisasi sebagai tindak tutur itu penting karena menunjukkan bahwa perkataan tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi merupakan realitas yang pada gilirannya memicu tanggapan tertentu. Dalam proses mendeskripsikan realitas yang kita lihat, kita juga berinteraksi dengan dunia tutur (*speech*) itu, dan melakukan tindakan yang akan sangat berkontribusi untuk melihat realitas itu dengan cara yang berbeda. Misalnya, menyebut kamp imigrasi di Calais sebagai 'Hutan' *(the jungle*) tidak hanya menggambarkan apa yang sebenarnya ada kamp itu, tetapi menggambarkannya sebagai tempat tanpa hukum dan berbahaya. Oleh karena itu, ancaman bukan hanya ancaman

pada asasnya, tetapi dibangun sebagai ancaman melalui bahasa. Untuk meyakinkan penonton agar mengambil tindakan luar biasa, pelaku sekuritisasi harus menarik perhatian dan seringkali membesar-besarkan urgensi dan tingkat ancaman, mengkomunikasikan kondisi kritis dimana tidak ada poin untuk bisa kembali (*a point of no return*), yaitu ‘jika kita tidak mengatasi masalah ini, segala sesuatu yang lain menjadi tidak relevan atau tidak ada artinya’, dan menawarkan jalan keluar yang mungkin (dengan mengangkat masalah di atas papan politik), yang sering dibingkai dalam istilah militer. Dengan demikian, pelaku sekuritisasi membuat beberapa tindakan lebih dapat dipahami daripada yang lain, dan memungkinkan membentuk rezim kebenaran (*regime of truth*) tentang sifat ancaman dan tentang sifat objek rujukan.

Sebuah masalah menjadi di-sekuritisasi ketika audiens (masyarakat) secara kolektif menyetujui sifat ancaman dan mendukung pengambilan tindakan luar biasa. Jika penonton menolak tindak tutur *(speech act*) aktor sekuritisasi, itu berarti hanya mewakili gerakan sekuritisasi, dan sekuritisasi telah gagal saat itu. Dalam hal ini, fokus pada audiens dan proses membutuhkan lebih dari sekadar ‘berbicara tentang keamanan’. Hal ini menuai kritik dari beberapa ahli, yang merekomendasikan pemahaman sekuritisasi sebagai proses panjang konstruksi sosial yang sedang berlangsung dan negosiasi antara berbagai audiens dan pembicara. Masalah keamanan apa pun dapat disajikan dalam spektrum, mulai dari yang tidak dipolitisasi (masalah belum mencapai debat publik) hingga dipolitisasi (masalah telah menimbulkan keprihatinan publik dan menjadi agenda) hingga sekuritisasi (masalah telah dibingkai sebagai ancaman eksistensial). Ketika suatu masalah dilindungi, tindakan sering kali dilegitimasi dengan bahasa ‘urgensi’ dan ‘ancaman eksistensial’ dan merupakan tindakan yang dapat dianggap tidak demokratis dalam situasi normal. Langkah-langkah keamanan dalam Perang Melawan Teror, seperti kamp penahanan Teluk Guantanamo, penggunaan penyiksaan, peningkatan pengawasan warga, penyerangan luar biasa dan serangan drone rahasia, menggambarkan logika pengecualian. Seandainya Perang Melawan Teror tidak dibingkai dalam konteks di mana penangguhan politik normal diperbolehkan, langkah-langkah keamanan ini mungkin

tidak akan ada, juga tidak akan bertahan hingga hari ini karena pasti ditolak oleh publik sebagai tidak demokratis dan melanggar HAM universal.

Sekuritisasi yang berhasil menempatkan ‘keamanan’ sebagai ranah luar biasa, menginvestasikan aktor sekuritisasi dengan kekuatan kekuasaannya untuk memutuskan kapan kerangka demokrasi harus ditangguhkan, dan dengan kekuasaan untuk memanipulasi populasi dan tingkat bahayanya. Bagi Wæver (2015 dan 2000), teori sekuritisasi dibangun untuk melindungi politik dari kekuasaan negara yang tidak proporsional dengan menempatkan keberhasilan dan kegagalan sekuritisasi di tangan penonton/masyarakat, daripada di aktor sekuritisasi itu sendiri. Wæver juga menyuarakan preferensinya untuk ‘penodaan agama’, untuk dirujuk kembali ke politik normal. Lagipula, penonton tidak sepenuhnya tertipu oleh belas kasihan aktor sekuritisasi, dan dengan membuat prosesnya lebih transparan, teori sekuritisasi memberi penonton keagenan dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, peran analis keamanan bergerak dari menganalisis ancaman secara objektif ke mempelajari proses di mana para aktor sekuritisasi membangun pemahaman bersama tentang apa yang secara kolektif diakui sebagai ancaman. Teori sekuritisasi dengan demikian tidak begitu banyak terlibat dalam menjawab ‘mengapa’ (why) suatu masalah harus di-sekuritisasi-kan. Lebih penting untuk diamati adalah, bahwa kita memperhatikan kondisi yang memungkinkan sekuritisasi dengan mengajukan pertanyaan ‘bagaimana’ (how), yakni, bagaimana menggunakan bahasa tertentu yang memungkinkan aktor untuk meyakinkan penonton tentang ancaman tertentu?

Teori Sekuritisasi dan Kelompok ISIS di Eropa

Menyusul serangan di berbagai kota Eropa, kelompok yang mengklaim akan mendirikan Negara Islam (yang dikenal dengan nama Daesh, ISIS atau ISIL) menjadi prioritas utama dalam agenda keamanan mulai tahun 2015 dan seterusnya. Kelompok tersebut telah ditampilkan sebagai ancaman terhadap keamanan negara, dan keamanan individu di Eropa Barat, dan lebih luas lagi sebagai ancaman terhadap cara hidup Barat. Artinya, sekuritisasi kelompok ISIS mempengaruhi setidaknya tiga sektor, yakni, kemasyarakatan, militer dan politik. Teori sekuritisasi

mengamati bahwa terkadang dalam sebuah sistem demokrasi, pemerintah harus membenarkan penangguhan politik normal kepada publik. Oleh karena itu, jika kelompok ISIS di sekuritisasi di negara-negara Eropa, yang dianggap demokratis, kita harus melihat gerakan sekuritisasi dari pejabat pemerintah, yang melakukan pembenaran retoris mengapa intervensi, misalnya, adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman kelompok ISIS dan rekan-rekannya ini.

Penting untuk dicatat bahwa aktor sekuritisasi tidak terbatas pada politisi. Para profesional keamanan seperti polisi, badan intelijen, bea cukai, layanan imigrasi, penjaga perbatasan dan militer semuanya memainkan peran penting dalam mendefinisikan sistem keamanan (security landscape) yang akan dipraktikkan. Mereka beroperasi dalam bidang keamanan yang ditandai dengan persaingan antara pengetahuan yang 'benar' dengan ancaman dan risiko lain yang terkait, serta bagaimana mencari solusi yang 'benar'. Meskipun ketidaksepakatan dan konfrontasi terjadi antara keamanan profesional, Bigo, Bonditti dan Olsson (2010, 75–78) berpendapat bahwa mereka masih dipandu oleh seperangkat keyakinan dan praktik umum. Aktor pengamanan mengambil ancaman keamanan secara objektif dan berusaha menyelesaikannya dengan melakukan berbagai misi. Selain itu, ada juga aktor fungsional yang dapat mempengaruhi dinamika bidang keamanan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat persoalan di atas politik. Aktor fungsional adalah yang terpenting karena mereka membantu membingkai alur cerita tentang sifat masalah yang mengancam itu secara eksistensial, dan seringkali menciptakan perbedaan antara 'kami' dan 'mereka', bahkan sering kali terlibat dalam proses pelabelan sebagai 'orang lain' (*othering process*). Contoh aktor fungsional dapat berupa media, akademisi, lembaga non-pemerintah, dan lembaga think tank. Ini juga dapat mencakup individu itu sendiri, dengan menceritakan dan berbagi cerita antara teman, keluarga, dan kolega. Misalnya, klaim ekstrim yang dibuat di surat kabar tabloid di seluruh Eropa menciptakan narasi di mana kelompok ISIS dan rekan-rekannya telah menyusup ke masyarakat dan bekerja untuk menghancurkan sistem negara demokratis yang mereka tinggali.

Contoh nyata dari gerakan sekuritisasi di Inggris dapat ditemukan selama debat *House of Commons* tentang mosi aksi militer Inggris di Suriah pada 2 Desember 2015. Perdana Menteri Inggris David Cameron berpendapat bahwa 'kami menghadapi ancaman fundamental terhadap keamanan kami' dari ancaman kelompok ISIS, yang 'menyerang kami karena siapa kami, dan bukan karena apa yang kami lakukan' (ini adalah presentasi tentang sifat ancaman dan pembentukan rezim kebenaran-*regime of truth*). Dia kemudian berkata bahwa 'kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi' untuk mengurangi ancaman (ini adalah titik tidak bisa kembali-a point of no return). Akhirnya, dia menunjukkan bahwa ini bukan tentang apakah kita ingin memerangi terorisme tetapi tentang cara terbaik kita melakukukannya (ini adalah solusi yang diberikan).

Lebih jelas lagi di Prancis, ketika, setelah serangan Paris tanggal 13 November 2015, Presiden Francois Hollande menyatakan bahwa 'Prancis sedang berperang melawan pasukan jihadis yang menyerang Prancis karena Prancis adalah negara kebebasan' (sekali lagi, fokus pada 'apa dan siapa kami'). Dalam framing ini, orang Prancis adalah 'orang yang galak, gagah berani dan pantang menyerah', dan menjadi korban serangan semacam itu hanya karena 'hidup' (*being alive*). Di ujung lain spektrum adalah 'mereka', 'pasukan jihadis', adalah dari jenis manusia 'pembunuh dan pengecut' yang merupakan 'monster kekejian' dan 'membuat serangan keji' yang hanya dapat ditandai dengan 'horor'. Sebuah *point of no return* muncul ketika Hollande mengklaim bahwa kelompok ISIS adalah sebuah organisasi yang 'mengancam seluruh dunia', dan bahwa ini adalah 'alasan mengapa penghancuran Daesh/ISIS adalah kebutuhan bagi komunitas internasional'. Akhirnya, solusinya, mengangkat masalah ke 'area politik' ditawarkan oleh Hollande, bahwa, 'kontrol perbatasan langsung dan keadaan darurat telah diperintahkan' (Hollande 2015).

Pola tata bahasa dari pidato atau pernyataan-pernyataan yang terkait isu keamanan dapat dilihat dengan jelas. Pidato tersebut merujuk pada sifat kelompok ISIS yang secara eksistensial mengancam, posisi *a point of no return* menjadi tidak dapat dielakkan, dan solusinya adalah seperangkat tindakan yang membebaskan proses demokrasi normal (artinya, membenarkan cara-cara yang mengesampingkan nilai-nilai demokrasi dan HAM-penerjemah). Beberapa bulan setelah serangan Paris,

Hollande meningkatkan serangan militer Prancis di Suriah dan memerintahkan keadaan darurat yang memberi pasukan keamanan Prancis kekuatan domestik yang kontroversial. Oleh karena itu, kami memiliki kasus sekuritisasi yang berhasil membuktikan gagasan teori sekuritisasi ini. Penting untuk dicatat, bahwa ketika berargumen bahwa ISIS adalah isu yang di-sekuritisasi, para ahli teori sekuritisasi tidak menentang eksistensi kelompok tersebut memang sebagai sesuatu yang berbahaya, atau bahwa kelompok tersebut memang telah mengoordinasikan serangan di Eropa. (Namun, yang dikritik oleh para ahli teori ini adalah 'cara para elit dan pengelola keamanan negara' yang menggunakan bahasa-bahasa yang melampaui kebutuhannya untuk membuat keputusan yang proporsional secara demokratis-penerjemah). Sebaliknya, sekuritisasi mempertanyakan proses di mana kelompok ini dipandang sebagai ancaman, dan berpendapat bahwa dengan menyebut kelompok tersebut sebagai ancaman, para pemimpin negara Eropa seperti Prancis dan Inggris juga terlibat dalam penciptaan perang. Dalam hal ini, sekuritisasi menyoroti bagaimana tindak tutur (*speech act*) sekuritisasi oleh Hollande tidak hanya menggambarkan keadaan 'di luar sana', tetapi merupakan instrumen serangan sebagai tindakan perang, sehingga membawa perang menjadi ada atau terjadi, dan semakin meluas ke wilayah yang sebenarnya masih damai. Dengan demikian, menggambarkan ancaman kelompok ISIS tidaklah imparsial atau obyektif, melainkan dalam tindakan tutur itu sendiri, dan tindakan yang harus dilihat sebagai tindakan politik.

Menggunakan teori sekuritisasi menunjukkan bahwa politik terorisme dan kontraterorisme adalah tentang pembesaran ancaman, dan bahwa kekerasan simbolis yang disebabkan oleh serangan tidak proporsional dengan jumlah kematian yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, jumlah korban di Eropa Barat lebih tinggi pada tahun 1970-an dan 1980-an sebagai akibat dari kelompok-kelompok seperti IRA[9]

[9] Kekerasan antara kaum Protestan dan Katolik di Irlandia Utara meningkat pada awal 1970-an. Pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik ini adalah organisasi paramiliter republik seperti Provisional Irish Republican Army (IRA) dan Tentara Pembebasan Nasional Irlandia (INLA), paramiliter loyalis seperti Pasukan Sukrelawan Ulster (UVF) dan Asosiasi Pertahanan Ulster (UDA), pasukan keamanan negara Britania Raya, termasuk Angkatan Darat Britania dan Royal Ulster Constabulary (RUC), dan aktivis politik maupun politisi. Pasukan keamanan Republik Irlandia memainkan peran yang lebih kecil. Lebih

dibandingkan dengan jumlah yang dapat dikaitkan dengan teroris Islam belakangan ini. Namun para pemimpin negara-negara Eropa mengklaim bahwa dunia tidak pernah menghadapi 'kebiadaban, horor dan kekejaman', seperti itu (tanpa harus mengatakan masih adanya sentimen ras dan agama di kalangan para pemimpin di Eropa dewasa ini-penerjemah). Perbesaran ancaman ini menunjukkan keluar-biasaan dari ancaman, yang pada gilirannya membutuhkan urgensi dan tanggapan yang luar biasa pula. Memikirkan terorisme dengan cara ini tidak hanya merugikan proses musyawarah, tetapi juga membatasi pemahaman kita tentang terorisme secara lebih umum dan mendalam.

Kesimpulan

Sekuritisasi adalah alat yang berguna bagi para penstudi HI karena menentang pendekatan tradisional terhadap keamanan yang terlalu berfokus pada keamanan negara, bukan pada objek rujukan lainnya. Mengadopsi kerangka sekuritisasi berarti menghadirkan tantangan hegemoni dan gagasan yang selama ini diterima begitu saja tentang universalitas dan objektivitas keamanan, dan menekankan cara di mana pengetahuan tentang keamanan tidak hanya diproduksi 'di luar sana', tetapi didorong oleh kepentingan (dari dalam-penerjemah). Teori sekuritisasi mengingatkan kita bahwa sekuritisasi bukanlah tindakan netral tetapi politik. Dari titik awal itu kami dapat menggali lebih dalam dan menyelidiki berbagai ketidakamanan yang ditemukan dalam hubungan internasional.

---

dari 3.500 orang tewas dalam konflik ini, 52% adalah warga sipil, 32% adalah anggota pasukan keamanan Britania Raya, dan 16% adalah anggota kelompok paramiliter. Telah terjadi kekerasan sporadis sejak Perjanjian Jumat Agung ditandatangani, termasuk sebuah kampanye oleh kaum republiken yang menolak gencatan senjata. Bahkan, Terorisme di Eropa telah menewaskan 11.288 orang dalam 18.811 serangan sejak Januari 1970, menurut University of Maryland National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism's Global Terrorism Database, yang melacak lebih dari 170.000 insiden asing dan domestik di seluruh dunia. Lihat laman https://www.rcc.int/p-cve/news/55/46-years-of-terrorist-attacks-in-europe-visualized dan https://tnsr.org/2019/05/the-good-friday-agreement-ending-war-and-ending-conflict-in-northern-ireland/ (penerjemah).

15
TEORI GEOGRAFI KRITIS
(CRITICAL GEOGRAPHY)

Irena Leisbet Ceridwen Connon &
Archie W. Simpson

Geografi kritis didasarkan pada gagasan bahwa umat manusia memiliki potensi untuk mengubah lingkungan. Ini menantang ideologi dominan yang menjadi ciri struktur politik internasional, termasuk menolak kategori tradisional dan unit analisis dalam HI seperti anarki, keamanan, dan konsep negara. Geografi kritis didasarkan pada prinsip bahwa pertanyaan tentang relasi spasial, yang merujuk pada bagaimana suatu objek yang terletak di dalam ruang tertentu berhubungan dengan objek lain, adalah penting karena perilaku politik tertanam dalam struktur sosial politik yang didasarkan pada gagasan tentang ruang. Selanjutnya, jika keilmuan dan perilaku politik tertanam dalam struktur sosial-politik, analisis objektif tentang politik internasional menjadi tidak mungkin. Teori HI tidak dapat mencerminkan situasi global dari sudut pandang netral. Ahli geografi kritis menyarankan bahwa cara berpikir alternatif tentang ruang memiliki potensi untuk mengubah ide, teori dan pendekatan fundamental yang mendominasi studi politik internasional. Pada gilirannya, mereka berharap perspektif alternatif ini akan membantu mengubah politik internasional dan mengurangi ketimpangan manusia.

Dasar-Dasar Teori Geografi Kritis

Geografi kritis muncul pada tahun 1970-an sebagai kritik terhadap positivisme, yang merupakan bentuk keilmuan yang didasarkan pada gagasan bahwa dunia ada secara independen dari sisi pengamat. Geografi kritis berakar pada neo-Marxisme dan mengacu pada ide-ide Jürgen Habermas dan mazhab Frankfurt, yang memperluas ide-ide dalam

Marxisme klasik dengan mengeksplorasi bagaimana kebebasan dari ketidaksetaraan dapat dihasilkan dari proses damai daripada tindakan revolusioner. Pada saat ini, para sarjana mulai meneliti bagaimana struktur politik yang dominan dan keilmuan mengekalkan ketidaksetaraan politik yang ada.

Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991 menunjukkan perkembangan ekonomi global baru, disertai dengan perubahan demografi global. Pada awal 1990-an, semakin pentingnya aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah dan perusahaan multinasional disertai dengan meningkatnya etno-nasionalisme, di mana negara didefinisikan berdasarkan etnis, dan bukan keanggotaan sipil negara, mendorong gagasan baru tentang keamanan dan peran negara.

Pemikiran HI kritis mulai berfokus untuk membongkar teori dominan seperti realisme yang memperkuat hubungan kekuasaan yang tidak setara dengan mendukung negara-negara tertentu mendominasi politik internasional. Berdasarkan ide Ken Booth dan Richard Wyn Jones dari Welsh School, mereka berpendapat bahwa ketidakamanan manusia dipertahankan oleh struktur politik yang ada (Booth 1991 dan 1997). Dari sini, para sarjana mulai melihat ke arah geografi kritis, dan teori kritis-nya Lefebvre (1991) sebagai ruang untuk menguji bagaimana asumsi-asumsi yang memberi ruang kekekalan konsep ketidak-amanan dan ketidak-setaraan yang ada saat ini. Dua sarjana penting terkait dengan ini adalah David Harvey dan John Agnew, yang menyoroti bagaimana konsepsi tradisional tentang ruang proses dekontekstualisasi pembentukan negara dan memperkuat konsepsi terpolarisasi secara tradisional tentang ruang antara Timur dan Barat, Utara dan Selatan, negara berkembang dan maju dalam pemikiran Hubungan Internasional (Agnew 1994; Harvey 2001 dan 2006).

Geografi kritis menawarkan sarana untuk menguji perilaku politik internasional, termasuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antar negara di tingkat regional dan global, dan antara organisasi internasional dan negara. Ada sejumlah gagasan dan konsep kunci dalam geografi kritis yang menawarkan analisis alternatif hubungan internasional. Salah satu gagasan kunci berkaitan dengan adanya gagasan ruang teritorial. Filsuf Henry Lefebvre (1991) berpendapat bahwa ada tiga cara untuk berpikir

tentang ruang, yakni, secara absolut, relatif dan relasional. Dari perspektif absolut, ruang dipandang sebagai sesuatu yang tetap dan terukur. Gagasan tetap tentang wilayah ini menopang teori tradisional HI. Tapi, jika Anda berasumsi bahwa wilayah itu sudah pasti, itu memperkuat asumsi tentang hubungan di dalam dan di antara wilayah tertentu.

Misalnya, pikirkan tentang bagaimana dunia direpresentasikan pada peta politik standar. Peta politik mewakili dunia dalam istilah negara yang dipisahkan satu sama lain oleh perbatasan teritorial. Pandangan absolut tentang ruang global menganggap mode representasi ini tetap, yang berarti ia tidak akan mempertimbangkan kemungkinan cara-cara alternatif untuk memetakan dunia. Pandangan tetap ini juga mengabaikan bagaimana politik internasional berubah sepanjang sejarah, mengubah bentuk ruang global ketika negara baru dan institusi internasional muncul.

Pandangan absolut tentang ruang bukanlah satu-satunya pilihan yang dimiliki para sarjana untuk memikirkan ruang global internasional. Konsep ruang relatif Lefebvre menantang pandangan absolut tentang ruang. Konsep ini melibatkan pemikiran tentang ruang dengan cara yang memandang ruang internasional bukan sebagai 'wadah kosong' atau ruang tetap, tetapi yang diisi dengan objek dan hubungan yang saling berhubungan (Meena 2013). Lebih lanjut, pandangan ruang relatif memandang keberadaan ruang ini sebagai hasil dari hubungan antar objek dalam ruang tersebut. Dari sini, cara kita memahami ruang dapat dikatakan sebagai produk dari rangkaian hubungan tertentu.

Misalnya, jika kita mempertimbangkan ruang-ruang tertentu dalam kaitannya dengan ruang-ruang lain, kita dapat melihat bahwa ketika para sarjana berbicara tentang '*Global South'*, mereka merujuk ke selatan dalam kaitannya dengan 'Dunia Selatan'. Ide dan representasi dari '*Global North'* dan '*Global South'*, atau dari '*Eas*t' dan '*Wes*t' disajikan sebagai hasil dari hubungan terpolarisasi yang menjadi ciri politik internasional hingga akhir Perang Dingin.

Pandangan relatif tentang ruang dapat digunakan untuk menunjukkan keberadaan berbagai pandangan dan cara alternatif untuk mengkonseptualisasikan ruang dari pandangan negara tertentu dan aktor internasional lainnya. Misalnya, ketika sarjana HI mengklasifikasikan semua negara di belahan bumi selatan sebagai mewakili 'Dunia Selatan',

pandangan ini gagal untuk mengakui perbedaan dan hubungan kompleks yang ada di antara negara-negara

Selatan dimaksud. Ini mengarahkan kita untuk berasumsi bahwa semua negara di wilayah selatan adalah setara dalam hal kekuatan politik dan ekonomi mereka, padahal tidak demikian halnya karena negara-negara yang kuat di Dunia Selatan seperti Brasil memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada negara-negara miskin seperti Malawi. Ini mengasumsikan bahwa negara-negara di Selatan secara monolit-homogen, yang melihat diri mereka berada di atas dasar yang sama bagi semua negara di Selatan. Hal ini merupakan penyederhanaan yang berlebihan karena mengabaikan banyak persaingan ekonomi dan politik yang ada di antara berbagai negara di wilayah selatan ini. Pandangan itu juga gagal untuk mengakui bagaimana negara-negara tertentu di Dunia Selatan secara politik dan ekonomi terkait dengan negara-negara di dalam Dunia Utara melalui perjanjian perdagangan *(international trade agreement).*

Pandangan relasional tentang ruang menunjukkan bahwa ruang tidak dapat ada tanpa perspektif pengamat, karena objek hanya ada dalam hubungannya dengan objek lain. Misalnya, ketika kita memikirkan suatu tempat, kita hanya dapat memikirkannya berdasarkan apa yang kita ketahui tentang tempat itu. Apa yang kita ketahui menuntun kita untuk membentuk opini-opini yang mempengaruhi bentuk, dan membentuk bentuk-ruang tersebut, dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan argumen/wacana yang mendukung atau menolak gagasan dan perkembangan politik yang sudah ada sebelumnya. Pada gilirannya, pendapat tersebut mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh aktor negara secara internasional yang membentuk ruang internasional secara global. Ini bisa dilihat, misalnya, dalam hal menyetujui keanggotaan negara ke dalam organisasi regional seperti Uni Eropa. Oleh karena itu, cara kebanyakan sarjana memikirkan dan merepresentasikan ruang politik internasional dalam kaitannya dengan negara berdaulat dan batas teritorialnya dapat dikatakan sebagai produk dari perspektif ruang.

Perkembangan pemikiran lebih lanjut meneliti bagaimana proses perubahan global dan pertumbuhan organisasi politik alternatif, seperti gerakan lingkungan transnasional dan lembaga-lembaga adat *(indigenous*

government institutions), yang telah turut andil dalam membentuk ruang global kontemporer (Harvey 2009). Salah satu perkembangan tersebut melihat bagaimana kebangkitan lembaga pemerintah adat di Kutub Utara menawarkan pandangan ruang alternatif yang menantang konsepsi tradisional ruang internasional dan melihat bagaimana pendekatan Suku Inuit[10] terhadap pemerintahan menekankan tanggung jawab kolektif untuk lingkungan di luar batas negara (Zellen 2009). Perkembangan lain baru-baru ini mengamati bagaimana ekspansi kapitalisme neoliberal telah mengakibatkan meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi dalam skala global, meminggirkan kaum miskin di dalam dan di seluruh negara bangsa, dengan perwakilan berbasis negara di lembaga-lembaga politik internasional berkontribusi pada ketimpangan yang meningkat ini (Harvey 2009). Selain itu, perhatian terhadap keamanan manusia yang terkait dengan risiko dan dampak perubahan iklim global semakin mengemuka di HI. Teori geografi kritis dapat menunjukkan kepada kita bagaimana gagasan arus utama HI tradisional tentang ruang yang tertanam dalam politik internasional, dan teori HI dapat mengabadikan ketidaksetaraan manusia dan marginalisasi mereka yang paling berisiko langsung dari perubahan lingkungan global. Gagasan alternatif tentang ruang angkasa memaksa para ahli untuk menilai kembali skala global dari risiko dan dampak perubahan iklim, dan memberikan dukungan untuk argumen yang menyerukan reformasi representasi dalam politik internasional untuk mengurangi ketidaksetaraan, dan untuk mengatasi peningkatan risiko perubahan iklim bagi kelompok yang secara tradisional terpinggirkan, seperti masyarakat adat.

[10]Sensus oleh Pemerintah Kanada tahun 2001 melaporkan 56.330 orang Inuit tinggal di Kanada, yakni, 22.560 di Nunavut, 3.910 di Northwest Territories, 9.530 di Quebec dan 4.560 orang di Newfoundland dan Labrador. Ada populasi Inuit yang lebih kecil di Alberta, Ontario, dan British Columbia. Komunitas Inuit lainnya bertahan hidup di Siberia Rusia, Greenland, dan negara bagian Alaska, AS. Suku Inuit tinggal di 53 komunitas Arktik di empat wilayah geografis, yakni, di Nunatsiavut (Labrador); Nunavik (Quebec); Nunavut; dan Wilayah Pemukiman Inuvialuit di Wilayah Barat Laut. Lihat laman https://minorityrights.org/minorities/inuit/ (penerjemah)

Geografi Kritis dan Pandangan Ruang bagi Suku Inuit

Suku Inuit adalah sekelompok masyarakat adat yang memiliki budaya serupa yang tinggal di wilayah Kutub Utara Alaska, Kanada, Greenland, Denmark dan Rusia. Pandangan mereka tentang ruang teritorial didasarkan pada kesamaan budaya dan penggunaan lahan untuk praktik berburu tradisional daripada batas-batas negara-bangsa. Tingkat spasial hunian suku Inuit di wilayah Arktik mencapai lima negara bagian, menggambarkan kedaulatan bersejarah mereka atas wilayah yang luas. Namun peta politik dunia tidak mewakili daerah ini sebagai wilayah Inuit. Sebaliknya, wilayah yang dicakup oleh wilayah Inuit dipecah dan dimasukkan dalam batas-batas negara bagian masing-masing. Ketika wilayah Inuit dijajah oleh kekuatan Eropa, Amerika dan Rusia, wilayah mereka menjadi bagian dari wilayah negara-bangsa kolonial, dan Inuit menjadi tunduk pada pemerintah negara kolonial. Saat ini, warisan kolonialisme masih dapat dilihat dalam representasi ruang politik internasional, karena mayoritas keanggotaan dalam lembaga politik internasional terus ditetapkan atas dasar negara-negara berdaulat, yang mengakibatkan marjinalisasi politik yang terus berlangsung di Inuit.

Tanpa perwakilan yang memadai di tingkat politik internasional, keprihatinan Inuit tentang keamanan dan kelestarian lingkungan tidak dapat mempengaruhi kebijakan internasional sejauh yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara (Kanada). Lebih lanjut, keterwakilan kepentingan Inuit dalam keputusan yang dibuat di tingkat internasional masih sangat buruk. Hal ini terutama terjadi ketika kepentingan Inuit bertentangan dengan kepentingan pemerintah, seperti pembangunan jaringan pipa melalui wilayah Inuit untuk mengangkut minyak antar negara. Namun, dengan mengadopsi perspektif wilayah Inuit yang menolak penggambaran negara-bangsa atas ruang global, ahli geografi kritis dapat menawarkan definisi alternatif wilayah dan memberikan representasi yang lebih akurat.

Suku Inuit hanya mewakili sebagian kecil dari total populasi penduduk di suatu negara, yakni, hanya 0,2% dari total penduduk Kanada yang terdaftar sebagai Inuit pada sensus 2011. Tapi, ketika memikirkan tentang bagaimana hilangnya es laut Arktik (karena perubahan iklim) mempengaruhi jumlah total Inuit di masing-masing lima negara bangsa

dengan mendefinisikan wilayah sebagai yang terdiri dari kesamaan budaya dan bukan batas negara, maka gambaran yang jauh lebih besar akan muncul (Huntington 2013). Hilangnya es membahayakan mata pencaharian ekonomi dan budaya suku Inuit, karena memengaruhi aktivitas berburu dan menempatkan desa-desa pesisir pada risiko erosi dan banjir.

Jika dilihat dari perspektif ini, risiko keamanan terhadap kesejahteraan orang-orang di wilayah yang begitu luas di dunia tampak jauh lebih menonjol daripada yang diberikan oleh sebagian besar teori IR lainnya (yang membatasi wilayah dengan batas negara dengan jumlah penduduk yang sangat kecil dibandingkan dengan Kanada, Inuit hanya 0,2% saja, atau amat sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk bumi seluruhnya-penerjemah). Ketika para sarjana mengadopsi definisi spasial tradisional, mereka terlalu menyederhanakan ruang global dan, seperti yang dapat kita lihat dalam contoh ini, terlalu menyederhanakan cakupan geografis dari ancaman terhadap keamanan manusia. Lebih jauh lagi, ketika para ahli mendefinisikan ruang sebagai negara yang hanya ada di negara merdeka, maka pengujian dampak bencana lingkungan terbatas pada perbandingan sederhana antara dua atau lebih negara, seperti antara Kanada dan Amerika Serikat. Ini mengaburkan tingkat keparahan dampak bencana alam di wilayah tertentu di dunia. Selain itu, metode analisis tradisional ini juga gagal melihat bagaimana ancaman keamanan manusia yang ditimbulkan oleh bencana lingkungan tidak tersebar secara merata di dalam wilayah negara masing-masing. Ini meremehkan fakta bahwa Inuit yang tinggal di Alaska berisiko mengalami gangguan yang jauh lebih besar dari efek mencairnya es laut daripada orang yang tinggal di daerah lain di Amerika Serikat. Ini juga meremehkan bagaimana komunitas pesisir di Alaska berada pada risiko yang lebih besar dari kehancuran yang disebabkan oleh banjir dan erosi daripada komunitas yang berada di pedalaman negara bagian.

Pemahaman Inuit tentang ruang teritorial juga dapat memberi para sarjana alat alternatif untuk membuat penilaian tindakan politik internasional yang diambil untuk mengurangi dampak perubahan lingkungan global. Ahli geografi kritis berpendapat bahwa analisis tradisional tentang pola aktivitas politik internasional cenderung berfokus pada tindakan yang diambil oleh lembaga formal, seperti Perserikatan

Bangsa-Bangsa, yang menggunakan sarana representasi politik negara-bangsa. Hal ini membatasi apresiasi kita terhadap bentuk tindakan politik yang lebih luas yang telah diambil untuk mengurangi perubahan iklim.

Sebagai contoh, sebagian besar analisis ilmiah dari Panel Internasional tentang Perubahan Iklim (IPCC) di Kopenhagen, Denmark, pada tahun 2009, menggambarkan bagaimana pendapat perwakilan negara tentang aksi perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca terbagi dalam tiga kubu yang terdiri dari; 1) Amerika Utara dan Eropa, yang kegiatan industrinya di masa lalu berkontribusi pada sebagian besar masalah perubahan iklim, 2) negara industri seperti negara-negara BRICS, yang cenderung tidak melihat alternatif emisi karbon sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 3) negara-negara yang lebih miskin, yang lebih cenderung tidak setuju dengan perubahan dengan pertimbangan bahwa pembangunan dan pengentasan kemiskinan mewakili tujuan yang lebih mendesak (Meena 2013). Namun, cara analisis ini didasarkan pada pembagian wilayah yang ditentukan oleh tingkatan pembangunan industri dan mengabaikan perbedaan kapasitas yang berpengaruh di seluruh dan di dalam negara yang dikelompokkan dalam setiap tingkatan, misalnya, antara Brasil dan Cina, atau antara segmen besar populasi Afrika Selatan.

Cara berpikir yang terlalu simplistik tentang ruang politik internasional menyebabkan kurangnya pertimbangan terhadap bentuk-bentuk alternatif tindakan politik, terutama tindakan yang terjadi di luar lembaga politik internasional formal termasuk yang dilakukan oleh organisasi masyarakat adat, yang lingkup representasi dan pemerintahannya melampaui batas-batas negara (nation state). Misalnya, Inuit adalah anggota Dewan Arktik, yang bersifat organisasi internasional pemerintah yang menangani masalah yang dihadapi oleh pemerintah Arktik dan masyarakat adat. Suku Inuit mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan di Dewan daripada membatasi partisipasi mereka pada status pengamat belaka, seperti pada KTT iklim PBB. Keputusan yang diambil Inuit didasarkan pada rasa kesamaan mereka yang melampaui batas negara (Kanada). Karena pengaruh mereka di Dewan Arktik, mereka berhasil mencapai keberhasilan dalam mengembangkan budaya tata kelola

kolektif dalam pengelolaan lingkungan dengan mengupayakan diskusi dan penyelesaian masalah yang menjadi perhatian bersama semua orang Inuit.

Namun, terlepas dari keberhasilan perwakilan Inuit di Dewan Arktik, sebagian besar badan pemerintah adat terus berada di luar struktur perwakilan politik formal dalam negosiasi perubahan iklim internasional yang lebih besar. The Inuit Circumpolar Council (ICC) adalah organisasi non-pemerintah yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan konstituennya sebagai populasi Inuit di Greenland, Alaska, Kanada, dan Rusia. Namun, partisipasi mereka dibatasi pada KTT PBB tentang perubahan iklim menjadi status 'pengamat' karena ini bukan negara berdaulat, sehingga membatasi suaranya. Atas dasar inilah sistem perwakilan negara dalam KTT iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat diperdebatkan untuk semakin memarjinalkan kelompok-kelompok adat seperti Inuit. Karena perwakilan diberikan atas dasar wilayah negara yang berbeda dengan konsepsi Inuit tentang wilayah. Hal itu memperkuat kekuatan pengambilan keputusan dari pemerintah kolonial sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas urusan internasional, yang menghalangi upaya penentuan nasib sendiri bagi Suku Inuit.

Kekuatan Inuit untuk membentuk pengambilan keputusan politik internasional berisiko semakin terpinggirkan, jika para sarjana HI tidak secara kritis mempertanyakan gagasan negara-bangsa (*nation-state*) tentang wilayah dan perwakilan. Dengan membawa konseptualisasi alternatif wilayah ke depan, teori geografi kritis membuka ruang untuk mengenali dan mengeksplorasi mode representasi alternatif yang mengurangi ketidaksetaraan antara masyarakat adat dan pemerintahan negara. Jika suku Inuit memiliki risiko langsung yang lebih besar dari dampak perubahan iklim global, reformasi representasi akan memungkinkan mereka memiliki suara yang lebih besar dalam mengelola risiko tersebut.

Kesimpulan

Dengan memberikan perhatian pada cara-cara alternatif agar ruang hidup dapat dibayangkan secara lebih baik (dengan kesetaraan dan

representasi global-penerjemah), para ahli geografi kritis telah berusaha untuk mengubah politik internasional dan ruang global. Geografi kritis menyoroti bagaimana isu-isu ekonomi dan perubahan iklim berdampak pada manusia dan menunjukkan bahwa efek spasial dari proses-proses ini berbeda dengan bagaimana mereka ditangani oleh negara, organisasi internasional dan di dalam konsepsi para akademisi. Titik pandang unik dari geografi kritis memberikan cara yang berguna untuk memikirkan kembali apa yang kita ketahui tentang Hubungan Internasional, baik dalam istilah teoritis maupun empiris. Ini menantang asumsi tentang ruang dan wilayah, menawarkan alat konseptual dan analitis baru dan mendorong para sarjana HI untuk mempertanyakan pemikiran arus utama (realisme dan liberalisme).

16
PERSPEKTIF ASIA
(ASIAN PERSPECTIVES)

Pichamon Yeophantong

Dengan munculnya apa yang disebut ‘Abad Asia’ (*Asian Century*), yang melihat kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit seperti China dan India mengambil peran yang lebih menonjol dalam membentuk urusan dunia, Asia telah menjadi wilayah studi yang penting. Tren global ini telah diimbangi dengan arah baru dalam keilmuan, di mana Asia telah menjadi jangkar konseptual untuk pengembangan pendekatan non-Barat dalam studi politik dunia. Oleh karena itu, dalam konteks HI-Asia inilah beberapa tantangan teoretis yang paling menarik, dan inovasi dalam pemikiran HI sedang dibangun dan diproduksi. Mengingat keragaman sosial-budaya dan politik yang sangat luas yang ditemukan di seluruh benua, HI Asia terdiri dari serangkaian perspektif yang berbeda. Beberapa berasal dari negara-negara di Dunia Selatan sementara yang lain, seperti perspektif Jepang, tentu saja tidak. Oleh karena itu, HI Asia dimasukkan ke dalam perspektif HI Global Selatan (*Global South*), tetapi tetap berbeda, seperti halnya HI Asia berbicara dengan teori HI arus utama tetapi didasarkan pada tradisi dan praktik politik yang unik.

Dasar-Dasar Perspektif Asia

Teori HI terutama didasarkan pada asumsi yang berasal dari cara berpikir Barat dalam memandang dunia. Hal ini, pada gilirannya, membuatnya ‘terlalu sempit dari sisi sumbernya dan terlalu dominan dalam pengaruhnya’ (Acharya dan Buzan 2010, 2). Akibat dari ini adalah bahwa perspektif non-Barat dan wawasan teoritis telah secara sistematis diabaikan atau dikesampingkan sama sekali oleh disiplin HI. Bagi banyak sarjana, diamnya suara-suara HI non-Barat ini merupakan penyebab keprihatinan

yang mendalam, ketika mereka meragukan kegunaan teori arus utama sebagai lensa untuk memahami suatu kompleks dan budaya dunia yang beragam. Coba kita perhatikan dengan lebih teliti perspektif HI dari *The English School*. Konsep kunci yang mendasari English School adalah konsepsi 'masyarakat internasional', misalnya, prinsip kedaulatan nasional dan kesetaraan kedaulatan negara, yang didasarkan pada pengalaman sejarah Eropa. China, misalnya, hanya mempelajari konsep-konsep ini melalui perjumpaannya dengan kekuatan-kekuatan Eropa era kolonial, seperti yang juga terjadi di negara-negara Asia lainnya. Kekaisaran Tiongkok, sampai saat itu, melakukan urusannya dengan negara lain berdasarkan pandangan dunia Sinosentris, di mana ia bertindak sebagai pusat politik dan budaya dunia, dengan kaisar Tiongkok memerintah dengan konsep Tianxia[11] atau '*All-under-Heaven'* (yang pada dasarnya, seluruh dunia). Kesetaraan kedaulatan tidak pernah ada sebagai konsep dalam pikiran orang Cina sampai abad kesembilan belas. Mengingat sejarah, budaya, dan dinamika antarnegara yang khas terjadi di Asia. Ilmua Asia jelas tidak dapat menerima begitu saja universalitas asumsi dan konsep yang lazim dalam pemikiran HI-Barat.

Perspektif Asia tentang politik antarnegara ada, dan telah ada praktiknya selama ribuan tahun. Ahli teori politik India dan Cina kuno seperti Kautilya (sekitar 300 SM) dan Konfusius (551–479 SM) telah memberikan beberapa pengamatan penting tentang kebijakan luar negeri. Barulah di pertengahan 1990-an, ketika upaya mulai menjadikan kajian HI

[11] Tianxia berarti 'bumi dan semua yang berada di bawah langit' (all under heaven). Tianxia adalah sistem universal yang bertanggung jawab atas tatanan dunia. Sekitar 3.000 tahun yang lalu, Dinasti Zhou menjadikan sistem Tianxia dipraktikkan dalam sistem pemerintahannya. Dinasti tersebut berusaha untuk menyatukan seluruh dunia di bawah satu tenda sebagai cara untuk menghilangkan segala pengaruh eksternal yang negatif, termasuk mencegah konflik, sehingga kehidupan dapat dianggap sebagai dunia yang beradab. Oleh karena itu, Tianxia mendefinisikan konsep "politik" sebagai seni hidup berdampingan melalui transformasi permusuhan menjadi keramahan. Konsep Tianxia ini dapat menjadi alternatif pemikiran yang jelas untuk menantang konsep yang lebih modern dari konsep pengakuan politik secara legal (*legal recognition*) dari ahli teori hukum Jerman Carl Schmitt, sebagai pengakuan adanya us vs. them (kita vs. mereka), juga pemikiran Hans Morgenthau yang realis dengan *struggle for power*-nya (Perjuangan untuk meraih kekuasaan), dan konsep *clash of civilizations* (benturan peradaban) ala Samuel Huntington. Lihat laman https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/02/07/tianxia/ (penerjemah)

lebih representatif, kontribusi para pemikir ini mulai dianggap serius oleh disiplin ilmu tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, kami melihat hambatan bahasa dapat diatasi seiring dengan tumbuhnya inovasi teoretis yang menantang pemikiran lama di HI. Diskusi telah berkumpul pada kelayakan membangun berbagai kajian dan teori HI Cina, Jepang, Korea dan Asia Tenggara, sekadar menyebutkan beberapa saja. Dengan demikian, meskipun masih terperosok dalam perdebatan dan tingkat ketidakpastian, hasil akhir dari diskusi ini akan terbukti penting bagi masa depan HI sebagai disiplin global (yang lebih kaya dan komprehensip-penerjemah).

Saat ini, tidak ada mazhab pan-Asia tunggal atau teori HI-Asia tunggal. Berbagai alasan dapat diberikan mengapa hal ini terjadi. Misalnya, sifat 'tersembunyi' (the hidden of nature) dari teori HI non-Barat, merujuk pada kesulitan mengenali dan mengakui perspektif non-Barat, bahkan ketika kita melihatnya dengan jelas (Acharya dan Buzan 2010, 18), atau kegagalan untuk menantang/menolak 'impor' teoretis dan mengakui nilai dari '*non-Western theory-buliding'* atau perumusan teori non-Barat (Puchala 1997, 132; Chun 2010, 83). Tentu saja, tidak ada yang secara inheren 'Barat' dalam teori HI. Tetapi apakah kita dapat dengan benar berbicara tentang teori HI Asia, sebagian besar bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan 'teori' dan memahami 'Asia' itu sendiri.

Dalam hal ini, HI Asia tidak boleh dipandang sebagai wacana monolitik yang berdiri sendiri, atau sebagai usaha intelektual yang semata-mata ditujukan untuk menghasilkan teori-teori besar. Meskipun telah mengumpulkan banyak perhatian dalam kajian HI non-Barat, perspektif kajian HI Cina dan Jepang mewakili dua alur pemikiran Asia di antara beberapa yang lainnya. Daripada membangun 'teori' dalam arti pengamatan suatu obyek yang dapat diuji tentang bagaimana sistem internasional beroperasi, mungkin lebih baik untuk menggambarkan sebagian besar pendekatan HI Asia sebagai perspektif untuk memahami dunia. Hal ini, pada gilirannya, menimbulkan pertanyaan penting tentang apakah teori HI terpadu Asia memang diinginkan. Siddharth Mallavarapu (2014), misalnya, kurang tertarik untuk mengedepankan teori monolitik, karena lebih 'penasaran tentang bagaimana dunia dilihat dari lokasi tertentu'. Navnita Chadha Behera (2010, 92) juga menolak gagasan untuk mendirikan perspektif pemikiran HI India karena kekhawatiran bahwa

upaya semacam itu akan menghasilkan ‘biner diri sendiri’ (*self other binary*) yang hanya membenturkan kajian HI India (diri sendiri) dengan HI Barat *(other*). Jika berbicara tentang keprihatinan yang lebih luas, bahwa pembangunan mazhab pemikiran yang bersatu (*unified schools of thought*) akan berisiko menciptakan penyederhanaan yang dipaksakan dan polarisasi kategori yang akhirnya hanya menggantikan satu pemikiran dominan dengan pemikiran dominan lainnya (menggantikan dominasi HI Barat dengan HI Asia, padahal bukan itu tujuannya-penerjemah). Sentimen serupa juga menyelimuti perdebatan di kajian HI Tionghoa, dengan beberapa sarjana tetap skeptis tentang kelayakan menyatukan kajian/perspektif (*schoo*l) yang mewakili keragaman perspektif Tionghoa. Pluralisme konseptual, itulah gambaran asli dari maksud para ahli teori HI non-Barat, yaitu, membawa kembali keragaman ke dalam studi politik dunia. Setelah itu, penting juga untuk tidak melebih-lebihkan perbedaan antara pendekatan HI Barat dan Asia. Memang, atribut umum dari pendekatan Asia dan Barat terletak pada kualitas normatif mereka, yaitu, minat mereka pada bagaimana dunia seharusnya. Kautilya, misalnya, mencatat perlunya berperang yang adil (misalnya, agar seorang raja tidak mengambil tanah sekutu), sedangkan para sarjana Konfusian prihatin dengan bagaimana mempertahankan ‘harmoni’ (perdamaian dan stabilitas) di dunia melalui tata negara yang mampu mengelola dengan baik.

Sama seperti teori HI Barat, perspektif Asia memiliki akar yang dalam dari pemikiran politik (filsafat politik-penerjemah). Dalam banyak kasus, ini adalah masalah memindahkan teori-teori ketatanegaraan, masyarakat dan sifat manusia ke ranah global. Sama seperti filsuf era Pencerahan seperti Thomas Hobbes dan John Locke yang menjadi pusat perkembangan teori HI, filsuf kuno dan modern dari Konfusius dan Sun Tzu (544–496 SM) hingga Shiratori Kurakichi (1865–1942) dan Nishida Kitarō (1870– 1945) adalah sumber inspirasi penting bagi para sarjana Asia.

Menurut Benoy Kumar Sarkar (1919), para ahli teori politik Hindu kuno, sudah memiliki konsepsi kedaulatan pribumi yang mengakui pentingnya ‘pemerintahan sendiri’ *(self-rule*) dan kemerdekaan nasional untuk pelaksanaan otoritas negara. Negarawan dan filsuf India, Kautilya, yang sering dipuji sebagai salah satu realis paling awal di dunia, adalah

tokoh kritis dalam hal ini. Dalam menguraikan prinsip-prinsip perilaku yang menjadi inti dari tugas pembangunan kerajaan. Kautilya dalam Teori Mandala (yang artinya 'lingkup pengaruh' atau *spheres of influence*), mengajukan gagasan tentang bagaimana seorang raja harus mengelola aliansi dan hubungan permusuhan dengan negara-negara sekitarnya. Ia mengakui, misalnya, kegunaan non-intervensi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan di antara para raja, dan menghindari orang asing yang tidak perlu terlibat, dan juga mengusulkan konseptualisasi awal dari 'kekuatan' (*strength*) sebagai alat untuk mencapai *happiness* atau kebahagiaan (Vivekanandan 2014, 80).

Demikian pula, unsur-unsur pemikiran Konfusianisme tentang kekuasaan, ketertiban dan ketatanegaraan dapat disaring dari bagaimana China melakukan kebijakan luar negerinya saat ini. Pentingnya menjaga keharmonisan untuk menjaga tatanan global adalah konsep Konfusianisme yang tetap populer di Cina. Demikian pula, gagasan bahwa untuk memegang kekuasaan, sebuah negara harus memikul tanggung jawab domestik dan internasional yang sepadan, adalah gagasan yang mendefinisikan identitas kontemporer Tiongkok sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab. Ini juga berfungsi sebagai dasar untuk 'konsep tanggung jawab' (*responsibility thesis*) yang sesuai, yang memajukan gagasan bahwa China memiliki tugas dan kewajiban tertentu yang tidak dapat dihindari sebagai kekuatan yang meningkat, terutama dalam hal mengelola dan mengamankan ketertiban dan stabilitas global (Yeophantong 2013).

Dalam upaya mengidentifikasi kontribusi uniknya sendiri di bidang ini, HI Jepang juga banyak memanfaatkan karya filsuf terkenal, termasuk Nishida Kitarō, yang merupakan pelopor Kajian Kyoto (Kyoto School). Seringkali dicap sebagai 'proto-konstruktivis' karena penonjolan yang dia berikan pada faktor budaya dan konstruksi identitas, Nishida mengedepankan filosofi identitas untuk mengatasi teka-teki mendasar Jepang tentang apakah Jepang termasuk Timur atau Barat. Di sini, ia mengadopsi pendekatan dialektik, dengan alasan bahwa identitas Jepang ada dalam 'koeksistensi (atau kerjasama damai) dengan pihak yang berlawanan, antara Timur dan Barat', yang akibatnya justru memungkinkan untuk menumbuhkan daya tarik universal (Inoguchi 2007,

379). Dengan kata lain, Jepang diberikan peran khusus di dunia, karena diposisikan untuk mendorong kesadaran Timur dan global. Argumen ini sesuai dengan visi Nishida yang lebih luas tentang dunia multikultural, di mana 'budaya dunia sejati' (*a true world culture*) dapat dicapai melalui pengakuan perbedaan budaya dan penyatuan perbedaan-perbedaan ini (Krummel 2015, 218).

Terlepas dari kritik terhadap posisi hegemonik mereka dalam disiplin ini, perlu dicatat bagaimana teori HI arus utama telah membantu menyediakan lahan subur bagi ide dan pendekatan baru untuk berkembang di antara para sarjana HI Asia. Sarjana HI Korea Selatan, misalnya, sangat dipengaruhi oleh HI arus utama, khususnya, teorinya yang berfokus pada penanganan masalah dunia secara nyata. Alasan di balik upaya untuk membangun kajian HI Tiongkok juga berasal dari keinginan untuk mewakili gagasan dan kepentingan Tiongkok dengan lebih baik dalam disiplin yang didominasi Amerika (dan kemudian eropa-penerjemah). Kita dapat membagi para sarjana HI Cina yang bekerja pada periode pra-1949 dan selama 1980-an-90-an menjadi dua kubu (Lu 2014), yakni, mereka yang berusaha untuk belajar dari dan meniru teori Barat, dan mereka yang menggunakan HI Barat sebagai dasar untuk kritik dan pengembangan perspektif alternatif yang baru.

Sangat menarik untuk mengingat bagaimana artikel '*Clash of Civilizations'* Samuel Huntington 1993, yang menyatakan bahwa konflik yang didorong oleh budaya akan selalu mendefinisikan dunia pasca-Perang Dingin, telah memicu diskusi panas di China selama pertengahan 1990-an karena spekulasi kontroversialnya tentang akan datangnya konflik antara Barat dan negara-negara 'Konfusianisme dan Islam'. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidakpuasan orang Tionghoa yang semakin dalam terhadap teori-teori Barat, namun, yang lebih berbahaya adalah kesalahpahaman mereka terhadap budaya Timur. Itu juga memberi para sarjana Cina dorongan baru untuk mendirikan kajian HI Cina.

Anda mungkin bertanya-tanya, jika tidak ada teori HI Asia, dapatkah perspektif Asia benar-benar memberikan penjelasan (yang lebih) menarik tentang dinamika antarnegara daripada teori HI arus utama?

Tentu saja, kita dapat melihat kurangnya seperangkat inti teoritis sebagai pemersatu asumsi dalam batasan yang cukup besar dari pendekatan

HI Asia saat ini. Meskipun kita dapat dengan mudah mengidentifikasi prinsip utama realisme atau konstruktivisme, perspektif Asia cenderung menunjukkan tingkat fluiditas konseptual dan kekhususan konteks yang lebih tinggi. Dalam istilah praktis, bagaimanapun, ada contoh di mana HI Asia telah memberikan kontribusi penting untuk 'teori menengah' atau Middle range theory (perumusan teori yang digerakkan oleh fakta untuk menjelaskan fenomena dunia nyata tertentu), dan 'teori HI lunak' (*soft IR theory*), yang mengacu pada teori yang digerakkan oleh kebijakan itu diinformasikan oleh 'pendekatan pemikiran dan kebijakan luar negeri para pemimpin Asia' (Acharya dan Buzan 2010, 11). Ini biasanya diandalkan untuk menghasilkan resep kebijakan, serta wawasan tentang faktor-faktor yang memotivasi perilaku kebijakan luar negeri negara-negara Asia.

Middle-range theory yang berpengaruh adalah 'model angsa terbang' (*flying geese model)* dari Akamatsu Kaname untuk pengembangan regional. Teori ini tidak hanya digunakan untuk membenarkan kepemimpinan ekonomi Jepang di Asia (Korhonen 1994), tetapi juga berfungsi sebagai alasan di balik bantuan ekonomi negara kepada negara-negara berkembang. Kaname mengajukan teori pada tahun 1930-an untuk menjelaskan bagaimana sebuah negara berkembang dapat mengejar ketinggalan dengan negara industri melalui interaksi mereka. Dengan industrialisasi Jepang yang pesat dari akhir abad kesembilan belas dan seterusnya dan perkembangan ekonomi yang luar biasa di negara-negara Asia Timur pada periode pasca-Perang Dunia Kedua, Jepang digambarkan dalam teori ini sebagai 'angsa pemimpin' (*lead goose*) dalam formasi berbentuk V yang terdiri dari negara-negara industri Asia. Di sini, Jepang membantu merangsang industrialisasi regional dan pertumbuhan ekonomi dengan mewariskan teknologi dan pengetahuan lamanya (melalui program bantuan ekonomi, misalnya) ke negara berkembang lainnya.

Sementara itu, contoh kontribusi teoritis lunak adalah konsep '*non-alignment*' (tidak memihak). Dikembangkan oleh Jawaharlal Nehru dari India dengan latar belakang politik Perang Dingin yang memecah belah, sehingga non-alignment menjadi kerangka kerja kebijakan yang berpengaruh yang diadopsi oleh negara-negara Asia dan Afrika yang berusaha menempati jalan tengah antara kekuatan saingan selama tahun 1950-an dan1960-an.

Perspektif Asia dalam Mengembangkan Kajian HI Cina

Di Cina, pembahasan tentang kajian teori HI Cina telah menjadi perhatian nasional yang sangat beresonansi dengan aspirasi global Cina. Pada saat pemerintah China menekankan kekayaan budaya negara, yaitu, Konfusianisme sebagai warisan dalam retorika resmi, para sarjana HI China semakin beralih ke pemikiran politik China kuno untuk mendapatkan wawasan yang melampaui waktu dan geografi.

Meskipun telah dikembangkan sejak akhir 1920-an, upaya awal untuk membangun perspektif teoritik khas Tionghoa dapat ditelusuri kembali ke akhir 1950-an, ketika fokus perdebatan akademis mulai bergeser dengan sungguh-sungguh dari belajar dari Barat ke menolak HI Barat, dan mengembangkan pendekatan HI Tionghoa yang berbeda. Pergeseran ini mengkristal dengan keretakan dalam hubungan Sino-Soviet selama tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an, di mana pendekatan Uni Soviet terhadap HI secara resmi dikecam di Tiongkok. Akhir 1980-an terlihat pembagian yang lebih jelas muncul antara sarjana Cina yang menyukai pendekatan HI Barat dan mereka yang mendorong teori HI dengan karakteristik Cina. Sarjana Maois seperti Liang Shoude berargumen untuk penolakan teori Barat dan pengembangan model Cina sebagai gantinya. Perdebatan berikutnya di awal tahun 2000-an sebagian besar berpusat pada status hegemoni HI Barat. Di sini, gagasan mendirikan kajian Tionghoa (the China School) menggantikan tujuan berteori yang lebih digerakkan secara ideologis dengan karakteristik Tionghoa.

Dengan demikian, proyek China School menjadi didefinisikan tidak hanya sebagai lawan dari disiplin HI yang penuh *prejudice* atau ‘berprasangka’, tetapi juga terang-terangan menantang pendekatan Barat yang secara realitas dihadapi oleh Tiongkok sebagai kekuatan yang meningkat dalam dunia globalisasi yang didominasi Amerika (Wang dan Han 2016, 54). Dengan cara inilah perspektif HI Tiongkok memanfaatkan teori HI Barat, sekaligus diwarnai oleh gagasan Maois-sosialis, pemikiran politik Tiongkok kuno, dan pengalaman Tiongkok sendiri dalam menjelajahi medan internasional.

Menurut Qin Yaqing (2016), teori 'relasionalitas' mendalilkan bahwa negara-negara sebagai aktor sosial yang mendasarkan tindakannya pada hakikat hubungan yang mereka miliki dengan orang lain. Logika relasionalitas dengan demikian menyatakan bahwa 'seorang aktor cenderung membuat keputusan sesuai dengan tingkat keintiman dan / atau pentingnya hubungannya dengan orang lain' (Qin 2016, 37). Logika ini didasarkan pada filosofi Tiongkok kuno yang menekankan pentingnya menghormati, dan berperilaku sejalan dengan hierarki hubungan (misalnya antara kaisar dan surga, raja dan subjek, ayah dan anak) hingga stabilitas sosial dan bahkan kosmologis. Tetapi yang paling penting di sini adalah hubungan antara dua kekuatan yang berlawanan, yin dan yang, yang terlihat mengatur semua hubungan lainnya. Keberadaan yin dipandang bergantung pada Yang, yang secara efektif menjadikan mereka dua bagian yang saling melengkapi dari keseluruhan. Gagasan tentang inklusivitas, bahwa 'setiap pasangan termasuk yang lain' atau *each of a pair is inclusive of the other* (Qin 2016, 40), adalah pusat dari konsep Zhongyong ('Jalan Menengah' atau *the middle course*), yang menyarankan bagaimana pertentangan menimbulkan interaksi positif, menghasilkan harmoni, bukan menjadi konflik, sebagai keadaan alami (dan pengalaman Barat pada umumnya-penerjemah). Teori relasionalitas adalah salah satu yang berusaha menjelaskan bagaimana kontradiksi dapat hidup berdampingan dan juga bagaimana mereka hidup berdampingan diperlukan untuk menjalankan hubungan. Mengingat bagaimana politik dunia beroperasi atas dasar hubungan ambivalen, di mana suatu negara bisa dianggap sebagai sekutu pada satu saat, dan ancaman pada saat berikutnya. Relasionalitas menjadi teori yang berguna dalam konteks ini.

Ambil contoh, hubungan antara Cina dan Filipina. Hubungan politik antara kedua negara ini, meski sudah berlangsung lama, karena klaim teritorial, mereka bersaing atas rantai pulau dan atol di Laut Cina Selatan, yang diyakini menyimpan deposito gas yang sangat berharga dan kepentingan strategis. Karena kedua negara lebih berani dalam upaya mereka untuk menegaskan kepemilikan atas pulau-pulau tersebut, ketegangan telah berkobar. Pada 2016, Filipina memenangkan kasus arbitrase yang menyimpulkan hal itu bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah atas Laut China Selatan.

Pemerintah China dengan keras menolak keputusan Pengadilan Permanen Arbitrase internasional itu. Spekulasi segera muncul tentang konflik militer yang akan datang antaradua negara. Namun, tidak ada konflik militer yang terjadi. Meski ada permusuhan pada kedua sisinya atas masalah ini, hubungan ekonomi antara Cina dan Filipinaterus berkembang dan relatif tidak terganggu.

Dari perspektif relasionalitas, baik ketegangan politik maupun kerjasama ekonomi sangat bergantung pada kualitas hubungan Sino-Filipina sebelumnya. Dengan menerapkan konsep Zhongyong, seseorang dapat berasumsi bahwa konflik tidak dapat dihindari dalam hubungan ini. Kalaupun ada, konflik militer akan merupakan penyimpangan status quo, sesuatu yang merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, prospek seperti itu dapat memaksa China dan Filipina untuk mencari jalan baru untuk resolusi konflik dan kerja sama sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan antara kekuatan yang saling beroposisi dalam hubungan kedua negara. Tak lama setelah putusan arbitrase, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengartikulasikan keinginannya untuk bernegosiasi langsung dengan China tentang masalah Laut China Selatan, bahkan mengusulkan pengembangan sumber daya bersama di perairan yang diperebutkan dan mendesak pemerintah China untuk membantu Filipina dalam pembangunan infrastruktur. Buku putih China (2017) yang diterbitkan setelah putusan itu, sambil menegaskan kembali klaim China di Laut China Selatan, menegaskan kembali komitmen Beijing untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dan konsultasi.

Melalui perspektif relasionalitas, kita dapat berharap bahwa kontradiksi yang harmonis akan terus menjadi ciri hubungan Tiongkok-Filipina, karena kerja sama antara kedua negara tetap ada meskipun ada ketegangan. Ini adalah demonstrasi penting tentang nilai dan arti penting *China School*, karena bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh para ahli teori HI arus utama (Barat tradisional), yang mendasarkan analisis mereka tentang interaksi antarnegara dalam keadaan konfliktual dan anarki internasional, yang akan membawa pada kesimpulan untuk berperang (dan itu tidak terjadi-penerjemah).

Kesimpulan

Karena Hubungan Internasional adalah studi yang semakin populer, terutama di Asia di mana pengkajian HI telah menjadi bahan pokok di banyak universitas, ada kebutuhan untuk menjadi disiplin yang benar-benar global yang menghargai perbedaan politik dan budaya tetapi juga mencerminkan sejarah dan kemanusiaan bersama. Mengingat ketidakpastian dan kecemasan yang menyertai kebangkitan kekuatan non-Barat seperti Cina dan India, kajian dan perspektif HI harus bertindak tidak hanya sebagai lensa untuk menganalisis fenomena dunia nyata, tetapi juga sebagai panduan yang berguna dan praktis tentang bagaimana kita harus bertindak dalam mengubah lingkungan global. Yang mengatakan 'Asia' adalah konstruksi sosial yang sama seperti 'Barat', dan yang berpotensi menjadi monolitik dan hegemonik. Karena itu, kita perlu berhati-hati dalam membuat kategori sederhana yang memunculkan biner baru (*self-other binary)* ilmu yang tidak membantu (atau bahkan menyesatkan-penerjemah). Demi memulai dialog yang bermakna, sangatlah penting bagi para sarjana untuk terus bekerja menuju pandangan inklusif yang mendamaikan Timur dan Barat, menangkap keragaman dan kesatuan wawasan yang bisa diperoleh dari perspektif arus utama (Barat) serta HI Asia.

17
PERSPEKTIF DUNIA SELATAN
(GLOBAL SOUTH PERSPECTIVES)

Lina Benabdallah, Carlos Murillo-Zamora & Victor Adetula

Dunia Selatan umumnya dipahami sebagai negara yang kurang berkembang secara ekonomi. Ini adalah istilah luas yang terdiri dari berbagai negara dengan beragam tingkat pengaruh ekonomi, budaya, dan politik dalam tatanan internasional. Meskipun Hubungan Internasional adalah bidang studi interdisipliner, secara historis telah dipelajari dari perspektif yang sangat Eurosentris yang tidak selalu membantu kita untuk memahami perkembangan yang terjadi di Dunia Selatan. Memahami perspektif Global South dimulai dengan diskusi tentang fokus teori HI arus utama yang berpusat pada Barat. Ini juga mengakui tantangan yang dihadapi para sarjana dari Dunia Selatan yang mungkin membantu menjelaskan mengapa perspektif Global Selatan sebagian besar tidak ada dalam perdebatan arus utama. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas bidang pandang dalam teori HI untuk memasukkan pemahaman hubungan internasional yang lebih adil dan representatif.

Dasar-Dasar Perspektif Global South

Kelemahan utama dari teori HI arus utama Barat adalah bahwa mereka tidak dialami secara universal sebagai arus utama. Konsep yang menjadi dasar mereka tidak secara tegas mencerminkan atau cocok dengan kenyataan di banyak negara di bagian Selatan Dunia. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tertentu yang menjadi inti dari perspektif Global South tidak ada atau kurang di-teori-kan dalam kajian arus utama. Tickner (2016, 1), misalnya, menunjukkan bahwa isu ras dan kerajaan telah hilang dari teori arus utama meskipun ada kajian yang kuat dalam postkolonial

dan studi poststrukturalis. Anehnya, dia menambahkan, dominasi kolonial secara mendalam membentuk keadaan tatanan global saat ini, namun mereka bahkan tidak terlalu sentral untuk kajian arus utama HI. Saat ini, ada semakin banyak sarjana yang memperhatikan konteks teori hubungan internasional di Afrika, Asia dan Amerika Latin, dan pada interpretasi yang beragam di wilayah yang luas ini. Banyak dari kajian ini telah diproduksi di bawah payung istilah 'HI global' (*Global IR*).

HI arus utama (realisme dan liberalisme) juga salah dalam membaca sejarah dunia. Ketika peristiwa besar global dinarasikan dari perspektif Barat, suara-suara yang terjajah dan tertindas sering hilang, yang mengarahkan ke dasar pemahaman yang berbeda untuk berteori (theoretical building). Misalnya, para sarjana realis mengacu pada Perang Dingin sebagai periode stabilitas relatif mengingat tidak ada perang besar yang terjadi antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, jika seseorang melihat pada periode yang sama melalui lensa Global South, seseorang dapat melihat dunia yang penuh dengan perang proxy dan penderitaan manusia, di mana kedua negara adidaya ikut campur dalam konflik intra-negara (domestik) untuk mendukung kepentingan mereka atau merusak kepentingan orang lain. Contoh sederhana dapat digunakan untuk menyoroti masalah penting pada HI arus utama. Di satu sisi, penting untuk menggabungkan aktor non-Barat dan pemikiran non-Barat untuk mengeksplorasi cara-cara di mana aktor yang berbeda menantang, mendukung, dan membentuk tatanan global dan regional. Di sisi lain, penting juga untuk mempertanyakan relevansi teori-teori arus utama dengan konteks negara-negara pascakolonial, dan berteori tentang peran negara-negara berkembang *(emerging economies*) dan negara-negara Selatan lainnya dalam membentuk institusi internasional dan pemerintahan global. Jadi, pertanyaan yang umum adalah apakah teori HI tradisional mampu beradaptasi dengan perspektif *Global South*, dan jika tidak apakah teori dan pendekatan baru diperlukan untuk menggantikannya. Dalam menjawab pertanyaan ini, para ilmuan telah mengambil berbagai posisi yang berbeda.

Sementara banyak cendekiawan bersatu di sekitar seruan untuk keadilan dan kesetaraan dalam cara narasi HI mewakili dunia, tidak dapat dikatakan bahwa ada satu strategi besar untuk berteori perspektif Global

South. Dilema ini mungkin paling baik diilustrasikan dengan pertanyaan, ‘siapakah cendekiawan Dunia Selatan? Dalam banyak kasus, tidaklah akurat untuk merujuk pada satu perspektif yang dapat dilihat mewakili suatu kawasan, atau bahkan negara, apalagi mayoritas populasi dunia. Meskipun mereka mungkin berbagi pengalaman serupa tentang eksploitasi di bawah penjajahan, dapatkah istilah seperti ‘Afrika’ digunakan untuk menggambarkan beragam pengalaman negara mulai dari Malawi hingga Maroko? Para sarjana bahkan tidak setuju pada satu definisi mengenai wilayah ‘Amerika Latin’ (terdiri dari negara mana saja, misalnya), apalagi perbedaan tentang ‘apa’ arti perspektif Amerika Latin tentang hubungan internasional. Demikian pula, telah terbukti sulit untuk mendefinisikan struktur teoritis yang koheren yang akan membentuk ‘*China School’* dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, mengingat berbagai filsuf dan interpretasi yang berbeda dari pemikiran mereka sendiri. Masalah-masalah seperti ini mempersulit para sarjana Global South untuk mendukung satu perspektif teoretis.

Sementara itu, satu tujuan pemersatu perbedaan pemikiran itu yang mungkin untuk mendobrak dominasi pemikiran Dunia Utara *(Global North* atau HI tradisional), risiko fragmentasi lebih lanjut terletak pada ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara Dunia Selatan itu sendiri. Ketimpangan tidak hanya terjadi pada hubungan Utara dengan Selatan, tetapi juga menembus hubungan antar negara di intern wilayah Selatan. Munculnya ekonomi yang kuat dan kekuatan regional di Dunia Selatan seperti Cina, Brazil dan India telah mengangkat isu baru tentang marjinalisasi dan dominasi di antara negara-negara yang sudah terpinggirkan oleh Utara.

Tantangan lebih lanjut datang dalam dominasi historis atas alat produksi dan publikasi pengetahuan Barat. Jika ada sedikit pembicaraan/diskusi tentang perspektif teoritis Afrika di HI, misalnya, ini mungkin lebih menunjukkan dampak imperialisme Barat pada sistem produksi pengetahuan asli di Afrika daripada kurangnya ahli teori Afrika. Adalah fakta sejarah, bahwa benua Afrika adalah rumah bagi pengalaman dan praktik kuno dalam diplomasi dan hubungan antar pemerintah yang telah lama mendahului kedatangan orang Eropa di era kolonial. Namun, selama penjajahan banyak negara tunduk pada dominasi bentuk-bentuk

pengetahuan Barat yang secara sadar atau tidak sengaja memaksakan nilai-nilai tertentu pada koloni.

Bahkan sejak kemerdekaan, hasil ilmiah cenderung mencerminkan keprihatinan dan pengalaman Barat, bahkan terkadang ketika ditulis dari dalam Dunia Selatan. Contohnya dapat dilihat pada perkembangan kajian HI di Amerika Latin. Sejak Doktrin Monroe tahun 1823, yang menyatakan niat Amerika Serikat untuk menjauhkan kekuatan Eropa dari Amerika, Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan terhadap tetangga terdekatnya yang memandang Amerika Latin sebagai halaman belakang strategisnya, dan secara teratur menghasilkan tindakan intervensionis. Banyak kajian dan penelitian tentang Amerika Latin telah ditulis di, atau untuk Amerika Serikat. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa untuk mengamankan karir, para sarjana perlu menerbitkan publikasi bergengsi berbahasa Inggris, yang seringkali berbasis di Amerika Serikat.

Dengan menyoroti masa lalu yang terlupakan dari era pra-kolonial, sarjana Global Selatan dapat menunjukkan ketidakadilan saat ini. Misalnya, jika diceritakan dari sudut pandang Barat, catatan tentang sejarah Afrika dimulai dengan kedatangan orang Eropa. Namun catatan para penjelajah Eropa awal sendiri menjelang akhir abad keempat belas bersaksi tentang struktur politik, institusi, dan organisasi yang sudah ada di banyak bidang. Afrika adalah situs imperium, kerajaan-kerajaan, dan institusi sosial lainnya yang memungkinkan perdagangan, pembangunan ekonomi, dan agama berkembang. Catatan para pelancong dan pedagang Arab awal di seluruh Gurun Sahara mengacu pada aktivitas diplomatik beberapa kerajaan dan kekaisaran awal di Afrika Barat, terutama kekaisaran Ghana, kekaisaran Mali, kekaisaran Songhai, dan misionaris Islam yang menggunakan jalur perdagangan trans-Sahara. Dalam perjalanan mereka, misionaris kolonial dari Eropa melaporkan bahwa jaringan perdagangan di Gurun Sahara telah berhasil menjembatani Afrika Utara dengan Eropa. Jelas, perdagangan dan aktifitas komersial lainnya, kegiatan diplomatik, sebagaimana pembelajaran dan aktifitas ilmu pengetahuan berada pada berbagai tingkat pembangunan di Afrika sebelum kedatangan orang Eropa. Namun, narasi yang dimulai dengan penjajahan melihat negara-negara Afrika hanya merdeka dan 'berdaulat' sejak dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20. Oleh karena itu, mereka dipandang sebagai 'negara baru' (*new*

states), yang baru belakangan ini menjadi bagian dari sistem internasional kontemporer. ‘Kebaruan’ (*newness*) ini digunakan untuk mempertahankan lembaga-lembaga internasional yang mengecualikan atau meminggirkan negara-negara Afrika dari struktur kekuasaan dan sistem pengambilan keputusan, seperti badan-badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Dewan Keamanan dengan alasan bahwa aturan untuk mengelola hubungan antar-negara ditetapkan jauh sebelum berdirinya sebagian besar negara Afrika. Namun, jika perhatian diberikan pada sejarah yang ‘dilupakan’ oleh Barat *(the West forgot*), maka ini menjadi lebih sulit untuk dibenarkan. Akibatnya, banyak negara Afrika berada di garis depan kampanye restrukturisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pekerjaan para sarjana Global Selatan membantu membangun narasi mereka.

Perspektif Global South tentang Pembangunan Internasional

Banyak kebijakan yang membentuk politik internasional saat ini didasarkan pada asumsi yang berasal dari cara berpikir Barat. Ambil contoh, ‘pembangunan’ (*development conception*), sebuah kata yang memiliki kekuatan untuk mendikte kebijakan nasional dan internasional dan menarik atau mengalihkan uang dalam jumlah besar. Hal ini dapat dilihat melalui Tujuan Pembangunan Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-MDGs) dan proyek penerusnya, yakni, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*the Sustainable Development Goals*). Ini melibatkan target yang disetujui oleh setiap negara di dunia untuk diperjuangkan dan didanai. Mereka didasarkan pada pemahaman pembangunan yang melihat banyak negara di Dunia Selatan belum mencapai kemajuan ekonomi di Utara.

Mungkin salah satu kontribusi terbesar cendekiawan Amerika Latin untuk teori HI adalah teori ketergantungan, yang membongkar pemahaman dominan tentang pembangunan sebagai prinsip pengorganisasian dalam politik internasional. Teori ketergantungan menegaskan bahwa keterbelakangan dan kemiskinan adalah hasil dari pengaruh politik, ekonomi dan budaya yang diberikan pada negara-negara tersebut dari luar. Ini menyajikan hubungan antara Dunia Selatan dan Dunia Utara sebagai eksploitatif dan tidak adil dengan menggarisbawahi cara-cara di mana negara-negara di Selatan telah dimasukkan ke dalam sistem ekonomi dunia

melalui pembangunan kapitalis, yang telah mengeksploitasi sumber daya manusia dan material, serta mengganggu moda produksi masyarakat adat. Teori ketergantungan menganalisis bagaimana keterbelakangan banyak negara di Selatan merupakan akibat langsung dari kebijakan, intervensi, dan praktik perdagangan tidak adil negara-negara dari Utara. Dari perspektif ini, hubungan ekonomi (tidak adil) saat ini antara Dunia Utara dan Selatan tidak akan membantu Selatan untuk berkembang sama sekali. Sebaliknya, mereka akan membuat Selatan semakin lebih miskin daripada Utara (kesenjangan atau gap ekonomi Utara-Selatan, penerjemah). Lebih dari sekedar untuk menyuarakan tentang kebutuhan negara-negara di Dunia Selatan agar lebih 'berkembang', teori ketergantungan menekankan bahwa restrukturisasi seluruh sistem ekonomi internasional akan memberikan keadilan ekonomi bagi kaum miskin dunia.

Berdasarkan teori ketergantungan, para ahli telah menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi di banyak negara terjajah tidak berhenti dengan dekolonisasi. Nyatanya, pada tahun-tahun terakhir kolonialisme, pada saat gerakan kemerdekaan menjadi terlalu kuat untuk ditekan, kekuatan kolonial pun datang menghasut sejumlah kebijakan dan program yang membuka jalan bagi jenis baru dominasi ekonomi di wilayah Global Selatan. Warisan dari kebijakan tersebut adalah penekanan pada produksi tanaman komersial untuk ekspor, ketergantungan pada intervensi keuangan luar negeri dan penguatan modal swasta (baik domestik maupun asing) sebagai mesin pertumbuhan dan pembangunan. Perjanjian perdagangan Utara-Selatan dan kebijakan organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah lebih jauh berfungsi untuk melindungi kepentingan kekuatan yang sudah mapan meskipun ada seruan berulang kali dari Selatan untuk kesepakatan yang lebih adil dalam hubungan perdagangan global. Mereka telah melayani hak istimewa negara 'maju' dalam hubungan perdagangan dan merugikan bekas koloni untuk lebih 'berkembang'. Dilihat dari Utara, kebijakan semacam itu merupakan instrumen untuk membantu Selatan. Namun, dilihat dari Selatan, mereka sama saja dengan jenis baru dominasi kolonial, atau sering disebut sebagai 'neokolonialisme' karena mereka mewakili kelanjutan dari ketidaksetaraan dan sifat eksploitatif hubungan Utara-Selatan.

Teori HI arus utama yang muncul dari masyarakat Barat sebagian besar mencari penjelasan rasional untuk interaksi negara-negara itu. Namun, beberapa sarjana telah mulai mengeksplorasi motivasi di balik interaksi antar negara di Dunia Selatan dari perspektif relasional. Contoh dari penekanan pada relasionalitas ini dapat dilihat dalam interaksi China dengan berbagai negara Afrika. Pada 2015, China telah menjadi mitra dagang terbesar di benua Afrika. Investasi China di Afrika mencakup, antara lain, ekstraksi sumber daya alam, infrastruktur, konstruksi, real estate dan teknologi informasi. Ekonomi Afrika dan Cina saling bergantung satu sama lain karena Cina mengimpor banyak sumber energi dari benua dan negara-negara Afrika sebagai imbalannya mengimpor barang-barang konsumsi, komoditas, dan teknologi dari Cina. Kebanyakan negara Afrika, bagaimanapun, mengimpor jauh lebih banyak daripada yang mereka ekspor ke Cina dan menderita ketidakseimbangan hubungan perdagangan. Model pembangunan China (*the Beijing Consensus* atau Konsensus Beijing) berbeda dari model pembangunan neoliberal yang dianjurkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan organisasi lain yang dipimpin Barat (*The Washington Consensus* atau Konsensus Washington). Penekanan Konsensus Washington pada liberalisasi dan meminimalkan peran negara di pasar telah dikecam oleh banyak pemimpin Afrika sebagai neokolonial dan eksploitatif. Sebaliknya, Konsensus Beijing, dengan penekanannya pada prinsip non-interferensi (terutama tidak mau masuk untuk membatasi peran negara di pasar yang sepenuhnya area kebijakan domestik, penerjemah), telah menyajikan alternatif yang menarik bagi beberapa negara Afrika.

Lebih jauh lagi, ketika China secara pasti mendapatkan keuntungan ekonomi dari peran pembangunannya di negara-negara Afrika, upaya meningkatkan dialog budaya dan membina jaringan melalui pertukaran antarorang-ke-orang *(people to people*), juga menjadi faktor pendorong penting di balik pengaruhnya. Selain mendanai Institut Konfusius di seluruh benua Afrika yang menampilkan bahasa dan budaya China, pemerintah China telah mensponsori 200.000 kesempatan untuk melatih para profesional, akademisi, jurnalis, dan pegawai negeri dari seluruh penjuru Afrika. Ini adalah bagian dari membangun identitas bersama berdasarkan aspirasi dan jalur masa depan yang akan mengangkat warga

negara keluar dari kemiskinan. Apakah pendekatan China di Afrika pada kenyataannya merupakan jenis kebijakan pembangunan yang benar-benar baru atau tidak, masih menjadi perdebatan sengit di antara para sarjana. Tetapi intinya di sini adalah bahwa China ingin terlihat mengadopsi pendekatan yang lebih relasional, berlawanan dengan yang rasional di Utara. Memang, konsep ini tidak hanya bagi orang Cina, namun, ia juga meluas ke masyarakat lain di Dunia Selatan dan menawarkan cara alternatif untuk berteori hubungan Selatan-Selatan dengan perspektif yang muncul dari Utara.

Kesimpulan

Dalam beberapa tahun terakhir banyak yang telah dilakukan untuk menggaris bawahi kontribusi penting yang dibuat oleh para aktor dari Dunia Selatan, dan memang telah selalu dibuat dalam jejak sejarahnya, untuk hubungan internasional. Memang, HI sebagai disiplin ilmu telah berkembang pesat dalam memasukkan aspek, aktor, dan konsep yang mewakili dunia secara lebih luas. Namun, karena dinamika sistem internasional terus berubah dengan munculnya kekuatan ekonomi baru seperti India, China, Brasil, Turki, serta negara berkembang lainnya, HI perlu berbuat lebih banyak untuk memperhatikan perspektif mereka di Selatan. Perspektif Global South tidak hanya menantang perspektif teoritis dominan yang telah berfungsi untuk menciptakan dan melestarikan hubungan yang tidak adil antara Global Utara dan Selatan, mereka juga membuka kemungkinan hubungan yang berbeda dan lebih adil yang mewakili kepentingan semua pihak yang berkepentingan dan menantang lembaga internasional untuk memiliki struktur kekuasaan yang lebih representatif dan memperbaiki proses pengambilan keputusannya.

18
PERSPEKTIF PRIBUMI
(INDIGENOUS PERSPECTIVES)

Jeff Corntassel & Marc Woons

Menjadi pribumi adalah narasi tentang cara menghormati dan memperbarui hubungan yang kompleks antara manusia dan juga dengan alam. Perserikatan Bangsa-Bangsa menawarkan definisi kerja multifaset tentang apa artinya menjadi anggota salah satu dari ribuan bangsa pribumi yang hidup di seluruh dunia. Ini mencakup faktor-faktor seperti identifikasi diri, kesinambungan sejarah, dan keberadaan berbasis pada keterikatan dengan suatu tempat tertentu. Definisi tersebut juga berbicara tentang sistem pemerintahan, bahasa, pengalaman sejarah, budaya, dan cara mengetahui yang berbeda. Yang penting, hal ini juga menggambarkan komunitas yang berusaha mempertahankan wilayah mereka dan menyatakan diri mereka sebagai masyarakat yang berbeda, terlepas dari keberadaan mereka dalam suatu negara (yang biasanya bertentangan dengan keinginan mereka). Negara, di sisi lain, dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan teritorial yang berbeda, dan sistem pemerintah yang diakui secara internasional, dan, secara historis berusaha untuk mengontrol, memaksa, dan bahkan menghilangkan masyarakat adat dari lanskap habitat asli mereka. Kerangka kerja dominan hubungan antar negara berakar pada konsepsi kedaulatan negara seperti itu. Dari perspektif Pribumi, hal ini ditetapkan melalui kekerasan, penjajahan, pelanggaran perjanjian dan pernyataan tidak adil tentang kekuasaan atas masyarakat adat dan tanah mereka. Hal ini merongrong, meremehkan, mengecualikan, menghinakan, dan pada akhirnya, memprovokasi pandangan dunia Pribumi, dan argumen tandingan yang berusaha mendorong model '*state-centric'* melampaui batas-batasnya yang sempit (yang dibuat oleh HI arus utama-penerjemah). Dengan menjelajahi Perspektif masyarakat adat dan hubungan yang kompleks, kita dapat lebih jelas melihat masalah yang muncul dari banyak

asumsi di jantung Hubungan Internasional perspektif tradisional selama ini, dan rumpun teorinya.

Dasar-Dasar Perspektif Pribumi

Tatanan politik dan hukum global yang dominan saat ini, yang ditemukan di Eropa, berpusat pada negara, dan sejak itu menyebar ke mana-mana untuk menciptakan batas-batas terpisah yang menandai peta dunia geopolitik yang paling banyak digunakan saat ini. Mengakhiri kekerasan brutal dan konflik endemik selama puluhan tahun di seluruh Eropa, Perdamaian Westphalia 1648 memperkuat gagasan kedaulatan negara yang total dan abadi. Tanggapan Eropa terhadap anarki, konflik, dan kekacauan di antara bangsa-bangsa (atau masyarakat) dengan demikian merupakan penciptaan sistem hubungan antar-negara yang didukung oleh negara-negara yang saling mengakui otoritas kedaulatan satu sama lain. Pemahaman perspektif pribumi (*indigenous*) tentang hubungan internasional berbeda dari pendekatan antar negara, terutama dalam hal cara masyarakat adat memperbarui dan bertindak berdasarkan komitmen sakral dan saling ketergantungan mereka dengan alam. Penegasan kebangkitan pribumi, yang memerlukan reklamasi dan regenerasi hubungan dengan tanah, budaya dan komunitas, mempromosikan visi internasional alternatif yang positif untuk menantang model hubungan antar-negara 'berdaulat penuh' yang dominan.

Konsep kedaulatan negara memicu strategi pembangunan negara modern dan, hampir tanpa kecuali, menyebabkan kehancuran negara-negara Pribumi. Setiap negara mencoba untuk membangun sebuah visi tentang orang-orang biasa yang berbagi budaya, nilai, sejarah, bahasa, mata uang (dan sebagainya) melalui pendidikan, penaklukan militer dan inisiatif lain yang didorong oleh negara. Ini sering disebut identitas nasional, dan dikaitkan dengan ide-ide seperti patriotisme dan nasionalisme. Perjumpaan penduduk asli dengan kerajaan-kerajaan Eropa membuat mereka berkali-kali menghadapi pilihan yang sulit (kolonial hampir tidak pernah memberikan pilihan, sebab kolonialisme itu sendiri bukanlah suatu pilihan dari pribumi-penerjemah). Pribumi dipaksa berasimilasi dengan tatanan kolonial pemukim baru yang dipraktikkan atas mereka dan tanah mereka

(misalnya sistem ekonomi, pemerintahan, budaya, dan bahasa kaum kolonial-penerjemah), atau resiko menghadapi dislokasi, bahkan genosida. Seperti yang ditunjukkan oleh George Manuel dan Michael Posluns (1974, 60);

> sistem kolonial selalu merupakan cara untuk mendapatkan kendali atas orang lain demi apa yang telah ditentukan oleh kekuasaan kolonial sebagai 'kebaikan bersama' *(the common good*). Orang hanya bisa diyakinkan akan kebaikan bersama ketika kapasitas mereka sendiri untuk membayangkan cara-cara mereka bisa mengatur diri sendiri telah hancur.

Berbicara kepada perjuangan Pribumi atas upaya pembangunan negara yang mengasingkan masyarakat adat dari tanah dan sumber daya mereka, Manuela Picq (2015) menyarankan bahwa perspektif Pribumi menawarkan tiga tantangan khusus pada perspektif yang berpusat pada negara. Pertama, mereka menantang otoritas tertinggi negara dengan menegaskan otoritas mereka atas negara, tanah / perairan, dan alam mereka. Kedua, mereka mengekspos fondasi kolonial dari sistem yang berpusat pada negara dengan menyoroti pandangan Pribumi yang menantang dan duduk di luar sistem dominan. Dengan kata lain, negara-negara yang kita kenal berhutang keberadaannya pada proses penjajahan dan permukiman yang berakar pada imperialisme budaya, kekerasan, perusakan, genosida dan pada akhirnya penghapusan identitas Pribumi dan hubungan dengan tanah mereka, jika bukan pemberantasan (pemusnahan) masyarakat itu sendiri. Ketiga, pandangan dunia dan praktik masyarakat adat menantang kita untuk membayangkan bagaimana rasanya berbagi kekuasaan di dalam, dan berpikir di luar batas negara dan sistem negara global yang berlaku saat ini.

Prinsip penentuan nasib sendiri telah memberikan bangsa-bangsa (masyarakat) Pribumi tanpa kewarganegaraan dengan cara-cara untuk mencoba (kembali) menegaskan dan (kembali) mengklaim otoritas mereka. Penentuan nasib sendiri memberikan jalan bagi masyarakat adat untuk menciptakan entitas politik yang dapat diakui oleh komunitas internasional. Proses ini didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat harus bebas membentuk pemerintahan sendiri, dan mengontrol urusan mereka

sendiri, sesuatu yang penting bagi etika dan legalitas yang mendasari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Klaim pribumi seperti ini telah mendapatkan daya tarik yang signifikan selama abad terakhir, terutama pasca-1945 ketika dekolonisasi menjadi proses internasional yang penting. Sumber otoritas dari penentuan nasib sendiri memang merupakan sumber pertengkaran. Bagi bangsa-bangsa pribumi, sumber otoritas itu berasal dari hubungan yang kompleks dengan tanah air mereka, sejarah kehidupan suci, dunia binatang alam mereaka, tumbuhan, upacara adat, bahasa dan ke-alam-an dunia lainnya. Sumber otoritas penentuan nasib sendiri bagi negara sangat jauh berbeda, yakni bersumber dari warisan kebijakan dan hukum kolonial. Misalnya, Doktrin Penemuan (*the Doctrine of Discovery*), yang berasal dari abad ke-15, menyatakan dukungan bahwa tanah yang diduduki oleh non-Kristen dapat 'ditemukan' atau *discovered* (baca: dirampas-penerjemah) secara legal dan diklaim sebagai wilayah yang dimiliki oleh Kerajaan 'penemu'. Konstruksi politik dan hukum lain yang berlaku masa itu juga telah tertanam dalam sejarah dan praktik hukum negara, membentuk praktik internasional yang menolak konsepsi Pribumi alternatif tentang hubungan antar bangsa-bangsa (nations dan bukan states-penerjemah).

Salah satu contoh ketegangan antara kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri bagi bangsa pribumi dapat dilihat dalam kisah kunjungan Kepala Cayuga Deskaheh[12], pertama ke Inggris pada tahun 1921 dan kemudian ke Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1923. Dalam

[12] Deskaheh (juga dikenal sebagai Levi General) adalah kepala suku Cayuga dan pembicara dari Dewan Herediter Enam Bangsa. Seorang anggota agama Rumah Panjang (Longhouse religion), Deskaheh bersikeras bahwa Enam Bangsa mempertahankan bahasa dan budaya mereka yang khas. Ketika pemerintah Kanada mencoba pada tahun 1923 untuk menggulingkan Dewan Herediter Enam (the Six Nations Hereditary Council) dan menggantinya dengan pimpinan formal melalui pelembagaan yang terpilih, Deskaheh segera bertindak. Dia bekerja untuk mendapatkan pengakuan internasional dari Enam Bangsa sebagai bangsa Indian yang berdaulat yang diperintah oleh dewan kepala keturunan. Bepergian dengan paspor yang dikeluarkan oleh dewan, dia pergi ke Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss. Tetapi sekretariat Liga menolak untuk mengizinkannya berpidato di hadapan majelis, dengan alasan bahwa Kanada memiliki yurisdiksi atas Enam Bangsa. Karena kelelahan, Deskaheh jatuh sakit tak lama setelah kembali ke Amerika Utara dan meninggal karena pneumonia. Lihat laman https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/levi-general (penerjemah)

kapasitasnya sebagai Juru Bicara Enam Bangsa *(the Six Nations Hereditary Council*), dia merasa harus melakukan perjalanan panjang trans-Atlantik karena konflik antara Haudenosaunee dan masyarakat Kanada telah menemui jalan buntu. Dia merasa tidak adil bahwa rakyatnya dipenjara karena melakukan protes pengenaan negara Kanada atas kedaulatan yang dideklarasikan sendiri atas tanah mereka, mengklaimnya sama dengan invasi dan menyatakan bahwa 'kami bertekad untuk hidup sebagai orang merdeka sejak dari lahir' (Liga Bangsa-Bangsa 1923, 3). Tanah itu, tunduk pada perjanjian yang mengungkapkan visi alternatif otoritas bersama atas tanah bersama dan saling menghormati antara orang-orang sebagai negara yang setara secara kooperatif mengatur wilayah yang sama, sebuah gagasan yang sebagian besar bertentangan dengan visi Westphalia tentang otoritas teritorial eksklusif oleh satu orang. Namun, banding perkara yang dilakukan Kepala Deskaheh tidak didengarkan baik di London dan Jenewa karena negara yang bersangkutan menolaknya mencampuri urusan dalam negeri salah satu rekan mereka, yaitu Kanada (Corntassel 2008). Dia akhirnya meninggalkan Eropa dengan tangan kosong, dan akhirnya meninggal setelah tahun 1925 di negara bagian New York, diasingkan dari tanah airnya yang saat itu telah dikuasai oleh negara pemukim baru Kanada.

Beberapa kemajuan telah dibuat sejak zaman Kepala Deskaheh dan sekarang muncul di tempat-tempat yang menonjol. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) mendesak negara-negara untuk mengakui bahwa 'Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka' (Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2007: 3). Ada juga momentum di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung apa yang dianggap banyak orang sebagai inti penentuan nasib sendiri, yaitu, hak veto Pribumi atas semua hal yang mempengaruhi mereka, komunitas mereka dan wilayah mereka. Di permukaan, Deklarasi tampaknya menjamin kekuasaan bangsa-bangsa (suku) Pribumi yang sebelumnya hanya diberlakukan ke negara-negara. Seperti yang ditunjukkan oleh White Face (2013), negara-negara yang bersekongkol menolak untuk mengadopsinya sampai memasukkan pembatasan bahasa

yang akhirnya masuk ke dalam Pasal 46, yang menyatakan bahwa '*tidak ada dalam deklarasi ini yang dapat ditafsirkan ... atau ditafsirkan sebagai mengizinkan atau mendorong tindakan apa pun yang akan memotong atau merusak, secara keseluruhan atau sebagian, integritas teritorial atau kesatuan politik negara-negara yang berdaulat dan merdeka'* (Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2007: 14). Pasal 46 dapat dilihat sebagai mengabadikan Doktrin Penemuan (*Doctrine of Discovery)* yang disebutkan di atas, atau setidaknya dampaknya terhadap doktrin itu, meskipun secara resmi ditolak pada tahun 2012. Sayangnya, berlaku fiksi hukum (kekuatan keberlakuannya karena dianggap semua telah mengetahuinya-penerjemah) Doktrin Penemuan melalui Pasal 46 UNDRIP serta instrumen hukum antar negara lainnya berdampak pada negara-negara Pribumi secara mendalam dan merusak dengan merongrong otoritas penentuan nasib sendiri mereka (Miller et al. 2010; Pelapor Khusus 2010).

Penentuan nasib sendiri penduduk asli tidak boleh disamakan dengan upaya penentuan nasib sendiri non-negara bangsa seperti Québec, Catalonia, Palestina atau Kurdistan. Berharap untuk mencapai keberhasilan Timor Timur atau Sudan Selatan, gerakan nasional ini menginginkan negara mereka sendiri sehingga mereka dapat dimasukkan sebagai anggota penuh dalam sistem antar negara seperti yang ada saat ini. Di sisi lain, gerakan penentuan nasib sendiri penduduk asli meningkatkan tantangan yang lebih kuat dan mendasar pada sistem itu sendiri. Bahkan jika sebagian besar negara Pribumi tidak mengupayakan penghapusannya secara besar-besaran, mereka berusaha keras untuk dimasukkan dalam istilah mereka sendiri yang cenderung menolak gagasan Westphalia tentang kedaulatan negara. Mengingat ada sekitar 5.000 Bangsa Pribumi di seluruh dunia, tentu ada banyak cara untuk menegaskan otoritas penentuan nasib sendiri. Banyak alternatif Pribumi bahkan menolak gagasan bahwa harus ada seperangkat prinsip yang kuat yang mengatur hubungan antar masyarakat, dengan alasan bahwa kita harus toleran terhadap pluralitas pendekatan untuk mempromosikan perdamaian di antara masyarakat dan dengan lingkungan yang menopang kita.

Perspektif Pribumi dan Perjanjian Kerbau *(The Buffalo Treaty)*

Muncul kajian tentang hubungan internasional Pribumi yang menantang ekspresi kedaulatan dan penentuan nasib sendiri yang berpusat pada negara. Seperti yang dinyatakan oleh pakar Anishinaabe, Hayden King (2015, 181), bahwa 'dalam pandangan politik kita, negara dan kedaulatan mencair'. Bangsa-bangsa pribumi/ adat telah menyatakan solidaritas satu sama lain melalui pembentukan konfederasi, perjanjian dan kesepakatan baru yang mempromosikan perdamaian, persahabatan dan aliansi strategis baru. Hubungan pribumi internasional langgeng dan sakral, dan membuat perjanjian dengan negara asing tidak mencegah bangsa Pribumi untuk melanjutkan hubungan diplomatik mereka sendiri satu sama lain. Misalnya, Perjanjian Perdamaian, Penghormatan, dan Tanggung Jawab antara Bangsa Heiltsuk dan Bangsa Haida (Crist 2014) adalah perjanjian damai pertama antara kedua negara ini sejak tahun 1850-an dan didasarkan pada asumsi bahwa 'ada masalah yang lebih besar yang dihadapi negara kita; tanah dan air dan penipisan sumber daya yang disebabkan oleh kekuatan di luar bangsa kita. Perjanjian tersebut disahkan antara dua bangsa Pribumi secara adat, melalui upacara potlatch, dan berusaha untuk menantang ancaman hukuman umum yang ditimbulkan oleh pengaturan perikanan/penangkapan herring komersial yang disetujui negara di perairan Heiltsuk'.

Pada tahun 2014, perjanjian bersejarah lainnya dimulai antara bangsa-bangsa Pribumi yang hidup di sepanjang garis pengobatan (the medicine line), perbatasan Amerika Serikat-Kanada. Iiniiwa, yang merupakan nama Blackfoot untuk bison, memiliki hubungan yang sangat dekat, dan telah berlangsung lama dengan tanah, masyarakat, dan praktik budaya ekosistem padang rumput. Saat membahas peran bison di tanah air mereka, pakar biologi alam, Blackfoot Leroy Little Bear (2014) menunjukkan bahwa, di lanskap padang rumput, para bison membentuk komunitas tumbuh-tumbuhan, mengangkut dan mendaur ulang nutrisi, menciptakan keragaman habitat yang menguntungkan burung padang rumput, serangga, dan mamalia kecil, serta menyediakan sumber makanan yang berlimpah bagi beruang grizzly, serigala, dan manusia. Namun sayangnya, pembantaian bison yang meluas di abad kesembilan belas

menyebabkan kerusakan ekosistem padang rumput, dan dengan ini kesehatan dan kesejahteraan orang-orang Blackfeet menjadi terancam pada akhirnya. Perburuan bison meskipun legal, juga berdampak pada praktik budaya masyarakat adat di wilayah tersebut, yang telah mendorong perlunya tindakan yang dipimpin/dipandu oleh komunitas untuk memulihkan Iiniiwa ke tanah air Pribumi yang seperti semula.

Pada tanggal 23 September 2014, delapan bangsa Pribumi (Bangsa Blackfeet, Suku Blood, Bangsa Siksika, Bangsa Piikani, Suku Assiniboine dan Gros Ventre dari Reservasi Indian Fort Belknap, Suku Assiniboine dan Sioux dari Fort Peck Reservasi Indian, Suku Salish dan Kootenai dari Confederated Salish and Kootenai Indian Reservation, dan Tsuu T'ina Nation) berkumpul di wilayah Blackfeet dekat Browning, Montana untuk menandatangani Buffalo Treaty yang bersejarah. Ini melibatkan bangsa-bangsa Pribumi di kedua sisi jalur batas Amerika Serikat dan Kanada, dan menyerukan kembalinya Iiniiwa ke ekosistem padang rumput. Mengingat bahwa itu adalah perjanjian Pribumi lintas batas pertama yang ditandatangani dalam lebih dari 150 tahun, Perjanjian Kerbau itu juga merupakan cara memperbarui dan meregenerasi aliansi lama. Ini menguraikan beberapa tujuan yang dipimpin masyarakat, termasuk melibatkan suku-suku dan First Nations dalam melanjutkan dialog tentang konservasi iiniiwa, menyatukan kekuatan politik suku-suku dan *First Nations of the Northern Great Plains* (Bangsa Pertama di Dataran Besar Utara), memajukan seruan internasional untuk pemulihan iiniiwa, melibatkan pemuda dalam proses perjanjian dan memperkuat serta memperbarui hubungan budaya dan spiritual kuno dengan Iiniiwa dan padang rumput di Northern Great Plains.

Sebagai contoh hubungan internasional Pribumi, ketentuan perjanjian yang disebutkan di atas menunjukkan sifat sakral pembuatan perjanjian sebagai cara bagi negara-negara Pribumi 'untuk memperluas hubungan hubungan mereka dengan semua orang yang berbeda di dunia' (Williams 1997, 50). Selain memiliki bangsa Pribumi sebagai penandatangan, Perjanjian Kerbau juga menguraikan visi untuk keterlibatan pemerintah federal, negara bagian dan provinsi, serta petani, peternak dan kelompok konservasi dalam pemulihan Iiniiwa ke tanah air Pribumi. Sebagai individu bangsa Pribumi, komunitas ini akan memiliki

kemampuan terbatas untuk mempromosikan restorasi Iiniiwa. Namun, dengan visi yang bersatu, mereka secara kolektif menggunakan otoritas penentuan nasib sendiri untuk memfasilitasi pengembalian Iiniiwa ke sekitar 6,3 juta hektar tanah air mereka.

Buffalo Treaty juga merupakan dokumen hidup yang membutuhkan pembaruan dan interpretasi ulang secara berkala. Dua tahun setelah Perjanjian ditandatangani, jumlah penandatangan berubah dari delapan menjadi 21. Pada bulan September 2016, para penandatangan mengadakan upacara pipa di Taman Nasional Banff untuk menghormati rencana pelepasan kembali enam belas area Iiniiwa ke wilayah tersebut. Selain memulihkan populasi kerbau/Bison, para penandatangan meminta Pemerintah Alberta di Kanada untuk mengubah nama Tunnel Mountain di Banff menjadi *Sacret Buffalo Guardian Mountain* (Gunung Penjaga Kerbau Suci). Visi untuk regenerasi dan pelestarian Iiniiwa juga memerlukan perubahan lanskap untuk mencerminkan tempat tinggal khas Iiniiwa. Bentuk-bentuk baru pembuatan perjanjian Pribumi mencerminkan diplomasi yang kompleks dan kebangkitan kembali spiritual yang membentuk hubungan antar-bangsa Pribumi.

Kesimpulan

Ketidakseimbangan kekuatan, dan perbedaan pandangan dunia, antara negara dan bangsa-bangsa Pribumi tetap ada dalam sistem internasional kita. Perkembangan dan kritik dalam disiplin HI, dan bagaimana mereka berteori, menyoroti perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan keberadaan berbasis tempat mereka sehingga tanah, budaya, komunitas dan hubungan mereka akan berkembang untuk generasi yang akan datang. Pemahaman adat tentang hubungan internasional datang dalam berbagai bentuk, baik melalui penyegaran kembali perjanjian dengan alam, membangun (kembali) aliansi antara masyarakat adat atau advokasi adat dalam kegiatan diplomatik dalam forum global. Upaya-upaya ini menantang sistem dominan yang berpusat pada negara untuk memasukkan cara-cara mereka yang berbeda dalam memahami dan menata hubungan tidak hanya antara manusia, tetapi dengan alam dan planet. Lebih khusus lagi, mereka menantang gagasan Westphalia tentang kedaulatan

negara tertinggi dan mencari cara untuk memulihkan otoritas untuk menentukan nasib sendiri mengenai hubungan mereka dengan tanah air dan bangsa mereka.

19
PERSPEKTIF REALISME KONTEMPORER
(A CONTEMPORARY PERSPECTIVE ON REALISM)

Felix Rösch & Richard Ned Lebow

Sejak akhir Perang Dingin, realisme telah kembali ke akarnya. Sarjana realis menunjukkan minat baru pada pemikir-pemikir utama mereka, pemahaman tragis mereka tentang kehidupan dan politik (yang anarkhis-penerjemah), perhatian praktis mereka terhadap etika dan pemahaman mereka tentang teori sebagai titik awal untuk narasi penjelas atau ramalan (*forecast*) ke depan yang sangat bergantung pada konteks. Terlepas dari perspektif mereka yang berbeda tentang politik dunia, tulisan Thucydides, Niccolò Machiavelli, Edward Hallett Carr, Reinhold Niebuhr, Arnold Wolfers, John Herz, Hans Morgenthau dan Hannah Arendt menunjukkan kesatuan pemikiran yang luar biasa karena didorong oleh kekhawatiran yang sama tentang 'masalah-masalah abadi' (*perennial problems*) (Morgenthau 1962, 19). Salah satu masalah ini adalah depolitisasi masyarakat. Kaum realis prihatin bahwa, dalam masyarakat modern, orang tidak dapat lagi mengekspresikan kepentingannya secara bebas di depan umum, kehilangan kemampuan untuk berkontribusi secara kolektif pada masyarakatnya. Akibatnya, realisme dapat dianggap sebagai kritik yang bersifat 'korektif' (Cozette 2008, 12) untuk perkembangan ini. Awalnya mungkin tampak aneh, tetapi satu cara untuk melihat bagaimana realisme berhubungan dengan dunia saat ini adalah dengan melihat kembali ke akarnya, tentu saja melalui para sarjana sebelumnya, yang lebih menarik perhatian mereka daripada memikirkan beberapa perkembangan teori realisme itu sendiri, seperti neorealisme, misalnya. Karena alasan ini, bab ini akan meninjau kembali realisme untuk menawarkan perspektif kontemporer tentang apa sebenarnya teori HI tertua, dan yang pasti, kelompok teori HI yang paling signifikan mempengaruhi perkembangan disiplin ilmu ini.

Dasar-Dasar Perspektif Kontemporer tentang Realisme

Para ilmuan realis pertengahan abad ke-20, yang sering disebut realis klasik (*classical realists*), adalah kelompok sarjana yang sebenarnya memiliki beragam pemikiran. Meskipun pusat geografis mereka berada di Amerika Serikat (dengan beberapa pengecualian), banyak dari mereka adalah imigran dari Eropa yang terpaksa pergi karena kebangkitan fasisme dan komunisme pada tahun 1930-an. Meskipun mereka memiliki pandangan dunia humanistik yang sama dalam arti bahwa mereka mengenyam dan mempelajari secara ekstensif kajian-kajian filsafat dan seni liberal, dan mereka percaya bahwa orang hanya dapat menjadi diri mereka sendiri sebagai manusia dengan terlibat bersama dengan orang lain di ruang publik, para ilmuan itu juga menampakkan keberagamannya dalam berbagai profesi mereka. Mengingat bahwa HI hanya dilembagakan secara bertahap di Eropa ketika 'kursi siswa pertama' kajian ini didirikan sehubungan dengan kengerian Perang Dunia Pertama di universitas di Aberystwyth pada tahun 1919, maka, sebenarnya, tidak ada dari mereka yang dilatih sebagai sarjana HI sebelumnya (karena memang belum ada disiplin ini-penerjemah). Sebaliknya, mereka adalah sejarawan, sosiolog, filsuf, pengacara, dan bahkan teolog. Hanya secara retrospektif banyak dari mereka yang terkait dengan HI. Bahkan Morgenthau, yang bisa dibilang pendiri realis HI paling terkenal, justru memegang jabatan profesor untuk ilmu politik dan sejarah, bukan untuk Hubungan Internasional. Terlepas dari keragaman ini, bagaimanapun, pertengahan abad kedua puluh, realis menyetujui visi kehidupan yang tragis, pandangan yang mereka bagi dengan banyak pendahulu mereka (Lebow 2003; Williams 2005). Ini karena orang-orang, dan terlebih lagi para pemimpin, harus membuat keputusan atas dasar informasi yang tidak lengkap, menangani tindakan mereka yang tidak dapat diprediksi, dan mengatasi konflik nilai yang tidak dapat didamaikan di dalam dan di antara masyarakat. Di atas segalanya, mereka mengakui bahwa para pemimpin terkadang harus menggunakan cara yang tidak etis (seperti kekerasan) untuk mencapai tujuan yang terpuji dan tanpa pengetahuan sebelumnya, bahwa cara ini akan mencapai tujuan yang mereka cari (para pemimpin negara pada awal dan pertengahan ada

masalah krusial dalam membuat keputusan yang terkait dengan hubungan dengan bangsa-bangsa lain, baik itu di masa damai, apalagi di masa perang, yakni kurangnya informasi yang lengkap tentang materi yang akan mereka putuskan terutama terkait dengan apa, siapa dan bagaimana pihak (negara) lain itu, sehingga akan cenderung untuk protektif dan *over* sekuritisasi-penerjemah).

Pandangan tragis ini dapat dimengerti jika kita mempertimbangkan konteks di mana para realis klasik ini menulis. Thucydides hidup selama masa Perang Peloponnesia di mana Athena kehilangan keunggulannya di dunia Yunani kuno. Kehidupan Machiavelli juga dipengaruhi oleh konflik yang berulang-ulang di mana kepausan, Prancis, Spanyol, dan pasukan lainnya bertujuan untuk menguasai Italia Utara selama Perang Renaisans (1494–1559). Para realis modern akhirnya mengalami kebangkitan ideologi sebagai klimaks dari sebuah perkembangan yang telah dimulai hampir dua ratus tahun sebelumnya. Berlanjut sejak Zaman Pencerahan yang memuncak pada Revolusi Prancis, orang dibebaskan dari aturan agama yang lurus. Tetapi secara bersamaan mereka telah kehilangan rasa kebersamaan yang berbasis ideologi seperti nasionalisme, liberalisme atau Marxisme dan hanya dapat menyuarakannya secara dangkal, dan seringkali hanya akibat dari konflik kekerasan. Kaum realis berbagi sentimen publik bahwa kehilangan rasa komunitas ini menyebabkan penurunan nilai-nilai yang diterima secara umum seperti yang dicontohkan dalam debat di Jerman tentang krisis budaya selama dekade awal abad kedua puluh. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap godaan tarikan ideologi, sebab ideologi memberikan apa yang disebut Arendt (1961, 469) sebagai 'penjelasan dunia' (*world explanations*), yang memungkinkan orang untuk menyalurkan keinginan, cita-cita, mencari jalan keluar dari problem sosial, dan berbagai dorongan manusia lainnya ke dalamnya.

John Herz (1951) berargumen bahwa dorongan untuk mempertahankan diri, yang memastikan bahwa orang peduli akan kelangsungan hidup mereka di dunia dengan mencari makanan dan tempat berlindung, memicu dilema keamanan karena orang tidak pernah bisa yakin untuk menghindari serangan dari orang lain. Morgenthau (1930), sebaliknya, lebih peduli tentang dorongan untuk membuktikan diri, yang dapat dicapai dengan memberikan kontribusi pada dunia kehidupan sosial-

politik seseorang. Sukses itu sulit karena orang memiliki pengetahuan yang tidak lengkap tentang diri mereka sendiri dan dunia kehidupan mereka. Keputusan politik apa pun harus selalu bersifat sementara, dan dapat direvisi jika keadaan berubah atau karena perkembangan pengetahuan/informasi. Saat menyadari bahwa ambisi mereka sia-sia, aspek kehidupan tragis lainnya muncul. Bagi Morgenthau, menerima aspek tragis ini adalah langkah pertama untuk melampauinya, yang saat itu, orang dapat merefleksikan secara kritis tentang keberadaan mereka dan memahami bahwa hanya melalui upaya mereka sendiri kehidupan dapat menjadi bermakna. Dalam modernitas, bagaimanapun, kehilangan nilai-nilai sebagai dasar untuk membuat penilaian yang konprehensif, kehidupan masyarakat dicirikan oleh apa yang disebut Steven Toulmin (1990, 35) sebagai 'pencarian untuk kepastian' *(quest for certainty*), tetapi sangat sedikit yang berhasil menghadapi kesulitan yang mengkritik diri sendiri (yang berhasil dalam otokritik lalu bangkit dan sukses-penerjemah) yang memerlukan kontemplasi serius. Sebagian besar, seperti dicatat Nietzsche, puas dengan ilusi yang tertanam dalam suatu bentuk komunitas (individu mengidentikkan diri dengan cita-cita dan capaian komunitasnya-penerjemah). Oleh karena itu, pada tataran negara-bangsa tragedi tampak besar karena masyarakat hidup dalam komunitas politik yang diwarnai oleh kekurangan yang sama yang menghambat perkembangan kondisi manusia.

Mengingat bahwa dorongan ini mempengaruhi orang-orang di setiap tingkatan, realis tidak membedakan antara politik domestik dan internasional. Sebaliknya, mereka fokus pada komunitas politik, bagaimanapun mereka dipahami, karena melalui hubungan masyarakatlah dorongan manusia ini mulai mempengaruhi politik. Dalam hubungan ini, kekuasaan memainkan peran yang menentukan. Karena dorongan untuk membuktikan diri, keseimbangan kekuatan berkembang dalam hubungan antarpribadi, antarkelompok, dan internasional untuk melawan ambisi aktor politik yang berusaha mendapatkan kemampuan untuk mendominasi orang lain. Keseimbangan kekuasaan ini tidak stabil tetapi berkembang karena aktor menghadapi dilema keamanan, artinya, karena ketidakpastian, para aktor hidup dalam ketakutan terus-menerus. Ini memaksa mereka untuk mengumpulkan kekuatan lebih lanjut, hanya menyebabkan reaksi yang sama pada musuh potensial mereka. Oleh karena itu, lebih sedikit

kendala fisik atau material yang mengarah pada keseimbangan kekuatan dan lebih banyak pada faktor ketidakamanan emosional. Ironisnya, oleh karena itu, keseimbangan kekuatan bekerja paling baik pada saat dibutuhkan, paling tidak, karena jika orang dan komunitas memiliki identitas yang sama, mereka dapat bekerja sama dengan lebih mudah dan tidak memerlukan keseimbangan kekuatan (dalam kondisi yang mengancam komunitas dari luar, maka persaingan individu dalam perebutan pengaruh akan diabaikan untuk sementara-penerjemah).

Namun, dorongan manusia memiliki efek yang lebih dramatis pada masyarakat di luar perkembangan keseimbangan kekuatan itu sendiri, karena mereka dapat mendepolitisasi mereka. Perhatian ini adalah inti dari pemikiran realis Hans J. Morgenthau. Dia menentang musuh / perbedaan teman yang lebih umum dan mendefinisikan politik sebagai kekuatan universal yang melekat pada setiap manusia dan yang selalu berfokus pada orang lain, sementara pada saat yang sama itu hanya muncul dalam hubungan antar-pribadi. Diskusi yang dihasilkan, di mana orang mengekspresikan minat mereka, menciptakan '*an arena of contestation'* atau arena kontestasi (Galston 2010, 391). Menyadari kemampuan individu mereka, dan mengalami keefektifan kekuatan melalui tindakan bersama, orang mengembangkan identitas mereka, saat mereka memperoleh pengetahuan tentang diri mereka sendiri dan dunia kehidupan sekitar mereka.

Tragedi ketidaksempurnaan manusia, bagaimanapun, membahayakan politik, karena mendorong perkembangan ideologi. Mengingat bahwa kebanyakan orang tidak dapat menghadapi ketidaksempurnaan mereka, ideologi menawarkan suatu bentuk keamanan ontologis. Ini berarti bahwa ideologi memberi orang rasa kemanan, keteraturan/tertib sosial, dan membantu mereka menyembunyikan ketidak-berartian/ketidak-berdayaan pada fase awal kehidupan, karena ideologi menawarkan penjelasan yang luas dan kompleks dari ketiksempurnaan individual sampai dengan peristiwa sosial-politik secara historis dan problem terkini. Terutama fasisme dan komunisme memenuhi pikiran dan sangat berbekas pada kaum realis klasik, karena mereka adalah ideologi paling kejam selama hidup mereka, tetapi mereka juga mengkritik keangkuhan liberalisme dan nasionalisme Amerika secara umum.

Bagi realis, ideologi bertujuan untuk mempertahankan status sosio-politik dan setiap aktivitas manusia diarahkan untuk mempertahankan reifikasi[13] ini. Realitas sosiopolitik saat ini dianggap sudah ada dan tidak dapat diubah secara fundamental. Perkembangan politik sebagai ranah di mana masyarakat dapat menyuarakan kepentingannya secara bebas dan berbagi pemikiran tentang komposisi, dan tujuan komunitas politiknya ini berarti membahayakan status quo sosio-politik, karena itu perkembangan politik tersebut berpotensi mendorong perubahan sosial-politik. Untuk mengatasi depolitisasi ini, realis mengedepankan apa yang disebut sebagai 'etika tanggung jawab' *(ethics of responsibility*), menggunakan istilah Max Weber. Meskipun kaum realis yakin bahwa kebanyakan orang tidak mau atau tidak mampu mengambil tanggung jawab atas hidup mereka, mereka tetap memperjuangkan etika di mana pengambilan keputusan dipandu oleh intellectual honesty atau 'kejujuran intelektual' (Sigwart 2013, 429). Pikiran dan keyakinan harus dikontekstualisasikan dalam proses kritik diri sendiri (otikritik) yang menunjukkan empati terhadap posisi orang lain. 'Etika wacana' (*discourse ethic*) yang dihasilkan, demikian Arendt menyebutnya, hanya bisa terjadi dalam kolektivitas. Pertemuan Balai Kota (*town hall meetings*) di Amerika menjadi tempat yang sempurna bagi Arendt untuk mengilustrasikan hal ini, karena pertemuan itu memungkinkan semua orang yang memiliki minat yang sama untuk berkumpul. Namun, akibatnya, masyarakat harus siap berganti posisi dan mau bertanggung jawab atas dilema moral politik (antar) bangsa.

Bertentangan dengan asumsi umum, para sarjana realis bukanlah pembela negara-bangsa, tetapi kritis terhadapnya, bertujuan untuk menghindari bahayanya dan mengatasi kekurangannya dengan menyelidiki potensi negara-dunia (Scheuerman 2011). Untuk berbagai alasan, realis klasik menganggap negara sebagai '*blind and potent monster'* atau monster buta yang kuat (Morgenthau 1962, 61). Mereka buta karena globalisasi dan

---

[13] Reifikasi berarti bahwa suatu konsep abstrak yang dipandang sebagai sesuatu yang konkret. Dalam Marxisme, reifikasi (Jerman: Verdinglichung, atau 'Membuat menjadi sesuatu') adalah proses di mana hubungan sosial dianggap sebagai atribut inheren dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, atau atribut-atribut yang dihasilkan oleh hubungan sosial, seperti komoditas yang saling dipertukarkan dalam perdagangan. Lihat laman https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/reification dan https://en.unionpedia.org/Reification_(Marxism) (penerjemah)

kemajuan teknologi tidak hanya menghalangi mereka untuk memenuhi peran mereka dalam memberikan keamanan, tetapi juga membahayakan kehidupan di bumi. Versi yang sangat kuat dari kritik ini dapat ditemukan dalam tulisan Aron, Herz dan Morgenthau. Yang terakhir memberikan pandangan kecewa tentang prospek umat manusia dalam salah satu penampilan publik terakhirnya, dengan alasan bahwa kita hidup di 'dunia mimpi' *(a dream of world*) karena negara-bangsa tidak dapat lagi menjunjung tinggi klaim untuk memiliki monopoli kekuasaan atas suatu wilayah tertentu karena pengembangan senjata nuklir (jika perjanjian non-proliferasi nuklir gagal menghambatnya-penerjemah).

Lebih jauh, pemborosan sumber daya alam mengancam lingkungan, yang mengarah ke *a society of waste* atau 'masyarakat sampah' (Morgenthau 1972, 23). Namun, negara-bangsa juga kuat karena dalam mendapatkan kepastian atas wilayah tertentu dan sekelompok orang tertentu, mereka melakukan kekerasan terhadap orang-orang ini dan orang lain. Negara-bangsa menguniversalkan standar mereka sendiri, dan bahkan mencoba untuk memaksakannya kepada orang lain, sebagaimana dibuktikan dengan kebangkitan fasisme selama awal abad ke-20 di Eropa. Setelah merebut kekuasaan di negara-negara seperti Italia, Jerman, Spanyol, dan Kroasia, gerakan fasis tidak hanya mengobarkan perang secara internasional (yang pada akhirnya mengarah ke Perang Dunia Kedua), tetapi juga melakukan kekerasan di dalam negeri dengan mengucilkan minoritas etis, agama, dan sosial-politik. Lebih jauh, kemajuan teknologi memperumit dunia kehidupan manusia, mempercepat proses pengambilan keputusan sosial-politik. Ini menguntungkan perkembangan elit ilmiah, yang tidak bertanggung jawab langsung kepada publik (karena secara efektif hanya mempengaruhi para elit pengambil keputusan saja-penerjemah), tetapi upaya intelektual mereka untuk merencanakan arah dunia secara sosial sangat mempengaruhi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka (dalam sekala domestik maupun global-penerjemah).

Perspektif Realis Klasik tentang Krisis Migrasi Eropa

Sejak 2011, jutaan orang mengungsi dari Suriah akibat perang saudara di sana. Hal ini diperburuk oleh arus migrasi yang datang dari negara lain di Afrika dan Timur Tengah karena berbagai keadaan politik dan ekonomi. Pada 2015, masalah tersebut telah dinyatakan sebagai krisis di Eropa yang menjadi tujuan bagi banyak migran. Berfokus pada krisis ini, mungkin tampak bukan pilihan yang jelas, tetapi banyak kaum realis yang menjadi bagian dari pengungsi atau migran itu sendiri. Memang, Herz (1984, 9) mencirikan dirinya sebagai 'penjelajah antara semua dunia' *(traveller between all worlds*), dan Morgenthau bahkan menjadi *a double exile'* atau pengasingan ganda (Frankfurter 1937) setelah pengusirannya dari Jerman, dan kemudian diusir lagi dari Spanyol sebelum tiba di Amerika Serikat pada tahun 1937. Di luar itu semua, realisme memberikan wawasan yang berguna tentang krisis ini karena kita dapat menyelidiki kondisi untuk hidup berdampingan secara damai dari perbedaan. Ini penting, karena masalah pengungsi telah diidentifikasi sebagai salah satu alasan mengapa publik Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) dalam referendum 'Brexit' tahun 2016. Ini juga telah berimplikasi pada kebangkitan partai-partai sayap kanan di seluruh Eropa dan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS pada 2016. Pengungsi dan migran secara jelas digambarkan dalam wacana keamanan sebagai ancaman, dan dampak yang dapat diukur.

Mengaitkan karya para realis 'klasik' pertengahan abad ke-20 dengan perkembangan modern ini memungkinkan para ilmuan HI untuk memahami bahwa keamanan dibangun dalam konteks diskursif, sehingga bergantung pada kondisi spasial-temporal. Ini berarti keamanan memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula, dan oleh karena itu bersifat transformatif (Behr 2013, 169). Hal ini menempatkan pemikiran realis ke dalam afinitas (kerumpunan) dengan teori-teori kritis yang tampaknya bertentangan dengannya. Mengingat bahwa kedua pengelompokan menemukan obyek rangsangan ilmiah dalam sumber yang sama, salah satunya adalah dalam Ideology and Utopia (1929) dari Karl Mannheim, hal ini menjadi tidak terlalu mengejutkan. Salah satu konsep kunci dalam buku Mannheim adalah persyaratan pengetahuan. Ini berarti

bahwa pengetahuan selalu terikat pada lingkungan sosio-politik tempatnya beroperasi, yang menekankan bahwa pengetahuan universal itu tidak mungkin. Menerapkan gagasan ini pada krisis pengungsi saat ini, kita memahami bahwa memandang pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan adalah hasil dari keinginan manusia dan agen politik (konstruksi sekuritisasi-penerjemah). Misalnya, krisis pengungsi adalah salah satu pendorong yang dominan Wacana Brexit Inggris, meskipun Inggris menerima kurang dari 40.000 pencari suaka pada tahun 2015 (jumlah yang terlalu sedikit untuk dianggap sebagai suatu 'ancaman' yang serius bagi negara Inggris-penerjemah). Sebagai perbandingan, sekitar 890.000 pengungsi memilih Jerman sebagai tujuan mereka pada tahun yang sama, menjadikan Jerman negara Eropa yang menerima pengungsi terbanyak dari total populasi imigran secara keseluruhan.

Ini bukan untuk mengatakan bahwa proses ini selalu terjadi secara sadar karena kita tidak pernah dapat sepenuhnya yakin bagaimana tulisan atau tindakan kita dianggap oleh orang lain, tetapi realisme klasik dapat membantu kita untuk memahami bahwa manusia bukan hanya objek keamanan tetapi juga subjeknya. Dalam wacana publik, masyarakat memiliki kesempatan untuk meredefinisi substansi keamanan, daripada menyerahkannya kepada elit politik asing dari luar negeri. Wacana-wacana ini dapat berkembang pesat, karena mencakup kepentingan semua orang yang terlibat. Untuk menghindari bahaya yang mengancam ini (ancaman konstruksi yang over sekuritisasi-penerjemah), ilmuan realis menekankan kemungkinan pembelajaran dialogis, seperti yang disebut oleh para sarjana saat ini, untuk meningkatkan potensi yang mengubah wacana ini menjadi 'kebaikan bersama' (dalam arti yang sebenarnya, dan bukan pemaknaan '*common good'* yang eksploitatif seperti para elit kolonialis dan sebagian pemimpin liberalis-penerjemah). Bentuk pembelajaran ini didasarkan pada kemungkinan pertukaran yang berkesinambungan antara pengungsi, pendatang, dan masyarakat lokal dan membutuhkan semua kelompok untuk menunjukkan keterbukaan dan empati serta kemauan untuk mendialogkan posisi masing-masing. Akibatnya, keamanan dapat didefinisikan ulang, dan apa yang dianggap sebagai krisis pada akhirnya dapat dipahami sebagai sebuah kesempatan untuk menciptakan sesuatu 'yang tidak ada sebelumnya, yang tidak diberikan, bahkan tidak pernah

terlintas sebagai objek kognisi atau imajinasi' (Arendt 1961, 151). Ingatlah bahwa realis klasik skeptis terhadap janji negara bangsa modern dan berargumen untuk pembentukan komunitas dunia, yang akhirnya mengarah pada negara dunia. Komunitas global seperti itu akan membantu mengatasi depolitisasi dalam masyarakat modern (baik karena dominasi elit, maupun kekurangan sumberdaya pada masyarakat itu sendiri dalam mengakses arus informasi pengambilan keputusan-penerjemah), dan bahkan realis juga mendukung 'pembela negara global untuk tetap sadar' atau *defenders of the global state to stay sober* (Scheuerman 2011, 150). Ketenangan seperti itu akan terjadi bermanfaat untuk menambah perdebatan akademis dan politik tentang migrasi. Bagaimanapun, akar dari krisis migrasi di Eropa adalah bahwa negara-negara tertentu, dan kelompok-kelompok berpengaruh tertentu di dalamnya, memutuskan untuk menegakkan dinding metafora dan fisik perbatasan mereka dan membatasi (atau memblokir) migran untuk masuk karena menganggap mereka sebagai ancaman keamanan bagi bangsa mereka. Dengan memungkinkan orang berkumpul di tingkat yang berbeda (di tingkat regional dan internasional untuk berdialog secara sehat-penerjemah), lingkungan politik dapat mengekstrapolasi melampaui batas negara, memungkinkan orang untuk bertukar kepentingan secara global dan secara bertahap mengembangkan identitas yang melampaui batas negara. Itu juga memungkinkan untuk mendapatkan gambaran berbeda tentang migran, atau pengungsi, untuk mendapatkan daya tarik, yang akan dapat berfungsi untuk menggantikan gambar negatif isu migrasi yang tersebar luas di Eropa pada 2015.

Fleksibilitas yang ditemukan dalam literatur realis klasik memungkinkan orang untuk mengakomodasi kepentingan manusia yang beragam. Refleksi diri dan keterbukaan pikiran yang dihasilkan membantu lintasan kehidupan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, budaya, sosio-politik atau agama untuk diterima. Dalam ranah politik, orang-orang diakui atas perbedaan mereka dan, melalui diskusi, dibangun kesamaan yang setidak-tidaknya dapat diterima oleh warga negara pada tingkat dasar. Jika ini bisa dilakukan di setiap negara, maka ini pun mungkin untuk dilakukan di tingkat global. Jika tujuan seperti itu dapat dicapai, maka tidak akan ada krisis migrasi di masa depan karena akan ada warga negara

global[14] (*a global citizenry* atau sebuah kewarganegaraan global tunggal adalah dipandang sebagai paradox realisme modern oleh sebagian ilmuan HI, karena sifatnya yang utopis-penerjemah). Para realis klasik tidak langsung sampai pada kesimpulan ini. Sebaliknya, para sarjana seperti Morgenthau dan Niebuhr awalnya skeptis terhadap organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bentuk awal Uni Eropa. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka memberikan ruang (jika digunakan seperti yang mereka harapkan) bagi politik untuk berevolusi secara bertahap, karena berbagai aktor dapat berkumpul secara damai dan bertukar pikiran di tingkat internasional.

Kesimpulan

Dalam bab ini kami telah memperkenalkan perspektif tentang realisme yang mungkin tidak seperti apa yang dapat ditemukan dalam buku teks teori HI lainnya. Ini merupakan bagian dari ambisi kami untuk memperkenalkan perspektif yang lebih bernuansa tentang realisme, untuk membedakannya dari neorealisme, dan untuk menunjukkan bahwa realisme dapat membantu kami mengembangkan kesadaran yang lebih kritis tentang politik internasional. Oleh karena itu, realisme, terutama dalam bentuk klasiknya, masih jauh dari siap untuk tong sampah sejarah teori HI, seperti yang dikemukakan beberapa kritikus yang ekstrem. Ini dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk mempertanyakan beberapa asumsi umum yang dipegang dalam disiplin, mengusulkan solusi untuk beberapa masalah kontemporer dalam hubungan internasional dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

---

[14] *'Kita tidak dapat membayangkan masyarakat tanpa utopia, karena ini akan menjadi masyarakat tanpa tujuan'* (Ricoeur 1986, 283). Ini adalah topik tentang tujuan apa yang kita miliki, sebagai warga global untuk masyarakat dunia? Tapi apa itu 'kewarganegaraan global'? Di laman webnya, Universitas Oslo memberi tahu kita bahwa itu tidak nyata, tetapi terbayangkan secara akal; 'Warga Negara Global adalah orang yang melihat dirinya sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas.' Lihat laman https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-6209-929-6_2 (penerjemah)

20
'ISME' ADALAH JAHAT, TAPI SEMUA MEMUJINYA!
(THE 'ISMS' ARE EVIL. ALL HAIL THE 'ISMS'!)

Alex Prichard

Dalam bab penutup ini, saya ingin menjelajahi beberapa masalah yang muncul dengan mengklasifikasikan teori HI dalam cara yang kami lakukan. Saya ingin membuka dengan masalah; mengapa kita menyebutnya teori politik dunia dan bukan ideologi? Untuk menjawab pertanyaan ini saya akan terlibat dalam sedikit *metatheory*, yaitu, teori tentang teori, untuk mengekspos beberapa kompleksitas dan masalah yang muncul begitu kita berpikir lebih dalam tentang bagaimana 'isme' dapat dan harus digunakan. Inti dari bab ini adalah untuk membantu Anda berpikir secara teoritis tentang bagaimana bab-bab sebelumnya dalam buku ini saling terkait. Dengan kata lain, meskipun Anda mungkin telah melihat karakteristik yang sama dari berbagai 'isme', dalam bab ini saya ingin memberi Anda alat untuk memahami mengapa kesamaan itu ada.

Singkatnya, argumennya adalah bahwa teori HI harus dipahami tidak hanya sebagai teori tetapi juga sebagai ideologi. Kedekatan dan perbedaan antara teori dan ideologi akan menjadi lebih jelas seiring kemajuan kita, tetapi poin kunci yang ingin saya buat adalah, bahwa ketika kita memahami elemen ideologis dalam teori HI, kita lebih mampu untuk berpikir kritis tentang usaha membagi HI sebagai sekumpulan isme pada tempat pertama.

Bab ini dimulai dengan gambaran singkat tentang naik turunnya isme dalam studi politik dan teori HI. Lucunya, bagi banyak orang kita dianggap hidup di era pasca-ideologis, dan fakta para ahli teori HI berbicara tentang teori dan bukan ideologi adalah bukti nyata dari hal itu. Saya kemudian membahas beberapa alasan mengapa kita harus menolak isme

sebagai cara untuk membagi pemikiran filosofis dalam HI, dan menunjukkan bagaimana analisis konsep dan kritik ideologi adalah alternatif yang baik.Tetapi saya menutup dengan menyatakan bahwa kita membutuhkan ideologi, dan isme kita tidak hanya untuk membantu membingkai penjelasan tentang politik dunia tetapi juga sebagai bahan mentah untuk mengungkap asumsi politik dan moral yang digunakan para sarjana. Mudah-mudahan, bab terakhir ini mendorong Anda untuk bermain-main secara kreatif, dan bereksperimen dengan teori HI.

Sebuah 'isme' adalah sufiks yang menunjukkan sekumpulan keyakinan, opini, dan/atau nilai yang kurang lebih sistematis tentang dunia. Sufiks ditambahkan ketika sesuatu berubah dari yang cukup spesifik menjadi mencakup pandangan, keyakinan, dan sikap yang lebih luas atau umum. Misalnya, presiden Filipina Rodrigo Duterte mungkin memiliki pandangan umum yang unik baginya, tetapi sampai dia atau orang lain menyusunnya menjadi pandangan dunia yang koheren, kita tidak mungkin mulai berbicara tentang Duterteisme dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan terhadap Marxisme misalnya. Isme menjadi lebih luas ketika lebih dari satu orang berkontribusi atau mengembangkan kumpulan pandangan awal. Marxisme kontemporer menggabungkan beragam ide dan teori, pendekatan, epistemologi, dan ontologi. Memang, isme-isme lain juga menambahkan sebagian besar Marxisme ke dalam isme mereka sendiri, terutama untuk membedakannya dari subtipe lain. Misalnya, bisa ada Marxisme ortodoks atau heterodoks atau feminisme liberal dan feminisme Marxis, dan sebagainya. Singkatnya, dalam ilmu politik, isme umumnya menunjukkan ideologi dan penyempurnaannya.

Namun dalam HI, kami menganggap isme sebagai teori, bukan ideologi, yang itu tampak aneh. Mengapa kita menyebut Marxisme sebagai teori dalam HI, tetapi sebagai ideologi dalam ilmu politik? Ini bukan hanya masalah semantik. Faktanya, ini masuk ke inti dari apa yang dipikirkan HI tentang dirinya sendiri pada periode di mana ia muncul sebagai ilmu sosial yang berdiri sendiri pada pergantian abad ke-20. Alasan sarjana HI berbicara tentang teori daripada ideologi pada saat ini adalah karena pada umumnya ada anggapan bahwa hubungan internasional tidak dapat menerima visi total tentang kehidupan yang baik yang kita temukan terelaborasi dalam arsitektur ideologi utama (Wight 1966). Kaum realis

membanggakan diri mereka atas kemampuan mereka untuk menembus kabut moral politik dunia ke masalah-masalah politik dunia yang abadi. Realisme bukanlah ideologi, tetapi semakin dilihat sebagai sekumpulan kebenaran universal sederhana tentang politik.

Kecenderungan untuk membedakan teori HI dari ideologi ini diperkuat pada akhir Perang Dingin ketika hampir semua orang juga menjadi pasca-ideologis. Ini memiliki sejumlah inti pemahaman. Berakhirnya, Perang Dingin menggalang konsensus luas bahwa liberalisme bukan lagi sebuah ideologi, melainkan diberikan dalam struktur sejarah, yang menurut Francis Fukuyama (1989), sekarang mulai membuahkan hasil yang menandakan 'akhir sejarah' *(an end of history*). Uni Soviet, kekuatan kontra-hegemonik yang menawarkan satu-satunya alternatif yang ada untuk liberalisme Barat, telah jatuh. Bagi banyak orang, seperti Fukuyama, ini berarti bahwa kita memasuki era pasca-ideologis, era di mana dominasi liberalisme dan matinya penantang utamanya, fasisme dan komunisme, yang berarti tidak ada ideologi lain di sekitarnya, membuat liberalisme sebagai kebenaran (truth) yang terungkap di akhir sejarah. Namun, sebagian dari penjelasan liberalisme ini melibatkan konsepsi yang sangat khusus tentang rasionalitas manusia, di mana memaksimalkan kepentingan pribadi Anda adalah sebagai perilaku yang rasional dan merupakan gambaran universal dari jiwa manusia.

Institusionalisme, individualisme metodologis, dan rasionalisme semuanya merupakan konsep teoretis. Ini adalah konsep yang hanya 'melakukan pekerjaan' (*to do a job*), kata-kata yang sedikit diinvestasikan di dalamnya secara politik. Mereka yang menyebarkan kata-kata seperti itu biasanya bangga dengan pendekatan non-ideologis mereka terhadap pengembangan teori, dengan menyatakan bahwa konsep seperti ini adalah alat ilmiah. Alat-alat ini memotong alur ideologi untuk melihat apa yang sebenarnya memotivasi orang. Menurut pandangan para 'rasionalis' jenis ini, bukanlah komunisme tetapi kepentingan pribadi lah yang memotivasi Uni Soviet. Lebih jauh lagi, bukanlah masalah tentang ideologi mana yang kalah/tunduk secara global, dan mana yang kemudian akan menertibkan dunia, akibat konflik antara kaum Komunis dan kaum Kapitalis, tetapi sebenarnya itu adalah klaim yang agak lebih biasa terkait dengan 'masalah

institusi' (Keohane dan Martin 1995) dalam membantu menyatukan kepentingan mereka (Jahn 2009).

Orang mungkin berpikir bahwa kaum kiri akan tetap bertahan dalam kritiknya untuk menutupi kandungan ideologis ilmu pengetahuan liberal, tetapi anehnya, sebagian besar kaum kiri juga mengadopsi variasi pemikiran post-ideologis mereka sendiri, sekitar waktu yang sama. Teori poststrukturalis lepas landas pada akhir Perang Dingin. Salah satu kritik paling signifikan terhadap ideologi yang dikembangkan oleh kaum poststrukturalis menjadikannya sebagai visi dunia dan sejarah yang lebih signifikan sebagai mode kekuasaan, daripada pernyataan yang secara deskriptif akurat tentang dunia dan sejarahnya. Liberalisme, dan neoliberalisme, dideskripsikan ulang sebagai mode pemerintahan (sendiri) daripada penjelasan tentang bagaimana dunia bekerja. Begitu kita menerima asumsi tentang rasionalitas, kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri yang seharusnya hanya dijelaskan oleh teori itu. Ideologi menghasilkan subjek politik. Dengan cara ini, ideologi dilihat secara inheren mengatur dan mendominasi, yang artinya, ideologi itu bukan deskripsi tentang dunia, tapi cara membuat kita melihat dan bertindak di dalamnya.

Pada akhir 1990-an, perubahan filosofis dan sejarah dunia yang bertentangan ini telah pecah di dalam Hubungan Internasional. Di sini, ideologi digambarkan kembali sebagai 'teori', yang detailnya dapat Anda akses di halaman-halaman sebelumnya dari buku ini. Sedikit saja kontributor yang berbicara tentang berbagai teori mereka sebagai ideologis. Melakukannya berarti mengundang berbagai kritik. Merangkum kritik di atas saja, ideologi dipandang tidak ilmiah, mendominasi, dan bermoral. Singkatnya, selesai sudah teori yang akan dibangun oleh seseorang (artinya, apabila ia menyebutnya sebagai ideologi, maka runtuhlah bangunan ilmiah murninya-penerjemah). Teori, sebaliknya, bersifat ilmiah, relatif dapat diuji, setidaknya secara nominal didepolitisasi, dan tidak memiliki visi dunia secara historis dan totalitas visi tentang kehidupan yang baik, yang biasanya dikaitkan dengan ideologi. Tetapi, di HI, setiap isme telah mengembangkan industri rumahan teori-nya sendiri, dengan jurnal spesialis dan program gelar sendiri. Terlepas dari ini (mungkin karena itu, siapa tahu!), hampir tidak ada lagi yang memperdebatkan teori-teori itu.

Perdebatan besar yang menjadi inti dari disiplin di masa lalu tampaknya telah memudar, meskipun ada semakin banyak bukti bahwa mereka tidak pernah benar-benar menjadi perdebatan, apalagi hebat (Wilson 1998)! Ironisnya, isme yang kita hadapi dalam buku ini tidak pernah lebih mengakar di lapangan, tetapi juga tidak begitu sedikit digunakan sebagai senjata oleh berbagai tokoh protagonisnya. Kita telah, menurut satu pandangan baru-baru ini, sampai pada 'akhir teori HI' (Dunne, Hansen dan Wight 2013).

Jika kita tidak berbicara tentang ideologi dalam teori HI, apa yang kita bicarakan? Bagi David Lake (2011), kita berbicara tentang sekte akademis yang telah berkembang di sekitar setiap isme. Sekte-sekte ini menuntut para sarjana tingkat lanjut, menempatkan diri mereka ke dalam sebuah kotak, mengadopsi sebuah isme seumur hidup dan kemudian melanjutkan untuk mengkhususkan diri dalam ritualnya dan kode-kode dari 'teologi' ini (mewakili pandangan yang skeptis tentang perkembangan ilmiah dari sebuah ideologi-penerjemah). Akhirnya, kemampuan para cendekiawan ini untuk berpikir melampaui atau melintasi dan di antara isme-isme begitu saja menghilang. Dalam upaya kami untuk memperbarui setiap isme untuk memenuhi tuntutan peristiwa 'dunia nyata' (*real world*) terbaru, isme-isme tersebut menjadi semakin terdefinisi secara sempit, atau direntangkan menjadi begitu luas didefinisikan sehingga menjadikannya sebagai ideologi praktis. Bagaimanapun, mereka terlepas dari konteks historis, sosial, dan geopolitik tempat mereka muncul. Kami kemudian mulai mengulangi frasa seperti 'masalah institusi penting' (*institutions matter)* tanpa memahami betapa pentingnya hal itu selama Perang Dingin, dan mungkin penting dengan cara yang berbeda saat ini. Ini dikenal sebagai 'reifikasi' baru, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, Lake memahami teori dengan cara yang membuat perbedaan kategoris antara ideologi, teologi, filosofi, dan teori. Bagi Lake, isme adalah kategori pemikiran yang jauh lebih luas daripada teori. Teori menempatkan hubungan antara variabel dan menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, sementara tradisi adalah pertemuan ide yang lebih berantakan dan tidak sistematis yang perlu diluruskan orang untuk menarik hipotesis tersebut.

Misalnya, baik liberalisme maupun realisme berasal dari tradisi ideologis yang lebih luas dan lebih lama, tetapi untuk menjadikannya teori

HI, beberapa prinsip inti harus diidentifikasi. Dalam hal ini, kedua tradisi memiliki pandangan yang sama bahwa anarki dan kepentingan material adalah ciri utama politik dunia, tetapi mereka menambahkan variabel tambahan untuk menghasilkan teori yang berbeda. Dalam mengejar pola umum ini dari 1) menguraikan asumsi umum, 2) mengajukan hubungan konsep-konsep teoretis, 3) menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, tidak ada pertanyaan apa yang dianggap sebagai teori, apa yang dianggap sebagai bukti dan apa yang dianggap sebagai materi pelajaran HI yang layak menyempit secara eksponensial. Lake berasumsi bahwa teori HI bercita-cita menjadi ilmiah dalam arti yang sangat sempit dari kata itu (Lake 2011, 470), dan kemudian dia mengatakan bahwa teori yang tidak tepat sebenarnya tidak sesuai untuk HI. Pertanyaan meta-teoretik (sekali lagi, teori tentang teori) seperti apakah sejarah memiliki titik akhir, atau apakah sejarah dibentuk oleh kekuatan material atau oleh ide, adalah pertanyaan tidak ilmiah yang tanpa jawaban akhir. Sebaliknya, kita harus melakukannya fokus pada apa yang disebut sebagai 'teori tingkat menengah' (*mid-level theory*), yaitu, hipotesis yang dapat diuji terhadap bukti empiris; misalnya, pertanyaan seperti lembaga mana yang paling baik untuk membatasi kekerasan? Beginilah cara Lake berpikir kita akan memahami bagaimana sebenarnya dunia bekerja, bukan melalui filsafat spekulatif.

Permintaan teori HI untuk mempertanyakan pertanyaan yang tampak lebih sederhana ini agak bermasalah. Solusi Lake meminta kita untuk mengabaikan sifat ideologis mendalam dari konsep yang kita gunakan secara rutin dalam teori HI. Karena kita tidak dapat lagi mengajukan pertanyaan spekulatif tentang koherensi asumsi latar belakang dan konsep, seperti apa itu kapitalisme, misalnya, kita akhirnya memperlakukan stok teori HI yang sudah ada sebagai sejauh mana materi yang mungkin kita perlukan untuk menarik hipoteses yang dapat diuji. Fakta bahwa hanya ada sedikit konsensus tentang apa itu negara, dan apakah itu institusi terbaik untuk membatasi kekerasan, sangat signifikan sebenarnya untuk didiskusikan secara mendalam.

Paradoksnya, kritik Lake membuat teori HI, terutama yang lebih esoterik (jlimet, sulit dipahami dan diverifikasi-penerjemah), terdengar sangat mirip ideologi, tetapi intinya adalah bahwa semua teori adalah

ideologi. Apa yang tidak ingin dia sadari adalah bahwa pendekatan yang dia sukai itu sendiri tertanam secara dalam dengan gagasan standar sains yang juga ideologis, positivisme (isme lain). Dengan catatan ini, pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang dapat diverifikasi secara empiris, dan hanya apa yang dapat kita hitung sebagai pengalaman, dan sebagai bukti nyata. Tetapi kita tidak dapat mengetahui hal ini dari kajian Lake, kecuali kita memiliki pemahaman yang luas tentang ideologi ilmiah juga, seperti positivisme dan empirisme, sehingga kita akan secara tidak sadar atau sadar menjadi alat ilmiah untuk mengungkap asumsi yang mendasarinya (Jackson 2011). Tidak ada yang diperoleh dengan sekedar membalikkan tangan sehingga umum dalam studi HI Anglo-Amerika kontemporer biasa menyatakan segala sesuatunya, kecuali sains sebagai ideologis (penolakan ideologi sebagai sain ilmiah-penerjemah).

Sebelum mengajukan jalan keluar dari masalah ini, mari kita telaah dulu beberapa masalah yang muncul ketika seorang sarjana tidak berpikir jernih tentang apa itu isme dan untuk apa kita menggunakan isme. Orang mungkin berasumsi dari penjelasan di atas bahwa HI lebih baik tanpa isme-isme-nya, dan dalam beberapa hal itu mungkin benar. Tidak ada yang bisa diperoleh bagi seorang peneliti dengan berpikir bahwa isme adalah generator hipotesis mandiri. Kami juga tidak harus menyambut teori yang dimaksudkan untuk dapat menjelaskan segalanya, menawarkan solusi untuk memperbaiki dunia sebagai kesimpulan umum. Saya pikir siapa pun akan curiga tentang ini. Tapi ada masalah nyata dengan memikirkan tentang isme dengan cara ini sejak awal, dan kita tidak perlu melakukannya.

Bagaimana jika kita mengubah apa yang kita pikirkan tentang ideologi? Apakah ini membantu kita memikirkan kembali isme di HI juga?

Ideologi adalah hal-hal yang menakjubkan, keropos, kompleks, dan berkembang yang memberi kita wawasan unik tentang struktur pemikiran kolektif. Dua pendekatan terkenal terhadap ideologi harus membuka apa yang saya maksud di sini.

Untuk pendekatan pertama, mari kita pertimbangkan ideologi sebagai jaringan konsep, dengan konsep inti bertindak sebagai simpul yang disambungkan dan diputus periferal saat berkembang seiring waktu (Freeden 1996). Jadi, misalnya, sementara kebebasan mungkin menjadi

pusat liberalisme, konsep periferal seperti supremasi kulit putih atau demokrasi telah surut dan semakin penting seiring waktu (masing-masing). Demikian juga, kita mungkin harus memahami bahwa konsep digunakan dalam konteks sejarah tertentu, yang berarti konsep tersebut mungkin memiliki arti yang berbeda dengan cara kita menggunakannya sekarang (Berenskoetter 2016). Konsep seperti negara itu sendiri adalah generatif dari isme, sementara makna tertentu dari konsep tertentu hanya dapat dipahami dalam istilah isme itu.

Misalnya, dapatkah kita benar-benar memahami apa itu liberalisme tanpa pemahaman tentang apa yang dimaksud oleh kaum liberal kontemporer dengan kebebasan? Dan mana yang lebih dulu, ideologi atau konsepnya? Ini bukan argumen yang sembrono, karena kecuali kita dapat secara memadai memahami kekhususan historis dari bahasa yang kita gunakan, kita akan tergoda untuk berasumsi bahwa begitulah bahasa kita selalu digunakan, membuat kita 'terpesona'[15] oleh masa sekarang (Skinner 1998).

Begitu kita mulai menginterogasi konsep-konsep kunci, logika, koherensi, dan hubungannya dengan konsep lain, kita dapat memetakan hubungan ideologi satu sama lain. Misalnya, realisme dan liberalisme berbagi konsep inti seperti anarki, negara, kekuasaan material, dan sebagainya. Tetapi kepentingan relatif dari masing-masing hanya dapat benar-benar dipahami setelah kita melihat bagaimana konsep 'periferal' dan 'inti' lainnya diterapkan dalam kaitannya satu sama lain, seperti kerja sama atau kapitalisme, institusi atau hegemoni. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda setuju dengan beberapa aspek ideologi tetapi tidak dengan yang lain, dan menderita tentang bagaimana Anda dapat memahami kesetiaan yang terbelah itu (menerima sebagian dan menolak sebagain lain dari gagasan suatu ideologi-penerjemah)? Cara memahami struktur

---

[15] Misalnya, penggunaan istilah 'demokrasi' yang biasa diterjemahkan dengan 'dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat' itu, sesungguhnya dalam masa awal kemerdekaan Amerika Serikat, yang dimaksud dengan 'rakyat' dalam konstitusi negara itu adalah bukan setiap penduduk AS saat itu, tetapi hanya mereka yang berkulit putih, laki-laki, pembayar pajak dan usianya di atas 21 tahun. Sebuah nilai asal yang sangat racis dan diskriminatif, namun menjadi sangat 'mempesona' di era modern sekarang ini. Lihat juga laman features New York Timeshttps://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/black-history-american-democracy.html (penerjemah)

ideologi ini dengan lebih baik menunjukkan kepada kita permadani ideologi yang saling berhubungan, sesuatu yang perlu kita biasakan, dan itu usaha yang bermanfaat bagi para sarjana HI untuk melakukannya pada semua teori yang disajikan dalam buku ini.

Jadi, ideologi, seperti halnya teori, adalah permadani konsep. Tapi, mari kita mundur selangkah lagi dan terlibat dalam beberapa kritik ideologi untuk menjelajahi pendekatan kedua. Apa yang memungkinkan untuk memimpikan teori seperti realisme atau liberalisme? Dengan pengecualian pascakolonialisme dan feminisme, sebagian besar teori HI, secara umum, dikembangkan di Barat oleh pria kulit putih, terutama dari 1–2% berpenghasilan tertinggi, atau kelas menengah ke atas. Faktanya, munculnya teori feminis dan pascakolonial dibutuhkan untuk menunjukkan hal ini. Untuk melakukan ini, para ahli teori ini harus mengembangkan narasi kompleks tentang dunia, dan bagaimana hal itu tergantung bersama dengan mengambil konsep inti dan asumsi arus utama. Berlawanan dengan Lake, hanya karena feminis dan ahli teori postkolonial (antara lain) menyelidiki konsep dan kategori eksistensial, maka perkembangan teoritis menjadi mungkin diupayakan.

Dan, ini melibatkan pengungkapan teori HI sebagai ideologis. Beginilah cara berpikir dialektis bekerja. Ini mengeksplorasi kondisi kemungkinan dari cara berpikir tertentu, apakah itu koherensi konseptual, kekhususan sejarah atau apa pun, dan kemudian mendorongnya melampaui itu.Tidaklah penting apakah teori HI itu benar atau tidak. Yang penting adalah apakah mereka membantu membentuk pemikiran kita sehingga dapat memandu tindakan, ilmiah, politik atau teologis. Karena mereka memandu tindakan, membentuknya, membatasi dan memahaminya sehingga ideologi dan teori harus terus diteliti. Ideologi adalah latar belakang kognitif, struktur moral yang membentuk masyarakat dan mencerminkan perbedaan mereka, sehingga memahami cara kerjanya akan memberi tahu kita banyak hal tentang dunia tempat kita tinggal.

Mari kita coba sesuatu; nyalakan televisi Anda. Apakah tidak ada kesamaan yang mencolok dengan hal-hal yang disiarkan di kebanyakan negara, terutama negara Barat? Bukan hanya karena ada banyak program tentang memasak dan real estat, tetapi asumsi mendasar di balik program tersebut memiliki resonansi tertentu. Anda tidak akan menemukan

pembawa acara real estate yang meratapi struktur kapitalisme yang tidak adil atau menyatakan bahwa properti adalah pencurian! Agak, ada perasaan yang sama tentang logika kepemilikan properti yang tak terhindarkan, atau bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan harga setinggi mungkin. Pikirkan tentang cara anak laki-laki dan perempuan secara berbeda di tarik dalam kartun yang mereka tonton, dengan peran gender hampir secara rutin diberikan daripada dipertanyakan.

Seperti yang dikemukakan oleh Steve Smith (2007, 8), 'pilihan akun non-teoritis dunia sama sekali tidak tersedia' (*the option of non-theoretical accounts of the world is simply not available*). Karena itu, Anda perlu membiasakan diri dengan apa itu teori, cara kerjanya, dan bagaimana teori itu membentuk cara Anda memandang dunia. Kritik ideologi mengeksplorasi cara-cara di mana komunikasi secara umum dibatasi dan dilingkungi oleh gagasan, konsep, sikap dan teori yang diterima begitu saja, atau cara-cara yang tanpa mempertanyakan bagaimana bisa terikat pada teori dan bergantung pada teori. Teori, kemudian, teori HI juga, dengan sendirinya merupakan refleksi ideologi. Mereka harus menjadi sasaran kritik dengan cara yang sama.

Kesimpulan

Pikirkan tentang isme dan pemahaman yang luas tentang mereka dalam tiga cara; pertama, isme adalah ideologi dan teori HI juga jenuh secara ideologis. Ini bukanlah hal yang buruk. Begitu kita mengetahui hal ini, kita harus mampu menginterogasi koherensi internal ideologi dan membandingkan kebaikannya dengan yang lain.

Kedua, ideologi itu sendiri membentuk masyarakat tempat kita hidup. Jadi, kita harus mampu memahami masyarakat dan politik dunia kita dengan lebih baik dengan mengeksplorasi cara-cara di mana ideologi membentuk dan menyusun cara orang hidup dan bertindak. Jadi, dalam banyak hal, teori HI mencerminkan cara hidup dan tindakan ini juga. Dengan demikian, kita dapat menganggap teori HI sebagai cerminan ideologis dari dunia di sekitar kita. RBJ Walker (1993, 6) telah membuat saran yang kontroversial bahwa 'teori hubungan internasional lebih menarik sebagai aspek politik dunia kontemporer yang perlu dijelaskan

daripada sebagai penjelasan politik dunia' (*theories of international relations are more interesting as aspects of contemporary world politics that need to be explained than as explanations of world politics).* Anda mungkin tidak ingin melangkah sejauh itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang netral secara politis atau ideologis tentang teori HI , dan menempatkan teori HI dalam konteks historis dan intelektualnya memperlihatkan hal ini secara permanen.

Ketiga, ideologi bisa salah, nilai-nilainya tercela atau menjijikkan, asumsi intinya tidak masuk akal. Ini karena mereka digunakan oleh orang-orang yang praktik dan politiknya mungkin tidak kita setujui. Bagi Robert Cox (1981, 128), teori tidak hanya selalu 'untuk seseorang dan untuk beberapa tujuan', tetapi juga pasti mencerminkan bias kelas. Kita perlu menyadari hal ini dan menundukkan teori ke berbagai kritik. Memahami Marxisme akan menjadi prasyarat yang tak terpisahkan dari ini. Melakukan hal ini tidak mungkin jika kita menyangkal teori-sebagai-ideologi itu ada, atau jika kita mengabaikan seberapa dalam implikasinya dalam struktur ideologis cara hidup dan berpikir modern kita.

Tidak ada yang diperoleh dengan menolak isme kecuali kita pada awalnya memahami kompleksitas dari apa yang kita tolak. Isme-isme itu mungkin jahat, tetapi kita harus memberi penghormatan kepada mereka untuk mengembangkan refleksi kritis yang kita butuhkan untuk melampaui mereka.

Referensi

Acharya, Amitav. (2014). 'Global IR and Regional Worlds: Beyond Sahibs and Munshis – A New Agenda for International Studies', Presidential Address to the 55th Annual Convention of the International Studies Association, Toronto, 26–29 March.

Acharya, Amitav. (2016). '"Idea-shift": How Ideas From the Rest are Reshaping Global Order', *Third World Quarterly* 37 (7): 1156–1170.

Acharya, Amitav and Barry Buzan. (2010). 'Why is There No Non-Western International Relations Theory? An Introduction', in *Non-Western International Relations Theory Perspectives on and beyond Asia,* edited by Amitav Acharya and Barry Buzan, 1–25. Oxon and New York: Routledge.

Agnew, John. (1994). "The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory', *Review of International Relations* 1(1): 53–80.

Archibugi, Daniele. (2004). 'Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention'. *Alternatives 29 (1)*: 1–22.

Arendt, Hannah. (1961). *Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought*. London: Faber & Faber.

Ayoub, Phil and David Paternotte, eds. (2014). *LGBT Activism and the Making of Europe: A Rainbow Europe?* Palgrave: New York.

Bairoch, Paul. (1993). *Economics and World History: Myths and Paradoxes*. New York: Harvester Wheatsheaf.

Behera, Navnita Chadha. (2010). 'Re-Imagining IR in India', in *Non-Western International Relations Theory Perspectives on and beyond Asia,* edited by Amitav Acharya and Barry Buzan, 92–116. Oxon and New York: Routledge.

Behr, Hartmut. (2013) 'Security Politics and Public Discourse: A Morgenthauian Approach', in *Interpreting Global Security,* edited by M. Bevir, O. Daddow, and I. Hall, London: Routledge.

Beitz, Charles. (1975). 'Justice and International Relations', *Philosophy and Public Affairs* 4 (4): 360–389.

Berenskoetter, Felix, ed. (2016). *Concepts in World Politics*. London: Sage.

Biermann, Frank. (2001). 'The Emerging Debate on the Need for a World Environment Organization: A Commentary', *Global Environmental Politics* 1 (1): 45–55.

Bigo, Didier, Philippe Bonditti and Christian Olsson. (2010). 'Mapping the European Field of Security Professionals', in *Europe's 21st Century Challenge: Delivering Liberty*, edited by Didier Bigo, Sergio Carrera, Elspeth Guild and R. B. J. Walker, 49–64. London: Routledge.

Biswas, Shampa (2014). *Nuclear Desire: Power and the Postcolonial Nuclear Order*. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.

Blake, Michael. (2001). 'Distributive Justice, State Coercion, and Autonomy', *Philosophy and Public Affairs* 30 (3): 257–296.

Booth, Kenneth. (1991). 'Security and Emancipation', *Review of International Studies* 17(4): 313–326.

Booth, Kenneth. (1997). 'Security and Self: Reflections of a Fallen Realist', in *Critical Security Studies*, edited by K. Krause and J. C. Williams. London: UCL Press.

Boswell, Thomas. (2001). 'In Disbelief: A Suspension of American Innocence', *Washington Post*, 12 September: D01.

Boyd, Charles. G. (2001). 'Vulnerable to Hate', *Washington Post*, 12 September: A29.

Brock, Gillian. (2010). *Global Justice: A Cosmopolitan Account.* Oxford: Oxford University Press.

Brown, Garrett Wallace. (2012). 'Distributing Who Gets What and Why: Four Normative Approaches to Global Health', *Global Policy* 3 (3): 292–302.

Bull, Hedley. (1977). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. London: Macmillan.

Butler, Judith. (2003). 'Violence, Mourning, Politics', *Studies in Gender and Sexuality* 4(1): 9–37.

Butler, Judith. (1990). *Gender Trouble*. New York: Routledge.

Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner.

Caney, Simon. (2010). 'Climate Change, Human Rights and Moral Thresholds', in *Climate Ethics: Essential Readings,* edited by Stephen Gardiner, Simon Caney, Dale Jamieson and Henry Shue, 163–180. Oxford: Oxford University Press.

Caney, Simon. (2006). *Justice Beyond Borders.* Oxford: Oxford University Press.

Chowdhry, Geeta and Sheila Nair, eds. (2002) *Power, Postcolonialism and International Relations: Reading Race, Gender and Class*. New York: Routledge.

Chun, Chaesung. (2010). 'Why is There No Non-Western International Relations Theory? Reflections on and from Korea', in *Non-Western International Relations Theory Perspectives on and beyond Asia,* edited by Amitav Acharya and Barry Buzan, 69–91. New York: Routledge.

Coomaraswamy, Radhika. (2015). *Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325.* New York: UN Women.

Corntassel, Jeff. (2008). 'Toward Sustainable Self-Determination: Rethinking the Contemporary Indigenous-Rights Discourse', *Alternatives* 33 (1): 105–132.

Cox, Robert W. and Jacobson, Harold. K. (1977). 'Decision Making', *International Social Science Journal* 29(1): 115–135.

Cox, Robert W. (1981). 'Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory', *Millennium – Journal of International Studies* 10 (2): 126–155.

Cozette, Murielle. (2008) 'Reclaiming the Critical Dimension of Realism: Hans J. Morgenthau and the Ethics of Scholarship', *Review of International Studies* 34(1): 5–27.

Crist, Valine. (2014). 'A Peace of Mind: Haida Heiltsuk Affirm Historic Relationship', *Haida Laas: Newsletter of the Council of the Haida Nation*. Pp. 8–10.

Deudney, Daniel and G. John Ikenberry. (1999). 'The Nature and Sources of Liberal International Order'. *Review of International Studies* 25 (2): 179–196.

Dunne, Tim, Lene Hansen and Colin Wight. (2013). 'The End of International Relations Theory?', *European Journal of International Relations* 19(3): 405–425.

Dyer, Hugh. (2014). 'Climate Anarchy: Creative Disorder in World Politics', *International Political Sociology* 8 (2): 182–200.

Edkins, Jenny. (2006). 'The Local, the Global and the Troubling', *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 9(4): 499–511.

Enloe, Cynthia. (1989). *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. London: Pandora.

Fanon, Frantz. (1967). *Black Skin, White Masks*. New York: Grove Press.

Fierke, Karin M. (2015). *Critical Approaches to International Security*, 2nd ed. Cambridge: Polity Press.

Finnemore, Martha. and Kathryn Sikkink. (1998). 'International Norm Dynamics and Political Change', *International Organization* 52(4): 887–917.

Foucault, Michel. (1976). *History of Sexuality 1*. New York: Penguin.

Foucault, Michel. (1984). 'The Order of Discourse', in M. Shapiro, *Language and Politics*. Oxford: Basil Blackwell.

Fraser, Nancy. (1995). 'From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a "Post-Socialist" Age', *New Left Review* 212: 68–93.

Frankfurter, Felix. (1937) 'Letter to Nathan Greene', 9 December. Container 22, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, DC.

Freeden, Michael. (1996). *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*. Oxford: Clarendon.

Galston, William. A. (2010) 'Realism in Political Theory', *European Journal of Political Theory* 9 (4): 385–411.

Goodin, Robert. (1992). *Green Political Theory*. Cambridge: Polity.

Gramsci, Antonio. (1998). *Selections from the Prison Notebooks*, London: Lawrence & Wishart.

Harris, Paul. (2010). *World Ethics and Climate Change: From International to Global Justice.* Edinburgh: Edinburgh University Press.

Handrahan, Lori. (2004). 'Conflict, Gender, Ethnicity and Post-Conflict Reconstruction', *Security Dialogue* 35 (4): 429–445.

Hardin, Garret. (1968). 'The Tragedy of the Commons'. *Science* 162: 1243–1248.

Harvey, David. (2001). *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Harvey, David. (2006). *Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development*. London and New York: Verso.

Harvey, David. (2009). *Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom*. New York: Columbia University Press.

Hayden, Patrick. (2010). 'The Environment, Global Justice and World Environmental Citizenship' in *The Cosmopolitanism Reader*, edited by Garrett W. Brown and David Held, 351–372. Cambridge: Polity Press.

Hayward, Tim. (2007). 'Human Rights Versus Emission Rights: Climate Justice and the Equitable Distribution of Ecological Space', *Ethics and International Affairs* 21 (4): 431–450.

Herbert, Bob. (1994) 'In America; Terror in Toyland'. *New York Times*, December 1. Available at www.nytimes.com/1994/12/21/opinion/in-america-terror-in-toyland.html

Herz, John. (1951) *Political Realism and Political Idealism*. Chicago: University of Chicago Press.

Herz, John. (1984) *Vom Überleben: Wie ein Weltbild entstand*. Düsseldorf: Droste.

hooks, bell. (2000). *Feminist Theory: From Margin to Center*. Cambridge, MA: South End Press.

Huntington, Henry P. (2013). 'A Question of Scale: Local versus Pan-Arctic Impacts from Sea-Ice Change', in *Media and the Politics of Arctic Climate Change: When the Ice Breaks*, edited by Miyase Christensen, Annika E. Nilsson and Nina Wormbs, 114–127. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hutchings, Kimberly. (2001). 'The Nature of Critique in Critical International Relations Theory', in *Critical Theory and World Politics*, edited by Richard Wyn Jones, 79–90. Boulder and London: Lynne Rienner.

Inoguchi, Takashi. (2007). 'Are There Any Theories of International Relations in Japan?', *International Relations of the Asia-Pacific* 7 (3): 369–390.

Jackson, Patrick Thaddeus. (2011). *The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and its Implications for the Study of World Politics*. London: Routledge.

Jahn, Beate. (2009). 'Liberal Internationalism: From Ideology to Empirical Theory – and Back Again', *International Theory* 1(3): 409–438.

Kaldor, Mary. (2010). 'Humanitarian Intervention: Toward a Cosmopolitan Approach', in *The Cosmopolitanism Reader*, edited by Garrett W. Brown and David Held, 334–350. Cambridge: Polity Press.

Katzenstein, Peter. J. (1996). ***The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics***. New York: Columbia University Press.

Keohane, Robert O. and Lisa L. Martin. (1995). 'The Promise of Institutionalist Theory', ***International Security*** 20(1): 39–51.

King, Hayden. (2015). 'The Problem with "Indigenous Peoples": Re-considering International Indigenous Rights Activism', in ***More Will Sing Their Way to Freedom: Indigenous Resistance and Resurgence***, edited by Elaine Coburn, 167–183. Halifax: Fernwood Publishing.

Krummel, John W. M. (2015). ***Nishida Kitarō's Chiasmatic Chorology: Place of Dialectic, Dialectic of Place***. Bloomington: Indiana University Press.

Lake, David A. (2011). 'Why "isms" Are Evil: Theory, Epistemology, and Academic Sects as Impediments to Understanding and Progress', ***International Studies Quarterly*** 55(2): 465–480.

League of Nations. (1923). 'Petition to the League of Nations from the Six Nations of the Grand River', communications by the Government of the Netherlands, document C.500.1923.VII.

Lebow, Richard. N. (2003). ***The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests, and Orders.*** Cambridge: Cambridge University Press.

Lebow, Richard. N. (2011) 'German Jews and American Realism', ***Constellations*** 18(4): 545–566.

Lefebvre, Henri. (1991). ***The Production of Space***, translated by Donald Nicholson Smith. Oxford: Blackwell.

Link, Arthur S. (1956). ***Wilson: The New Freedom***, vol. 2. Princeton: Princeton University Press.

Little Bear, Leroy, Ervin Carlson, Angela Grier, Chief Earl Old Person and Tommy Christian (2014). 'Historic Treaty: Bring Buffalo Home, Heal the Prairie', ***LiveScience***. Available at www.livescience.com/47998-tribal-treaty-to-restore-territory-american-bison.html

Lu, Peng. (2014). 'Pre-1949 Chinese IR: An Occluded History', ***Australian Journal of International Affairs*** 68 (2): 133–155.

Machiavelli, Nicollò. (1532). *The Prince*. The Harvard Classics, vol. XXXVI. Available at www.bartleby.com/36/1/prince.pdf

MacKenzie, Megan. (2010). 'Securitization and de-Securitization: Female Soldiers and the Reconstruction of Women in Post-Conflict Sierra Leone', in *Gender and International Security: Feminist Perspectives*, edited by Laura Sjoberg, 151–167. London: Routledge.

Mallavarapu, Siddharth. (2014). 'Siddharth Mallavarapu on International Asymmetries, Ethnocentrism, and a View on IR from India', *Theory Talks*, 9 February. Available at www.theory-talks.org/2014/02/theory-talk-63.html

Mannheim, Karl. (1929, 1985) *Ideology & Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. San Diego: Harcourt.

Manuel, Chief George and Michael Posluns. (1974). *The Fourth World: An Indian Reality*. New York: Collier Macmillan Canada.

March, James. and Johan Olsen. (1998). 'The Institutional Dynamics of International Political Orders', *International Organization* 52 (4): 943–969.

McGinnis, Michael Vincent, ed. (1999). *Bioregionalism*. London: Routledge.

McGlinchey, Stephen. (2017). *International Relations*. Bristol: E-International Relations.

Mearsheimer, John J. (2002). 'Realism, the Real World and the Academy', in *Realism and Institutionalism in International Studies*, edited by Michael Brecher and Frank P. Harvey. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Meena, Krishnendra. (2013). 'BRICS: An Explanation in Critical Geography', *Contexto Internacional* 35(2): 565–593.

Meiser, Jeffrey. (2015). *Power and Restraint: The Rise of the United States, 1898–1941*. Washington: Georgetown University Press.

Memmi, Albert. (1991). *The Colonizer and the Colonized*. Boston: Beacon Press.

Miller, David. (2007). *National Responsibilities and Global Justice.* Oxford: Oxford University Press.

Miller, Robert J., Jacinta Ruru, Larissa Behrendt and Tracey Lindberg. (2010). *Discovering Indigenous Lands: The Doctrine of Discovery in the English Colonies*. Oxford: Oxford University Press.

Morgenthau, Hans. J. (1930) *Über die Herkunft des Politischen aus dem Wesen des Menschen*. Container 151, Manuscript Division, Library of Congress, Washington.

Morgenthau, Hans J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. 7th edition. New York: McGraw-Hill.

Morgenthau, Hans. J. (1962) *Politics in the Twentieth Century*, vol. I, *The Decline of Democratic Politics*, Chicago: University of Chicago Press.

Morgenthau, Hans. J. (1972) *Science: Servant or Master?*, New York: New American Library.

Nagel, Thomas. (2005). 'The Problem of Global Justice'. *Philosophy and Public Affairs* 33 (3): 113–147.

Nash, Kate and Cath Browne. (2010). *Queer Methods and Methodologies*. New York: Ashgate.

Ollman, Bertell. (2003). *Dance of the Dialectic: Steps in Marx's Method*. University of Illinois Press.

Onuf, Nicholas G. (1989). *World of our Making. Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. London: Routledge.

Pankhurst, Donna. (2008). 'Introduction: Gendered War and Peace', in *Gendered Peace: Women's Struggles for Post-War Justice and Reconciliation*, edited by Donna Pankhurst, 1–30. New York: Routledge.

Picq, Manuela. (2015). 'Self-Determination as Anti-Extractivism: How Indigenous Resistance Challenges World Politics', in *Restoring Indigenous Self-Determination: Theoretical and Practical Approaches*, edited by M. Woons. Bristol: E-International Relations.

Picq, Manuela and Markus Thiel. (2015). *Sexualities in World Politics: How LGBTQ Claims Shape International Relations*. Routledge: New York.

Pogge, Thomas. (1989). *Realizing Rawls*. Cornell: Cornell University Press.

Pogge, Thomas. (2001). 'Eradicating Systemic Poverty: Brief for a Global Resources Dividend', *Journal of Human Development* 2(1): 59–77.

Pogge, Thomas. (2010). 'Cosmopolitanism and Sovereignty', in *The Cosmopolitanism Reader*, edited by Garrett W. Brown and David Held, 334–350. Cambridge: Polity Press.

Puchala, Donald. J. (1997). 'Some Non-Western Perspectives on International Relations', *Journal of Peace Research* 34 (2): 129–134.

Qin, Yaqing. (2016). 'A Relational Theory of World Politics', *International Studies Review* 18 (1): 33–47.

Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press.

Rich, Adrienne. (2002). *Arts of the Possible: Essays and Conversations*, London and New York: W.W. Norton & Co.

Risse, Mathias. (2008). 'Who Should Shoulder the Burden? Global Climate Change and Common Ownership of the Earth', Faculty Research Working Papers Series, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

Said, Edward W. (1978). *Orientalism*. New York: Random House.

Said, Edward W. (1997). *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*. New York: Vintage Books.

Sarkar, Benoy Kumar. (1919). 'Hindu Theory of International Relations', *American Political Science Review* 13 (3): 400–414.

Sedgwick, Eve Kosofsky. (1990). *Epistemology of the Closet*. Los Angeles: University of California Press.

Shue, Henry. (2014). *Climate Justice: Vulnerability and Protection*. Oxford: Oxford University Press.

Sigwart, Hans-Jörg (2013) 'The Logic of Legitimacy: Ethics in Political Realism', *Review of Politics* 75(3): 407–432.

Skinner, Quentin. (1998). ***Liberty before Liberalism***. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, Steve. (2007). 'Introduction: Diversity and Disciplinarity', in *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, edited by Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith. Oxford: Oxford University Press.

Thucydides. (1972). *History of the Peloponnesian War*. Baltimore: Penguin Books.

Tickner, Ann J. (2016). 'Knowledge Is Power: Challenging IR's Eurocentric Narrative', *Presidential Special Issue International Studies Review* 18 (1): 157–159.

Toulmin, Stephen (1990) *Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity*. Chicago: University of Chicago Press.

Toynbee, Polly. (2001). 'The Rule of Reason over Madness Died Along with the Victims', *The Guardian*, 12 September. Available at: https://www.theguardian.com/politics/2001/sep/12/september11.britainand9113

True, Jacqui. (2012). *The Political Economy of Violence against Women*. Oxford: Oxford University Press.

United Nations General Assembly. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples resolution, adopted by the General Assembly, 2 October 2007. UN. Doc. A/ RES/61/295.

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. (2006). *Who are Indigenous Peoples?* Available at www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf

Vivekanandan, Jayashree. (2014). 'Strategy, Legitimacy and the Imperium: Framing the Mughal Strategic Discourse', in *India's Grand Strategy: History, Theory, Cases*, edited by Kanti Bajpai, Saira Basit and V. Krishnappa, 63–85. New Delhi and Oxon: Routledge.

Walker, Rob B. J. (1993). *Inside/Outside: International Relations as Political Theory.* Cambridge: Cambridge University Press.

Wallerstein, Immanuel. (1974). *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.

Waltz, Kenneth N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Wæver, Ole. (2000). 'The EU as a Security Actor: Reflections from a Pessimistic Constructivist on Postsovereign Security Orders', in *International Relations Theory and the Politics of European Integration*, edited by Morten Kelstrup and Michael C. Williams, 250–294. London: Routledge.

Wæver, Ole. (2015). 'The Theory Act: Responsibility and Exactitude as Seen from Securitization', *International Relations* 29(1): 121–127.

Wang, Yiwei and Xueqing Han. (2016). 'Why is There No Chinese IR Theory? A Cultural Perspective', in *Constructing a Chinese School of International Relations: Ongoing Debates and Sociological Realities*, edited by Yongjin Zhang and Teng-chi Chang, 52–67. Oxon and New York: Routledge.

Weber, Cynthia. (2014). 'Why is there no queer international theory?', *European Journal of International Relations* 21(1): 27–51.

Weber, Cynthia. (2016). *Queer International Relations*. New York: Oxford University Press.

Wendt, Alexander. (1992) 'Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics', *International Organization* 46(2): 391–425.

Wendt, Alexander. (1995) 'Constructing International Politics', *International Security* 20(1): 71–81.

White Face, Charmaine. (2013). *Indigenous Nations' Rights in the Balance: An Analysis of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. St. Paul, Minnesota: Living Justice Press.

White paper by the State Council Information Office of the People's Republic of China. (2017). 'China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation'. Available at
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2017/01/11/content_281475539078636.htm

Williams, Robert A., Jr. (1997). *Linking Arms Together: American Indian Treaty Visions of Law & Peace 1600–1800*. New York: Oxford University Press.

Young, Iris Marion. (2011). *Justice and the Politics of Difference.* Princeton: Princeton University Press.

Yeophantong, Pichamon. (2013). 'Governing the World: China's Evolving Conceptions of Responsibility', *Chinese Journal of International Politics* 6 (4): 329–364.

Zellen, Barry Scott. (2009). *On Thin Ice: The Inuit, the State and the Challenge of Arctic Sovereignty.* Lanham Maryland: Lexington Books.

E-IR Foundations
Series Editor: Stephen McGlinchey

"This is a superb book. It offers a comprehensive listing that is imaginatively presented and enormously accessible. Helpfully, too, it takes the form of a global conversation. IR theory at its sparkling best."

– Peter Vale, Professor of Humanities, University of Johannesburg; Professor of Public Policy and Global Affairs, Nanyang Technological University and Nelson Mandela Professor of Politics Emeritus, Rhodes University.

This book is designed as a foundational entry point to International Relations theory. As a beginner's guide, it has been structured to condense the most important information into the smallest space and present that information in an accessible manner. Like other books in the E-IR Foundations series, this takes the form of an engaging narrative, connecting the reader directly to the issues at hand.

The first half of the book covers the theories that are most commonly taught in undergraduate programmes. The book then expands to present emerging approaches and offer wider perspectives. Each chapter sets out the basics of a theory whilst also applying it to a real-world event or issue, creating a lively, readable and relevant guide that will help students to see not only what theories are – but why they matter.

Editors
Stephen McGlinchey, Rosie Walters and Christian Scheinpflug.

Contributors
Victor Adetula, Amitav Acharya, Sandrina Antunes, Lina Benabdallah, Isabel Camisão, Irena Leisbet Ceridwen Connon, Jeff Corntassel, Alix Dietzel, Hugh C. Dyer, Clara Eroukhmanoff, Marcos Farias Ferreira, Dana Gold, Richard Ned Lebow, Aishling Mc Morrow, Jeffrey W. Meiser, Carlos Murillo-Zamora, Sheila Nair, Maïa Pal, Alex Prichard, Felix Rösch, Archie W. Simpson, Sarah Smith, Yannis A. Stivachtis, Sarina Theys, Markus Thiel, Marc Woons and Pichamon Yeophantong.

www.E-IR.info